

Laporan Triwulan

Triwulan I - 2018

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

KATA PENGANTAR



Wimboh Santoso, Ph.D

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, OJK dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam berkontribusi meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan di Indonesia khususnya dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan.

Selama triwulan I-2018, kondisi perekonomian global terpantau semakin solid ditandai dengan perbaikan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang yang terus berlanjut. Penguatan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang terlihat dari meningkatnya inflasi yang disertai dengan menurunnya angka pengangguran mendorong Bank Sentral AS untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya. Normalisasi kebijakan moneter AS ini menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia dan mendorong *capital outflow* dari negara berkembang termasuk Indonesia. Namun, kita patut bersyukur di tengah gejolak eksternal ini, fundamental perekonomian domestik pada Triwulan I-2018 terpantau masih menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06% (yoy), tingkat inflasi yang terjaga serta kinerja perdagangan eksternal yang mencatatkan surplus.

Sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik, stabilitas sektor keuangan juga dapat terjaga dengan baik. Kinerja industri jasa keuangan secara umum masih cukup solid dengan tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai untuk menyerap potensi risiko dan mendukung ekspansi usaha. Aktivitas intermediasi keuangan baik melalui sektor Perbankan maupun sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga menunjukkan perbaikan dengan kualitas kredit/pembiayaan yang tetap terjaga.

Sementara itu, kinerja di sektor Pasar Modal pada triwulan I-2018 menunjukkan sedikit pelemahan. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan yang terjadi di pasar keuangan global yang didorong oleh sentimen kenaikan suku bunga acuan AS dan ancaman perang dagang AS-Tiongkok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada level 6.188,99, mengalami sedikit penurunan sebesar -2,62% (ytd). Untuk pasar surat utang dalam negeri juga terpantau mengalami koreksi yang ditandai dengan peningkatan rata-rata *yield* SBN pada ketiga tenor. Namun demikian, investor nonresiden masih mencatatkan posisi *net buy* di pasar surat utang. Di sisi lain, kinerja Reksa Dana dinilai cukup baik tercermin dari pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang terus meningkat. Penghimpunan dana melalui pasar modal juga terus mengalami peningkatan yang positif sejalan dengan kebijakan OJK dalam mendorong pendalaman pasar keuangan melalui pasar modal.

Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan, selama triwulan I-2018 OJK telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan. POJK yang diterbitkan terdiri dari masing-masing satu POJK yang mengatur sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Adapun salah satu aturan yang diterbitkan adalah mengenai penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*. Selain itu, OJK juga menerbitkan 5 (lima) SEOJK, di mana 1 (satu) SEOJK untuk mengatur sektor Pasar Modal dan 4 (empat) SEOJK untuk mengatur sektor IKNB.

Di samping itu, dalam rangka mendukung aktivitas pengawasan sektor jasa keuangan, OJK menginisiasi sejumlah kegiatan strategis, antara lain: mengembangkan *dashboard* konglomerasi keuangan, kajian manajemen risiko transaksi intragrup bagi Konglomerasi Keuangan, kajian *Early Warning System* (EWS) Konglomerasi Keuangan, sosialisasi POJK mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau *Fintech P2P Lending* dan ekosistemnya, penyusunan ketentuan internal Pengawasan Bank serta pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berbasis risiko pada BPR.

Selain melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya di bidang pengaturan dan pengawasan, OJK juga terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dalam hal ini, OJK menginisiasi pengembangan model inklusi keuangan untuk pedesaan melalui pemberdayaan BUMDes/ BUMADes, pembentukan 3 (tiga) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 1 (satu) provinsi dan 2 (dua) kabupaten, Edukasi Komunitas kepada guru SD-SMP dan TKI serta peluncuran Galeri Investasi *Mobile* di Universitas Khairun Ternate. Di samping itu, OJK juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan 2 (dua) lembaga yaitu Pengurus Pusat Aisyiyah terkait pengembangan keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, serta penandatanganan dengan Pengurus Pusat Bhayangkari terkait literasi dan inklusi keuangan.

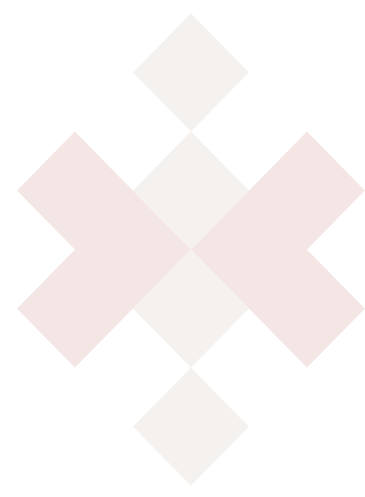
Selanjutnya, untuk mewujudkan organisasi yang tangguh dan berdaya saing, OJK senantiasa melakukan peningkatan kapasitas internal antara lain dengan melaksanakan pengembangan kompetensi teknis maupun kepribadian bagi pegawainya. Selain itu, OJK mengoptimalkan sarana infrastruktur guna mendukung inisiasi *digital office* khususnya melalui pengembangan sistem informasi antara lain Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT), Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS) dan Sistem Informasi Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahap II.

Akhir kata, atas nama Anggota Dewan Komisioner, kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai OJK yang telah dengan sangat baik menjalankan tugas dan senantiasa menjaga nama baik institusi. OJK akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya serta menjalin hubungan kerja sama secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya sehingga dapat mendorong terciptanya industri jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif.

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

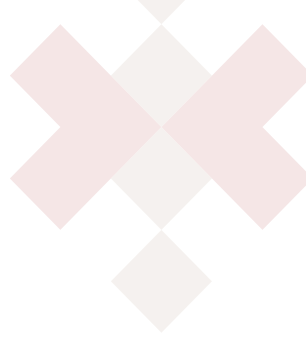


Wimboh Santoso, Ph.D



Halaman ini sengaja di kosongkan

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xviii
INFOGRAFIK PROGRAM PRIORITAS OJK	xxii

BAB 1 TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1	PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA	27
1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	27
1.1.2	Perkembangan Ekonomi Domestik	28
1.1.3	Perkembangan Pasar Keuangan	29
1.2	PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	30
1.2.1	Perkembangan Bank Umum	30
1.2.2	Perkembangan Bank Umum Konvensional	31
1.2.3	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	33
1.2.4	Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	36
1.2.5	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	37
1.3	PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	40
1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	40
1.3.2	Perkembangan Perusahaan Efek	43
1.3.3	Perkembangan Pengelolaan Investasi	44
1.3.4	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	47
1.3.5	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	51
1.4	PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	52
1.4.1	Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	53
1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	55
1.4.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	57
1.4.4	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional	60
1.4.5	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	61
1.4.6	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	61
1.4.7	Perkembangan Industri Penunjang IKNB	63
1.4.8	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	64
1.4.9	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	64
1.5	PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS OJK	65
1.5.1	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	65
1.5.2	Simpanan Pelajar (SIMPEL)	65
1.5.3	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	66
1.5.4	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	66
1.5.5	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan inklusif (LAKU PANDAI)	67
1.5.6	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	67
1.5.7	Asuransi Nelayan	68
1.5.8	Asuransi Usaha Budidaya Udang	68
1.5.9	Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif	68

BAB 2
TINJAUAN
OPERASIONAL
SEKTOR JASA
KEUANGAN

2.1	AKTIVITAS PENGATURAN	71
2.1.1	Pengaturan Bank	73
2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	73
2.1.3	Pengaturan IKNB	73
2.2	AKTIVITAS PENGAWASAN	73
2.2.1	Pengawasan Terintegrasi	74
2.2.2	Pengawasan Perbankan	74
2.2.3	Pengawasan Pasar Modal	74
2.2.4	Pengawasan IKNB	75
2.3	AKTIVITAS PENGEMBANGAN	80
2.3.1	Pengembangan Pengawasan	83
2.3.2	Pengembangan Industri Perbankan	96
2.3.3	Pengembangan Industri Pasar Modal	96
2.3.4	Pengembangan IKNB	96
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	97
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	97
2.4.2	Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional	97
2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	99
2.5.1	Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen	99
2.5.2	Inklusi Keuangan	101
2.5.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	102
2.5.4	Perlindungan Konsumen	104
2.5.5	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	106
2.5.6	<i>Market Conduct</i>	107
2.5.7	<i>Investor Alert Portal</i>	108
2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	110
2.6.1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	110
2.6.2	Penanganan Perkara	110
2.6.3	Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	110
2.6.4	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	110
2.6.5	Penandatanganan Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi dengan 13 Kementerian/Lembaga Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Daerah (Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah)	110
2.7	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	110
2.8	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	112
2.8.1	Kerjasama Domestik	112
2.8.2	Kerjasama Internasional	112

BAB 3
TINJAUAN
INDUSTRI DAN
OPERASIONAL
SEKTOR JASA
KEUANGAN
SYARIAH

3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	117
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	117
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	121
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	124
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	126
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	126
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	126
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	126
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	127
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	127
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	128
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	128
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	129
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	129
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	130
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	131

BAB 4
MANAJEMEN
STRATEGIS
DAN TATA
KELOLA
ORGANISASI

4.1	MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA OJK	135
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	135
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	135
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK	136
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RESIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	140
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	141
4.4	KOMUNIKASI	142
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	142
4.4.2	OJK TV	143
4.5	KEUANGAN	144
4.5.1	Realisasi Anggaran	144
4.5.2	Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan	144
4.6	SISTEM INFORMASI	144
4.6.1	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan	144
4.6.2	Tugas Pokok Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi	145
4.7	LOGISTIK	145
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	145
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	145
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	146

4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI	146
4.8.1	Kebijakan Sumber Daya Manusia	146
4.8.2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	146
4.8.3	Pengembangan Organisasi	147
4.8.4	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	147
4.8.5	Dana Pensiun OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK	147
4.9	OJK INSTITUTE	147
4.9.1	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)	147
4.9.2	Program Pengembangan Kompetensi	147
4.9.3	Program Pendidikan Formal	148
4.9.4	Program Penugasan	148
4.9.5	Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan	148
4.9.6	Program Asesmen	148
4.9.7	Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	148
4.9.8.	Program Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti	148
4.9.9	Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	148
4.9.10	Program <i>Visit</i> OJK	148
4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN	149
4.10.1	Program Budaya	149
4.10.2	<i>Monitoring</i> Program Budaya	149
4.10.3	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	150

DAFTAR TABEL

Tabel I - 1	Indikator Bank Umum	31
Tabel I - 2	Kondisi Bank Umum Konvensional	31
Tabel I - 3	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	32
Tabel I - 4	Kondisi Umum BPR	33
Tabel I - 5	Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	35
Tabel I - 6	Konsentrasi Penyaluran UMKM	36
Tabel I - 7	Kredit UKM berdasarkan Kelompok Bank	37
Tabel I - 8	Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	38
Tabel I - 9	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik	41
Tabel I - 10	Perkembangan IHSG dan Net Asing	42
Tabel I - 11	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	43
Tabel I - 12	Jumlah Perusahaan Efek	43
Tabel I - 13	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	44
Tabel I - 14	Proses izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	44
Tabel I - 15	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	44
Tabel I - 16	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	44
Tabel I - 17	Perkembangan Pengelolaan Investasi	44
Tabel I - 18	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya	45
Tabel I - 19	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	46
Tabel I - 20	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	46
Tabel I - 21	Tabel Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	47
Tabel I - 22	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan I-2018	47
Tabel I - 23	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	48
Tabel I - 24	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	48
Tabel I - 25	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	48
Tabel I - 26	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	49
Tabel I - 27	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi pada Triwulan I-2018 Berdasarkan Sektor Industri	50
Tabel I - 28	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	51
Tabel I - 29	Komposisi Peringkat Perusahaan Kategori <i>Investment Grade</i> dan <i>Non Investment Grade</i>	51
Tabel I - 30	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	52
Tabel I - 31	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum Selama Triwulan I-2018	52
Tabel I - 32	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai Selama Triwulan I-2018	52
Tabel I - 33	Total Aset IKNB	52
Tabel I - 34	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	53
Tabel I - 35	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	54
Tabel I - 36	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	54
Tabel I - 37	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	55
Tabel I - 38	RBC Industri Asuransi	55
Tabel I - 39	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	55
Tabel I - 40	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	56
Tabel I - 41	Portofolio Investasi Dana Pensiun	56
Tabel I - 42	Jumlah Dana Pensiun	57
Tabel I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	58
Tabel I - 44	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	59
Tabel I - 45	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	59
Tabel I - 46	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	60
Tabel I - 47	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	61
Tabel I - 48	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	64
Tabel I - 49	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	64
Tabel I - 50	Jumlah LKM	64
Tabel I - 51	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	64
Tabel I - 52	Perkembangan Industri Fintech (<i>Peer to Peer Lending</i>)	65
Tabel I - 53	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)	65
Tabel I - 54	Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2018	67

Tabel I - 55	Pelaksanaan Asuransi Usaha Budidaya Udang per triwulan I-2018	68
Tabel II - 1	Profil Konglomerasi Keuangan	75
Tabel II - 2	Pemeriksaan Bank Umum	75
Tabel II - 3	Pemeriksaan Khusus Bank	76
Tabel II - 4	Produk dan Aktifitas Baru Perbankan	76
Tabel II - 5	Track Record Tindak Tipibank Triwulan I-2018	76
Tabel II - 6	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	77
Tabel II - 7	Tabel Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	77
Tabel II - 8	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU*	77
Tabel II - 9	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	78
Tabel II - 10	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum selama Triwulan I-2018	78
Tabel II - 11	Perizinan BPR	79
Tabel II - 12	Daftar Hasil <i>Fit</i> dan <i>Proper Test New Entry</i> BPR	79
Tabel II - 13	Aksi Korporasi Triwulan I-2018	81
Tabel II - 14	Penyampaian Laporan Berkala	82
Tabel II - 15	Tabel Penetapan Sanksi Administratif	83
Tabel II - 16	Jumlah Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang Dianalisis Triwulan I -2018	83
Tabel II - 17	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	84
Tabel II - 18	Penerimaan Laporan Berkala Dana Pensiun	84
Tabel II - 19	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	84
Tabel II - 20	Tabel Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan	85
Tabel II - 21	Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Penuh	85
Tabel II - 22	Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Bersyarat	85
Tabel II - 23	Pelaksanaan Pendampingan LKM selama Triwulan I-2018	85
Tabel II - 24	Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha LKM selama Triwulan I-2018	86
Tabel II - 25	Daftar Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang Terdaftar pada Triwulan I-2018	86
Tabel II - 26	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	87
Tabel II - 27	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	88
Tabel II - 28	Penetapan Izin Usaha IKNB selama Triwulan I-2018	88
Tabel II - 29	Tabel Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	88
Tabel II - 30	Penetapan Pencabutan Izin Usaha IKNB selama Triwulan I-2018	89
Tabel II - 31	Jumlah IKNB Konvensional per Triwulan I-2018	89
Tabel II - 32	Rekapitulasi Likuidasi IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	90
Tabel II - 33	Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	90
Tabel II - 34	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Saham/Perubahan PDP IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	91
Tabel II - 35	Rekapitulasi Pelaporan Kantor Cabang IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	91
Tabel II - 36	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	92
Tabel II - 37	Rekapitulasi Pelaporan Produk sampai dengan Triwulan I-2018	92
Tabel II - 38	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	93
Tabel II - 39	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Pihak Utama IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	93
Tabel II - 40	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	94
Tabel II - 41	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	94
Tabel II - 42	Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan/Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal sampai dengan Triwulan I-2018	94
Tabel II - 43	Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB sampai dengan Triwulan I-2018	95
Tabel II - 44	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan I-2018	95
Tabel II - 45	Pendaftaran Profesi selama Triwulan I-2018	96
Tabel II - 46	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan I-2018	96

Tabel II - 47	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha	96
Tabel II - 48	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	100
Tabel II - 49	Peserta Rangkaian Kegiatan Sosialisasi BNPT	104
Tabel II - 50	Penerimaan Layanan OJK	105
Tabel II - 51	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	112
Tabel II - 52	Kerjasama Domestik	112
Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	117
Tabel III - 2	Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah (yoy)	119
Tabel III - 3	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	119
Tabel III - 4	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	120
Tabel III - 5	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (miliar Rupiah)	122
Tabel III - 6	Perkembangan Indeks Saham Syariah	122
Tabel III - 7	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	122
Tabel III - 8	Perkembangan Reksa Dana Syariah	122
Tabel III - 9	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	123
Tabel III - 10	Tabel Aset IKNB Syariah (triliun Rupiah)	124
Tabel III - 11	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (triliun Rupiah)	125
Tabel III - 12	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (miliar Rupiah)	125
Tabel IV - 1	Siaran Pers Triwulan I-2018	143
Tabel IV - 2	Jumpa Pers dan Media <i>Briefing</i> Triwulan I-2018	143
Tabel IV - 3	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	146
Tabel IV - 4	Pelaksanaan <i>Visit</i> OJK Triwulan I-2018]	148

DAFTAR GRAFIK

Grafik I - 1	Tingkat Inflasi dan Pengangguran AS	27
Grafik I - 2	Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro	27
Grafik I - 3	Tingkat Inflasi dan Pengangguran Jepang	28
Grafik I - 4	Kinerja Eksternal Tiongkok	28
Grafik I - 5	Perkembangan Harga Komoditas Dunia	28
Grafik I - 6	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	28
Grafik I - 7	Tingkat Inflasi Indonesia	29
Grafik I - 8	Neraca Perdagangan Indonesia	29
Grafik I - 9	Penjualan Eceran	29
Grafik I - 10	<i>Credit Default Swap</i> Indonesia	29
Grafik I - 11	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional	30
Grafik I - 12	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional	30
Grafik I - 13	Pergerakan <i>Yield</i> SBN	30
Grafik I - 14	Perkembangan Aset BUK	32
Grafik I - 15	Tren Pertumbuhan DPK	32
Grafik I - 16	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (<i>yoy</i>)	32
Grafik I - 17	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (<i>qtq</i>)	32
Grafik I - 18	Tren NPL (%)	33
Grafik I - 19	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	33
Grafik I - 20	Kondisi Umum BPR	33
Grafik I - 21	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	34
Grafik I - 22	Tren Pertumbuhan DPK (<i>qtq</i>)	34
Grafik I - 23	Tren ROA dan BOPO BPR	35
Grafik I - 24	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	37
Grafik I - 25	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (<i>yoy</i>)	39
Grafik I - 26	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (<i>yoy</i>)	39
Grafik I - 27	Grafik NPL <i>Gross</i> Sektor Ekonomi	39
Grafik I - 28	Grafik NPL <i>Gross</i> Sektor Ekonomi	39
Grafik I - 29	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	40
Grafik I - 30	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	41
Grafik I - 31	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	41
Grafik I - 32	Perkembangan IHSG dan Net Asing	42
Grafik I - 33	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	42
Grafik I - 34	Rencana Penggunaan Dana	49
Grafik I - 35	Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan I -2018	51
Grafik I - 36	Pangsa Pasar Perusahaan Pemingkat Efek Triwulan I-2018	51
Grafik I - 37	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2018	53
Grafik I - 38	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan I 2018	56
Grafik I - 39	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)	57
Grafik I - 40	Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)	57
Grafik I - 41	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah)	60
Grafik I - 42	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (triliun Rupiah)	60
Grafik I - 43	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah)	61
Grafik I - 44	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Triliun Rupiah)	61
Grafik I - 45	Pertumbuhan Aset LJKK (triliun Rupiah)	61
Grafik I - 46	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah)	62
Grafik I - 47	<i>Outstanding</i> Penjaminan (triliun Rupiah)	62
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah)	62
Grafik I - 49	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah)	62
Grafik I - 50	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (triliun Rupiah)	62
Grafik I - 51	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pergadaian (triliun Rupiah)	63
Grafik I - 52	Pertumbuhan Aset PTPNM(Persero) (triliun Rupiah)	63
Grafik I - 53	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero) (triliun Rupiah)	63
Grafik I - 54	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero) (triliun Rupiah)	63
Grafik I - 55	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero) (triliun Rupiah)	63
Grafik I - 56	Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING	65

Grafik I - 57	Simpanan Pelajar (SIMPEL)	65
Grafik I - 58	Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan I-2018	67
Grafik I - 59	Bank Wakaf Mikro	69
Grafik II - 1	Jenis Struktur Konglomerasi Keuangan	75
Grafik II - 2	Penyebaran Jaringan Kantor BUK Triwulan I-2018	78
Grafik II - 3	Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2018	79
Grafik II - 4	Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan	98
Grafik II - 5	Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan	98
Grafik II - 6	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Perbankan	98
Grafik II - 7	<i>Risk Based Capital</i> (RBC) Asuransi Umum	98
Grafik II - 8	<i>Risk Based Capital</i> (RBC) Asuransi Jiwa	98
Grafik II - 9	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	98
Grafik II - 10	Rasio NPL Perbankan	99
Grafik II - 11	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	99
Grafik II - 12	Layanan Masuk Triwulan I-2018	104
Grafik II - 13	Informasi per Sektor Triwulan I-2018	105
Grafik II - 14	Pertanyaan per Sektor Triwulan I-2018	105
Grafik II - 15	Pengaduan per Sektor Triwulan I-2018	105
Grafik II - 16	Grafik Tingkat Penyelesaian Layanan Triwulan I-2018	105
Grafik II - 17	Kanal Layanan Triwulan I-2018	105
Grafik II - 18	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	106
Grafik II - 19	Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS	107
Grafik II - 20	Status Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS	107
Grafik II - 21	Layanan Penyelesaian Sengketa yang Diajukan ke LAPS	107
Grafik II - 22	Kategori Dugaan Pelanggaran Iklan SJK	108
Grafik II - 23	Alur Layanan SLIK	109
Grafik II - 24	Data SLIK Januari - Maret 2018	109
Grafik II - 25	Data Informasi dan Permintaan Cetak SLIK	109
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	118
Grafik III - 2	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	121
Grafik III - 3	Laba dan ROA Perbankan Syariah	121
Grafik III - 4	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	122
Grafik III - 5	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	123
Grafik III - 6	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	123
Grafik III - 7	Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan I-2018	124
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja	135
Grafik IV - 2	Kebijakan Strategis OJK 2018	138
Grafik IV - 3	Jumlah Sosialisasi Berdasarkan peserta Sosialisasi	141
Grafik IV - 4	Gambaran Topik RDK	141
Grafik IV - 5	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK	142
Grafik IV - 6	<i>Tone</i> Pemberitaan Triwulan I-2018	142
Grafik IV - 7	Siaran Pers Triwulan I-2018	142
Grafik IV - 8	Jumlah Liputan OJK TV Triwulan I-2018	144
Grafik IV - 9	Statistik OJK TV Triwulan I-2018	144

Halaman ini sengaja di kosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tinjauan Perekonomian Global dan Domestik

Perekonomian global sepanjang triwulan I-2018 terpantau semakin solid tercermin dari tren peningkatan inflasi dan penurunan tingkat pengangguran di Amerika Serikat (AS). Perkembangan positif tersebut juga didukung oleh indikator kinerja manufaktur yang semakin membaik. Namun, ekspektasi laju kenaikan suku bunga AS yang lebih cepat serta perang dagang antara AS dan Tiongkok memicu terjadinya gejolak di pasar keuangan global. Pada Zona Euro, pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan indeks kinerja manufaktur dan indeks keyakinan konsumen. Sementara itu, inflasi Zona Euro relatif stabil dan tingkat pengangguran melanjutkan kecenderungan menurun terendah dalam sembilan tahun terakhir. Perekonomian Jepang dan Tiongkok juga mengalami perbaikan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat ditopang konsumsi, investasi properti dan ekspor. Ke depan, pengenaan tarif impor oleh AS terhadap produk-produk Tiongkok perlu diwaspadai sehingga mengurangi potensi terganggunya kinerja ekspor Tiongkok. Harga minyak dunia melanjutkan kecenderungan meningkat. Ke depan, harga minyak diperkirakan akan melanjutkan tren kenaikan, didukung oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Perekonomian Indonesia mencatat sejumlah perkembangan positif dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dibanding tahun lalu menjadi 5,06% (yoy) didorong oleh tingginya investasi (investasi nonbangunan maupun bangunan) dan konsumsi swasta (meningkatnya belanja terkait penyelenggaraan Pilkada). Sejalan dengan permintaan domestik, kinerja impor masih mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekspor masih relatif kuat. Stabilitas makroekonomi relatif terjaga di mana inflasi tercatat sebesar 3,40% (yoy). Kinerja perdagangan eksternal masih optimis, dengan surplus sebesar USD220 juta, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan signifikan impor barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal yang diharapkan akan mendukung pemulihan industri manufaktur yang memasuki zona ekspansi. Sektor riil disebabkan oleh semakin solid dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan eceran.

Pasar keuangan domestik mengalami peningkatan volatilitas sejalan dengan tren pasar keuangan regional dan global yang utamanya dipengaruhi faktor eksternal seperti ekspektasi kenaikan *Fed Funds Rate*

serta ancaman perang dagang AS-Tiongkok. Secara keseluruhan pasar keuangan domestik relatif masih terjaga tercermin dari *Credit Default Swap* (CDS) yang terjaga pada level yang rendah serta peningkatan peringkat investasi Indonesia oleh *Japan Credit Agency Ltd.* (JCR), *Rating and Investment Inc.* (R&I) dan *Moody's*.

Pada triwulan I-2018, IHSG terkoreksi sebesar -2,62% (qtq) dan berada pada posisi 6.188,99. Namun demikian, kinerja emiten masih terpantau stabil sehingga dapat mempertahankan persepsi investor atas prospek perekonomian Indonesia. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS melemah sebesar 1,4% (qtq), masih lebih moderat dibandingkan beberapa mata uang negara berkembang lainnya.

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil dan transparan sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan melindungi kepentingan konsumen, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

- 1. Perluasan Pembentukan Bank Wakaf Mikro dengan platform LKM Syariah**
Dalam rangka memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, UMKM, dan *ultra mikro* guna mendorong peningkatan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, OJK memfasilitasi pendirian dan memperkuat dukungan internal bagi Bank Wakaf Mikro melalui platform LKM Syariah. OJK melakukan pengkajian model bisnis penyaluran dana dan perkembangannya, pengawasan sumber dana serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai *branding* Bank Wakaf Mikro.
- 2. Penerbitan Peraturan OJK mengenai Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge***
Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu dilakukan harmonisasi yang sebelumnya menggunakan istilah "*Systemically Important Bank*" menjadi "Bank Sistemik" dan penyempurnaan metodologi dan indikator penetapannya.
- 3. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) dan *Dashboard* Konglomerasi Keuangan**
Pengembangan SIPT mencakup modul data dan rasio keuangan antara lain untuk mendorong standarisasi proses bisnis dan produk pengawasan, menyediakan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengaturan, dan



meningkatkan keamanan dan integritas data. Sementara itu, *dashboard* Konglomerasi Keuangan membantu pengawas terintegrasi dalam proses *monitoring* Konglomerasi Keuangan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

4. **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus (Klaster) Peremajaan Kelapa Sawit**

OJK bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam persiapan implementasi KUR khusus peremajaan (*replanting* sawit) yang akan dilaksanakan di Rokan Hulu, Riau. Petunjuk Teknis (Juknis) KUR khusus Peremajaan Kelapa Sawit telah disusun.

Sebagai upaya melaksanakan fungsi dan tugas pengaturan, pengawasan, edukasi dan perlindungan konsumen, OJK senantiasa menjalin kerja sama dengan koordinasi dengan berbagai lembaga antara lain melalui Nota Kesepahaman dengan 13 Kementerian dan Lembaga dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin (investasi bodong), Nota Kesepahaman dengan Aisyiyah dalam rangka pengembangan keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, Nota Kesepahaman dengan Pengurus Pusat Bhayangkari terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta beberapa kesepakatan kerja sama dengan organisasi internasional seperti *International Finance Cooperation* (IFC) dan *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF).

Penguatan Kapasitas Organisasi

Dalam rangka penguatan kapasitas organisasi, OJK terus melakukan perubahan dalam proses bisnis yang semula dilakukan secara manual menjadi berbasis sistem melalui program digital office. Salah satu implementasi program digital office adalah peluncuran Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK (SI-AUTO) yang mengintegrasikan enam aplikasi untuk mendukung pengelolaan keuangan OJK secara *end to end*. Selain itu, dilakukan pengembangan pada aplikasi lainnya seperti Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS), Sistem Informasi Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahap II, Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM), Sistem *e-Monitoring* Pengelolaan Investasi, Sistem Pelayanan Informasi dan Statistika IKNB (SIPIKA), *Data Warehouse Bank Umum* dan lain sebagainya. OJK juga mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2015 terkait penerapan manajemen mutu sistem manajemen kearsipan untuk layanan *Mailing Room* OJK (pengelolaan naskah dinas).

Selama triwulan I-2018 OJK menerima 18 kunjungan instansi dengan total 1.196 peserta serta memberikan 22 siaran pers dan delapan jumpa pers. Selain itu OJK juga aktif melaksanakan sosialisasi antara lain mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau *Fintech Lending* dan Waspada Investasi. Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan I-2018 telah dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan I-2018.

Program Prioritas OJK



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Program pembiayaan infrastruktur, UMKM, dan ultra mikro guna mendorong peningkatan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan sekitar pondok pesantren. Sampai triwulan I-2018, program ini telah melibatkan **20 LKM Syariah** dan memberikan **pelayanan bagi 3.876 nasabah** dan **780 Kelompok Usaha Masyarakat** dengan total pembiayaan Rp 3,63 miliar.



Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Bank Penyelenggara
28 Bank



Jumlah Agen
779.922 Agen



Cakupan Wilayah
512 Kota / Kabupaten dan 34 Provinsi



Dana Himpunan
Rp1,75 triliun



Nasabah
19.294.764



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang tercover adalah **35.141 ekor** atau **29,28%** dari target dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **27.044 peternak** dengan realisasi premi Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah sebesar **Rp9.037.690.000,00**



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Jumlah **lahan pertanian yang terdaftar** meningkat **9,21% (qtq)** menjadi **997.960,55 (ha)** atau **99,80%** dari target 1 juta Ha



Program JARING

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan **15 bank partner** dan Konsorsium lembaga pembiayaan. **Penyaluran kredit** program JARING tumbuh **4,98% (qtq)** menjadi Rp28,02 triliun dan NPL *gross* 1,84%.



Asuransi Nelayan

Asuransi yang mewajibkan nelayan memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko saat melaut sampai triwulan I-2018 klaim berjalan untuk asuransi nelayan mencapai **319 orang nelayan** dengan **nilai klaim** sebesar **Rp19.209.349.433,00**



Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Berbagai inisiatif diluncurkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan pada sektor infrastruktur melalui Pasar Modal, di antaranya:

1. Penawaran Umum **Emiten di sektor infrastruktur** sebesar **Rp6,7 triliun**.
2. Penerbitan **satu izin baru Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP)**, sehingga jumlah EBA-SP menjadi lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar **Rp4,11 triliun** atau meningkat sebesar **84,30% (qtq)**.
3. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 1,47% menjadi **Rp18,57 triliun**.
4. Jumlah **KIK-EBA** tetap tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar **Rp6,59 triliun**.



Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
280



Jumlah Rekening
10.990.889



Nominal
Rp 2,51 triliun

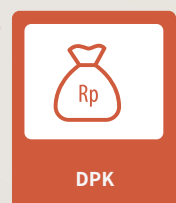
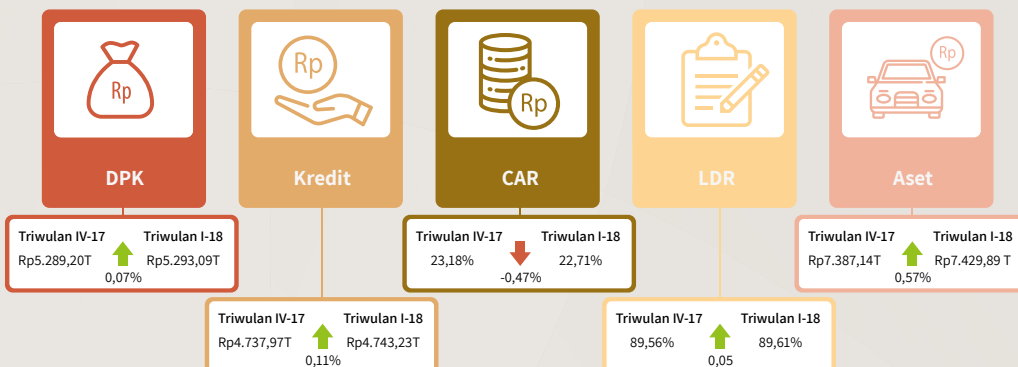


Jumlah Perjanjian Kerjasama
214.354

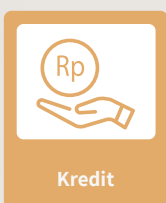
Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan



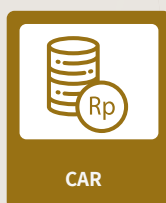
Bank Umum



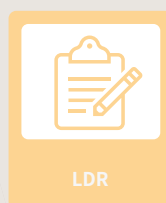
DPK



Kredit



CAR



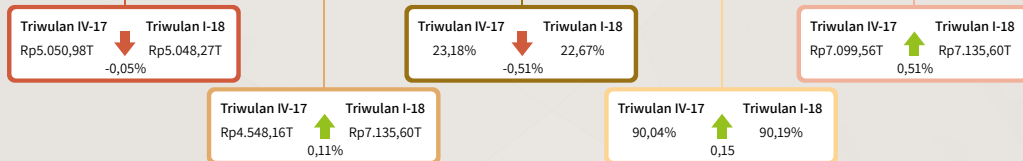
LDR



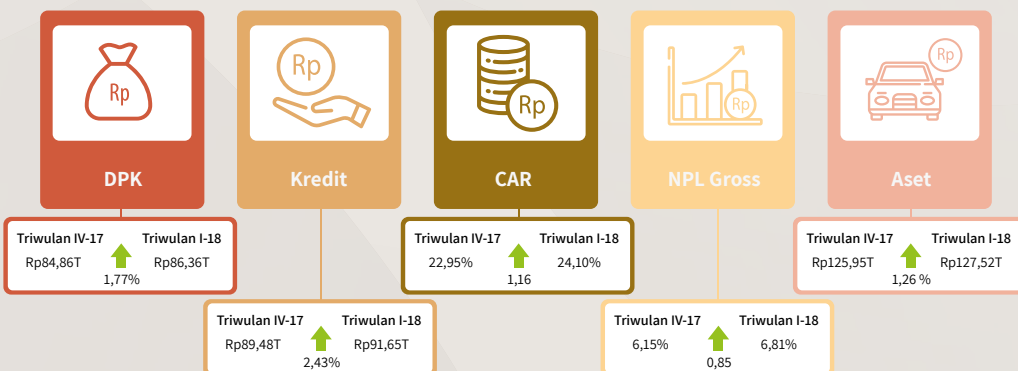
Aset



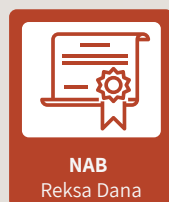
Bank Umum
Konvensional



BPR



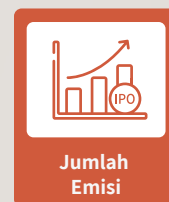
IHSG



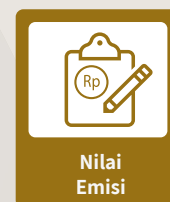
NAB
Reksa Dana



Nilai Perdagangan
Obligasi



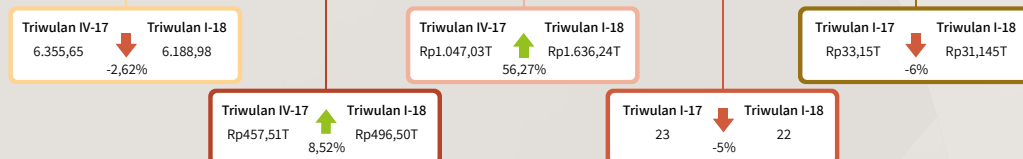
Jumlah
Emisi

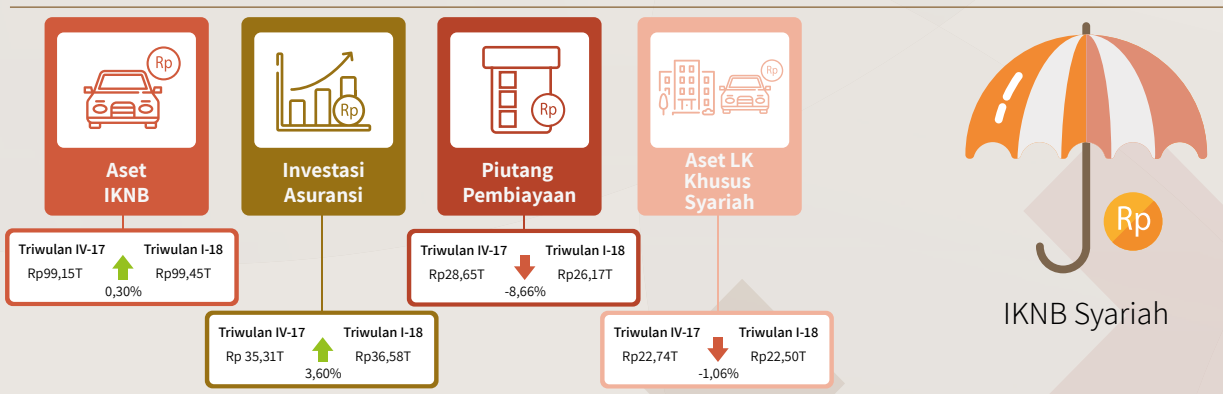
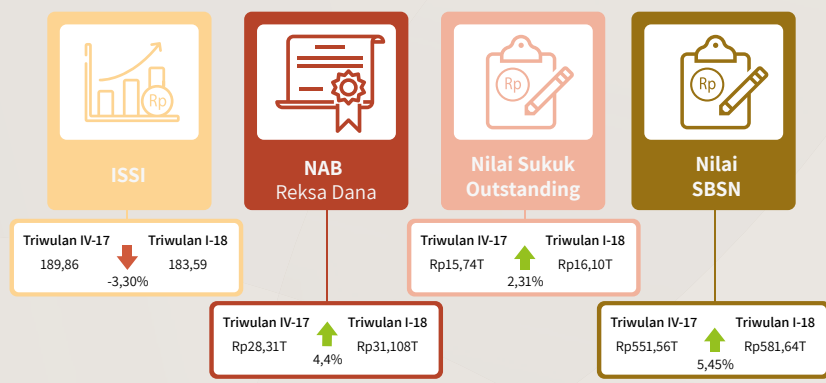
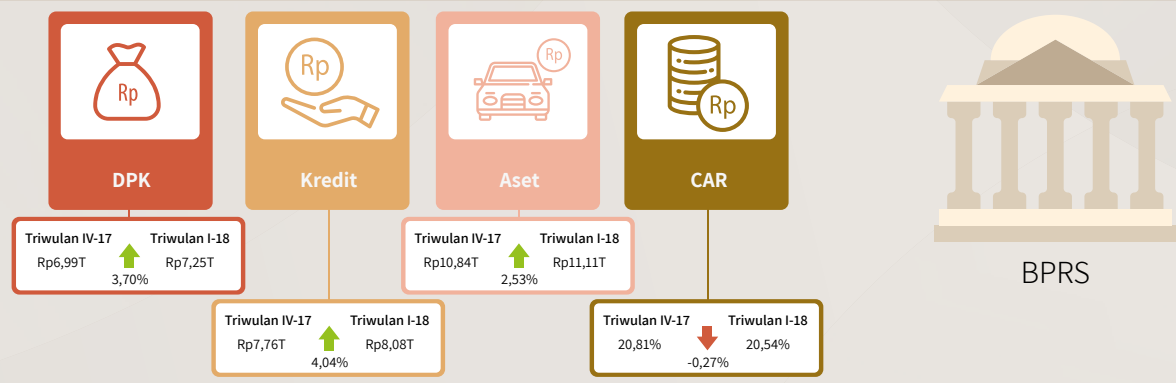
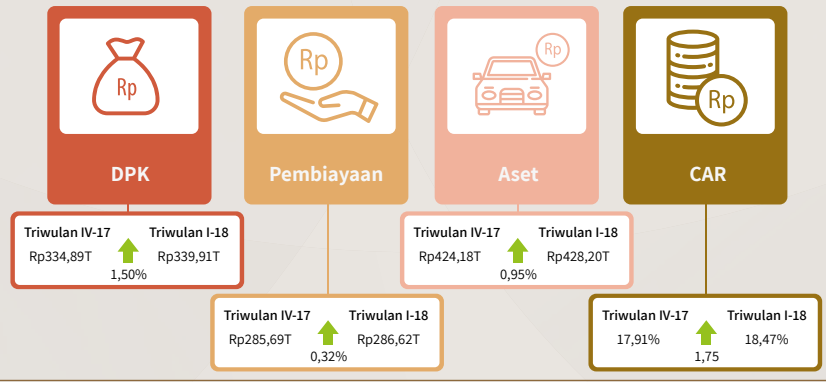
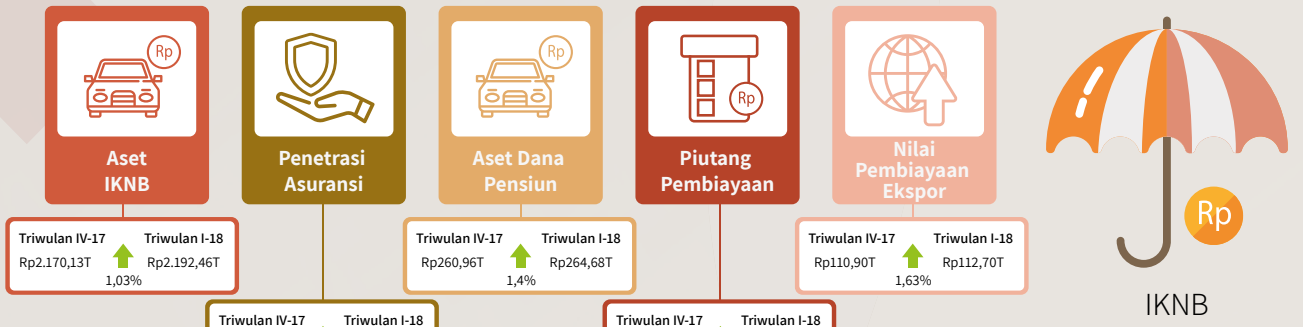


Nilai
Emisi



Pasar Modal





Halaman ini sengaja di kosongkan

BAB 1

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN



Halaman ini sengaja di kosongkan

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

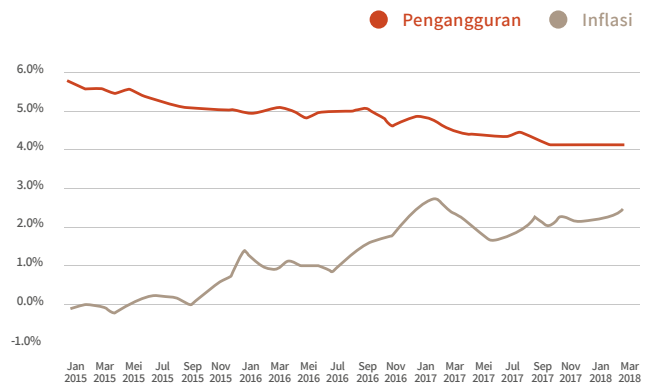
Pemulihan ekonomi global terpantau semakin solid pada triwulan I-2018, tercermin dari tren peningkatan inflasi dan penurunan tingkat pengangguran di negara-negara maju. Perkembangan positif tersebut juga didukung oleh indikator kinerja manufaktur di negara-negara maju dan berkembang yang semakin membaik. Namun, ekspektasi laju kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang lebih cepat serta perang dagang antara AS dan Tiongkok memicu terjadinya gejolak di pasar keuangan seluruh dunia.

Perkembangan Ekonomi Beberapa Negara Utama

Melanjutkan ekspektasi positif pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan I-2018 tumbuh sebesar 2,5% (yoy), di atas ekspektasi pasar sebesar 2,0% (yoy). Pertumbuhan tersebut berasal dari kontribusi positif investasi tetap nonresiden, konsumsi rumah tangga, dan ekspor. Semakin solidnya pertumbuhan ini sejalan dengan indikator-indikator ekonomi AS pada triwulan I-2018 yang juga positif. Per Maret 2018, tingkat inflasi tercatat sebesar 2,4% (yoy). Tingkat pengangguran AS stabil pada level 4,1%, tidak mengalami perubahan dalam enam bulan terakhir. Sementara itu, *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur AS berada di zona ekspansi pada level 55,6.

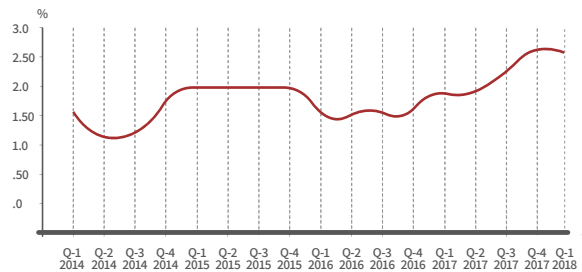
Mencermati pemulihan ekonomi AS yang semakin solid tersebut, *Federal Open Market Committee* (FOMC) *The Fed* pada bulan Maret 2018 kembali menaikkan *Fed Funds Rate* (FFR) menjadi pada kisaran 1,50%-1,75%. Lebih lanjut, diperkirakan bahwa FFR masih akan naik masing-masing tiga kali pada 2018 dan 2019, sehingga nantinya FFR akan berada pada kisaran 3,25%-3,50% pada 2020. Ekspektasi laju kenaikan FFR yang lebih cepat ini menjadi faktor utama yang mendorong gejolak di pasar keuangan global pada triwulan I-2018.

Grafik I - 1 — Tingkat Inflasi dan Pengangguran AS



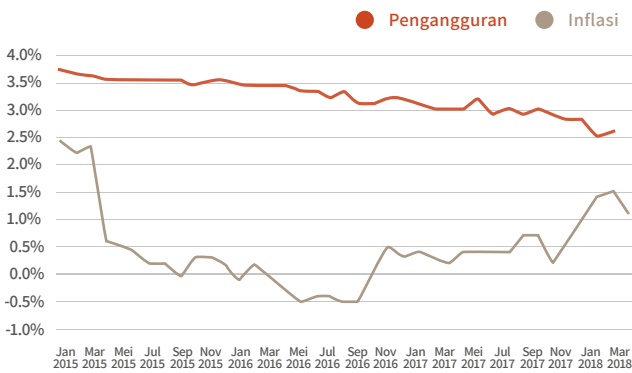
Di Zona Euro, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2018 sesuai dengan ekspektasi pasar sebesar 2,5% (yoy). Angka pertumbuhan yang relatif tinggi ini sejalan dengan peningkatan indeks kinerja manufaktur dan indeks keyakinan konsumen pada triwulan I-2018. Sementara itu, tingkat inflasi Zona Eropa relatif stabil dan tercatat sebesar 1,3% (Desember 2017: 1,4%). Adapun tingkat pengangguran di Zona Eropa melanjutkan kecenderungan menurun dan per Maret 2018 tercatat pada level 8,5%, terendah dalam sembilan tahun terakhir.

Grafik I - 2 — Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro



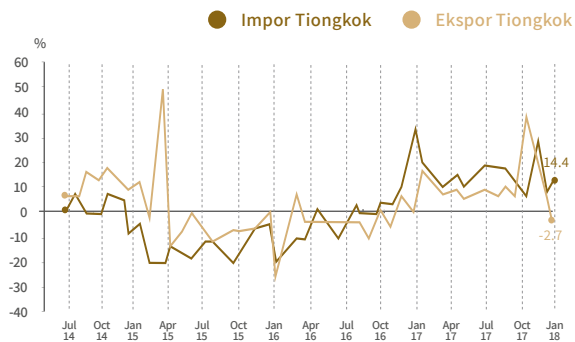
Perekonomian Jepang juga mencatat beberapa perkembangan positif. Tingkat inflasi Jepang per Maret 2018 tercatat sebesar 1,1%, meningkat dibandingkan akhir triwulan IV-2017 (0,6%). Tingkat inflasi Jepang sempat mencapai titik tertinggi pada Februari 2018 (1,5%), didorong kenaikan biaya transportasi dan bahan makanan. Sementara itu, tingkat pengangguran Jepang masih stabil pada level yang rendah (Maret 2018: 2,5%). Pertumbuhan ekonomi Jepang pada triwulan I-2018 diperkirakan masih cukup kuat, setelah mencatat angka pertumbuhan sebesar 2,0% pada triwulan IV-2017.

Grafik I - 3 — Tingkat Inflasi dan Pengangguran Jepang



Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I-2018 sebesar 6,8% (yoy), stabil pada tingkat yang sama dalam tiga kuartal berturut-turut. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, investasi properti, dan ekspor. Ke depan, kinerja ekspor Tiongkok berpotensi terganggu pengenaan tarif impor oleh AS terhadap produk-produk Tiongkok. AS sendiri merupakan negara tujuan ekspor terbesar Tiongkok, dengan porsi sekitar 19% dari total ekspor Tiongkok. Dari sisi inflasi, Tiongkok melaporkan tingkat inflasi pada level 2,1% (yoy) per Maret 2018, dibandingkan 1,8% (yoy) pada akhir triwulan sebelumnya.

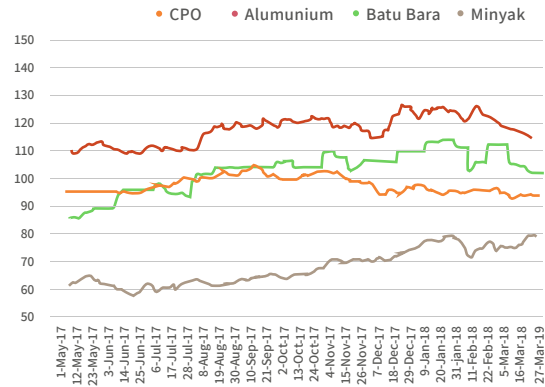
Grafik I - 4 — Kinerja Eksternal Tiongkok



Perkembangan Harga Komoditas

Harga minyak dunia melanjutkan kecenderungan meningkat pada triwulan I-2018. Sementara itu, harga minyak sawit dan sejumlah komoditas pertambangan membukukan kecenderungan melemah. Pada periode tersebut, terpantau adanya peningkatan volatilitas harga komoditas yang antara lain dipengaruhi oleh kekhawatiran mengenai berlanjutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Ke depan, harga minyak diperkirakan akan melanjutkan tren kenaikan, didukung oleh meningkatnya permintaan serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Grafik I - 5 — Perkembangan Harga Komoditas Dunia



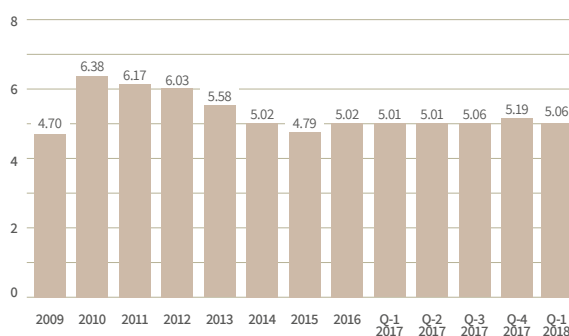
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian domestik pada triwulan I-2018 mencatat sejumlah perkembangan positif dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi masih berlanjut, diiringi oleh tingkat inflasi yang terkendali, kinerja eksternal yang positif, dan beberapa indikator kinerja sektor riil yang membaik.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I-2018 sebesar 5,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (5,01%). Meningkatnya angka pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh investasi dan konsumsi swasta. Pertumbuhan investasi yang cukup tinggi (7,95%) didorong oleh investasi nonbangunan maupun bangunan. Sementara itu, konsumsi swasta turut didorong oleh meningkatnya belanja terkait penyelenggaraan Pilkada. Sejalan dengan permintaan domestik, kinerja impor masih mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekspor masih relatif kuat.

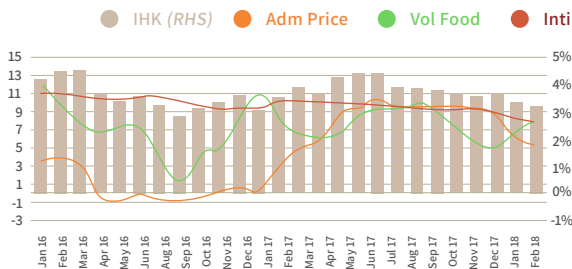
Grafik I - 6 — Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berada pada level yang terkendali. Per Maret 2018, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,40% (yoy) (Desember 2017: 3,61%), terjaga dalam kisaran target sebesar 3,5±1% (yoy). Inflasi inti cenderung stabil pada level 2,67% (yoy). Sementara itu, inflasi *administered price* tercatat sebesar 5,10% (yoy), yang terutama didorong oleh penyesuaian harga bensin non-subsidi. Inflasi volatile food tercatat 4,06% (yoy), terutama berasal dari komoditas bumbu rumah tangga, seperti cabai dan bawang.

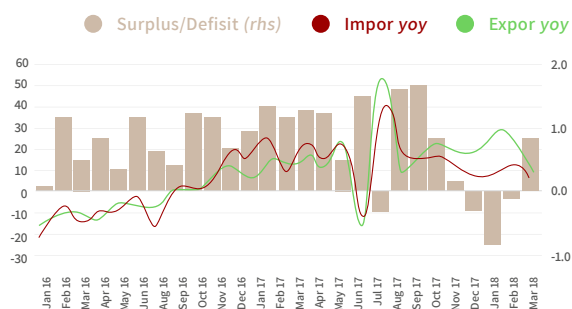
Grafik I - 7 — Tingkat Inflasi Indonesia



Perdagangan Eksternal dan Sektor Riil

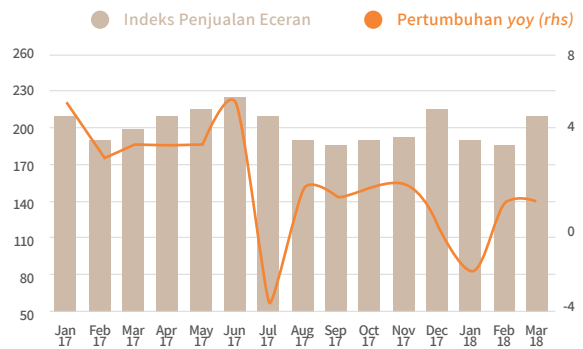
Neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I-2018 mencatat surplus sebesar USD220 juta, dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD954 juta. Ekspor Indonesia per Maret 2018 tumbuh sebesar 5,10% (yoy), dengan peningkatan ekspor terbesar berasal dari penjualan minyak dan batubara, besi dan baja, serta ikan dan udang. Sementara itu, impor barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal meningkat masing-masing sebesar 22,08%, 18,35%, dan 27,72% (yoy). Peningkatan impor bahan baku dan barang modal tersebut diharapkan akan dapat mendukung pemulihan industri manufaktur domestik.

Grafik I - 8 — Neraca Perdagangan Indonesia



Sementara itu, indikator kinerja manufaktur Indonesia pada triwulan I-2018 membaik ke zona ekspansi (50,7), meningkat dibandingkan akhir triwulan IV-2017 yang masih berada pada zona kontraksi (49,3). Kinerja sektor riil terpantau masih stabil, antara lain terlihat dari penjualan penjualan eceran. Ke depan, sejalan dengan membaiknya outlook perekonomian domestik, pertumbuhan sektor riil diekspektasikan akan semakin solid.

Grafik I - 9 — Penjualan Eceran



1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Pergerakan pasar modal domestik pada triwulan I-2018 menunjukkan volatilitas yang meningkat, sebagaimana terjadi pada pasar keuangan global dan regional. Peningkatan tekanan pasar tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ekspektasi kenaikan FFR serta ancaman perang dagang AS-Tiongkok. Namun di tengah fluktuasi tersebut, kondisi pasar domestik secara umum masih terjaga.

Pergerakan pasar keuangan domestik selama triwulan I-2018 dipengaruhi oleh meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekspektasi kenaikan FFR dan ancaman perang dagang AS-Tiongkok. Di tengah peningkatan volatilitas tersebut, secara keseluruhan pasar keuangan domestik relatif masih terjaga, antara lain tercermin dari *Credit Default Swap* (CDS) yang terjaga pada level yang rendah.

Grafik I - 10 — Credit Default Swap Indonesia

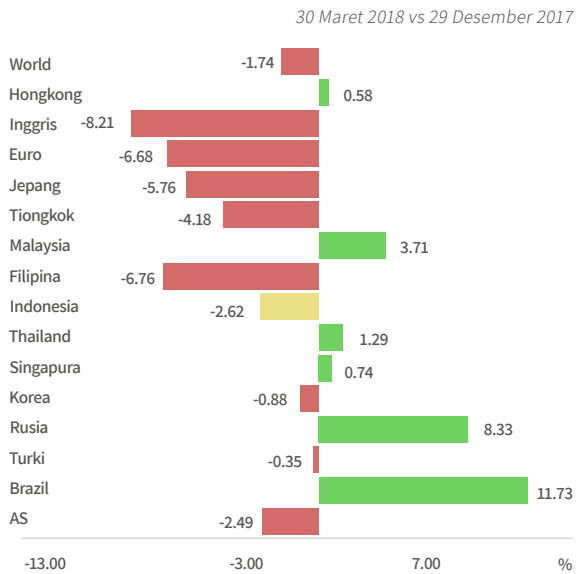


Sementara itu, perbaikan peringkat investasi Indonesia diharapkan akan turut membantu memperbaiki persepsi investor terhadap perekonomian domestik. Pada Februari 2018, *Japan Credit Agency Ltd.* (JCR) meningkatkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi. Selanjutnya, *Rating and Investment Inc.* (R&I) menaikkan peringkat Indonesia dari BBB-/outlook positif menjadi BBB/outlook stabil. Terakhir, salah satu lembaga pemeringkat utama, *Moody's*, juga meningkatkan peringkat Indonesia dari Baa2 ke Baa3.

Pasar Saham

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada triwulan I-2018 mencatat pelemahan sebesar 2,62% (qtq). Koreksi ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, tercermin dari pelemahan yang juga terjadi di pasar saham di seluruh dunia. Namun, pelemahan IHSG tercatat lebih rendah dibandingkan sebagian indeks saham di regional. Sementara itu, investor *nonresiden* membukan *net sell* sebesar Rp23,4 triliun, turun dibandingkan *net sell investor nonresiden* pada triwulan IV-2017 sebesar Rp29,1 triliun.

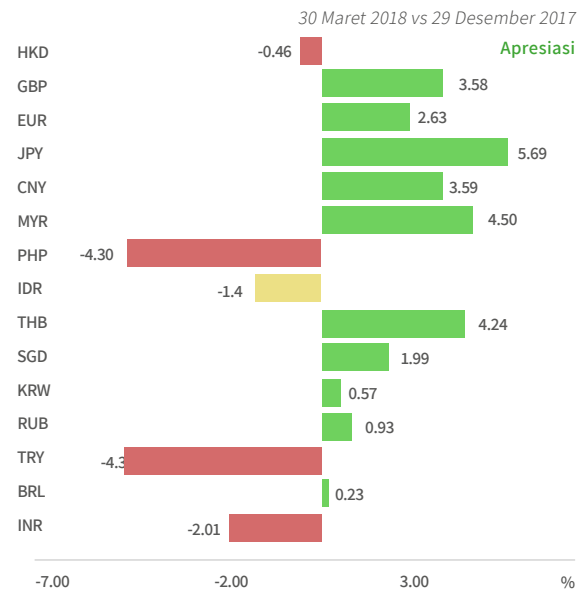
Grafik I - 11 — Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional



Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah menunjukkan kecenderungan melemah pada triwulan I-2018, yang dipengaruhi oleh ekspektasi laju kenaikan FFR dan meningkatnya impor. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS tercatat melemah sebesar 1,4% (qtq), masih lebih moderat dibandingkan beberapa mata uang negara-negara berkembang lainnya. Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan mengarah ke pergerakan yang lebih stabil, seiring surplus neraca perdagangan serta langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia.

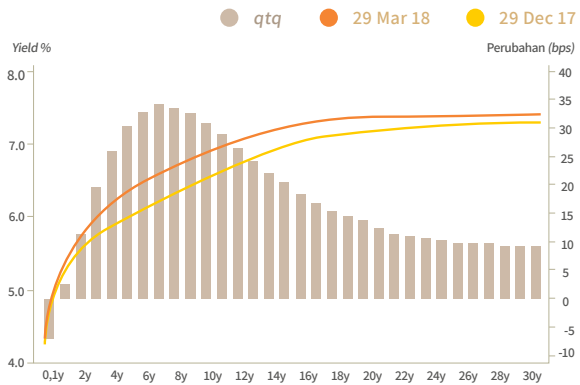
Grafik I - 12 — Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional



Pasar Surat Berharga Negara

Pasar surat utang dalam negeri terpantau mengalami koreksi pada triwulan I-2018, dipengaruhi oleh ekspektasi laju kenaikan FFR dan pelemahan nilai tukar Rupiah. *Yield* SBN mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18 bps. Namun di tengah pelemahan pasar tersebut, investor nonresiden masih mencatatkan *net buy* sebesar Rp22,6 triliun, melanjutkan *net buy* yang terjadi di triwulan sebelumnya.

Grafik I - 13 — Pergerakan *Yield* SBN



1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan I-2018 masih cukup *solid*, tercermin dari menguatnya permodalan bank dengan CAR yang tumbuh 3 bps (yoy) menjadi 22,71%. Menguatnya permodalan tersebut didukung oleh meningkatnya rentabilitas dan efisiensi bank umum dengan ROA dan BOPO masing-masing sebesar 2,50% dan 79,22%. Fungsi intermediasi perbankan juga cukup baik dengan Kredit dan DPK yang tumbuh masing-masing 8,54% (yoy) dan 7,66% (yoy), sehingga turut menopang pertumbuhan aset sebesar 8,79% (yoy). Kualitas kredit bank umum juga membaik dengan turunnya NPL gross sebesar 29 bps (yoy) menjadi 2,75%.

Tabel I - 1 — Indikator Bank Umum

Indikator	Des'16	Mar'17	Dec'17	Mar'18	qtq Mar'17	qtq Des ' 17	qtq Mar '18	yoy Mar '17	yoy Mar'18
Total Aset (Rp Miliar)	6.729.799	6.929.581	7.387.634	7.429.891	1,48%	3,32%	0,57%	10,72%	8,79%
Kredit (Rp Miliar)	4.377.195	4.369.967	4.737.972	4.743.237	-0,17%	4,28%	0,11%	9,24%	8,54%
DPK (Rp Miliar)	4.836.758	4.916.665	5.289.209	5.293.097	1,65%	2,85%	0,07%	10,02%	7,66%
- Giro (Rp Miliar)	1.124.235	1.146.021	1.233.337	1.234.418	1,94%	2,83%	0,09%	10,00%	7,71%
-Tabungan (Rp Miliar)	1.551.809	1.489.579	1.701.175	1.642.999	-4,01%	8,03%	-3,42%	12,32%	10,30%
- Deposito (Rp Miliar)	2.160.714	2.281.065	2.354.697	2.415.681	5,57%	-0,60%	2,59%	8,57%	5,90%
CAR (%)	22,71	22,68	23,18	22,71	-3	17	-47	92	3
ROA (%)	2,17	2,45	2,38	2,50	28	-4	11	7	5
NIM/NOM (%)	5,47	5,24	5,15	4,93	-24	-4	-22	-16	-30
BOPO (%)	82,85	80,68	79,28	79,22	-216	-6	-6	-272	-146
NPL/NPF Gross (%)	2,93	3,04	2,60	2,75	11	-34	-16	21	-29
NPL/NPFNet (%)	1,24	1,34	1,17	1,25	10	-13	-8	-3	-9
LDR/LFR (%)	90,50	88,88	89,56	89,61	-162	121	5	-64	-73

1.2.2 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan I-2018, sejalan dengan kinerja bank umum, kondisi ketahanan BUK masih solid yang tercermin dari CAR sebesar 22,67%. Kuatnya kondisi permodalan BUK didorong oleh meningkatnya rentabilitas perbankan karena adanya peningkatan efisiensi yaitu meningkatnya ROA menjadi 2,55% dan menurunnya rasio BOPO menjadi 78,76%. Intermediasi perbankan juga relatif terjaga

dibandingkan dengan tahun sebelumnya tercermin dari pertumbuhan Kredit dan DPK masing-masing sebesar 8,62% (yoy) dan 7,33% (yoy). Selain itu, risiko kredit BUK juga membaik dibanding tahun sebelumnya dengan menurunnya NPL gross dan NPL net masing-masing menjadi 2,67% dan 1,20%.

Tabel I - 2 — Kondisi Bank Umum Konvensional

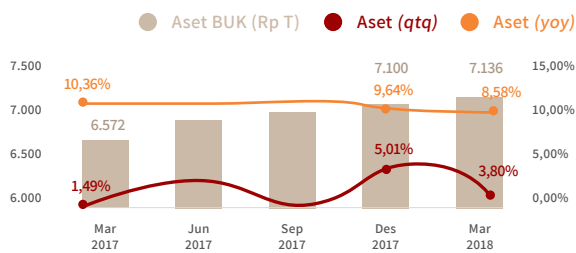
Rasio	2017		2018	Δ qtq		Δ yoy	
	Mar	Des	Mar	Des 17	Mar 18	Mar 17	Mar 18
Total Aset	6.571.793	7.099.564	7.135.601	+3,27%	+0,51%	+10,36%	+8,58%
Kredit (Rp Milyar)	4.191.886	4.548.155	4.553.173	+4,38%	+0,11%	+8,95%	+8,62%
Dana Pihak Ketiga (Rp Milyar)	4.703.466	5.050.984	5.048.278	+2,86%	-0,05%	+9,53%	+7,33%
- Giro (Rp Milyar)	1.123.869	1.207.069	1.207.182	+3,04%	+0,01%	+9,31%	+7,41%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.425.243	1.626.595	1.568.534	+7,91%	-3,57%	+11,87%	+10,05%
- Deposito (Rp Milyar)	2.154.355	2.217.321	2.272.562	-0,65%	+2,49	+8,15%	+5,49%
CAR (%)	22,88	23,18	22,67	-9	-51	87	-21
ROA (%)	2,50	2,45	2,55	-2	10	6	5
NIM (%)	5,38	5,32	5,07	-2	-25	-17	-32
BOPO (%)	80,15	78,64	78,76	-7	12	-280	-139
NPL Gross (%)	2,98	2,50	2,67	-37	17	25	-30
NPL Net (%)	1,29	1,11	1,20	-12	9	1	-9
LDR (%)	89,12	90,04	90,19	131	15	-47	107

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Maret 2018

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan I-2018 tumbuh 8,58% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 10,36% (yoy). Perlambatan didorong oleh DPK yang hanya tumbuh 7,33% (yoy) lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,53% (yoy). Selain itu, melambatnya pertumbuhan kredit sebagai komponen aset terbesar juga turut mempengaruhi perlambatan penurunan aset BUK. Secara triwulan, aset juga tumbuh melambat 0,51% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,27% (qtq), yang dipengaruhi oleh terkontraksinya DPK sebesar -0,05% (qtq) dan perlambatan pertumbuhan kredit sebesar 0,11% (qtq). Aset perbankan Indonesia terindikasi memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari *Concentration Ratio* (CR) aset 4 BUK terbesar yang mencapai 47,80% dan CR aset 20 BUK terbesar yang mencapai 79,23% dari aset perbankan.

Grafik I - 14 — Perimbangan Aset BUK



Sumber: SPI, Maret 2018

Tabel I - 3 — Tingkat Konsentrasi Aset BUK

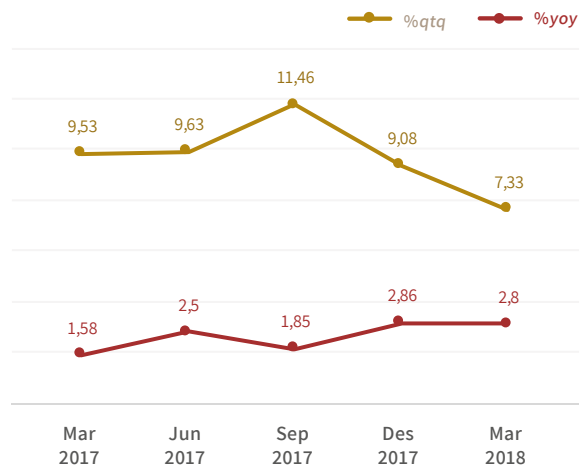
Periode	Aset	
	CR4%	CR20%
2014	45,94	79,7
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
Mar '17	47,52	79,37
Jun '17	47,96	79,42
Sep '17	47,84	79,28
Des '17	48,81	79,87
Mar '18	47,8	79,23

* *Concentration Ratio* digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi output sejumlah entitas (n) terhadap total output industri. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

Sumber: OJK, olah

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh melambat 7,33% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 9,53%. Perlambatan terjadi pada setiap komponen baik giro, tabungan dan deposito yang masing-masing tumbuh melambat sebesar 7,41% (yoy), 10,05% (yoy) dan 5,49% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara umum, perlambatan DPK dipengaruhi aliran dana masuk yang didorong oleh *tax amnesty* yang mengakibatkan lonjakan DPK di awal 2017. Secara triwulan DPK berkontraksi sebesar -0,05% (qtq) dibandingkan posisi Desember 2017 yang tumbuh 2,86% (qtq). Perlambatan pertumbuhan DPK di awal tahun merupakan siklus tahunan yang disebabkan penarikan dana nasabah untuk kegiatan operasional di awal tahun.

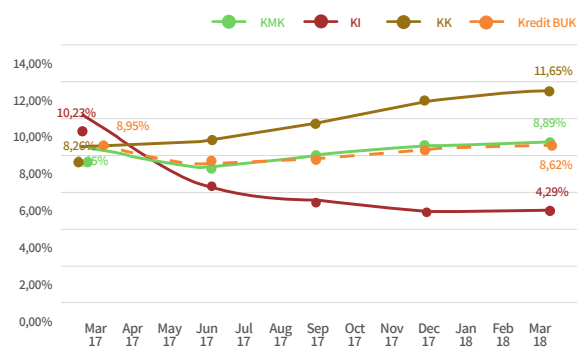
Grafik I - 15 — Tren Pertumbuhan DPK



B. Kredit

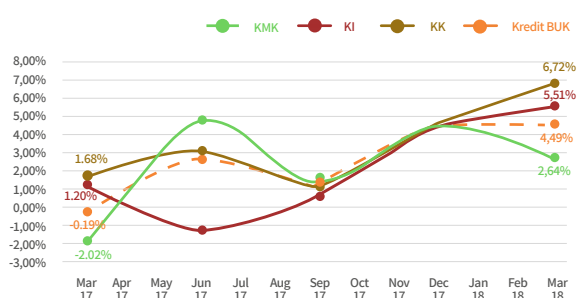
Pada triwulan I-2018, kredit BUK tumbuh relatif stabil sebesar 8,62% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, KMK dan KI tumbuh masing-masing 8,89% (yoy) dan 4,92% (yoy), yang menunjukkan adanya ekspansi kegiatan usaha di tengah perlambatan kredit investasi. Sementara itu, Kredit Konsumsi (KK) tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dari 8,26% (yoy) menjadi 11,65% (yoy). Pertumbuhan terbesar KK terjadi di Sektor Rumah Tangga untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya, utamanya pemilikan komputer dan alat komunikasi. Pertumbuhan KK ini mengindikasikan moderasi perbaikan daya beli masyarakat meskipun masih terbatas. Secara triwulan kredit mengalami pertumbuhan sebesar 0,11% (qtq), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,38% (qtq).

Grafik I - 16 — Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, Maret 2018

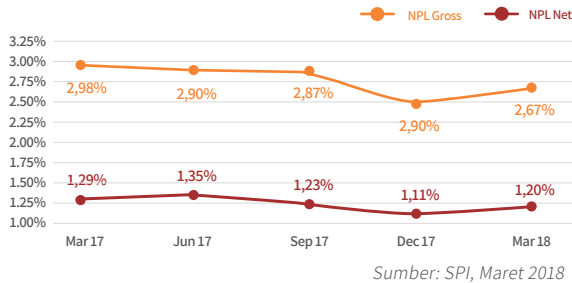
Grafik I - 17 — Tren Pertumbuhan Kredit Triwulan (qtq)



Sumber: SPI, Maret 2018

Kualitas kredit juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya tercermin dari NPL *gross* BUK turun 30 *bps* (*yoy*) menjadi 2,67%. Selain itu, pencadangan yang dilakukan oleh bank juga memadai sehingga NPL net relatif rendah sebesar 1,20%. Dari ketiga jenis penggunaan, KMK dan KI memiliki NPL tertinggi sebesar 3,27% dan 2,72%, namun masih terjaga dibawah *threshold* 5%. Sementara itu, NPL KK masih cukup rendah sebesar 1,67%.

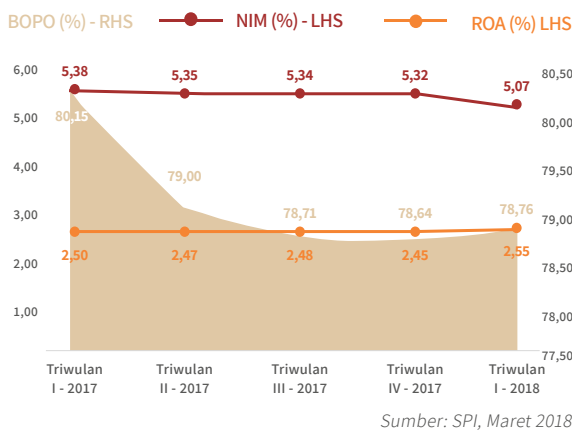
Grafik I - 18 — Tren NPL (%)



C. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada triwulan I-2018 meningkat 5 *bps* (*yoy*) dengan ROA sebesar 2,55% yang didorong oleh meningkatnya laba sebesar 10,94% (*yoy*). Selain itu, efisiensi BUK juga meningkat yang tercermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 139 *bps* (*yoy*) menjadi 78,76% yang mendorong meningkatnya rentabilitas. Peningkatan efisiensi didukung oleh meningkatnya pendapatan operasional sebesar 1,28% (*yoy*), serta turunnya beban operasional sebesar 0,48% (*yoy*).

Grafik I - 19 — Tren Rentabilitas dan Efisiensi



D. Permodalan

Pada triwulan I-2018 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 22,67%. Hal tersebut ditopang oleh meningkatnya modal yang tumbuh 8,54% (*yoy*) karena adanya peningkatan modal disetor dan laba yang tumbuh masing-masing 11,31% (*yoy*) dan 15,37% (*yoy*).

1.2.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan I-2018, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan pertumbuhan DPK yang meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga didukung dengan penyaluran

kredit yang masih tumbuh positif. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan perbaikan tingkat efisiensi, meskipun masih dibayangi dengan peningkatan risiko kredit.

Tabel I - 4 — Kondisi Umum BPR

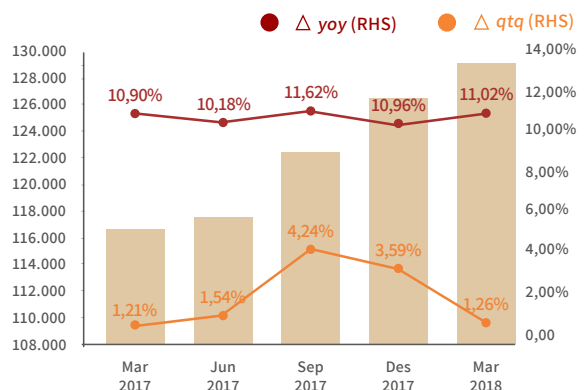
Rasio	Mar 2017	Des 2017	Mar 2018	qtq Des 2017	qtq Mar 2018	yoy Mar 2017	yoy Mar 2018
Total Aset (Rp Milyar)	114.872	125.945	+127.528	+3,59%	+1,26%	+10,90%	+11,02%
Kredit (Rp Milyar)	84.340	89.482	+91.655	+1,76%	+2,43%	+10,66%	+8,67%
Dana Pihak Ketiga (Rp Milyar)	77.212	84.861	+86.361	+4,00%	+1,77%	+11,33%	+11,85%
- Tagihan (Rp Milyar)	23.600	26.723	+26.999	+7,36%	+1,03%	+12,86%	+14,40%
- Deposito (Rp Milyar)	53.612	58.137	+59.362	+2,53%	+2,11%	+10,67%	+10,73%
NPL Gross (%)	6,68	6,15	6,81	-85	-66	-52	-13
NPL Net (%)	4,88	4,52	5,10	-65	-58	-49	-21
ROA (%)	2,76	2,55	2,68	-1	13	-11	-8
LDR (%)	77,00	75,36	75,43	-123	7	-22	-157
CR(%)	15,25	19,86	16,93	237	-293	-132	167
BOPO(%)	80,81	80,50	80,59	-57	-9	-37	-22
CAR(%)	23,72	22,95	24,10	26	116	8	38

A. Aset

Aset BPR pada triwulan I-2018 tumbuh 11,02% (*yoy*), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 10,90% (*yoy*). Pertumbuhan aset salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya DPK BPR. Disamping itu, fungsi intermediasi BPR masih cukup baik tercermin dari penyaluran kredit yang masih tumbuh positif.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (56,91%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi terbesar yaitu 22,65%. Dilihat dari pertumbuhannya, aset BPR di Banten tumbuh tertinggi sebesar 33,09% (*yoy*), meskipun memiliki porsi yang rendah yaitu 2,87% dari total aset BPR. Sementara itu, peningkatan nominal aset BPR tertinggi berada di Jawa Tengah yang tumbuh 14,73% (*yoy*).

Grafik I - 20 — Kondisi Umum BPR

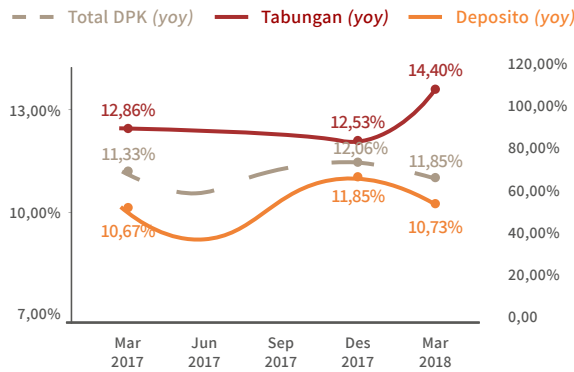


B. DPK

DPK BPR pada triwulan I-2018 tumbuh 11,85% (yoy) menjadi Rp86,36 triliun, relatif moderat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 11,33% (yoy). Hal tersebut didorong oleh meningkatnya tabungan dan deposito masing-masing sebesar 14,40% (yoy) (Maret 2017= 12,86%) dan 10,73% (yoy) (Maret 2017=10,67%, yoy).

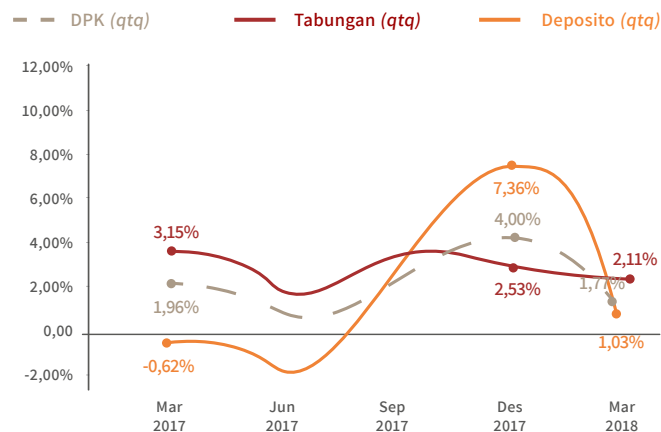
Di sisi lain, secara triwulan DPK BPR tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,77% (qtq) yang utamanya disebabkan oleh perlambatan tabungan yang hanya tumbuh 1,03% (qtq), sementara deposito masih tumbuh moderat yaitu sebesar 2,11% (qtq). Deposito masih merupakan komponen DPK tertinggi dengan porsi 68,74%, diikuti tabungan sebesar 31,26%.

Grafik I - 21 — Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



Sumber : SPI BPR, Maret 2018

Grafik I - 22 — Tren Pertumbuhan DPK (qtq)



Sumber : SPI BPR, Maret 2018

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada triwulan I-2018 tumbuh 8,67% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,66% (yoy). Tren penyaluran kredit BPR masih sama dengan periode-periode sebelumnya, dimana sebagian besar disalurkan untuk tujuan konsumsi dengan porsi sebesar 48,37%. Ditengah perlambatan, KI masih tumbuh cukup baik sebesar 10,48% (yoy). Sementara itu, secara nominal, sebagian besar penyaluran kredit disalurkan untuk KMK dan KK yang tumbuh masing-masing 9,58% (yoy) dan 7,60% (yoy).

Sektor perdagangan besar dan eceran masih merupakan sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar dengan porsi 25,29% dari keseluruhan penyaluran total kredit. Sektor ini tumbuh sebesar 7,10% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,76% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit ke sektor pertambangan tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 39,27% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi 0,25% terhadap total kredit BPR.

Tabel I - 5 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	Mar'16	Mar'17	Des'17	Mar'18	Porsi	qtq Des ' 17	qtq Mar '18	yoy Mar '17	yoy Mar'18
Modal Kerja	33.760	37.172	39.773	40.732	44,44%	1,68%	2,41%	10,11%	9,58%
Investasi	5.069	5.965	6.467	6.590	7,19%	4,59%	1,90%	17,68%	10,48%
Konsumsi	37.387	41.203	43.241	44.333	48,37%	1,41%	2,53%	10,21%	7,60%
Total	76.216	84.340	89.482	91.655	100%	1,76%	2,43%	10,66%	8,67%

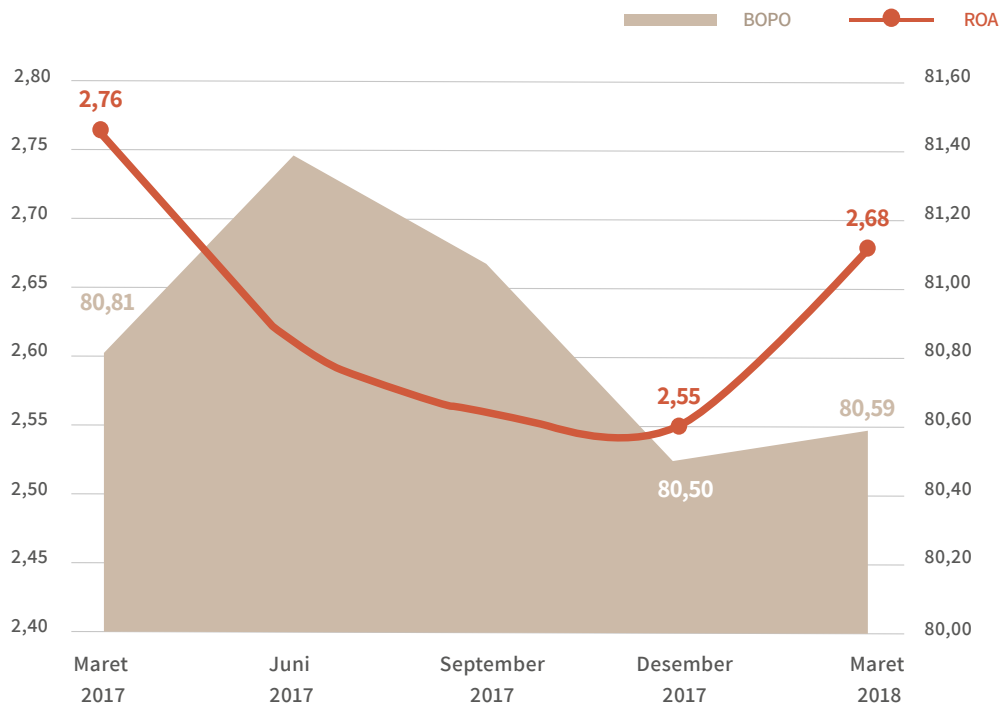
Sumber : SPI BPR, Maret 2018

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Maret 2018 masih cukup baik dengan rasio ROA sebesar 2,68%. Hal tersebut didukung oleh peningkatan efisiensi BPR yang tercermin dari menurunnya

BOPO sebesar 22 bps (yoy) menjadi 80,59% serta laba yang tumbuh stabil sebesar 7,83% (yoy).

Grafik I - 23 Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber : SPI BPR, Maret 2018

E. Permodalan

Permodalan masih terjaga dengan CAR sebesar 24,10%, meningkat 38 bps (yoy) dibandingkan Maret 2017 sebesar 23,72%. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya

laba sehingga turut memperkuat permodalan BPR. Tingginya permodalan BPR tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan I-2018, kredit UMKM tumbuh 9,95% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,32% (yoy). Peningkatan kredit UMKM terbesar utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian yang masing-masing tumbuh 6,79% (yoy) dan 19,91% (yoy) seiring dengan besarnya porsi kredit

pada kedua sektor tersebut. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat pada sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh 25,75% (yoy).

Secara triwulan, kredit UMKM terkontraksi 0,45% (qtq) yang utamanya didorong oleh penurunan kredit UMKM di sektor konstruksi yang turun sebesar 7,34% (qtq).

Tabel I - 6 Konsentrasi Penyaluran UMKM

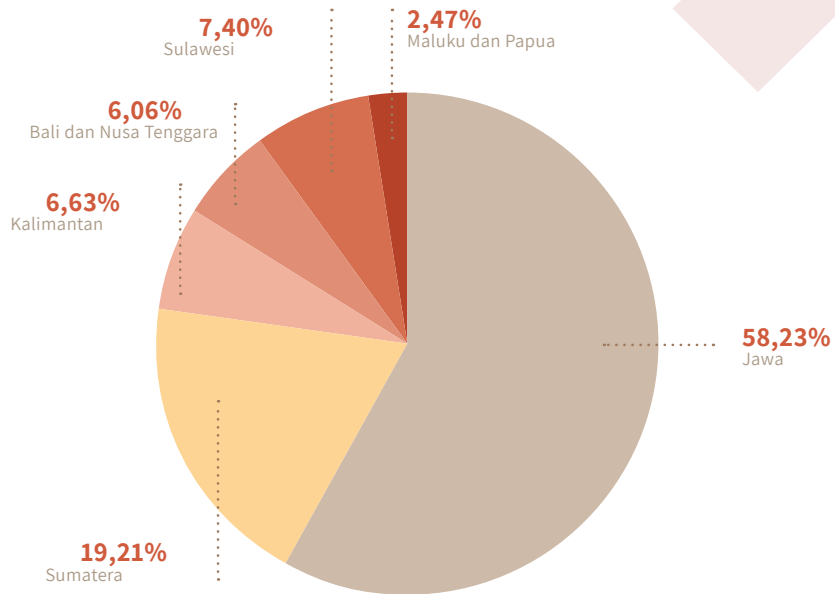
Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq	qtq	yoy	yoy
	Mar'17	Des'17	Mar'18	Mar'18	Des ' 17	Mar '18	Mar '17	Mar'18
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	433.551	462.729	462.998	52,67%	3,41%	0,06%	8,65%	6,79%
NPL	19.125	17.498	18.914	4,09%	-7,39%	8,09%	12,02%	-1,10%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	84.144	93.175	90.551	10,30%	3,68%	-2,82%	10,38%	7,61%
NPL	3.536	3.122	3.534	3,90%	-4,76%	13,20%	19,12%	-0,06%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	67.977	78.731	81.509	9,27%	5,00%	3,53%	9,71%	19,91%
NPL	2.892	2.424	2.592	3,18%	-5,39%	6,93%	5,94%	-10,37%
Listrik, gas, dan Air								
Baki Debet	2.749	3.577	3.457	0,39%	17,82%	-3,35%	45,00%	25,75%
NPL	138	168	708	20,48%	0,00%	321,43%	157,19%	413,04%
Lainnya								
Baki Debet	210.985	244.770	240.468	27,36%	5,98%	-1,76%	6,08%	13,97%
NPL	12.117	13.524	13.524	5,62%	-0,32%	13,02%	21,91%	11,61%
Baki Debet UMKM	799.406	882.982	878.983		4,34%	-0,45%	8,32%	9,95%
NPL UMKM	37.808	35.178	39.272	4,47%	-4,69%	11,64%	15,39%	3,87%

Keterangan : Shaded area merupakan rasio NPL
Sumber : SPI, Maret 2018

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,23% terutama di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih minor yaitu hanya

sebesar 22,57%. Masih rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dapat menjadi peluang bagi bank untuk meningkatkan pendampingan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat di *remote area*.

Grafik I - 24 — Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber : SPI, Maret 2018

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (57,27%) dan BUSN (34,75%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kredit UMKM BUMN dan BPD tumbuh tertinggi masing-masing sebesar 10,90% (yoy) dan 10,19% (yoy). Tingginya pertumbuhan

kredit UMKM BUMN sesuai dengan jumlah debitur atau kredit UMKM kelompok bank tersebut yang mendominasi pangsa pasar. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM BPD lebih ditopang oleh meningkatnya kredit ke sektor usaha mikro.

Tabel I - 7 — Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp Miliar)			Porsi	qtq Des '17	qtq Mar '18	yoy Mar '17	yoy Mar'18
	Mar'17	Des'17	Mar'18					
BUMN	453.932	495.186	503.402	57,27%	4,01%	1,66%	14,67%	10,90%
BUSN	281.574	310.222	305.460	34,75%	4,99%	-1,54%	1,48%	8,48%
BPD	56.908	70.366	62.705	7,13%	5,90%	-10,89%	16,59%	10,19%
KCBA dan Campuran	6.993	7.208	7.416	0,84%	-13,01%	2,89%	-55,93%	6,05%
Total UMKM	799.406	882.982	878.983	100%	4,34%	-0,45%	8,32%	9,95%

Sumber : SPI, Maret 2018

1.2.5 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Berdasarkan program Nawacita, terdapat enam sektor lapangan usaha yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor ini dianggap krusial bagi perekonomian Indonesia karena selain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sektor-sektor ini juga dapat menciptakan dampak lanjutan bagi

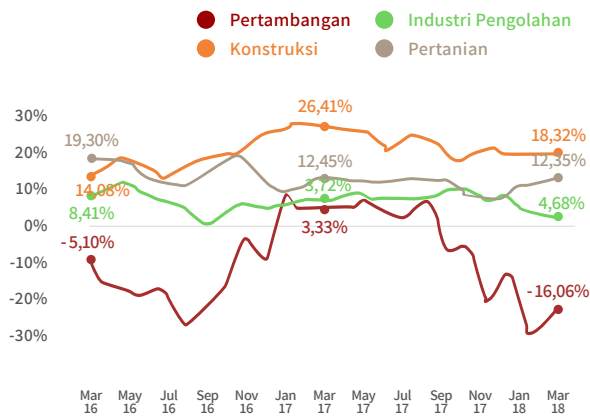
aktivitas di sektor ekonomi lainnya. Dari keenam sektor di atas, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 18,68% dan 16,73%. Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar terdapat pada sektor rumah tangga yaitu 23,95% terhadap total kredit.

Tabel I - 8 — Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

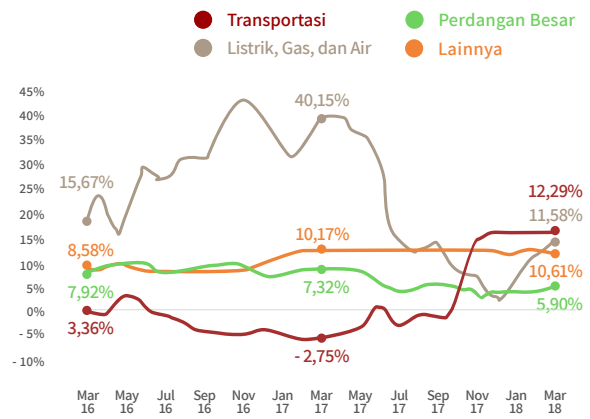
No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq	qtq	yoy	yoy	Porsi
		Mar '17	Des '17	Mar '18	Des '17	Mar '18	Mar '17	Mar '18	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	284,46	317,38	319,60	4,38%	0,70%	12,45%	12,35%	6,74%
2	Perikanan	9,78	11,27	10,64	8,17%	-5,62%	7,11%	8,74%	0,22%
3	Pertambangan dan Penggalian	124,80	113,62	104,75	3,19%	-7,81%	3,34%	-16,06%	2,21%
4	Industri Pengolahan	756,53	824,11	793,33	4,97%	-3,74%	3,72%	4,86%	16,73%
5	Listrik, Gas, dan Air	138,23	146,13	154,24	12,32%	5,55%	40,15%	11,58%	3,25%
6	Konstruksi	215,28	258,93	254,71	4,37%	-1,63%	26,41%	18,32%	5,37%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	836,52	885,45	885,84	3,44%	0,04%	7,30%	5,90%	18,68%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	94,40	97,89	97,37	2,11%	-0,53%	7,18%	3,14%	2,05%
9	Transportasi	171,08	182,63	192,10	4,64%	5,19%	-2,75%	12,29%	4,05%
10	Perantara Keuangan	196,33	214,19	211,49	2,63%	-1,26%	17,33%	7,72%	4,46%
11	Real Estate	206,87	221,92	225,52	2,91%	1,62%	12,41%	9,02%	4,75%
12	Administrasi Pemerintahan	22,64	21,82	21,98	-5,11%	0,73%	67,40%	-2,91%	0,46%
13	Jasa Pendidikan	8,89	10,10	10,17	6,03%	0,61%	9,65%	14,40%	0,21%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,57	19,09	19,80	8,23%	3,70%	9,97%	19,52%	0,42%
15	Jasa Kemasyarakatan	58,49	72,38	70,72	16,42%	-2,30%	8,84%	20,89%	1,49%
16	Jasa Perorangan	2,64	2,74	2,70	3,69%	-1,49%	1,22%	2,30%	0,06%
17	Badan Internasional	0,19	0,16	0,15	-1,27%	-2,24%	124,86%	-20,40%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2,39	2,75	3,49	-10,38%	26,77%	-78,67%	45,69%	0,07%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.002	1.102	1.136	4,86%	3,06%	8,63%	13,38%	23,95%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	221,86	233,32	228,53	1,90%	-2,05%	12,31%	3,01%	4,82%
Industri		4.370	4.738	4.743	4,28%	0,11%	9,24%	8,54%	100%

Sumber : SPI, Maret 2018

Grafik I - 25 & 26 — Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber: SPI, Maret 2018



Sumber: SPI, Maret 2018

Penyaluran kredit bank umum triwulan I-2018 tumbuh 8,54% (yoy), sedikit melambat dari tahun sebelumnya antara lain karena permintaan kredit yang masih terbatas dan perilaku bank yang selektif dalam memberikan kredit baru. Peningkatan kredit pada periode laporan utamanya didorong meningkatnya kredit ke sektor rumah tangga yang tumbuh 13,38% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya ditopang oleh peningkatan kredit pemilikan rumah tinggal dan kendaraan bermotor seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat meskipun masih terbatas. Tumbuhnya kredit untuk pemilikan rumah tinggal antara lain juga didukung oleh Program pemerintah Satu Juta Rumah. Selain itu, penyaluran kredit untuk pemilikan flat/apartemen dan peralatan rumah tangga juga tumbuh cukup baik.

Kredit sektor perdagangan besar dan eceran masih dalam tren perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tumbuh 5,90% (yoy), yang dipengaruhi oleh melambatnya kredit perdagangan eceran dan kredit ekspor produk antara. Meskipun demikian, penyaluran kredit pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor masih tumbuh cukup kuat sebesar 10,46% (yoy) utamanya pada perdagangan makanan, minuman dan tembakau.

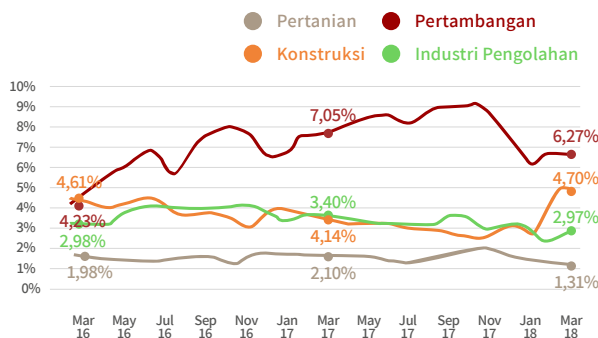
Kredit sektor industri pengolahan/manufaktur tumbuh 4,86% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya ditopang oleh tumbuhnya penyaluran ke subsektor makanan minuman, industri kertas, industri kimia, dan tekstil.

Meningkatnya kredit ke subsektor industri makanan dan minuman seiring dengan peningkatan kredit sektor pertanian sehingga mendorong tumbuhnya kredit perdagangan makanan dan minuman. Sementara itu, kredit sektor pertanian tumbuh moderat yaitu 12,35% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya didorong oleh subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura yang tumbuh 12,10% (yoy). Selain itu, penyaluran ke subsektor tersebut juga didukung oleh kredit ke subsektor jasa pertanian, perkebunan dan peternakan juga tumbuh tinggi sebesar 11,83% (yoy).

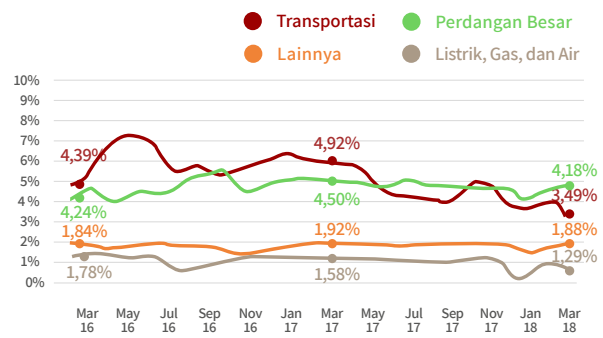
Kredit sektor pertambangan masih berkontraksi meskipun proses pemulihan harga komoditas global mulai membaik. Kredit ke sektor ini turun 16,07% (yoy) utamanya dipengaruhi oleh penurunan kredit pada tambang migas dan batubara. Meskipun demikian, kredit ke subsektor bijih logam masih baik dengan pertumbuhan sebesar 8,11% (yoy). Sementara itu, kredit sektor konstruksi tumbuh baik sebesar 18,32% (yoy) yang ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil. Tumbuhnya kredit konstruksi seiring dengan masih berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dan investasi swasta.

Meskipun memiliki porsi yang kecil terhadap total kredit (3,85%), kredit ke sektor transportasi tumbuh signifikan sebesar 12,29% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya utamanya didukung oleh meningkatnya kredit ke subsektor angkutan air dan jasa penunjang angkutan yang tumbuh masing-masing 12,30% (yoy) dan 25,05% (yoy).

Grafik I - 27 & 28 — Grafik NPL Gross Sektor Ekonomi



Sumber: SPI, Maret 2018



Sumber: SPI, Maret 2018

Risiko kredit industri perbankan pada triwulan I-2018 membaik tercermin dari turunnya NPL *gross* menjadi 2,75%. Hampir semua sektor ekonomi mengalami perbaikan rasio NPL yang utamanya terdapat pada sektor transportasi, perdagangan dan komunikasi. Meskipun

masih berada di atas *threshold*, risiko kredit sektor pertambangan relatif membaik dengan turunnya NPL menjadi 6,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor konstruksi juga mengalami peningkatan NPL, namun masih terjaga dibawah *threshold* 5%.

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

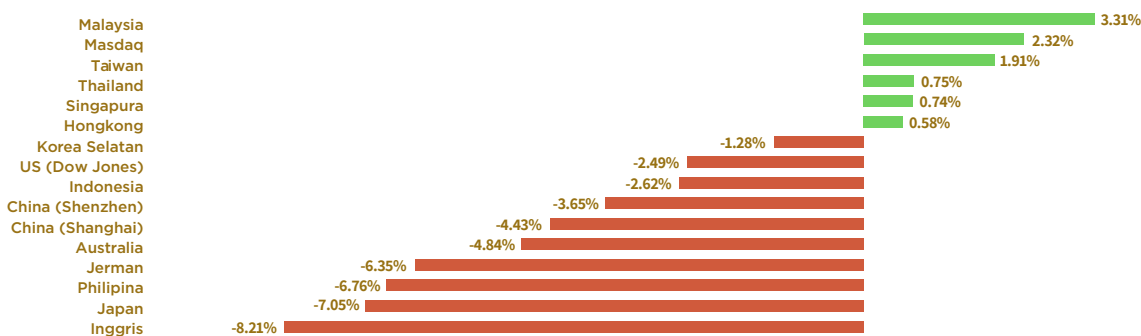
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan I-2018 berada pada posisi 6.188,99 atau mengalami penurunan sebesar -2,62% jika dibandingkan posisi triwulan IV-2017. Secara regional perkembangan indeks selama triwulan I-2018, IHSG menempati peringkat kesembilan setelah Amerika Serikat (Dow Jones). Perdagangan Efek pada triwulan I-2018, berdasarkan nilai dan volume transaksi didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *outflow (net sell)* di pasar saham sebesar Rp23,49 triliun.

Faktor domestik yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal di antaranya Bank Indonesia mempertahankan BI *7-days Repo Rate* di level 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* turun di level 3,50% dan *Lending Facility* turun di 5,00%, Lembaga Pemeringkat *Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)* meningkatkan peringkat utang (*Sovereign Credit Rating/SCR*) Indonesia dari BBB- dengan *outlook* positif menjadi BBB dengan *outlook* stabil.

Faktor eksternal dipengaruhi hasil pertemuan *Federal Open Meeting Committee (FOMC)* yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan AS sebesar 25 *bps* menjadi kisaran 1,50% - 1,75%, kenaikan imbal hasil US Treasury bertenor 10 tahun yang memberikan tekanan bagi pasar saham karena perusahaan besar mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membiayai utang mereka seiring kenaikan suku bunga obligasi, serta kebijakan perdagangan AS yang secara resmi pemberlakuan pengenaan bea masuk untuk impor dari Cina sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap perang dagang skala global.

Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan pelemahan sebesar Rp208,- atau 1,54% menjadi Rp13.756,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 29 — Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qta)

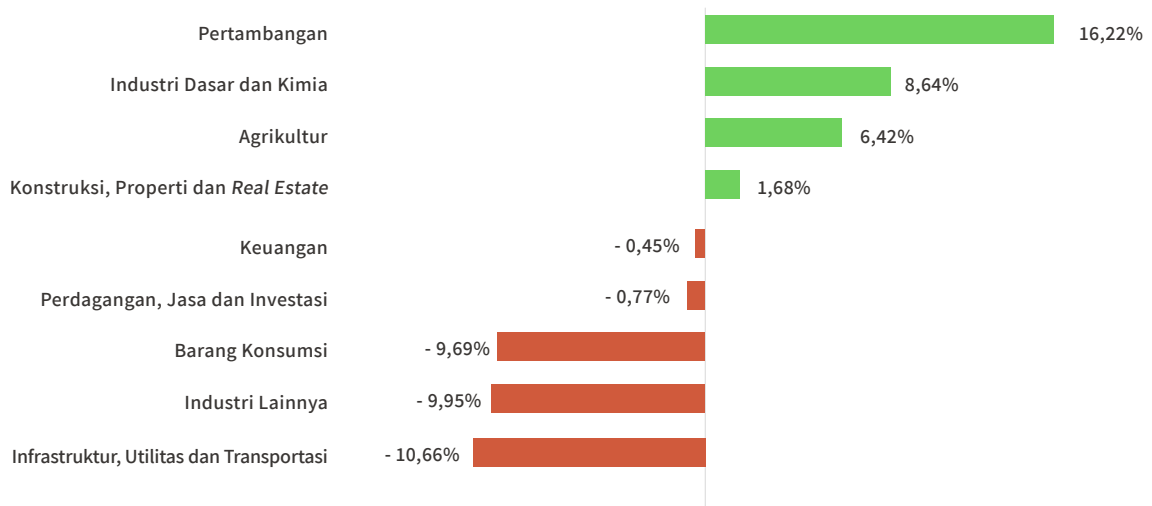


Sumber: Bloomberg

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar 2,38% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp6.884,88 triliun. Rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 9,63%, 2,47%, dan 20,71% menjadi sebesar Rp9.553,69 miliar, Rp12,55 miliar dan 385 ribu kali transaksi. Secara regional, IHSG menempati peringkat kesembilan setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat (*Dow Jones*) dengan penurunan sebesar -2,62%

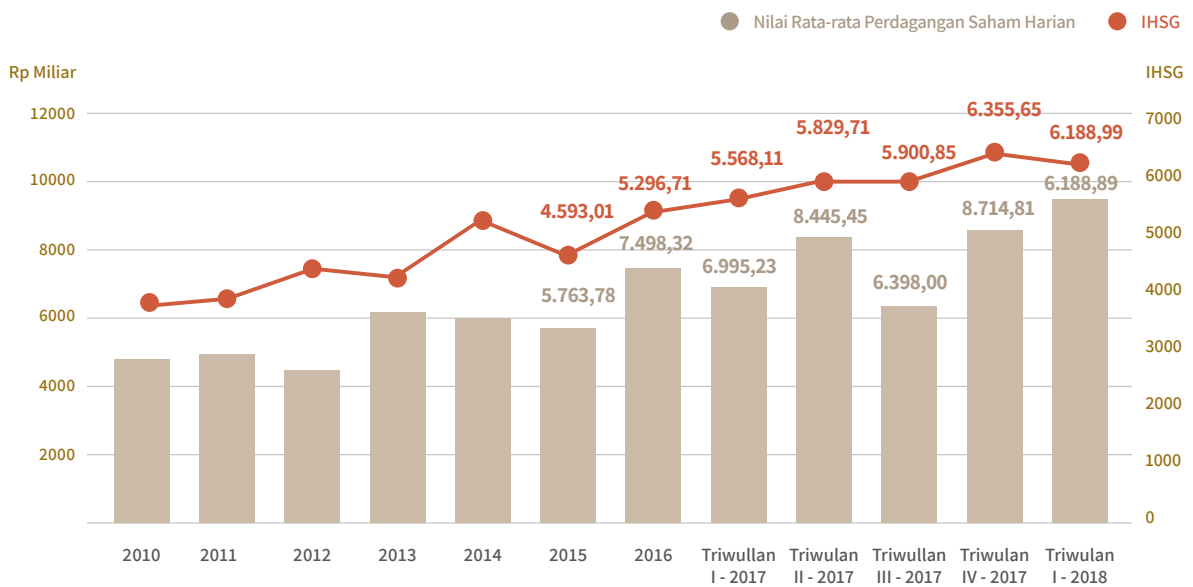
(ytd). Sementara itu, kinerja indeks dari Malaysia, AS (*Nasdaq*), Taiwan, Thailand, Singapura, dan Hongkong masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sebagian besar kinerja indeks sektoral pada triwulan I-2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan terdapat pada indeks sektor infrastruktur sebesar -10,66% yang disebabkan masih tingginya biaya logistik dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan.

Grafik I - 30 — Perkembangan Indeks Industri (qtq)



Sumber: Bloomberg

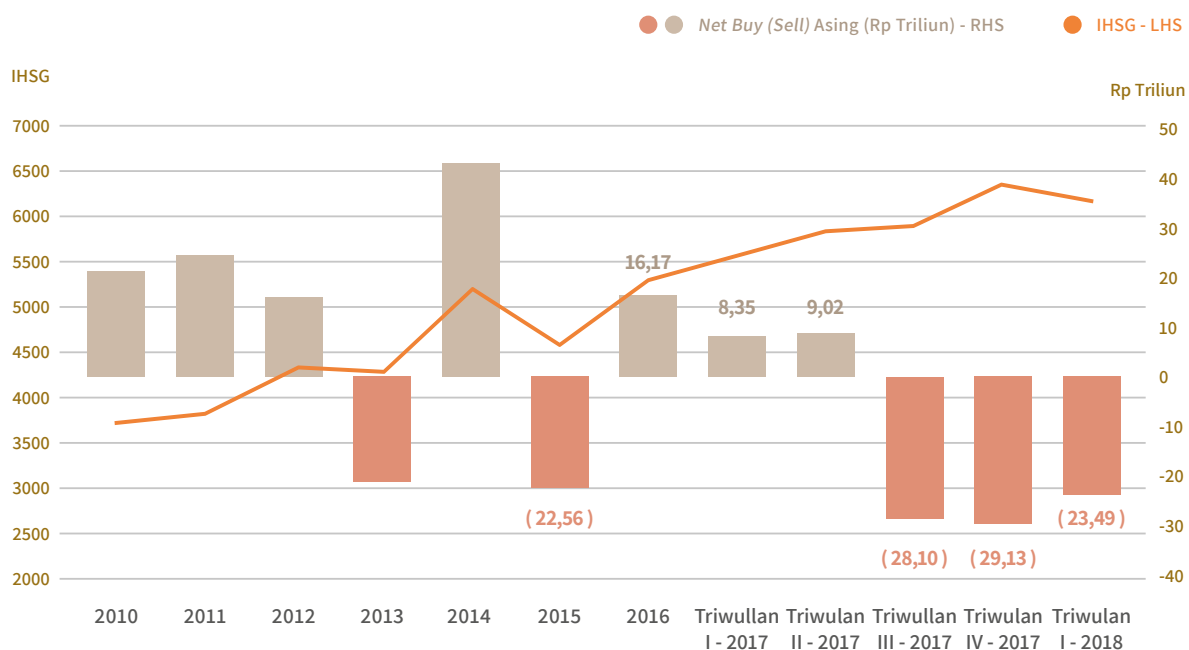
Grafik I - 31 — Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Tabel I - 9 — Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2017				2018
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	6.995,23	8.445,45	6.397,99	8.714,81	9.553,69
Investor Asing (Rp miliar)					
Beli	2.411,95	3.365,73	2.167,99	2.960,76	3.516,68
Jual	2.227,32	3.195,46	2.621,32	3.438,38	3.895,62
Investor Domestik (Rp miliar)					
Beli	4.583,28	5.079,71	4.230,00	5.754,05	6.037,01
Jual	4.717,91	5.249,99	3.776,68	5.276,43	5.658,07
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	336.568	301.152	291.847	318.829	384.845

Grafik I - 32 — Perkembangan IHSG dan Net Asing

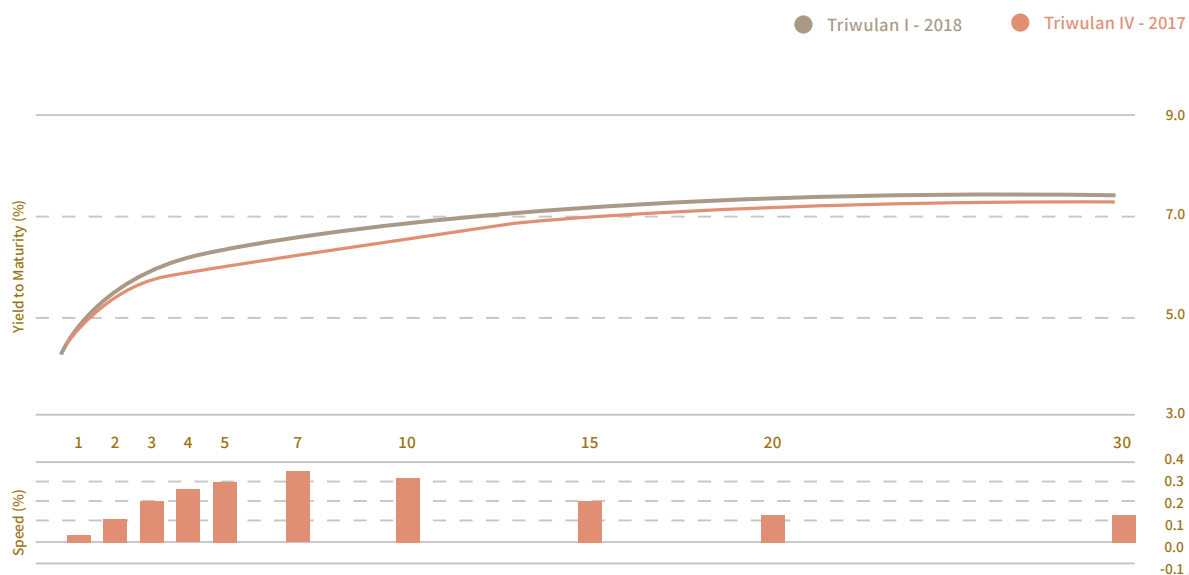


Tabel I - 10 — Perkembangan IHSG dan Net Asing

Periode	IHSG	Net Sell/Buy (Rp Triliun)
2015	4,593.01	-22.56
2016	5,296.71	16.17
Triwulan I - 2017	5,568.11	8.35
Triwulan II - 2017	5,829.71	9.02
Triwulan III - 2017	5,900.85	(28.10)
Triwulan IV - 2017	6,355.65	(29.13)
Total		-39.87
Triwulan I - 2018	6188.98	-23.49

Selama triwulan I-2018 transaksi investor asing membukukan *net sell* sejumlah Rp23,49 triliun.

Grafik I - 33 — Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi triwulan I-2018 mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan tren kenaikan

rata-rata sebesar +19,2 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami kenaikan masing-masing sebesar +15,5 *bps*, +32,8 *bps*, dan +18,1 *bps*.

Tabel I - 11 — Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan I-2017			Triwulan IV-2017			Triwulan I-2018		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)
Obligasi :									
Korporasi	58,84	59,18	6.212	108,79	109,33	9.518	63,36	64,23	7.130
SBN	955,64	965,92	48.514	896,30	937,71	49.654	1.512,90	1.572,01	74.853
Total	1.014,48	1.025,10	54.726	1.005,09	1.047,03	59.172	1.576,26	1.636,24	81.983
Repo	103,72	100,12	369	60,57	59,90	350	154,84	156,64	600

Sumber: OJK

Aktivitas perdagangan, nilai perdagangan dan frekuensi transaksi Obligasi Pemerintah pada triwulan I-2018 mengalami peningkatan masing-masing sebesar +68,79% , +67,64% dan 50,75% menjadi Rp1.512,9 triliun, Rp1.572,01 triliun dan 74.853 kali. Adapun aktivitas perdagangan, Nilai perdagangan dan frekuensi perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan I-2018 mengalami penurunan

masing-masing sebesar -41,76%, -41,25% dan -25,09% menjadi Rp63,36 triliun, Rp64,23 triliun dan 7.130 kali. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan triwulan I-2017, volume perdagangan, nilai perdagangan, frekuensi perdagangan Obligasi Korporasi meningkat masing-masing sebesar 7,68%, 8,54% dan 14,78%.

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 12 — Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	33
2	Penjamin Emisi Efek *)	4
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	85
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		127

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada triwulan I-2018 terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yaitu PT. Brent Securities, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK sebanyak 127 PE.

Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 23 lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah 12 lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan I-2018.

Tabel I - 13 — Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2017	2018
	s/d Triwulan IV	s/d Triwulan I
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	690	701

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 86 izin dengan rincian 76 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 10 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 9.576 WPPE dan 2.073 WPEE.

Tabel I - 14 — Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan IV-2017		Triwulan I-2018		Izin Total s/d Triwulan I-2018	Total
	Dokumen Pemberian Masuk	Izin	Dokumen Pemberian Masuk	Izin		
WPPE	156	134	93	76	76	9.576
WPEE	4	11	23	10	10	2.073
Total	160	145	116	86	86	11.649

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 51 perpanjangan izin dengan rincian 46 perpanjangan izin WPPE dan lima perpanjangan izin WPEE sehingga secara total OJK telah menerbitkan 5.406 perpanjangan izin dengan rincian 4.703 perpanjangan izin WPPE dan 703 perpanjangan izin WPEE.

Tabel I - 15 — Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

Jenis Izin	Triwulan IV-2017		Triwulan I-2018		Izin Total s/d Triwulan I-2018	Total
	Dokumen Pemberian Masuk	Izin	Dokumen Pemberian Masuk	Izin		
WPPE	100	80	131	46	46	4.703
WPEE	15	11	10	5	5	703
Total	115	91	141	51	51	5.406

Pada periode laporan, OJK menerima 122 dokumen perizinan dengan rincian 117 dokumen permohonan izin WPPEP dan lima permohonan WPPEPT. OJK juga menerbitkan 101 izin WPPEP dan tiga untuk izin WPPEPT. Sehingga sampai periode laporan total izin WPPEP sebanyak 539 dan WPPEPT sebanyak 66.

Tabel I - 16 — Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPEP) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPEPT)

Jenis Izin	Triwulan IV-2017		Triwulan I-2018		Izin Total s/d Triwulan I-2018	Total
	Dokumen Pemberian Masuk	Izin	Dokumen Pemberian Masuk	Izin		
WPPEP	196	229	117	101	101	539
WPPEPT	7	8	5	3	3	66
Total	203	237	122	104	104	605

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Pada periode laporan, kinerja Reksa Dana menunjukkan pertumbuhan cukup menggembirakan tercermin dari pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar Rp38,99 triliun (8,52% *qtq*) menjadi Rp496,50 triliun. NAB Reksa Dana Saham menunjukkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu Rp18,06 triliun (14,94% *qtq*), diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp14,52 triliun (13,50% *qtq*), Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp9,63 triliun (19,33% *qtq*), Reksa Dana Syariah sebesar Rp2,80 triliun (9,89% *qtq*), ETF sebesar Rp2,57 triliun (32,25% *qtq*), dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp1,00 triliun (25,06% *qtq*). Namun demikian, Reksa Dana Pasar Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Campuran masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp3,49 triliun (-3,25% *qtq*) dan Rp1,59 triliun (5,90% *qtq*).

Tabel I - 17 — Perkembangan Pengelolaan Investasi

dalam Rp triliun

NAB Per Jenis Reksa Dana	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
RD Pasar Uang	40,89	45,59	52,11	49,82	59,45
RD Pendapatan Tetap	76,54	83,44	91,43	107,55	104,06
RD Saham	109,73	108,16	115,23	120,85	138,91
RD Campuran	22,75	24,00	24,66	26,94	25,35
RD Terproteksi	88,86	94,29	99,27	107,55	122,07
RD Indeks	0,87	1,00	1,95	3,99	4,99
ETF	7,46	7,44	7,94	7,97	10,54
RD Syariah*	17,31	18,91	21,43	28,31	31,11
Total	364,42	382,84	414,03	457,51	496,50

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 1,47% menjadi Rp18,57 triliun pada triwulan I-2018 dan jumlah kontrak RDPT juga mengalami

peningkatan menjadi 55 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan I-2018 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

Tabel I - 18 — Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Transaksi	Triwulan I-2017			Triwulan IV-2017			Triwulan I-2018		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frekuensi (Kali)
Reksa Dana									
Jumlah	58,84	59,18	6.212	108,79	109,33	9.518	63,36	64,23	7.130
Total NAB	955,64	965,92	48.514	896,30	937,71	49.654	1.512,90	1.572,01	74.853
RDPT									
Jumlah	58,84	59,18	6.212	108,79	109,33	9.518	63,36	64,23	7.130
Total NAB	955,64	965,92	48.514	896,30	937,71	49.654	1.512,90	1.572,01	74.853
EBA									
Jumlah	58,84	59,18	6.212	108,79	109,33	9.518	63,36	64,23	7.130
Nilai Sekuritisasi	955,64	965,92	48.514	896,30	937,71	49.654	1.512,90	1.572,01	74.853
EBA-SP									
Jumlah	58,84	59,18	6.212	108,79	109,33	9.518	63,36	64,23	7.130
Nilai Sekuritisasi	955,64	965,92	48.514	896,30	937,71	49.654	1.512,90	1.572,01	74.853
Dire									
Jumlah	58,84	59,18	6.212	108,79	109,33	9.518	63,36	64,23	7.130
Total Nilai	955,64	965,92	48.514	896,30	937,71	49.654	1.512,90	1.572,01	74.853
KPD									
Jumlah	58,84	59,18	6.212	108,79	109,33	9.518	63,36	64,23	7.130
Total Nilai	955,64	965,92	48.514	896,30	937,71	49.654	1.512,90	1.572,01	74.853

*) dalam Rp trilliun

OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE), sehingga jumlah KIK-EBA tetap tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,59 triliun atau turun sebesar 5,59% dan jumlah KIK-DIRE tetap tiga KIK dengan dana kelolaan Rp0,59 triliun.

OJK menerbitkan satu izin baru Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP menjadi lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp4,11

triliun atau meningkat sebesar 84,30% dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I-2018, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan sebesar 2,60% menjadi Rp197,59 triliun. Namun demikian, jumlah kontrak KPD justru meningkat sebesar 7,09% menjadi 423 KPD. Sampai dengan triwulan I-2018, OJK menerbitkan 103 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 19 — Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah
Reksa Dana Saham	3
Reksa Dana Campuran	4
Reksa Dana Pendapatan Tetap	8
Reksa Dana Pasar Uang	10
Reksa Dana Terproteksi	64
Reksa Dana Indeks	3
ETF-Saham	2
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	2
Reksa Dana Syariah Saham	4
Reksa Dana Syariah Indeks	1
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	2
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total	103

OJK menerbitkan 28 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 27 Reksa Dana Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah dengan rincian sebagai berikut:

- 25 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 17 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan delapan Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Dua Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari satu

Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;

- Satu Reksa Dana Syariah Berbasis Efek luar negeri yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari.

Tabel I - 20 — Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Individu	2017				2018
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Wakil Manajer Investasi (WMI)	3.136	1.856	1.967	2.031	2.101
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	23.182	23.300	24.149	24.972	25.714
Penasehat Investasi (PI)	4	4	4	4	4
Institusi					
Manajer Investasi (MI)	85	87	87	90	90
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	32	34	35	36	36
Penasehat Investasi (PI)	3	3	3	4	4

Selama periode triwulan I-2018, OJK tidak memberikan izin kepada pelaku institusi pengelolaan investasi, sehingga jumlah MI, APERD dan PI Institusi masing-masing tetap berjumlah 90 MI, 36 APERD, dan empat PI institusi.

Adapun pelaku individu industri pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WAPERD sebesar 2,97% dan WMI sebesar 3,45% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan I-2018, secara umum jumlah dan nilai emisi Penawaran Umum mengalami penurunan masing-masing sebesar 5% dan 6% dibanding triwulan I-2017. Terdapat peningkatan jumlah dan nilai emisi Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 67% dan 37%. Jumlah emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tidak mengalami perubahan tetapi untuk nilai emisinya mengalami

peningkatan sebesar 21%. Sementara itu, untuk Penawaran Umum Terbatas mengalami penurunan jumlah dan nilai emisi dibandingkan triwulan I-2017 yaitu sebesar 167% dan 1.015%. Selama triwulan I-2018, jumlah Penawaran Umum sebanyak 22, terdiri dari enam Penawaran Umum Perdana Saham, tiga Penawaran Umum Terbatas, dan 13 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang.

Tabel I - 21 — Tabel Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I-2017		Triwulan I-2018		(% Jumlah Emisi	(% Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	2	571	6	900	67%	37%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	8	9.491	3	851	-167%	-1015%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	13	23.092	13	29.394	0%	21%
a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi	0	0	0	-	0%	0%
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap 1	1	500	2	1.500	50%	67%
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap 2, 3 dst	12	22.592	11	27.894	-9%	19%
Total Emisi	23	33.154	22	31.145	-5%	-6%

Tabel I - 22 — Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan I-2018

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1.	Perbankan	-	-	7.342.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	100.037	13.867.000
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-
4.	Perdagangan	41.400	-	3.233.500
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	206.372	-	-
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	-	-
7.	Properti dan Perhotelan	-	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	-	256.006	3.451.500
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-
11.	Aneka Industri Lainnya	81.302	-	-
12.	Industri Dasar	-	-	-
13.	Industri Logam	-	495.000	-
14.	Industri Kimia	411.016	-	-
15.	Agrobisnis	-	-	1.000.000
16.	Pertambangan dan Kehutanan	160.000	-	500.000
	Total	900.090	851.043	29.394.000

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan I-2018, terdapat 28 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak enam Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 22 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari enam Emiten tersebut sebesar Rp900 miliar.

Tabel I - 23 — Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	160.000.000.000
2	PT Jaya Trishindo Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	27.500.000.000
3	PT Sky Energy Indonesia Tbk	Aneka Industri Lainnya	81.302.400.000
4	PT Indah Prakasa Sentosa Tbk	Perdagangan	41.400.000.000
5	PT Tridomain Performance Material Tbk.	Industri Kimia	411.015.600.000
6	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia	Perhubungan dan Telekomunikasi	178.871.940.000
Total			900.089.940.00

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right issue*)

Selama triwulan I-2018, terdapat 13 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan tiga perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp851miliar.

Tabel I - 24 — Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi
1.	PT Surya Esa Perkasa Tbk	Industri Logam	495.000.000.000
2	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	256.006.008.000
3	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	100.037.237.500
Total			851.043.245.500

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama triwulan I-2018 terdapat dua Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan 11 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp29 triliun.

Tabel I - 25 — Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Emiten/Perusahaan Publik				
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi
1	PT Tunas Baru Lampung Tbk	Agrobisnis	PUB Obligasi I Tahap I	1.000.000.000.000
2	PT Medco Energi Internasional Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi III Tahap I	500.000.000.000
Total				1.500.000.000.000

Tabel I - 26 — Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

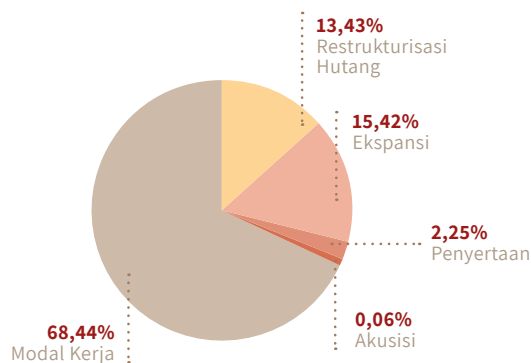
PUB Obligasi Tahap II dst				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Indomobil Finance Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	1.082.000.000.000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap VI	3.000.000.000.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap III	2.000.000.000.000
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap III	2.442.000.000.000
5	PT PLN (Persero)	Perdagangan	-PUB Obligasi II Tahap III -PUB Sukuk Ijarah II Tahap III	3.233.500.000.000
6	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi III Tahap II	3.451.500.000.000
7	PT Bank Panin Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap III	3.900.000.000.000
8	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap IV	2.165.000.000.000
9	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap II	1.000.000.000.000
10	PT Pegadaian (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	3.500.000.000.000
11	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	-PUB Obligasi IV Tahap II -Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II	2.120.000.000.000
Total				27.894.000.000.000

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan selama triwulan I-2018 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 68,44% atau sekitar Rp 21,2 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah

15,82% atau sekitar Rp4,9 triliun untuk ekspansi; 13,43% atau sekitar Rp 4,2 triliun untuk restrukturisasi hutang; 2,25% atau sekitar Rp 697,4 miliar untuk penyertaan; 0,06% atau sekitar Rp 19,7 miliar untuk akuisisi.

Grafik I - 34 — Rencana Penggunaan Dana



* Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

Tabel I - 27

Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan I-2018 Berdasarkan Sektor Industri

Dalam jutaan rupiah

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyer-taan	Akuisasi	Modal Kerja	Restruk-turisasi Hutang	Lain-Lain
1	Perbankan	-	-	-	7.314.053	-	-
2	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	11.404.296	2.538.880	-
3	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	-	-	-
4	Perdagangan	3.228.398	-	19.739	18.664	-	-
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	28.001	24.346	-	52.002	92.992	-
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
7	Properti dan Perhotelan	-	-	-	-	-	-
8	Real Estate dan Konstruksi	1.252.222	194.453	-	2.247.938	-	-
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10	Barang Konsumsi	-	-	-	-	-	-
11	Aneka Industri Lainnya	76.774	-	-	-	-	-
12	Industri Dasar	-	-	-	-	-	-
13	Industri Logam	-	478.602	-	13.686	-	-
14	Industri Kimia	220.543	-	-	180.444	-	-
15	Agrobisnis	-	-	-	-	990.000	-
16	Pertambangan dan Kehutanan	101.685	-	-	-	543.910	-
TOTAL		4.907.621	697.401	19.739	21.231.082	4.165.782	-

1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Perneringkat Efek

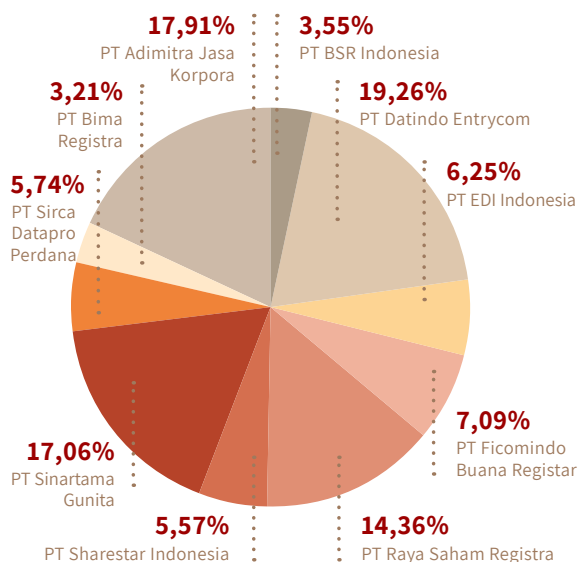
Selama periode triwulan I-2018, jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 28 — Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Jenis
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	20	20	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Perneringkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Grafik I - 35 — Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan I -2018

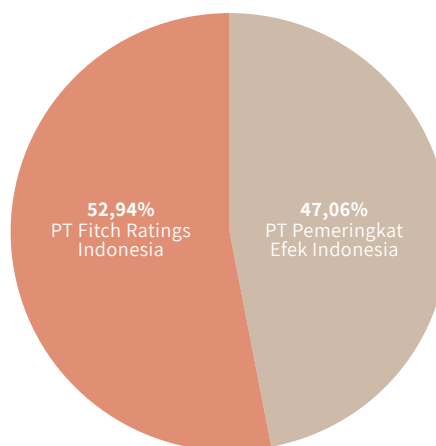


Berdasarkan jumlah klien, pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 19,26%, PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17,91%, PT Sinartama Gunita sebanyak 17,06% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT Bima Registra sebanyak 3,21%, diikuti oleh PT BSR Indonesia sebanyak 3,55% dan PT Sharestar Indonesia sebanyak 5,57%.

C. Perneringkat Efek

Sampai dengan triwulan I-2018, total perusahaan yang diperneringkat oleh dua Perneringkat Efek sebanyak 187 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperneringkat masing-masing Perneringkat Efek adalah PT Perneringkat Efek Indonesia sebanyak 88 Perusahaan dan PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 99 Perusahaan.

Grafik I - 36 — Pangsa Pasar Perusahaan Perneringkat Efek Triwulan I-2018



Dari 187 Perusahaan yang diperneringkat oleh Perusahaan Perneringkat Efek, sebanyak 177 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan 10 dalam kategori *Non Investment Grade*.

Tabel I - 29 — Komposisi Perneringkat Perusahaan Kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade*

Perneringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
PT Perneringkat Efek Indonesia	64	79	10	9
PT Fitch Ratings Indonesia	97	98	1	1
Total	161	177	11	10

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama triwulan I-2018, OJK menerbitkan 17 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan 11 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, terdiri dari:

a.	Akuntan	-
b.	Konsultan Hukum	10 STTD
c.	Penilai	5 STTD
d.	Notaris	2 STTD
e.	ASPM	11 Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan

Pada periode pelaporan, OJK menetapkan sebanyak 20 Keputusan Dewan Komisioner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:

a.	Akuntan	1 pembatalan STTD
b.	Konsultan Hukum	8 pembatalan STTD
c.	Penilai	-
d.	Notaris	11 pembatalan STTD
e.	ASPM	-

Pada periode pelaporan, OJK tidak menerima informasi mengenai Profesi yang meninggalkan dunia dan hanya menerima satu profesi Notaris yang melapor telah memasuki usia pensiun. Terdapat pula satu Penilai dan enam Penilai Pemerintah yang izinnya dicabut dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 30 — Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
Akuntan	594	593
Konsultan Hukum	724	726
Penilai	219	223
Notaris	1316	1306
Penilai Pemerintah	251	245
ASPM	62	73

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan empat Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Konsultan Hukum

Tabel I - 31 — Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum Selama Triwulan I-2018

No	Judul Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Sosialisasi Standar Profesi HKHPM yang Baru	100
2	Aspek Hukum Fintech di Pasar Modal & Penerapan GCG Bagi Konglomerasi Keuangan	90
3	Diklat Penawaran Umum Surat Berharga Komersial (SBK)	30

b. Penilai

Tabel I - 32 — Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai Selama Triwulan I-2018

No	Judul Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Update Temuan-Temuan pada Laporan Penilaian Properti dan Bisnis	50

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang triwulan I-2018, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menunjukkan perkembangan positif tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 1,03% (*qtq*) menjadi Rp2.192,46 triliun didukung kenaikan aset yang signifikan dari industri Asuransi Konvensional dan BPJS, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, dan Lembaga Pembiayaan.

Tabel I - 33 — Total Aset IKNB

Dalam triliun rupiah

No.	Industri	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	981,14	1.012,34	1.078,99	1.132,60	1.147,14
2	Dana Pensiun Konvensional	246,80	254,13	258,94	264,50	264,68
3	Lembaga Pembiayaan*)	517,73	534,02	538,28	556,99	560,27
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	193,95	199,41	201,67	207,66	211,99
5	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	6,83	8,26	8,26	8,05	8,05
6	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ***)	0,18	0,31	0,30	0,33	0,33
Total Aset		1.946,63	2.008,47	2.086,44	2.170,13	2.192,46

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah.

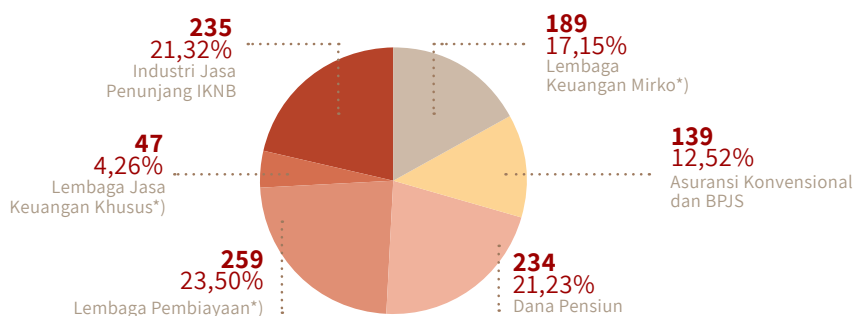
**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan I 2018 menggunakan data per Semester II 2017, data Triwulan III menggunakan data per Semester I 2017, dan data Triwulan I 2017 menggunakan data Semester II 2016.

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan I 2017 menggunakan data kuartal III 2016, Triwulan II 2017 menggunakan data kuartal I 2017, Triwulan III 2017 menggunakan data kuartal II 2017 dan Triwulan IV 2017 serta Triwulan I 2018 menggunakan data Kuartal III 2017.

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Pembiayaan merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 259 pelaku, diikuti oleh Industri

Jasa Penunjang IKNB dan Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional serta BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 37 ——— Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2018



*) Pelaku Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah.

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai dengan akhir periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 1,28% (*qtq*) menjadi Rp1.147,14 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan aset tersebut seiring dengan peningkatan jumlah investasi yang naik 1,3% (*qtq*) menjadi Rp984,67 triliun. Peningkatan investasi terbesar terdapat pada jenis investasi SBN dan Reksa Dana. Berdasarkan jenis industri Asuransi, maka kenaikan nilai investasi terbesar terjadi pada Asuransi Wajib dan Asuransi Sosial (BPJS) dengan total kenaikan investasi

sebesar Rp9,09 triliun. Peningkatan aset dan investasi industri Asuransi dan BPJS didukung oleh peningkatan kinerja industri di mana sisi pendapatan premi meningkat sebesar 23,78% (*yoy*) menjadi Rp106,59 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 46,5%, diikuti oleh BPJS sebesar 30,5%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 20,2%, serta Asuransi Wajib sebesar 2,7%.

Tabel I - 34 ——— Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	419,50	434,76	486,66	512,95	516,27
	Asuransi Umum dan Reasuransi	140,70	140,34	142,03	146,17	154,99
	Asuransi Wajib	123,01	124,36	126,15	132,40	131,12
	BPJS	297,93	312,89	324,16	341,09	344,76
	Jumlah	981,14	1.012,34	1.079,00	1.132,60	1.147,14
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	365,22	378,89	430,14	458,59	458,97
	Asuransi Umum dan Reasuransi	71,80	71,97	75,43	77,08	80,22
	Asuransi Wajib	102,60	103,52	106,13	111,90	116,77
	BPJS	276,52	295,65	307,92	324,50	328,72
	Jumlah	816,14	850,03	919,62	972,08	984,67
3	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	35,19	73,79	131,85	183,85	49,54
	Asuransi Umum dan Reasuransi	18,77	37,47	56,39	79,65	21,58
	Asuransi Wajib	2,88	5,74	8,79	11,90	2,92
	BPJS	29,26	61,60	95,13	130,49	32,55
	Jumlah	86,11	178,61	292,16	405,88	106,59
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	20,39	43,93	80,98	115,77	34,74
	Asuransi Umum dan Reasuransi	7,74	15,50	23,60	33,51	7,77
	Asuransi Wajib	2,64	5,21	8,53	11,79	3,33
	BPJS	25,70	52,63	80,11	109,81	31,60
	Jumlah	56,47	117,26	193,22	270,88	77,44
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	336,43	349,37	396,50	421,96	425,40
	Asuransi Umum dan Reasuransi	85,03	84,14	84,32	85,82	93,40
	Asuransi Wajib	99,05	100,24	101,79	105,49	104,90
	BPJS	40,37	44,78	49,23	51,20	57,42
	Jumlah	560,88	578,53	631,84	664,47	681,11

Tabel I - 35 — Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1	Deposito Berjangka	129,41	141,35	138,89	133,08	117,20
2	Sertifikat Deposito	-	-	1,86	0,33	0,32
3	Saham	177,75	181,30	201,02	216,96	214,85
4	Obligasi	101,15	105,10	107,79	111,13	109,67
5	MTN	-	-	1,32	1,95	2,36
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	231,79	240,03	247,87	246,40	264,87
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	0,83	0,86	0,90	0,88	0,86
8	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-
9	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	0,01	0,01	-	0,02
10	Reksa Dana	144,70	150,54	185,47	225,81	236,41
11	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	1,16	1,49	2,71	2,56	2,93
12	Dana Investasi Real Estat	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20
13	REPO	-	-	-	-	-
14	Penyertaan Langsung	13,67	13,74	14,06	15,24	16,31
15	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	13,58	13,49	13,57	13,90	14,88
16	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	0,34	0,39	0,45	0,58	0,50
17	Emas Murni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	0,18	0,18	0,17	0,17	0,24
19	Pinjaman Polis	-	-	2,02	1,97	2,03
20	Investasi Lain	1,40	1,34	1,31	0,90	1,03
	Total	816,14	850,03	919,62	919,62	972,08

Terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (26,9%), Reksa dana (24,0%), Saham (21,8%) dan Deposito Berjangka (11,9%).

Pada periode laporan terdapat perubahan jumlah pelaku dibanding triwulan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 36 — Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	28	28	30	30	30
	c. Patungan	23	23	23	23	22
	Sub Total	52	52	54	54	53
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	2	2	2	2	2
	b. Swasta Nasional	51	51	50	50	50
	c. Patungan	23	23	23	22	22
	Sub Total	76	76	75	74	74
3	Reasuransi	5	5	6	6	6
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	138	138	140	139	138

Tabel I - 37 — Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
GDP (miliar Rupiah)	12.406.800	12.406.800	12.406.800	13.588.797	13.588.797
Premi Bruto (miliar Rupiah)	335.199	340.656	371.139	385.809	405.234
Jumlah Penduduk (juta)	257	257	257	257	257
Penetrasi	2,70%	2,75%	2,99%	2,84%	2,98%
Densitas (ribu Rupiah)	1.304,28	1.325,51	1.444,12	1.501,20	1.576,79

Catatan:

1. Angka Premi Bruto merupakan premi per Maret 2018 disetahunkan
2. Angka GDP merupakan GDP per TRIWULAN 4 2017 berdasarkan press release BPS tanggal 5 Februari 2018.
3. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html>
4. Penetrasi: Premi Bruto/GDP
5. Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi naik sebesar 5,03% menjadi Rp1.576.790 per tahun. Adapun tingkat

penetrasi asuransi juga meningkat sebesar 0,14% yaitu sebesar 2,98%

Tabel I - 38 — RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
Asuransi Jiwa	428,8%	414,0%	491,5%	521,0%	480,6%
Asuransi Umum dan Reasuransi	279,7%	278,6%	294,1%	321,0%	321,9%

Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 480,6%, atau turun 40,4% dibanding periode sebelumnya tetapi masih pada batas

ketentuan minimal 120%. Sementara itu, untuk RBC Asuransi Umum, mengalami peningkatan sebesar 0,9% menjadi 321,9% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Sampai dengan periode laporan, terjadi peningkatan aset Dana Pensiun sebesar 1,4% (qtq) menjadi Rp264,68 triliun.

Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebanyak 1,0% (qtq) menjadi Rp257,02 triliun.

Tabel I - 39 — Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

Dalam triliun rupiah

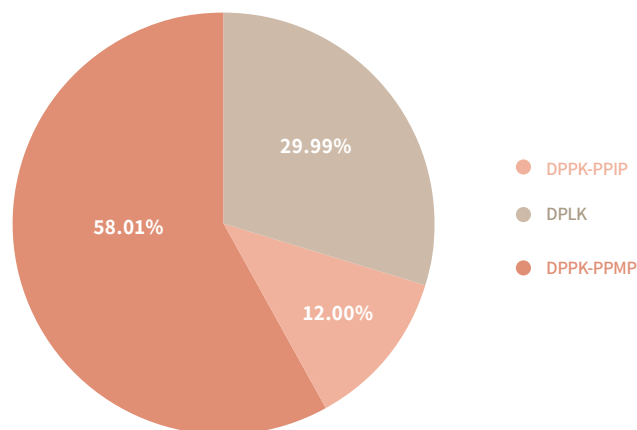
Jenis Program	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
DPPK-PPMP	150,49	152,65	152,37	154,50	154,60
Growth	1,81%	1,44%	-0,19%	1,40%	0,07%
DPPK-PPIP	27,45	28,34	30,91	30,95	31,55
Growth	3,00%	3,23%	9,08%	0,15%	1,94%
DPLK	68,86	73,14	75,66	75,50	78,53
Growth	7,86%	6,21%	3,45%	-0,21%	4,01%
Total Aset	246,80	254,13	258,94	260,96	264,68
Growth	3,57%	2,97%	1,9%	0,8%	1,4%

Tabel I - 40 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

Dalam triliun rupiah

Jenis Program	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
DPPK-PPMP	145,04	146,19	146,73	149,61	149,10
Growth	3,70%	0,80%	0,37%	1,96%	-0,34%
DPPK-PIIP	26,82	27,49	30,20	30,36	30,84
Growth	2,87%	2,49%	9,88%	0,53%	1,58%
DPLK	67,44	71,62	74,59	74,52	77,08
Growth	6,19%	4,16%	-0,10%	7,34%	3,44%
Total Aset	239,30	245,30	251,52	254,48	257,02
Growth	2,51%	2,5%	1,2%	4,60%	1,0%

Grafik I - 38 — Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan I 2018



Tabel I - 41 — Portofolio Investasi Dana Pensiun

Dalam triliun rupiah

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1	Surat Berharga Negara	56,10	57,08	57,70	58,36	58,46
2	Tabungan	0,21	0,19	0,57	0,29	0,68
3	Deposito On Call	1,71	2,04	1,25	1,17	1,47
4	Deposito Berjangka	62,80	65,59	68,34	67,00	66,27
5	Sertifikat Deposito	1,51	1,56	1,57	1,59	1,42
6	Sertifikat Bank Indonesia	0,004	-	-	-	0,05
7	Saham	29,93	30,29	29,60	31,61	31,14
8	Obligasi	48,54	49,18	51,55	52,70	54,15
9	Sukuk	2,12	2,37	2,61	3,02	3,32
10	Unit Penyertaan Reksa Dana	14,50	14,59	15,07	15,92	16,07
11	Medium Term Note	0,13	0,19	0,12	0,20	0,16
12	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,49	0,56	1,20	1,14	1,14
13	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
14	Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-
15	Repurchase Agreement	-	-	-	-	-
16	Penempatan Langsung pada Saham	7,60	7,77	7,77	8,18	8,55
17	Tanah	4,69	4,75	4,85	4,71	4,82
18	Bangunan	2,08	2,10	2,12	1,98	2,11
19	Tanah dan Bangunan	6,76	6,91	7,06	6,48	7,09
	Total	239,30	245,30	251,52	254,48	257,02

Empat jenis investasi Dana Pensiun yang memiliki proporsi terbesar yaitu SBN (22,75%), deposito berjangka (25,78%), obligasi (21,07%), dan saham (12,12%). Selanjutnya, jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode laporan adalah 234 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 42 — Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
DPPK PPMP	177	175	171	169	167
DPPK PPIP	43	43	43	44	44
DPLK	25	24	24	23	23
Jumlah	245	242	238	236	234

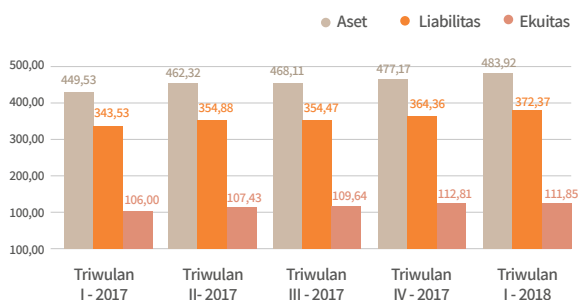
Selama periode triwulan I-2018, terdapat dua pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti, yaitu DPPK-PPMP Multi Bintang Indonesia dan DPPK-PPMP Aventis Pharma.

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,42% (*qtq*) dan 2,20% (*qtq*). Sementara itu, Ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar 1,12% (*qtq*).

Grafik I - 39 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

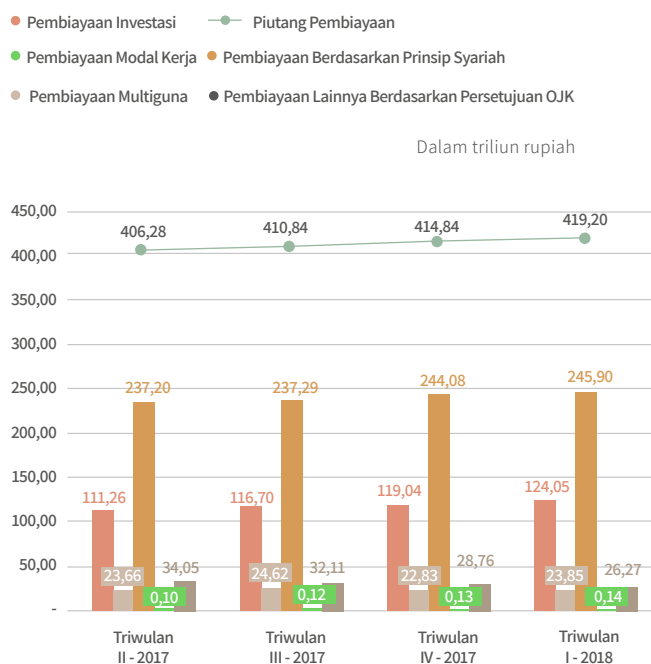
B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode pelaporan terdapat empat pencabutan izin Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan I-2018 menjadi 191 perusahaan. Berdasarkan total aset, 72 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 91% sedangkan 119 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 9%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp4,31 triliun atau 1,05% (*i*), dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 58,66% dan 29,59%. Berdasarkan proporsi pembiayaan yang disalurkan menurut sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 77,09% (Rp335,16 triliun).

Grafik I - 40 — Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)



Catatan: Data termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 43 — Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

Dalam triliun rupiah

No	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha		250,79	315,30	320,26	331,67	335,16
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,77	19,00	19,12	20,40	20,17
2	Pertambangan dan Pengalihan	20,11	22,24	22,97	23,74	24,65
3	Industri Pengolahan	32,42	35,71	36,39	38,34	39,88
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	23,77	21,21	22,07	19,26	21,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,31	0,33	0,34	0,35	0,35
6	Konstruksi	11,39	12,90	13,61	14,50	14,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	46,61	65,47	68,18	71,82	69,37
8	Transportasi dan Pergudangan	20,95	24,10	25,04	26,25	27,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,37	9,84	10,02	9,85	9,93
10	Informasi dan Komunikasi	3,07	4,04	3,57	3,55	3,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,84	4,27	4,14	4,35	4,44
12	Real Estate	1,80	1,91	1,83	1,83	2,04
13	Jasa profesional, Ilmiah dan Teknis	1,57	2,44	2,41	2,62	2,48
14	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	23,96	36,88	37,30	39,23	40,63
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,57	6,90	6,94	7,18	7,01
16	Jasa Pendidikan	3,17	4,37	4,71	4,84	4,73
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,17	9,01	9,27	9,41	9,28
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,43	2,05	2,04	2,13	2,22
19	Kegiatan Jasa Lainnya	16,95	22,90	20,81	22,05	20,58
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	9,56	9,72	9,48	9,90	9,48
21	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,06	0,07
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha		157,15	104,61	104,34	97,87	99,58
1	Rumah Tangga	52,75	58,46	56,61	61,45	61,55
2	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	104,39	46,15	47,73	36,42	38,03
Jumlah		407,93	419,91	424,60	429,54	434,74

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan masih tergolong baik dengan rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) yang masih terjaga pada rasio 86,63% atau masih dalam batas ketentuan, yaitu minimum 40%, kualitas piutang

pembiayaan (NPF) masih berada pada level 3,25% atau dalam batas ketentuan (maksimal 5%) dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 3,08 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali).

Tabel I - 44 — Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Indikator	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
FAR (%)	87,91%	87,88%	87,77%	86,94%	86,63%
NPF (%)	3,16%	3,47%	3,18%	2,96%	3,25%
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	2,98	3,05	3,00	2,99	3,08

Tabel I - 45 — NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha		3,79%	3,49%	3,20%	3,10%	3,36%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,53%	2,46%	2,22%	1,87%	2,18%
2	Pertambangan dan Penggalian	7,65%	7,17%	6,75%	6,22%	5,36%
3	Industri Pengolahan	2,59%	2,44%	2,38%	2,04%	2,08%
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,03%	0,04%	0,11%	0,13%	0,12%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2,69%	2,19%	1,96%	1,98%	1,78%
6	Konstruksi	3,64%	3,01%	3,13%	2,95%	2,84%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,14%	2,30%	1,76%	2,35%	3,59%
8	Transportasi dan Pergudangan	15,09%	14,01%	13,32%	12,27%	12,00%
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8,46%	5,28%	5,00%	5,10%	5,11%
10	Informasi dan Komunikasi	1,49%	5,10%	6,52%	1,18%	0,86%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68%	1,81%	1,54%	3,04%	2,78%
12	<i>Real Estate</i>	4,50%	4,49%	3,72%	3,61%	4,02%
13	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	2,51%	2,26%	1,55%	1,57%	2,49%
14	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2,62%	1,99%	1,73%	1,53%	1,69%
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,05%	1,88%	1,34%	1,35%	1,51%
16	Jasa Pendidikan	1,88%	1,93%	1,39%	1,30%	1,58%
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,13%	2,51%	1,60%	1,67%	1,68%
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1,66%	1,13%	1,40%	1,20%	0,92%
19	Kegiatan Jasa Lainnya	2,40%	2,05%	1,72%	1,59%	1,75%
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	1,58%	1,81%	1,89%	1,79%	1,87%
21	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,07%	2,66%	0,64%	1,13%	0,86%
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha		2,15%	3,40%	3,12%	2,48%	2,89%
1	Rumah Tangga	2,12%	2,37%	2,30%	2,17%	2,15%
2	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,16%	4,71%	4,09%	3,01%	4,08%
Jumlah		3,16%	3,47%	3,18%	2,96%	3,25%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan, laba bersih industri perusahaan pembiayaan juga mengalami kenaikan sebesar 20,56% menjadi Rp3,74 triliun pada triwulan I-2018.

F. Jenis Valuta Pinjaman

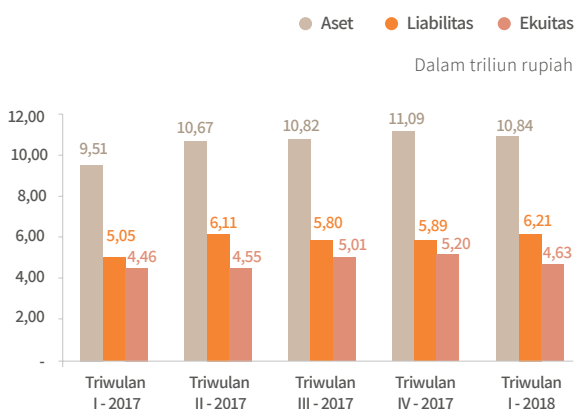
Jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp270,96 triliun. Dari jumlah pinjaman, Rp270,96 triliun yang diterima perusahaan pembiayaan pada triwulan I-2018, sebesar 53,65% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 36,91%, dan Yen Jepang 9,45%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total liabilitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 5,40% (*qtq*) menjadi Rp6,21 triliun. Sementara itu, total aset dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,29% (*qtq*) dan 11,00% (*qtq*) menjadi Rp10,84 triliun dan Rp4,63 triliun.

Grafik I - 41 — Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

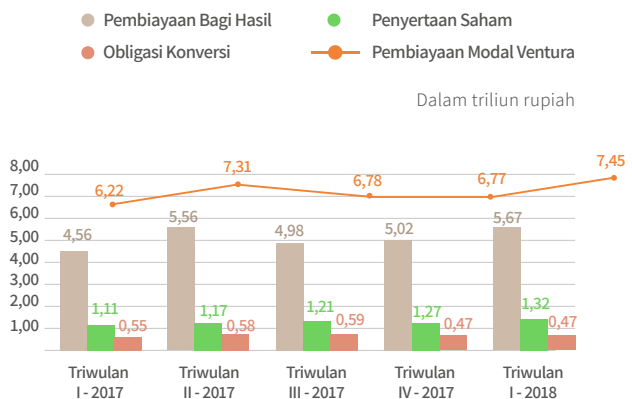
Sampai dengan triwulan I-2018, jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah 66 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 10,01% (*qtq*) menjadi Rp7,45 triliun dengan proporsi pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 76,01% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp5,67

triliun. Sementara itu, berdasarkan jenis sektor ekonomi, sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi keseluruhan total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp 3,36 triliun atau dengan proporsi sebesar 44,66%.

Grafik I - 42 — Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal



Catatan: Data termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel I - 46 — Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi

Dalam miliar rupiah

No	Sektor Ekonomi	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	727	766	730	742	761
2	Pertambangan	538	980	602	463	481
3	Perindustrian	528	575	552	554	526
4	Konstruksi	498	516	493	436	422
5	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	2.874	3.276	3.037	3.094	3.362
6	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	168	159	153	153	142
7	Jasa Pendukung Bisnis	375	422	537	578	770
8	Jasa Sosial dan Masyarakat	138	160	155	163	174
9	Lain-Lain	549	633	701	787	889
	Jumlah	6.397	7.488	6.960	6.970	7.528

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 92,34%, 68,73%, 2,13%, 3,27%.

- Penurunan BOPO dari 92,46% pada triwulan IV-2017 menjadi 92,34% pada triwulan I-2018 menunjukkan adanya kenaikan efisiensi dalam pengelolaan operasional Perusahaan Modal Ventura.
- Terjadi kenaikan IFAR dari 61,05% pada triwulan

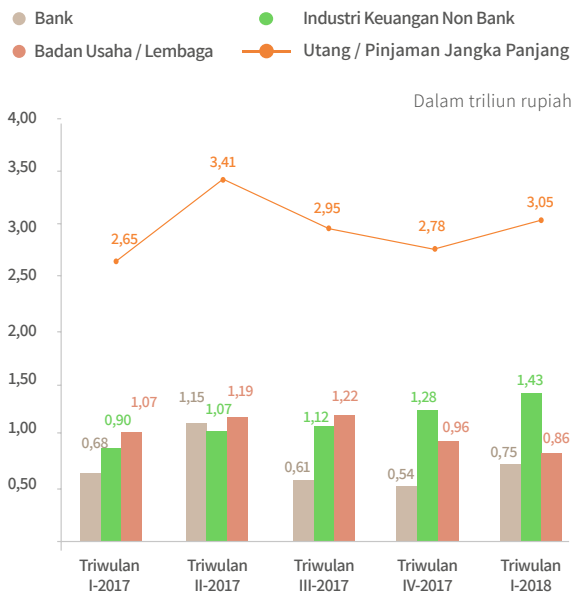
IV-2017 menjadi 68,73% pada triwulan I-2018 disebabkan kenaikan jumlah pembiayaan/penyertaan sebesar 10,01% atau dari Rp6,77 triliun menjadi Rp7,45 triliun.

- c. ROA mengalami kenaikan dari 1,92% pada triwulan IV-2017 menjadi 2,13% pada triwulan I-2018.

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan I-2018 adalah sebesar Rp3,05 triliun atau naik sebesar 9,49% dibandingkan triwulan sebelumnya.

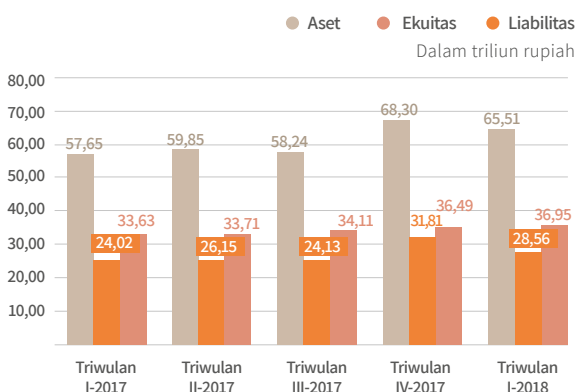
Grafik I - 43 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp65,51 triliun dan total liabilitas sebesar Rp28,56 triliun pada triwulan I-2018. Total aset mengalami penurunan sebesar 4,08% (qtq). Pinjaman yang diberikan juga mengalami penurunan sebesar 2,56% (qtq) menjadi Rp38,58 triliun.

Grafik I - 44 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas



Tabel I - 47 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

Dalam triliun rupiah

Jenis Infrastruktur	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
Air Minum	0,32	0,45	0,31	0,62	0,84
Jalan	8,08	7,53	8,15	9,07	8,76
Ketenagalistrikan	12,98	13,44	13,06	15,54	15,28
Lainnya	6,94	6,07	4,64	4,48	4,13
Minyak dan Gas Bumi	3,18	3,17	3,20	3,19	3,15
Telekomunikasi	1,53	2,31	2,11	2,25	1,95
Transportasi	5,45	3,18	4,36	4,43	4,46
Jumlah	38,47	36,15	35,83	39,59	38,58

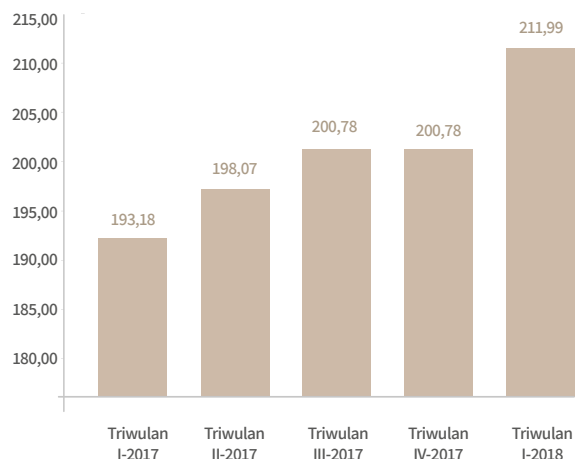
Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK naik 2,51% (qtq) menjadi Rp211,99 triliun.

Grafik I - 45 Pertumbuhan Aset LJKK

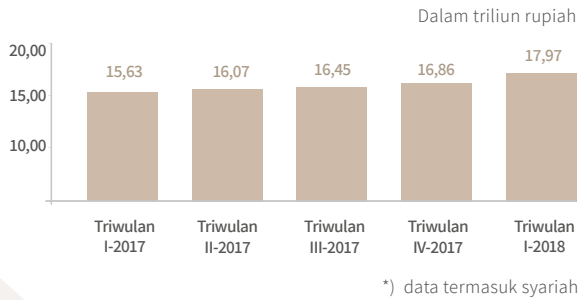
Dalam triliun rupiah



A. Perusahaan Penjaminan

Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 6,60% (*qtq*) menjadi Rp17,97 triliun.

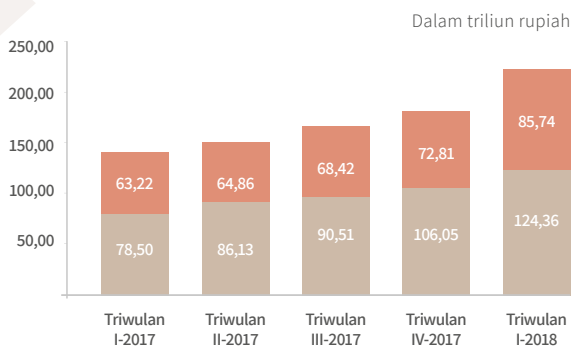
Grafik I - 46 — Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



Outstanding penjaminan selama triwulan I-2018 naik 17,46% menjadi Rp210,10 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh nilai *outstanding* usaha produktif dan non produktif yang masing-masing meningkat sebesar 17,26% dan 17,76% dibanding dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

Grafik I - 47 — Outstanding Penjaminan

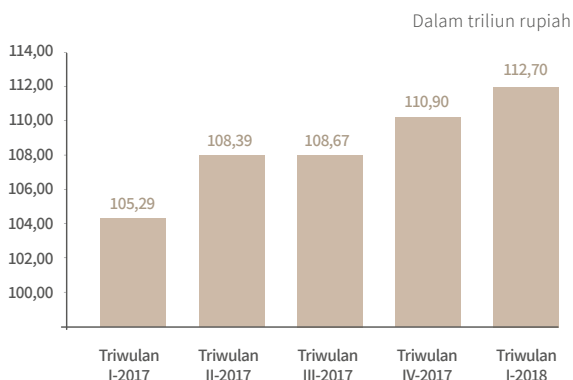
- Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif
- Outstanding Penjaminan - Usaha Non - Produktif



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

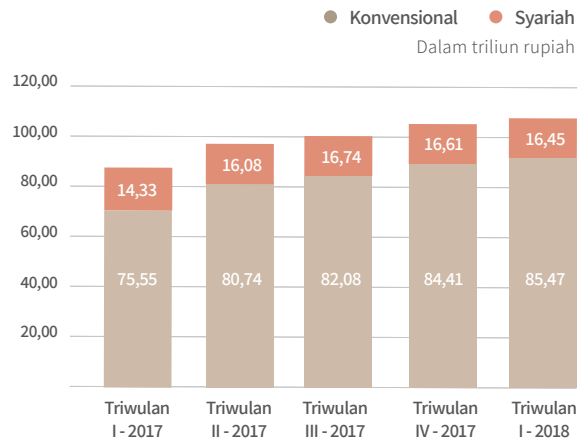
Total aset LPEI naik 1,63% (*qtq*), dari Rp110,90 triliun menjadi Rp112,70 triliun.

Grafik I - 48 — Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Kenaikan aset tersebut seiring dengan naiknya penyaluran pembiayaan dan piutang yang dilakukan oleh LPEI. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp101,92 triliun atau naik 0,89% (*qtq*). Kenaikan tersebut terdiri dari naiknya pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar 1,26% (*qtq*). Sementara itu, piutang melalui sistem syariah turun 0,99% (*qtq*)

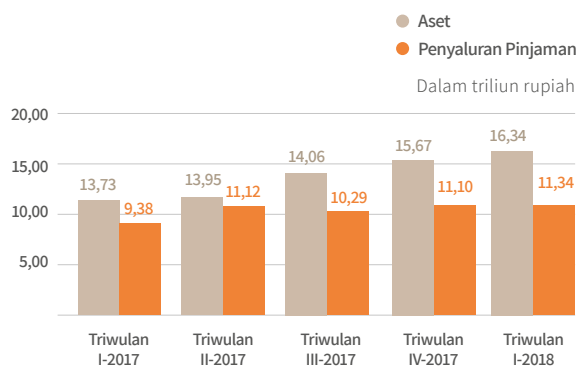
Grafik I - 49 — Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan I-2018 naik 4,28% (*qtq*) menjadi Rp16,34 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan kenaikan nilai pinjaman yang disalurkan yang mengalami kenaikan sebesar 2,14% (*qtq*) menjadi Rp11,34 triliun.

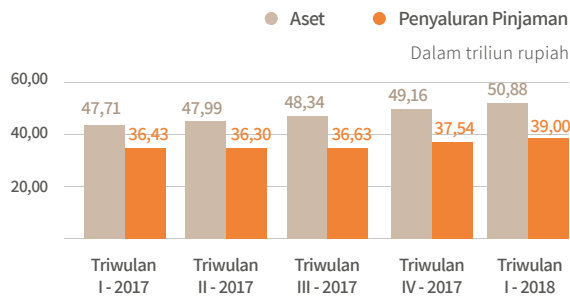
Grafik I - 50 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan I-2018, terdapat 12 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri (11 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan satu perusahaan pergadaian swasta syariah) serta tujuh perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK (enam perusahaan pergadaian swasta konvensional dan satu perusahaan pergadaian swasta syariah). Pada periode laporan, total aset pergadaian tercatat naik 3,49% menjadi Rp50,88 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan I-2018 sebesar Rp39,00 triliun, atau naik 3,88% dibandingkan triwulan sebelumnya.

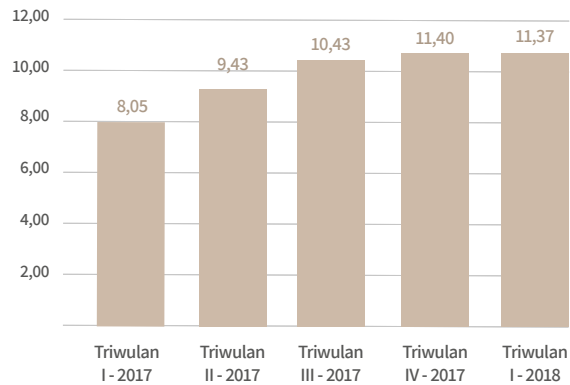
Grafik I - 51 — Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian



E. PT PNM (Persero)

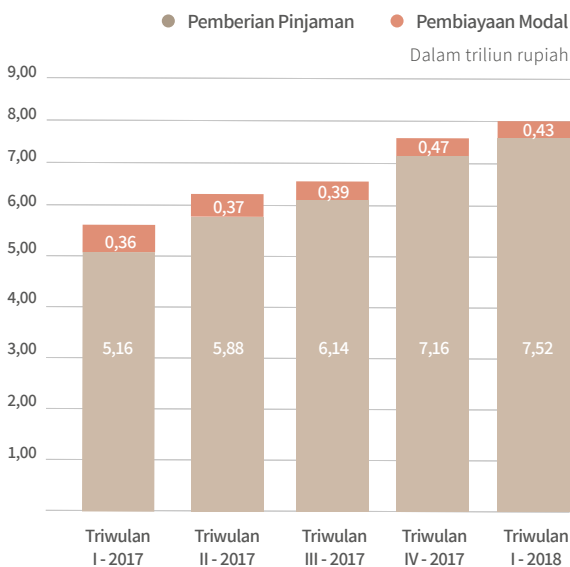
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Aset PNM pada periode laporan tercatat sebesar Rp11,37 triliun, turun 0,20% (qtq).

Grafik I - 52 — Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



Pada triwulan I-2018, pemberian pinjaman mengalami kenaikan sebesar 4,98% (qtq) sedangkan pemberian modal mengalami penurunan sebesar 7,87% (qtq)

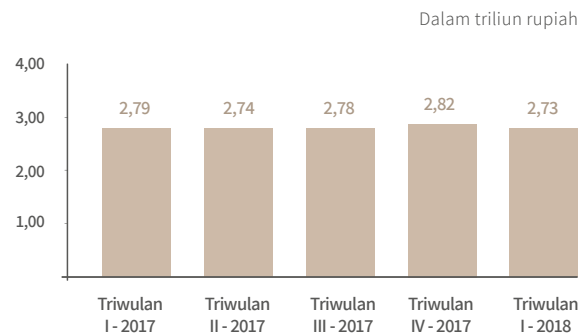
Grafik I - 53 — Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)



F. PT Danareksa (Persero)

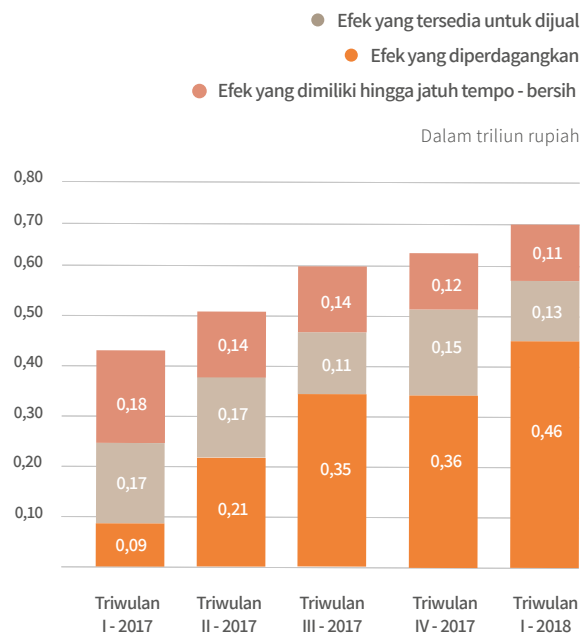
Aset PT Danareksa pada triwulan I-2018 sebesar Rp2,73 triliun, turun 2,85% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 54 — Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total portofolio efek PT Danareksa pada triwulan I-2018 tercatat sebesar Rp0,70 triliun, naik 10,52% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 55 — Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester II-2017 menurun 2,54% menjadi Rp8,05 triliun dibandingkan semester sebelumnya. Pendapatan jasa keperantaraan mengalami kenaikan 107,61% menjadi Rp1,91 triliun dibandingkan semester sebelumnya.

Tabel I - 48 — Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Dalam triliun rupiah

No	Jenis Indikator	Semester I-2016	Semester II-2016	Semester I-2017	Semester II-2017
1	Aset	7,25	7,30	8,26	8,05
2	Liabilitas	5,12	5,00	5,78	5,64
3	Modal Sendiri	2,13	2,30	5,06	2,41
4	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,06	1,11	0,92	1,91
5	Laba/(Rugi)	0,26	0,21	0,21	0,57

*) Menggunakan data semester II 2017 karena laporan periodik Jasa Penunjang adalah semesteran.

Selama periode pelaporan, terdapat pencabutan izin kepada lima Perusahaan Pialang Asuransi IKNB dan dua izin baru Perusahaan Pialang Asuransi sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 235 perusahaan.

Tabel I - 49 — Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No	Jenis Perusahaan	Triwulan I - 2017	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017	Triwulan IV - 2017	Triwulan I - 2018
1	Pialang Asuransi	169	169	169	168	165
2	Pialang Reasuransi	40	42	42	43	43
3	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	27	27
Jumlah		236	238	238	238	235

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan I-2018 adalah sebanyak 189 LKM dengan 152 LKM Konvensional dan 37 full syariah. Total aset LKM Konvensional sesuai dengan laporan triwulan III-2017 adalah sebesar Rp332,95 miliar.

Grafik I - 50 — Jumlah LKM

No	Jenis Badan Usaha	Triwulan I - 2017	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017
Konvensional				
1	Koperasi PT	125 17	129 18	132 19
Syariah				
2	Koperasi PT	17 0	18 0	29 0
Jumlah		159	165	180

Tabel I - 51 — Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

No	Jenis Indikator	Triwulan I - 2017	Triwulan II - 2017	Triwulan III - 2017
1	Aset	308,64	304,77	332,95
2	Liabilitas	192,72	191,30	214,11
3	Ekuitas	115,92	113,47	118,84
4	Pinjaman Yang Diberikan	247,17	246,75	264,98
5	Simpanan/ Tabungan	165,39	160,30	186,76

*data Triwulan I-2018 menggunakan data laporan triwulan III-2017

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology)

Jumlah Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*) yang terdaftar sampai dengan periode triwulan I-2018 sebanyak 40 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp4.472 triliun atau naik 74,45% dari periode sebelumnya sebesar Rp2.563 triliun.

Tabel I - 52 ——— Perkembangan Industri Fintech
(Peer To Peer Lending)

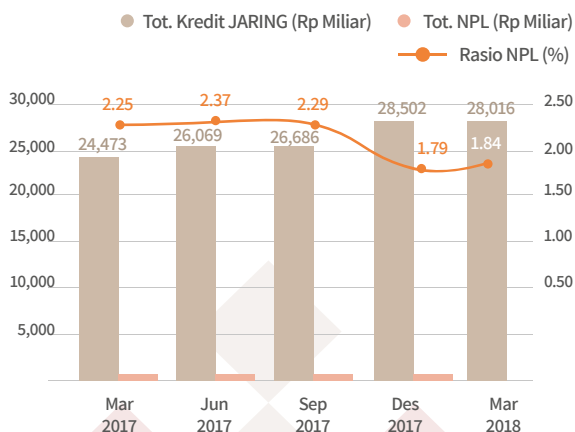
No	Jenis Indikator	Triwulan III - 2017	Triwulan IV - 2017	Triwulan I - 2018
1	Jumlah Penyelenggara Terdaftar	22	29	39
2	Jumlah Pemberi Pinjaman	63.867	100.940	145.965
3	Jumlah Penerima	119.857	259.635	1.032.776
4	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (triliun Rp)	1,6	2,5	4,5

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS OJK

1.5.1 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Pada triwulan I-2018, penyaluran kredit program JARING tumbuh 15,70% (yoy) atau 4,98% (qtq) menjadi Rp28,02 triliun. Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun demikian meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (12,52%, yoy). Sebagian besar kredit JARING masih diserap oleh subsektor industri hilir (Pengolahan dan Perdagangan). Peningkatan kredit JARING didorong oleh meningkatnya kredit pada hampir semua subsektor kegiatan usaha perikanan utamanya subsektor jasa sarana produksi dan budidaya yang tumbuh tertinggi masing-masing 29,14% (yoy) dan 23,79% (yoy). Sementara itu, kredit subsektor penangkapan turun 6,17% (yoy) yang antara lain dipengaruhi oleh faktor musiman awal tahun dan adanya pelunasan kredit. Kualitas kredit JARING juga meningkat tercermin dari NPL gross yang turun dari 2,25% pada tahun sebelumnya menjadi 1,84%. Perbaikan kualitas kredit terjadi pada semua subsektor perikanan terutama pada jasa sarana produksi dan budidaya seiring dengan meningkatnya kredit pada kedua subsektor tersebut.

Grafik I - 56 ——— Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK, Maret 2018

Tabel I - 53 ——— NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

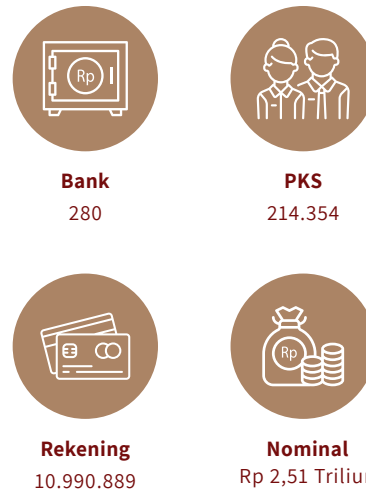
Kegiatan Usaha	2017		2018
	Mar	Des	Mar
Penangkapan	3,33	3,00	3,06
Budidaya	2,41	1,70	1,44
Jasa Sarana Produksi	5,56	5,83	4,40
Industri Pengolahan	0,83	0,23	0,38
Perdagangan	2,51	1,79	1,84
NPL Jaring	2,51	2,51	2,51

Sumber: OJK, Maret 2018

1.5.2 Simpanan Pelajar (SIMPEL)

SimPel/SimPel iB merupakan program yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Program ini diikuti oleh 280 bank yang terdiri dari Bank Umum, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS), dengan perkembangan sebagai berikut:

Grafik I - 57 ——— Simpanan Pelajar (SIMPEL)



Dalam rangka mengkampanyekan serta mengenalkan program SimPel/SimPel iB kepada industri perbankan, pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS) di beberapa wilayah dengan jumlah BPR/BPRS terbesar yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat dan Bali.

A. Sosialisasi SimPel/SimPel iB kepada BPR/BPRS di Sumatera Barat

Pelaksanaan sosialisasi model generik SimPel/SimPel iB kepada BPR/BPRS di Kota Padang, Sumatera Barat diikuti oleh 68 perwakilan BPR/BPRS dan Perwakilan Perbarindo Sumatera Barat. Dalam kegiatan sosialisasi

dimaksud, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat, dicanangkan hari Rabu pada pekan pertama setiap bulannya sebagai Hari Menabung Pelajar Sumatera Barat sehingga diharapkan dapat menjadi dasar bagi BPR/BPRS untuk dapat semakin mengembangkan tabungan pelajar, baik eksisting ataupun SimPel/SimPel iB.

B. Sosialisasi SimPel/SimPel iB kepada BPR/BPRS di Jawa Barat

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diikuti oleh 39 orang yang terdiri dari Perwakilan Perbarindo serta industri perbankan khususnya BPR/BPRS yang belum menjadi bank peserta SimPel/SimPel iB di wilayah Jawa Barat. Dalam kegiatan sosialisasi dimaksud, diketahui bahwa jumlah BPR/BPRS di wilayah Jawa Barat yang tercatat sebagai bank peserta SimPel/SimPel iB yaitu sebanyak empat bank. BPR/BPRS yang telah menjadi peserta tersebut biasanya melakukan kunjungan ke sekolah setiap minggu

1.5.3 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

Berbagai inisiatif diluncurkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan pada sektor infrastruktur melalui pasar modal, di antaranya:

- a. **Emiten sektor infrastruktur**
 - Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik, maka diharapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan semakin baik. Saat ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
 - Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memperoleh dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Perusahaan dapat memperoleh dana dari pasar modal dengan melakukan antara lain penjualan saham, penerbitan obligasi atau sukuk. Selama triwulan I-2018 terdapat Penawaran Umum Emiten di sektor infrastruktur sebesar Rp 6,7 triliun.
- b. **Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)**
 - Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor.
 - Selama periode laporan OJK, menerbitkan satu izin baru Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP menjadi lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar

Rp4,11 triliun atau meningkat sebesar 84,30% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

- c. **KIK EBA**
 - Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
 - Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), sehingga jumlah KIK-EBA tetap tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,59 triliun atau turun sebesar 5,59%
- d. **Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil**
 - Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil.
 - Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 1,47% menjadi Rp18,57 triliun pada triwulan I-2018. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami peningkatan menjadi 55 RDPT dari sebelumnya 54 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan I-2018 merupakan RDPT yang berbasis proyek.
- e. **Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE)**
 - Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas.
 - Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun surat pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE), sehingga jumlah KIK-DIRE tetap tiga KIK dengan dana kelolaan Rp0,59 triliun.

1.5.4 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona

risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AOTP.

AOTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AOTP 80 % ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AOTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan I-2018, jumlah total lahan klaim pertanian yang terdaftar per Maret 2018 adalah 4.016,85 ha dengan nilai klaim berjalan Rp24.101.071.949,70.

1.5.5 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan inklusif (LAKU PANDAI)

Pada triwulan I-2018, terdapat tambahan satu bank umum yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sehingga secara total bank penyelenggara Laku Pandai berjumlah 28 bank, yang terdiri dari 26 BUK (termasuk 13 BPD) dan dua BUS.

Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan I-2018 mencapai 779.919 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah nominal dan nasabah tabungan berkarakteristik basic saving account (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1,75 Triliun dan 19.294.764 nasabah. Nominal tabungan BSA tersebut tumbuh 69,90% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,03 Triliun, yang dipengaruhi oleh adanya penarikan dana bantuan melalui program Bansos Non Tunai serta penambahan jumlah nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah Bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Peningkatan jumlah nasabah dan nominal terkait dengan perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai oleh Kementerian Sosial melalui 4 Bank Himbara

Tabel I - 54 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2018

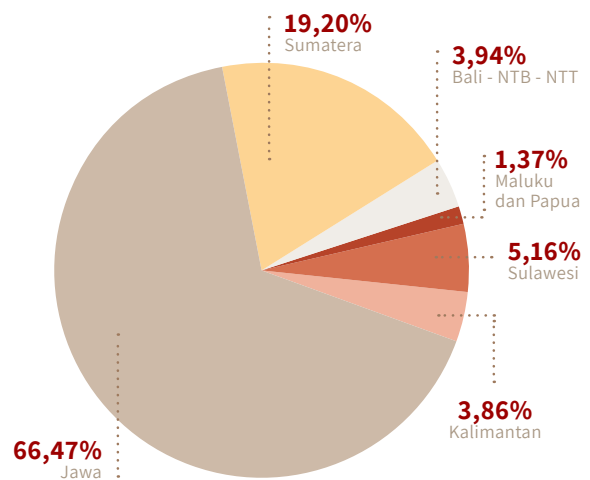
Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
757.420	22.499

Nasabah BSA	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabunan BSA
19.294.764	Rp 1,75 Triliun

Sumber: OJK

Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa (66,47%) dan Sumatera (19,20%), dan sisanya sebesar 14,33% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran nasabah BSA yang sebagian besar berada di pulau Jawa (71,84%) dan Sumatera (14,89%), sementara sisanya sebesar 13,27% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Grafik I - 58 Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan I-2018



Sumber: OJK

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai saat ini telah terdapat satu bank yang memiliki agen yang dapat melayani pengajuan kredit mikro berupa KUR Mikro dan pembelian asuransi mikro, sementara beberapa bank lainnya sedang dalam tahap persiapan untuk dapat memasarkan kredit mikro dan asuransi mikro melalui agen Laku Pandai.

Selain didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemerintah (Bantuan Sosial Non Tunai dan Inklusi Zakat/zakat inclusion), agen Laku Pandai dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan ekosistem ekonomi digital. Terkait hal ini, beberapa bank penyelenggara akan bekerjasama dengan perusahaan e-commerce/marketplace. Pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai : 8 bank Penyelenggara Laku Pandai turut serta dalam program Baznas yaitu "Zakat Inclusion", saat ini Baznas dan masing-masing bank sedang melakukan pengembangan sistem untuk mendukung penyaluran zakat melalui agen Laku Pandai. Selain itu, tiga bank telah dapat menyalurkan kredit mikro melalui agen Laku Pandai dan dua bank memasarkan Asuransi mikro melalui agen Laku Pandai.

1.5.6 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan triwulan I-2018, realisasi premi AUTS adalah sebesar Rp7.028,20 juta dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp5.622,56 juta dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp1.405,64 juta. Jumlah sapi yang tercover AUTS adalah 35.141 ekor sapi atau 29,28% dari target 120 ribu ekor sapi di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 27.044 peternak. Sampai akhir triwulan I-2018, realisasi klaim AUTS adalah Rp9.037.690.000,00.

1.5.7 Asuransi Nelayan

Asuransi nelayan tahun 2018 belum berjalan karena saat ini masih sedang proses tender perusahaan asuransi pelaksana asuransi nelayan oleh Kementerian Kelautan

dan Perikanan. Sampai dengan triwulan I-2018 klaim berjalan untuk asuransi nelayan mencapai 319 orang nelayan dengan nilai klaim sebesar Rp19.209.349.433,00.

1.5.8 Asuransi Usaha Budidaya Udang

Asuransi Usaha Budidaya Udang memberikan proteksi bagi pembudidaya udang dari risiko penyakit yang mengakibatkan matinya udang, atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidayaan.

Hingga triwulan I-2018 sebanyak 2.004 pembudidaya udang dengan luas lahan 3.300 telah terproteksi dengan nilai premi Rp 1,48 miliar dan realisasi klaim sebesar Rp 9,45 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 55 — Pelaksanaan Asuransi Usaha Budidaya Udang per triwulan I-2018

No.	Provinsi	Jumlah Nelayan	Realisasi Premi		Realisasi Klaim	
			Luas Lahan	Nilai Premi	Luas Lahan	Nilai Klaim
1.	Aceh	200	204,61	92.072.250,00	-	-
2.	Banten	41	140,30	63.135.000,00	-	-
3.	Gorontalo	35	96,50	43.425.000,00	-	-
4.	Jawa Barat	129	325,55	146.497.500,00	1,89	9.450.000,00
5.	Jawa Tengah	225	405,79	182.605.500,00	-	-
6.	Jawa Timur	263	219,20	98.640.000,00	-	-
7.	Kalimantan Selatan	19	44,50	20.025.000,00	-	-
8.	Lampung	90	136,58	61.458.750,00	-	-
9.	Nusa Tenggara Barat	53	31,11	13.999.500,00	-	-
10.	Sulawesi Barat	8	9,35	4.207.500,00	-	-
11.	Sulawesi Selatan	789	1.368,18	615.681.000,00	-	-
12.	Sulawesi Tengah	18	39,80	17.910.000,00	-	-
13.	Sulawesi Tenggara	109	262,00	117.900.000,00	-	-
14.	Sumatera Utara	25	16,54	7.443.000,00	-	-
Total		2.004	3.300	1.485.000.000,00	1,89	9.450.000,00

1.5.9 Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka memperkuat sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka

panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif. Selama triwulan I-2018, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp349 miliar.

Pengembangan Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

OJK berkomitmen untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah, kecil, mikro dan bahkan ultra mikro melalui pembentukan Bank Wakaf Mikro atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah di berbagai daerah. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil yang dikenakan setara 3%. Dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pendampingan bagi kelompok sehingga akan membantu pemberdayaan masyarakat kecil di daerah yang memiliki usaha ultra mikro.

Pengembangan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren ini diharapkan dapat menjadi quick wins dalam pengembangan keuangan syariah nasional yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah jangka menengah panjang yang berkesinambungan. Sampai akhir triwulan I-2018, OJK telah memberikan izin usaha kepada 20 Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren yang tersebar di Pulau Jawa, yakni di Jawa Barat (Cirebon, Bandung, Ciamis); Banten (Serang dan Lebak); Jawa Tengah (Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten), Yogyakarta dan Jawa Timur (Surabaya, Jombang, Kediri). Bank Wakaf Mikro tersebut telah menyalurkan pembiayaan kepada 3.876 orang nasabah yang tergabung dalam 780 kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren, dengan total pembiayaan sebesar Rp3,63 miliar.

OJK terus memperkuat dukungan internal dalam memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro salah satunya dengan pembahasankajian model bisnis dan perkembangan Bank Wakaf Mikro antara lain

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai branding Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pengawasan dan sumber dana, serta model bisnis penyaluran dana Bank Wakaf Mikro.

Pengembangan Bank Wakaf Mikro ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo yang turut meresmikan beberapa Bank Wakaf Mikro antara lain Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara di Serang, Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek, Cirebon dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri, Surabaya. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar silaturahmi dengan 300 orang pengurus dan nasabah Bank Wakaf Mikro yang saat ini telah beroperasi serta beberapa pimpinan pesantren yang sedang menyiapkan pendirian Bank Wakaf Mikro yang baru di Istana Negara.

Grafik I - 59 — Bank Wakaf Mikro



LKM Syariah
20



Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren
780



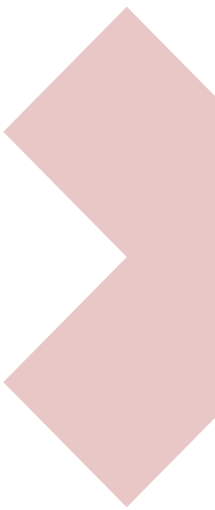
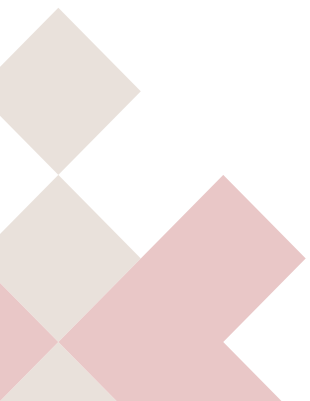
Nasabah
3876



Total Pembiayaan
Rp 3,63 Miliar



Halaman ini sengaja di kosongkan



BAB 2

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN





Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan 3 POJK dan 5 SEOJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB
 - Kajian terkait Pengawasan Terintegrasi:
 1. Kajian Manajemen Risiko Transaksi Intragrup Konglomerasi Keuangan
 2. Kajian Metodologi dan *Tools: Early Warning Systems (EWS)* Konglomerasi Keuangan
 - Kajian Pembentukan SRO bagi Industri *Financial Technology*
-



Pengembangan

- *Enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
 - FGD Standar Laporan Keuangan Khusus Penyelenggara *Fintech Lending*
 - Penandatanganan MoU dan Lol dengan dua lembaga domestik dan dua lembaga internasional
 - Penandatanganan Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi
-



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Pengembangan Model Inklusi Keuangan Untuk Pedesaan melalui BUMDes dan BUMADes
 - KUR Klaster peremajaan komoditas Kelapa Sawit
 - Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
 - Operasi Intelijen Pasar mengenai aspek perlindungan konsumen layanan *fintech*
-

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan I-2018, telah diterbitkan POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu dilakukan harmonisasi dengan POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge* yaitu yang sebelumnya menggunakan istilah “*Systemically Important Bank*” menjadi “Bank Sistemik”. Selain itu, dengan adanya penyempurnaan metodologi penetapan Bank Sistemik terdapat beberapa pengaturan dalam POJK Nomor 46/POJK.03/2015 yang harus diubah dan disesuaikan dalam rangka mengakomodir penyempurnaan atas metodologi dimaksud.

Pokok-Pokok Ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut antara lain:

1. Penetapan Bank Sistemik
2. Metodologi dan Indikator Penetapan Bank Sistemik
3. Penetapan *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan I-2018, OJK menerbitkan satu POJK dan satu SEOJK terkait Industri Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. **POJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.**
POJK ini memperluas cakupan peraturan dengan menambahkan pengaturan terkait PUB Sukuk mencakup persyaratan, jangka waktu dan kewajiban penyampaian Pernyataan Kesesuaian Syariah dan keterbukaan informasi terkait zakat.
- b. **SEOJK Nomor 6/SEOJK.04/2018 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal.**
SEOJK ini mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal, sesuai dengan ketentuan pasal 18 POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Pokok-pokok ketentuan yang diatur, antara lain: Ketentuan Umum Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL)
 1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan
 2. Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengakuan Pihak sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan
 3. Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan

2.1.3 Pengaturan IKNB

Selama triwulan I-2018, OJK menetapkan satu POJK dan empat SEOJK terkait IKNB sebagai berikut:

- a. **POJK nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama**
Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan belum adanya pengaturan khusus mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Adapun pokok-pokok materi pengaturan meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, tingkat solvabilitas, cadangan teknis kecukupan investasi, tingkat likuiditas, dana jaminan dan lain sebagainya.
- b. **SEOJK nomor 1/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Periodik Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mengatur ketentuan mengenai format laporan yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi secara berkala. Adapun pokok-pokok materi pengaturan meliputi ketentuan umum, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian Laporan Berkala.
- c. **SEOJK nomor 3/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Periodik Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Reasuransi Asuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi**
Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mengatur ketentuan mengenai format laporan yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah secara berkala. Adapun pokok-pokok materi pengaturan meliputi ketentuan umum, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian Laporan Periodik.
- d. **SEOJK nomor 4/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura**
Penerbitan peraturan ini merupakan amanat untuk menyusun ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari Pasal 42 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura. Adapun pokok-pokok materi pengaturan meliputi:
 1. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 2. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 3. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 4. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

5. Tata Cara Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- e. SEOJK nomor 7/SEOJK.05/2018 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Modal Ventura
- Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan modal ventura. Adapun pokok-pokok materi pengaturan meliputi:
1. Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan;
 2. Kualitas Aset Produktif;
 3. Tata Cara Penilaian Terhadap Faktor Rentabilitas;
 4. Tata Cara Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan;
 5. Verifikasi Dan Validasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Selain peraturan yang telah ditetapkan, terdapat empat peraturan yang masih dalam tahap proses penetapan dan enam peraturan yang masih dalam tahap permintaan pendapat (*legal review*), yaitu:

1. POJK mengenai tentang Laporan Berkala Dana Pensiun;
2. POJK mengenai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;
3. POJK mengenai Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja;
4. POJK mengenai Tata Kelola Dana Pensiun;
5. POJK Perubahan atas POJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
6. POJK mengenai Usaha Perasuransian yang Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama;
7. POJK mengenai Pembinaan dan Pengawasan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);
8. SEOJK mengenai Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
9. SEOJK mengenai Laporan Berkala Perusahaan Pergadaian;
10. SEOJK mengenai Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

A. Aktivitas Pengawasan

Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan dengan

pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*), selama triwulan I-2018 OJK melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Penyusunan rencana pengawasan terintegrasi berdasarkan hasil penilaian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan tahun 2018.
- b. Penilaian terhadap profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan serta pengkinian terhadap kondisi konglomerasi keuangan.
- c. Pengendalian kualitas pengawasan terintegrasi melalui *peer review* terhadap *input*, proses, dan *output* kegiatan pengawasan konglomerasi keuangan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*).
- d. Pelaksanaan strategi pengawasan secara *onsite* kepada beberapa Konglomerasi Keuangan (KK) dan kunjungan ke Entitas Non-LJK (Lembaga Jasa Keuangan) yang terelasi dengan Konglomerasi Keuangan maupun ke Debitur besar dari Entitas Utama dalam KK.

Enhancement Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, OJK secara berkelanjutan melakukan *enhancement* terhadap SIPT. Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah membantu Pengawas Terintegrasi dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan KK. Selanjutnya, tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pengembangan aplikasi SIPT modul data dan rasio keuangan ini antara lain mendorong standarisasi proses bisnis dan produk pengawasan, menyediakan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengaturan, dan Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.

Selain mengembangkan aplikasi Modul SIPT, OJK juga mengembangkan *Dashboard* Konglomerasi Keuangan. Tujuan utama pengembangan aplikasi *dashboard* ini adalah untuk membantu pengawas terintegrasi khususnya pimpinan dalam mengamati kondisi KK dan mengambil keputusan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pengembangan aplikasi ini antara lain menyediakan informasi kritical/penting mengenai KK kepada pimpinan dan pemangku kepentingan di OJK dan membantu pengawas terintegrasi dalam pengambilan keputusan yang efektif.

B. Profil Konglomerasi Keuangan

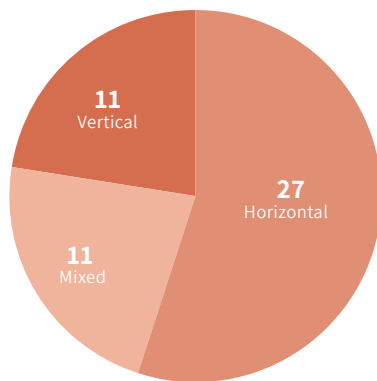
Total aset dari 49 grup KK per Desember 2017 sebesar Rp6.457 triliun. Sementara itu, total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp9.699 triliun. Dengan demikian, persentase perbandingan total aset 49 KK terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu 66,57%.

Tabel II - 1 Profil Konglomerasi Keuangan

KK Heterogen		
Jumlah Konglomerasi Keuangan	Des 16	Des 17
	43 KK	49 KK
Total Aset	5.893 T	6.457 T
% terhadap Total Aset SJK	67,25%	66,57%

Jenis LJK	Total EU
Bank	36
Perusahaan Efek	3
Asuransi/Reasuransi	7
Perusahaan Pembiayaan	2
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	1
Total	49 KK

Grafik II - 1 Jenis Struktur Konglomerasi Keuangan



C. Perizinan Terintegrasi

OJK memiliki fungsi pelaksanaan pengaturan dan perizinan terintegrasi yang efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, guna mendukung kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut sedang dilakukan proses kajian antara lain:

- **Kajian RPOJK Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik**
Sektor Jasa Keuangan atas aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).
- **Kajian Ketentuan Lintas Sektor terkait Pengaturan**
Transparansi Laporan Keuangan yang Bersifat Lintas Sektoral termasuk Ketentuan Pengenaan Sanksinya

2.2.2 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pada triwulan I-2018, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 753 kantor bank yang terdiri dari 544 Kantor Pusat (KP) dan 209 Kantor Cabang (KC). Dari 753 kantor bank tersebut, 195 diantaranya merupakan kantor Bank Umum (termasuk UUS) dan 558 kantor BPR dan BPRS.

Tabel II - 2 Pemeriksaan Bank Umum

Jenis Bank	Realisasi Triwulan I-2018		Jumlah Kantor
	KP	KC	
BUK	19	136	155
BUS	4	31	35
UUS	2	3	5
BPR	466	35	501
BPRS	53	4	57
Total	544	209	753

Sumber: OJK,
Catatan: Belum termasuk Perbankan Syariah Wilayah Pusat

Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari pemeriksaan umum yang dilakukan secara bersamaan.

Pada triwulan I-2018, telah dilakukan 105 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, *joint audit*, GCG, teknologi dan informasi, fraud, penetapan pencabutan, serta lainnya. Untuk pemeriksaan khusus terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.

Tabel II - 3 — Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan I-2018
Suku Bunga	-
Setoran Modal	33
Aktivitas Operasional	33
Teknologi dan Informasi	7
Aktivitas Treasuri	-
Joint Audit	1
GCG	1
Fraud	11
Penetapan Pencabutan	-
Pemeriksaan Kesiapan	-
Lainnya	19
Total	105

Sumber: OJK

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Dalam rangka memberikan panduan kepada Bank dalam menerbitkan dan mengeluarkan produk dan aktifitas baru, OJK mensyaratkan agar perbankan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya terkait dengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko yang ditanggung bank dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi semakin tinggi.

Pada triwulan I-2018, variasi produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui OJK cukup beragam. Produk dan aktivitas baru yang telah diterbitkan mencapai 406 produk yang sebagian besar terkait dengan Reksa Dana dan *bancassurance*.

Tabel II - 4 — Produk dan Aktivitas Baru Perbankan

Produk / Aktivitas Baru	Triwulan I-2018
Reksa Dana	130
<i>Bancassurance</i>	172
<i>E-Banking</i>	25
Perkreditan/Pembiayaan	13
Surat Berharga	21
Pendanaan	9
APMK	12
<i>Structured Product</i>	7
Aktivitas <i>Call Center</i>	2
LC	3
<i>Cash Management</i>	16
Fitur SMS Notifikasi	-
<i>E-Commerce</i>	4
Kepemilikan Logam Mulia	-
<i>Referral Retail Brokerage</i>	2
Lainnya	43
Total	459

Sumber: OJK

C. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Existing*)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/ atau kompetensi.

Pada triwulan I-2018, tidak terdapat penambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang lulus dalam proses *Fit and Proper Test Existing*. Selain itu, untuk *database track record* (TR), selama triwulan I-2018 terdapat penambahan 14 pelaku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Non Eksekutif untuk pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Adapun modus yang dilakukan antara lain terkait penyalahgunaan wewenang dan melanggar prinsip kehati-hatian.

Tabel II - 5 — *Track Record Tindak Tipibank* Triwulan I-2018

Objek <i>Track Record</i>	Triwulan IV - 2017
Komisaris	4
Direksi	4
Pejabat Eksekutif	1
Pejabat Non Eksekutif	5
Total	14

Sumber: OJK

2. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama triwulan I-2018, terdapat 26 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 11 kantor bank. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. PKP yang ditindaklanjuti dengan investigasi, akan dibahas dalam forum *Quality Assurance* yang bertujuan memastikan langkah-langkah investigasi yang akan dilakukan dalam mengungkap penyimpangan yang terjadi. Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, telah dilakukan investigasi pada sembilan PKP yang terdapat pada tiga kantor BPR.

Tabel II - 6 — Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

No. Topik	Triwulan I 2018					
	Kantor Bank		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	Kantor Bank	Kasus (PKP)
1 PKP yang diterima dan ditindaklanjuti	2	9	2	24	11	26
2 PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	-	2	-	6	2	6
a. Atas dasar analisis tim	-	2	-	6	2	6
b. Atas dasar QA1	-	-	-	-	-	-
3 PKP yang diinvestigasi	-	3	-	9	3	9
a. Tindak Lanjut dengan Pelimpahan ke DPJK	-	3	-	9	3	9
b. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah investigasi)	-	-	-	-	-	-

Sumber: OJK

3. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan I-2018 terdapat delapan pemberian keterangan ahli dan dua pemberian keterangan saksi. Pemberian keterangan ahli merupakan pemenuhan atas permintaan keterangan ahli yang berasal dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan RI, dan sebanyak dua pemberian keterangan saksi merupakan pemenuhan atas permintaan keterangan saksi yang berasal dari Kepolisian Negara RI (Polri).

Tabel II - 7 — Tabel Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1	Polri	2	6	8
2	Kejaksaan RI	0	2	2
Total		2	8	10

Sumber: OJK

D. Kelembagaan Bank Umum

1. Perizinan

Pada triwulan I-2018 telah diselesaikan 132 perizinan perubahan jaringan kantor BU yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan KCP (29,77% - 39 perizinan) yang diiringi dengan pembukaan KCP (9,16% - 12 perizinan).

Selain itu, terdapat perizinan perubahan nama The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ menjadi MUFG Bank, Ltd yang berlaku efektif sejak 1 April 2018.

Tabel II - 8 — Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BU

No	Jenis Kegiatan	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1	Pembukaan Bank Umum		
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-
	b. Kantor Cabang (KC)	7	11
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	11	12
	d. Kantor Fungsional (KF)	2	1
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
2	Penutupan Bank Umum		
	a. Izin Usaha	-	-
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	23	17
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	7	39
	e. Kantor Fungsional (KF)	7	5
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
	a. Kantor Pusat (KP)	1	-
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-	1
	c. Kantor Cabang (KC)	5	4
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	27	15
	e. Kantor Fungsional (KF)	1	1
	f. Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
	a. Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	14	6
	- KK menjadi KCP	10	7
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum		
	- KP menjadi KC	-	-
	- KC menjadi KCP	2	11
	- KCP ke KF/KK	2	-
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1	1
6	Perubahan Badan Hukum	1	-
7	Merger Bank Umum	-	-
8	Izin Bank Devisa	-	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indo	-	0
Jumlah		121	131

Sumber: LKPB

Catatan: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2018, jaringan kantor BUK meningkat 139 unit dari triwulan sebelumnya menjadi 139.626 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM yang bertambah 447 unit, sementara pengurangan terbesar terdapat pada kantor kas yang berkurang 164 kantor.

Tabel II - 9 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

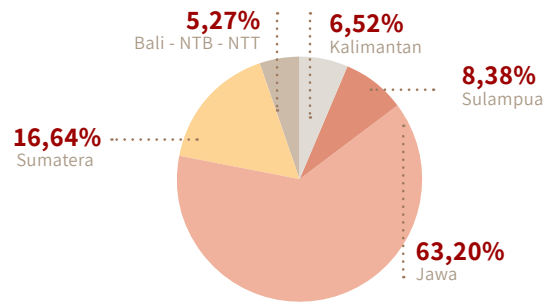
Status Kantor	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
Kantor Pusat Operasional	50	50
Kantor Pusat Non Operasional	55	55
Kantor Cabang Bank Asing	9	10
Kantor Wilayah Bank Umum (konven + syariah)	167	167
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.882	2.872
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	27	26
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.403	16.435
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-
Kantor Kas	10.785	10.621
Kantor Fungsional (konven + syariah)	1.575	1.575
Payment Point	1.996	1.980
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.607	1.457
Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14	13	13
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
ATM/ADM	103.918	104.365
Total	139.487	139.626

Sumber: LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 88.238 jaringan kantor (63,20%), diikuti pulau Sumatera 23.228 (16,64%), Sulampua 11.698 (8,38%), Kalimantan 9.104 (6,52%), dan Bali-NTB-NTT 7.358 (5,27%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terjadi pada hampir seluruh wilayah dengan peningkatan terbesar berada di pulau Sumatera yang bertambah 160 jaringan kantor. Sementara itu, terdapat 244 pengurangan kantor di wilayah Pulau Jawa utamanya pengurangan Kantor Kas seiring dengan proses konsolidasi perbankan.

¹Fit and Proper New Entry adalah Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan bagi Calon Pengurus baru (Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris) yang mengajukan permohonan untuk pertama kali. Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dengan ketentuan pelaksanaan pada SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Fit and Proper New Entry adalah Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan bagi Calon Pengurus baru

Grafik II - 2 Penyebaran Jaringan Kantor BUK Triwulan I-2018



Sumber: OJK, Maret 2018

3. Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank yang sehat.

Selain itu, dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry*¹).

Pada triwulan I-2018, terdapat 21 pemohon FPT New Entry yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari 14 Direksi dan 7 Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat 13 calon pengurus yang mendapat surat keterangan lulus, disertai dengan *carry over* periode sebelumnya.

Tabel II - 10 FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum selama Triwulan I-2018

Pemohon FTP	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FTP		Jumlah Tidak ditindaklanjuti	Triwulan I-2018
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
Dewan Komisaris	7	2	6	2	6	23
Direksi	14	1	7	1	12	35
Total	21	3	13	3	18	58

Sumber: OJK

(Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris) yang mengajukan permohonan untuk pertama kali. Ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dengan ketentuan pelaksanaan pada SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

E. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan I-2018, terdapat satu proses perizinan pendirian usaha BPR, empat proses merger BPR, dan enam BPR dalam pengawasan khusus dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- a. Izin pendirian BPR diberikan kepada PT BPR Danafast Kalimantan Utara.
- b. Empat proses merger terdapat pada:
 - i. Penggabungan PT BPR Sedayadhana Makmur dan PT BPR Dau Anugerah ke dalam PT BPR Dhana Lestari.
 - ii. Penggabungan PT BPR Supra Wahana Arta ke dalam PT BPR Supra Arta Persada.
 - iii. Penggabungan PT BPR Bumi Riau Insani, PT BPR Putra Riau Mandiri dan PT BPR Faiza Pradani Andi ke dalam PT BPR Fianka Rezalina Fatma.
 - iv. Penggabungan PT BPR Artha Anugrah Kencana, PT BPR Artha Tuban Kencana dan PT BPR Delta Artha Panggung Situbondo ke dalam PT BPR Delta Artha Panggung Banyuwangi.

Tabel II - 11 Perizinan BPR

Perizinan BPR	Triwulan I-2018
Pendirian BPR	1
Merger BPR	4
BPR dalam Pengawasan Khusus	6
Pencabutan Izin Usaha	-
Total	11

Sumber: OJK, Maret 2018

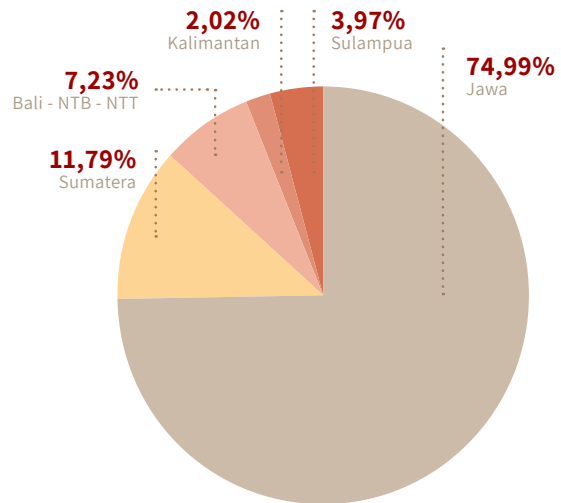
2. Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan I-2018 berkurang empat bank dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.615 BPR. Sementara itu, jumlah jaringan kantor BPR bertambah 34 unit menjadi 6.226 jaringan kantor.

Penyebaran jaringan kantor BPR di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di wilayah Jawa (74,99% atau 4.669 kantor), diikuti

wilayah Sumatera (11,79% atau 734 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,23% atau 450 kantor), wilayah Sulampua (3,97% atau 247 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,02% atau 126 kantor).

Grafik II - 3 Penyebaran Jaringan Kantor BPR Triwulan I-2018



Sumber: OJK, Maret 2018

3. Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)

Pada triwulan I-2018, telah dilakukan FPT New Entry kepada 705 calon Direksi, Komisaris dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 588 calon (83,40% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 117 calon yang ditolak.

Tabel II - 12 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR

Pemohon FPT	Triwulan I-2018		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	351	70	421
Komisaris	195	46	241
PSP	42	1	43
Total	588	117	705

Sumber: OJK

2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Selama triwulan I-2018, OJK melakukan *monitoring* terhadap 22 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar. Dari jumlah tersebut, empat saham ditindaklanjuti ke proses penelaahan dan satu saham diputuskan untuk di-*discard* setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran, serta 17 saham sedang dilakukan *monitoring*.

OJK juga melakukan penelaahan terhadap perdagangan enam saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari saham-saham tersebut, empat saham sedang dilakukan penelaahan. Sementara itu, dua saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.

Pada periode pelaporan OJK melakukan pemeriksaan teknis terhadap tiga saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, satu saham sedang dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, dua saham telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Satuan Kerja Pemeriksaan Pasar Modal.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Selama triwulan I-2018, OJK melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya melalui penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Januari, Februari dan Maret berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing oleh 20, 16 dan 15 Partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan Januari, Februari dan Maret tersebut masing-masing sebanyak 247, 170 dan 126 kali. OJK juga melakukan *review alert* pada bulan Januari, Februari dan Maret yang menghasilkan 4.838 alert Obligasi Pemerintah, 2.347 alert Obligasi Korporasi dan 341 alert waran. Saat ini OJK melakukan *monitoring* terhadap satu Obligasi Pemerintah dan enam Waran.

OJK melakukan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA). Kondisi pasar Surat Utang pada bulan Januari menunjukkan pola *bullish* dipengaruhi oleh faktor positif kenaikan peringkat dari *Fitch Ratings* yang didukung dengan positifnya indikator makro di awal tahun yang mendorong optimisme di pasar Obligasi domestik. Selanjutnya, Kondisi pasar Surat Utang pada Februari dan Maret menunjukkan pola *bearish* yang dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan inflasi Amerika Serikat pasca rilisnya data upah tenaga kerja AS yang

naik menjadi 2,9% (yoy) di Februari yang memicu ekspektasi normalisasi moneter yang lebih agresif dan isu penerapan kebijakan proteksionisme AS dan potensi perang dagang antara AS dengan Cina yang berdampak pada peningkatan risiko investor di pasar Obligasi Indonesia.

3. Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan I-2018, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), telah melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan penyesuaian nama divisi dan pemisahan fungsi unit kerja PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
2. Penyampaian Laporan Hasil RUPS PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) dan PT Penilaian Harga Efek Indonesia (PHEI).
3. Laporan atas Pencatatan atas Penyesuaian Prosedur Operasional Standar PHEI.
4. Penyampaian surat terkait kewajiban pelaporan dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017.
5. Penetapan apresiasi kinerja tahun 2017 bagi Direksi dan Komisaris PT BEI, PT KSEI, dan PT KPEI.
6. Laporan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja PT BEI, PT KSEI, PT KPEI dan PT P3IEI triwulan IV - 2017.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek pada triwulan I-2018, OJK telah melakukan persetujuan terhadap tujuh perubahan susunan direksi, dua perubahan susunan komisaris, dua proses persetujuan perubahan pemegang saham dan satu persetujuan peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek. OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 128 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai akhir triwulan I-2018 sebesar Rp22,93 triliun atau naik sebesar 2,89% (qtq) disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 106 Perusahaan Efek Anggota Bursa, terdapat dua Perusahaan Efek Anggota Bursa yang mempunyai nilai MKBD di bawah MKBD yang dipersyaratkan.

OJK melakukan analisis dan pemantauan atas 44 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 29 Emiten. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek. OJK juga

melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPE) dalam triwulan I-2018 yaitu periode bulan Desember 2017 - Februari 2018. Dalam periode tersebut, terdapat tujuh Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPE pada Desember 2017 dan Januari 2018. Sementara itu, pada Februari 2018 terdapat lima Perusahaan Efek yang merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen.

5. **Pemeriksaan terhadap Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal**
 Pada triwulan I-2018, OJK menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 2017. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan. Pada periode ini juga dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun fokus pemeriksaan BEI adalah kegiatan pengembangan investor, pemeriksaan internal, penentuan indeks LQ45, pengawasan transaksi, keuangan pengembangan dan perencanaan strategis.

6. **Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek**
 Pada periode triwulan I-2018, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap empat Kantor Cabang Perusahaan Efek di Medan dengan fokus pemeriksaan kepatuhan terkait dengan kegiatan operasional sebagai Perantara Pedagang Efek, pengamanan dana dan efek nasabah, dan perilaku Perantara Pedagang Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Dari hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut, ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku oleh seluruh Perusahaan Efek sehingga diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

7. **Pemeriksaan Teknis**
 Pada periode triwulan I-2018, OJK melakukan pemeriksaan teknis terhadap dua Perusahaan Efek, yang terdiri dari satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Dari hasil pemeriksaan teknis tersebut, satu Perusahaan Efek ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku sehingga diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Sementara itu, perusahaan Efek lainnya, sedang dalam proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Sampai dengan triwulan I-2018, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tujuh kantor pusat MI, 1 Perusahaan Efek sebagai APERD, tiga kantor pusat APERD, dua Bank Kustodian, dan dua RDPT. Sebanyak tujuh MI masih dalam proses permintaan konfirmasi. Untuk Pemeriksaan

kepatuhan terhadap APERD dan PE APERD, sebanyak dua APERD dalam proses finalisasi LHP dan dua APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi ke APERD. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap BK, dua BK masih dalam proses permintaan konfirmasi. Adapun untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap dua RDPT, saat ini seluruh LHP telah selesai penusunannya.

Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK melakukan pengembangan sistem *E-monitoring* sehingga dapat dijadikan alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan. Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi di mana terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan X.N.1 Januari, Februari, dan Maret 2018 serta dua MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 Maret 2018. Untuk laporan MKBD setiap bulan, terdapat tiga MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Januari 2018, satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Februari 2018, dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Februari 2018

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

Tabel II - 13 Aksi Korporasi Triwulan I-2018

No.	Aksi Korporasi	Triwulan I-2017	Triwulan I-2018
1	Transaksi Afiliasi	53	60
2	Transaksi Afiliasi Bersamaan Dengan Transaksi Material	-	1
3	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	11	16
4	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	8	8
5	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	1	-
6	Pembagian Saham Bonus	-	1
7	Pembagian Dividen Berupa Kas	3	2
8	Pembagian Dividen Saham	-	-
9	Laporan Buyback Saham	7	10
10	Laporan Buyback Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	-
11	Pembelian Kembali Obligasi	1	1
12	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	1	5
13	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	-	-
14	Penelaahan Atas Penawaran Tender	2	-
15	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	-	1
16	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	2	2
17	Penelaahan Go Private	-	-

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain sebagai berikut:

Tabel II - 14 — Penyampaian Laporan Berkala

No. Laporan Berkala	LKT 2017		LT 2017	
	EPP	%	EPP	%
1 Tepat Waktu	405	62	83	12,7
2 Terlambat	-	-	-	-
3 Belum Menyampaikan	233	35,7	564	85
4 Emiten Beda Tahun Buku dan Belum Menyampaikan	9	1,4	9	1,4
5 Belum Wajib Menyampaikan	6	0,9	6	0,9

Berdasarkan pengawasan OJK selama triwulan I-2018 terdapat 156 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, di mana 135 laporan tepat waktu, dan 21 laporan terlambat. OJK juga melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 251 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 89 laporan hasil Pemeringkatan Efek, 42 hasil RUPS, serta 13 laporan penjatahan Penawaran Umum. OJK melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, sebanyak 738 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik.

Selama triwulan I-2018, OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 15 Emiten dan Perusahaan Publik yaitu:

- Lima Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- Tiga Emiten untuk memastikan pemenuhan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik, POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- Dua Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;

- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ;
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan POJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan POJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama triwulan I-2018, OJK melakukan penelaahan atas 43 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 11 laporan dari Akuntan, 11 laporan dari Konsultan Hukum, 15 laporan dari Penilai, satu laporan dari Notaris dan lima laporan Perubahan Data ASPM. OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap dua Biro Administrasi Efek dan dua Wali Amanat. Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan kepatuhan BAE telah diselesaikan. Sementara itu, LHP atas pemeriksaan kepatuhan WA sedang dalam proses penyusunan.

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap satu Konsultan Hukum dan sedang melaksanakan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap satu Konsultan Hukum dengan ruang lingkup kesesuaian pelaksanaan penugasan profesional oleh Konsultan Hukum dengan kode etik, standar profesi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan VIII.B.1 dan penerapan/pelaksanaan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum.

OJK melakukan pemetaan terhadap tiga Notaris Pasar Modal dengan ruang lingkup pendalaman terhadap kegiatan Notaris sebagai Notaris Pasar Modal khususnya dalam penyusunan Akta Notariil dan penerapan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Pemeriksaan Kepatuhan Akuntan Publik Pasar Modal 2018 akan dilakukan terhadap 12 KAP dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP. OJK melakukan penelaahan atas 11 permohonan izin perorangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal. Pada triwulan I-2018, OJK menerbitkan 11 Surat Keputusan Izin ASPM.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

Selama triwulan I-2018, OJK melakukan 31 pemeriksaan Pasar Modal yang terdiri dari satu Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi, 16 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dan 14 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama triwulan I-2018, OJK menetapkan sebanyak 215 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 15 — Tabel Penetapan Sanksi Administratif

	Sanksi Administratif		
	Peringatan tertulis	Denda	Pencabutan Izin
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	85	77 dengan total denda sebesar Rp6.513.070.000,-	
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	1	3 dengan total denda sebesar Rp50.000.000,-	1
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	48	-	
Total	134	80	1

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di 2017 dan 2018, OJK menetapkan 30 Surat Teguran Pertama dan enam Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode triwulan I-2018, OJK menindaklanjuti 26 Permohonan Keberatan di mana 14 Keberatan telah ditanggapi dan 12 Keberatan masih dalam proses

2.2.4 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Pada triwulan I-2018, OJK melakukan analisis terhadap 15 laporan keuangan berkala, yang terdiri dari 11 laporan perusahaan asuransi umum dan empat laporan perusahaan asuransi jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 16 — Jumlah Laporan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang Dianalisis Triwulan I-2018

Periode Laporan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Asuransi Wajib
Januari 2018	3	6	-	-
Februari 2018	1	3	-	-
Maret 2018	-	2	-	-

2. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan I-2018, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan asuransi yang mana delapan merupakan pemeriksaan rutin dan dua merupakan pemeriksaan khusus. OJK menerbitkan 14 LHP yang terdiri dari lima LHP Sementara dan sembilan LHP Final.

3. Pemantauan Tindak Lanjut, Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi oleh perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan yang masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

Berdasarkan data pemantauan pelaksanaan rekomendasi sampai dengan triwulan I-2018, terdapat 334 rekomendasi yang harus dilaksanakan. Selanjutnya pada periode yang sama jumlah rekomendasi yang telah dilaksanakan sebanyak 87 rekomendasi sehingga total rekomendasi yang belum dilaksanakan pada periode tersebut adalah 247 rekomendasi.

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan I-2018, OJK mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 11 perusahaan, sanksi peringatan kedua kepada satu perusahaan, dan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan.

OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari dua surat pencabutan sanksi peringatan pertama, satu surat pencabutan sanksi peringatan kedua.

4. **Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan**
Pada triwulan I-2018, OJK menindaklanjuti sebanyak 24 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.

5. **Kegiatan Lain**

- a. **Penatausahaan Dana Jaminan**
Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan I-2018 OJK telah memproses 15 permohonan pencairan/ penggantian dana jaminan.
- b. **Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan**
Pada triwulan I-2018, OJK menerima 19 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.
- c. **Pengesahan Cadangan**
Selama periode triwulan I-2018, terdapat empat permohonan pengesahan cadangan premi dan satu pengesahan kenaikan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. **Analisis Laporan (off-site supervision)**
Sampai periode triwulan I-2018, rekapitulasi penyampaian Laporan Bulanan dan Laporan Berkala Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

Tabel II - 17 — Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

No.	Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
		Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018
1	Dana Pensiun Pemberi Kerja	213	206	206	18	24	24
2	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	24	24	0	1	1
Total		238	230	230	18	25	25

Tabel II - 18 — Penerimaan Laporan Berkala Dana Pensiun

Jenis Laporan	Jumlah
Laporan Aktuaris	13
Laporan Teknis Tahun 2017	183
Laporan Keuangan Tahun 2017 <i>audited</i>	40
Laporan Investasi Tahun 2017 <i>audited</i>	35

2. **Pemeriksaan (on-site supervision)**

Pada triwulan I-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap delapan Dana Pensiun. Menindaklanjuti pemeriksaan langsung tersebut, OJK menerbitkan tujuh LHP Sementara dan 12 LHP Final Dana Pensiun.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan I-2018, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak enam laporan berkala yang terdiri dari dua laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Desember 2017 dan Januari 2018 dan empat laporan keuangan bulanan periode Desember 2017 dan Januari 2018 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial. Pada akhir Februari 2018, OJK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan 2017.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Selama triwulan I-2018, penyampaian laporan bulanan lembaga pembiayaan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Tabel II - 19 — Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018
LBPP	13	6	6	180	185	185
LBPMV	10	7	4	53	56	59
LBPPI	0	0	0	2	2	2

* LBPP : Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV : Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI : Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. **Pemeriksaan (*on-site supervision*)**
Pada triwulan I-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 11 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari delapan Perusahaan Pembiayaan dan tiga Perusahaan Modal Ventura. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS). Perkembangan penyusunan laporan pemeriksaan selama triwulan I-2018, yaitu:

Tabel II - 20 — Tabel Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
LHPS telah dikirimkan	4
LHPF telah dikirimkan	6

3. **Perkembangan Penerapan *Risk Based Supervision***
Selama triwulan I-2018, terdapat 177 Perusahaan Pembiayaan yang telah menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko. Sementara itu, sebanyak 14 perusahaan belum menyampaikan.
4. **Penanganan Pengaduan**
Pada triwulan I-2018, OJK menangani dan menindaklanjuti empat pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.
5. **Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan Pembiayaan**
Sampai batas akhir penyampaian laporan, terdapat 165 Perusahaan Pembiayaan dan 47 Perusahaan Modal Ventura yang telah menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan. Selanjutnya, terhadap 26 Perusahaan Pembiayaan dan 16 Perusahaan Modal Ventura yang tidak menyampaikan rencana bisnis telah dikenakan sanksi administratif.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

1. **Pemberian Izin Usaha LKM**
Selama triwulan I-2018, OJK memberikan izin usaha kepada empat LKM sesuai wilayah operasional OJK, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Banten. OJK memberikan satu izin usaha bersyarat dan tiga izin usaha penuh. LKM yang telah mendapatkan izin usaha selama triwulan I-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 21 — Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Penuh

No.	Nama LKM	Jenis Usaha
1.	Koperasi LKM Syariah El-Manahij	Syariah
2.	Koperasi LKM Syariah Lan Taburo	Syariah
3.	PT LKM Pandeglang Berkah	Konvensional

Tabel II - 22 — Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha Bersyarat

No.	Nama LKM	Jenis Usaha
1.	PT LKM Ciomas	Konvensional

2. **Pelaksanaan Pendampingan Langsung Penyusunan Laporan Keuangan LKM**
Agar LKM dapat menyampaikan laporan keuangan secara benar, OJK melakukan pendampingan secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Pendampingan ini dilakukan juga untuk melihat profil dan proses bisnis LKM. Selama triwulan I-2018, OJK melakukan pendampingan pada beberapa LKM di beberapa daerah, antara lain:

Tabel II - 23 — Pelaksanaan Pendampingan LKM selama Triwulan I-2018

No.	Lokasi	Nama LKM
1.	Padang	1. Koperasi LKM Baringin Sakti
		2. Koperasi LKM Anduring
2.	Pesisir Selatan	3. Koperasi LKMA Alam Sungai Liku
		4. Koperasi LKM Taluk Tigo Sakato
3.	Bukit Tinggi	5. Koperasi LKMA Usaha Bersama
		6. Koperasi LKMA Amanah Manggis Ganting
4.	Padang Panjang	7. Koperasi LKMA Gemar Sepakat
5.	Lima Puluh Kota	8. Koperasi LKMA Lokuang Kuranji
6.	Lampung Selatan	9. Koperasi LKM Mandiri Sejahtera
7.	Tulang Bawang	10. Koperasi LKM Agribisnis Sido Jaya Abadi
		11. Koperasi LKMA Tunas Mekar Sejahtera
8.	Purbalingga	12. Koperasi LKMA PUAP Mugji Rahayu
		13. Koperasi LKMA PUAP Manunggal Lestari
		14. Koperasi LKM Syariah BTM Purbalingga
9.	Tasikmalaya	15. Koperasi LKMA PUAP Subur
		16. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya

3. Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Dalam rangka mendorong pertumbuhan LKM dan membantu proses perizinan usaha LKM, OJK melakukan asistensi perizinan usaha LKM di berbagai kota atau kabupaten. Pelaksanaan asistensi perizinan usaha ini ditujukan kepada pelaku LKM yang belum memiliki izin usaha dari OJK. Asistensi yang dilaksanakan oleh OJK dapat berupa asistensi perizinan Badan Kredit Desa (BKD) menjadi LKM, LKM berbasis agribisnis (LKMA), Usaha Ekonomi Kelurahan - Simpan Pinjam (UEKSP), atau Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Selama triwulan I-2018, OJK telah melaksanakan asistensi perizinan usaha di beberapa kota atau kabupaten, antara lain:

Tabel II - 24 — Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha LKM selama Triwulan I-2018

No.	Jenis	Kota / Kabupaten	Jumlah Peserta
1.	Usaha Ekonomi Kelurahan - Simpan Pinjam (UEKSP)	Pekanbaru	58
2.	Bank Kredit Desa (BKD)	Ponorogo	-
		Purwokerto	20
		Yogyakarta	26
3.	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	Purwokerto	1

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Sampai dengan triwulan I-2018, terdapat 18 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang beroperasi dan mendapatkan izin usaha dari OJK. Perusahaan Penjaminan Konvensional sampai dengan triwulan I-2018 adalah 21 Perusahaan, yaitu satu BUMN (Perum Jamkrindo), dua Perusahaan Penjaminan Kredit Swasta (PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia/PT PKPI dan PT UAF Jaminan Kredit), dan 18 PPKD. Pada triwulan I-2018, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 13 perusahaan dan telah diselesaikan tiga laporan hasil pemeriksaan, yaitu PT Jamkrida Sulsel, PT Jamkrida Kalbar, dan PT Jamkrida Kalteng.

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang IKNB dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Hingga triwulan I-2018, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi antara lain dilakukan dengan:

- Menyelesaikan Analisis laporan keuangan semester II-2017 terhadap 168 Perusahaan Pialang Asuransi dan 43 Perusahaan Pialang Reasuransi;

- Menyelesaikan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus sebanyak 10 Perusahaan Pialang Asuransi dengan telah menerbitkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS);
- Mengenaikan Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 106 sanksi yang terdiri dari 31 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 58 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), dua Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 14 Sanksi Administratif berupa Denda, dan satu Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU).

H. Pengawasan *Financial Technology (Fintech)*

1. Pendaftaran Penyelenggara *Fintech Lending* OJK memberikan tanda terdaftar kepada 11 penyelenggara *fintech lending*, sehingga total penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar hingga triwulan I-2018 sebanyak 40 penyelenggara *fintech lending*.

Tabel II - 25 — Daftar Penyelenggara *Fintech Lending* yang Terdaftar pada Triwulan I-2018

No.	Nama Penyelenggara	Nama Platform
1.	PT Mapan Global Reksa	Dana Mapan
2.	PT Aktivaku Investama Teknologi	Aktivaku
3.	PT Karapoto Teknologi Finansial	Karapoto
4.	PT Dana Kini Indonesia	Dana Kini
5.	PT Oriente Mas Sejahtera	Finmas
6.	PT Digital Synergy Technology	Rupiah Plus
7.	PT Toko Modal Mitra Usaha	Tokomodal
8.	PT Tunaiku Fintech Indonesia	Tunaiku
9.	PT Artha Dana Teknologi	Indodana
10.	PT FinAccel Digital Indonesia	Kredivo
11.	PT Mekar Investama Sampoerna	Mekar.id

2. Sosialisasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau *Fintech Lending* dan Ekosistemnya

OJK menyelenggarakan sosialisasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang bertujuan memberikan pemahaman kepada para *stakeholder* terkait *fintech lending*, ekonomi digital dan arah serta kebijakan OJK yang berdampak pada peningkatan jumlah serta sebaran *fintech lending* di Indonesia. Sosialisasi dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada acara *Fintech Days 2018* di Medan dan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto. OJK menyelenggarakan acara sosialisasi *Fintech Days* di Medan dengan tema “Peranan *Fintech Lending*

dalam Membangun dan Meningkatkan Sektor Riil di Wilayah Sumatra” menghadirkan 37 narasumber dan tujuh moderator serta 1.420 orang peserta. OJK juga menyelenggarakan sosialisasi POJK mengenai *fintech lending* di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto. Acara tersebut dihadiri oleh 400 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED Purwokerto.

3. *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai Standar Laporan Keuangan Khusus Penyelenggara *Fintech Lending*

OJK mengundang penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar untuk mengikuti FGD dalam rangka membahas tentang Standar Laporan Keuangan Khusus Penyelenggara *Fintech Lending*. FGD tersebut bertujuan agar untuk menyusun keseragaman format dari laporan keuangan yang diserahkan

oleh penyelenggara *fintech lending* terdaftar. Selain sebagai penyelenggara sosialisasi dan FGD peraturan dan kebijakan OJK mengenai *fintech lending*,

I. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan I-2018, terdapat 2.499 permohonan yang harus diproses OJK selama triwulan I-2018. Dari jumlah tersebut, sejumlah 1.559 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB telah selesai diberikan izin/persetujuan/pencatatan dan 937 permohonan dan pelaporan dimaksud telah ditanggapi serta masih dalam proses analisis. Sementara itu, tiga permohonan lainnya dibatalkan/dikembalikan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun dibatalkan kembali oleh IKNB. Rincian permohonan perizinan kelembagaan IKNB selama triwulan I-2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 26 — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Dianalisis & Ditanggapi *)	Dalam Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Jumlah				
Pemberian Izin Usaha	22	10	32	3	24	4	1
Pencabutan Izin Usaha	5	4	9	7	1	1	-
Likuidasi	13	10	23	6	12	5	-
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	16	6	22	3	15	2	2
Perubahan Kepemilikan/AD/ Modal/PS/PDP	151	107	258	87	153	18	-
Perubahan Nama	1	4	5	1	4	-	-
Kantor Cabang	128	223	351	186	91	74	-
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	70	149	219	134	46	39	-
Produk	142	360	502	356	104	42	-
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	124	294	418	188	183	47	-
Pelaporan Pengurus	21	192	213	184	3	26	-
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	13	336	349	329	1	19	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	5	45	50	40	6	4	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	2	46	48	35	12	1	-
Total	713	1.786	2.499	1.559	655	282	3

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

1. Pemberian Izin Usaha

Sampai akhir periode triwulan I-2018, terdapat 32 permohonan izin usaha IKNB di mana tiga telah selesai diberikan izin, 24 telah ditanggapi, empat

dalam proses analisis dan satu dikembalikan. Adapun rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 27 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pernyataan Terdaftar IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	1	-	1	-	-	1	-
Dana Pensiun	4	1	5	-	5	-	-
Perusahaan Pembiayaan	-	1	1	-	-	1	-
Perusahaan Modal Ventura	1	3	4	-	3	1	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian - Izin Usaha	10	4	14	2	10	1	1
Perusahaan Pergadaian - Pendaftaran	6	1	7	1	6	-	-
Total	22	10	32	3	24	4	1

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Daftar pemberian izin usaha IKNB selama triwulan I-2018, yaitu:

Tabel II - 28 Penetapan Izin Usaha IKNB selama triwulan I-2018

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Jawa Barat Gadai	Pergadaian
2.	PT Sili Gadai Nusantara	Pergadaian

2. Pencabutan Izin Usaha

Selama periode triwulan I-2018, OJK telah melakukan pencabutan terhadap tujuh IKNB.

Rincian pencabutan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 29 Tabel Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Dianalisis & Ditanggapi *)	Dalam Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	1	-	1	1	-	-	-
Dana Pensiun	1	2	3	2	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan	2	-	2	2	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	1	2	1	1	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	1	1	1	-	-	-
Total	5	4	9	7	1	1	-

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

Daftar pencabutan izin usaha IKNB selama triwulan I-2018, yaitu:

Tabel II - 30 — Penetapan Pencabutan Izin Usaha IKNB selama Triwulan I-2018

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT AXA Life Indonesia	Perusahaan Asuransi
2.	PT Arthabuana Margausaha Finance	Perusahaan Pembiayaan
3.	PT Rimba Hijau Investasi	Perusahaan Pergadaian
4.	PT Surya Nordfinans	Perusahaan Pembiayaan
5.	PT Pertamina Dana Ventura	Perusahaan Modal Ventura
6.	Dana Pensiun Multi Bintang Indonesia	Dana Pensiun
7.	Dana Pensiun Aventis Pharma Manfaat Pasti	Dana Pensiun

Dengan demikian, jumlah IKNB konvensional per triwulan I-2018, yaitu:

Tabel II - 31 — Jumlah IKNB Konvensional per Triwulan I-2018

No.	Jenis Industri	Jumlah
I	Asuransi dan Reasuransi	
1.	Asuransi Jiwa	53
2	Asuransi Umum	74
3	Reasuransi	6
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	138
II	Dana Pensiun	
1	DPPK PPIP	44
2	DPPK PPMP	167
3	DPLK	24
	Total Dana Pensiun	235
III	Lembaga Pembiayaan	
1	Perusahaan Pembiayaan	188
2	Modal Ventura	62
3	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2
	Total Lembaga Pembiayaan	252
IV	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
1	Perusahaan Penjaminan	21
2	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank	1
4	Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)- Izin usaha	10
5	Perusahaan Pergadaian –Pendaftaran	12
	Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	45
	TOTAL LJKNB (Konvensional)	670

3. Likuidasi

OJK menerima 10 permohonan terkait proses likuidasi. Adapun permohonan persetujuan terkait likuidasi yang diselesaikan pada triwulan I-2018, yaitu lima permohonan persetujuan rencana kerja

likuidasi dana pensiun dan satu permohonan persetujuan perubahan tim likudasi dana pensiun. Rincian proses likuidasi IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 32 Rekapitulasi Likuidasi IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi						
a. Proses Pembubaran	1	-	1	-	1	-
b. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	2	-	2	-	2	-
c. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun						
a. Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	8	6	14	5	6	3
b. Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	2	3	5	-	3	2
c. Persetujuan Perubahan Tim Likuidasi	-	1	1	1	-	-
Total	13	10	23	6	12	5

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

4. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun serta Merger dan Akuisisi

Selama periode triwulan I-2018, terdapat enam permohonan pengambilalihan (akuisisi) dan 16

permohonan pengambilalihan yang merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut, tiga permohonan telah diberikan persetujuan pengambilalihan (akuisisi). Rincian pengambilalihan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 33 Rekapitulasi Pengambilalihan IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	2	4	2	2	-	-
Perusahaan Pembiayaan	14	4	18	1	13	2	2
Total	16	6	22	3	15	2	2

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

5. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Sampai dengan triwulan I-2018, OJK telah menyelesaikan sebanyak 87 permohonan/ pelaporan terkait proses perubahan kepemilikan

perusahaan/ perubahan anggaran dasar/perubahan pemegang saham/perubahan PDP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 34 — Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB sampai dengan triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	24	25	49	25	18	6	0
Dana Pensiun	39	46	85	19	60	6	0
Perusahaan Pembiayaan	63	12	75	22	49	4	0
Perusahaan Modal Ventura	19	18	37	14	21	2	0
Perusahaan Penjaminan	6	6	12	7	5	0	0
Total	151	107	258	87	153	18	-

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

6. Perubahan Nama

Selama periode triwulan I-2018, terdapat dua pelaporan perubahan nama perusahaan asuransi, dua pelaporan perubahan nama perusahaan pembiayaan serta satu pelaporan perubahan nama perusahaan pembiayaan yang merupakan *outstanding* dari periode triwulan IV-2017. OJK telah memproses satu pelaporan perubahan nama perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (d/h PT Tugu Pratama Indonesia)

7. Kantor Cabang, Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang

Sampai dengan triwulan I-2018, OJK telah menerima 223 pelaporan terkait kantor cabang perusahaan asuransi dan reasuransi serta lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura) yang terdiri dari pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat serta pelaporan perubahan alamat kantor pusat untuk perusahaan asuransi dan reasuransi di mana 186 di antaranya telah selesai. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 35 — Rekapitulasi Pelaporan Kantor Cabang IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi						
- Pembukaan Kantor Cabang	-	4	4	3	-	1
- Penutupan Kantor Cabang	-	5	5	5	-	-
- Perubahan Alamat	-	7	7	6	-	1
Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	3	4	7	4	3	-
Lembaga Pembiayaan dan LJKK						
- Pembukaan Kantor Cabang	24	62	86	49	28	11
- Penutupan Kantor Cabang	16	25	41	19	11	11
- Perubahan Alamat	85	116	201	102	49	50
Total	128	223	351	186	91	74

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

Terkait kantor selain kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim kantor pemasaran, pada triwulan I-2018, OJK menerima 149 pelaporan serta 70 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya yang

mencakup pelaporan pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat yang disampaikan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi serta perusahaan pembiayaan. Rincian pelaporan kantor selain kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 36 — Rekapitulasi Pelaporan Kantor Cabang IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018					
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	12	90	102	74	8	20	-
Perusahaan Pembiayaan	58	59	117	60	38	19	2
Total	70	149	219	134	46	39	2

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

8. Pelaporan Produk

Pada periode triwulan I-2018, terdapat 360 permohonan pelaporan/persetujuan

produk disertai 142 *outstanding* dari periode sebelumnya. Rincian pelaporan/persetujuan produk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 37 — Rekapitulasi Pelaporan Produk sampai dengan triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018				
Pencatatan Nama Lain	2	3	5	5	-	-
Pencatatan Perubahan Produk	9	96	105	61	21	23
Pencatatan Produk Baru	3	20	23	9	14	0
Persetujuan <i>Bancassurance</i>	34	102	136	129	-	7
Persetujuan Perubahan Produk	6	13	19	14	5	-
Persetujuan Produk Baru	84	123	207	135	61	11
Persetujuan ASO	4	3	7	3	3	1
Total	142	360	502	356	104	42

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

9. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan I-2018, terdapat 294 permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) disertai dengan 124 yang merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya. Permohonan yang telah

diselesaikan adalah sebanyak 188 permohonan. Sementara itu, sebanyak 183 permohonan masih menunggu proses penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 38 — Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

Perusahaan	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	25	83	108	55	40	13
Dana Pensiun	36	78	114	63	44	7
Perusahaan Pembiayaan	45	92	137	60	67	10
Perusahaan Modal Ventura	17	35	52	9	28	15
Perusahaan Penjaminan	1	6	7	1	4	2
Total	124	294	418	188	183	47

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Dari 188 permohonan yang telah diselesaikan, terdapat 149 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II - 39 — Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Pihak Utama IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

Jabatan	Perusahaan Asuransi dan Reasuransi		Dana Pensiun		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Modal Ventura		Perusahaan Penjaminan	
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
Komisaris	16	1	-	-	13	-	3	-	-	-
Dewan Pengawas	-	-	22	4	-	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	33	1	4	2	1	-
Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus	20	-	14	2	-	-	-	-	-	-
Pemegang Saham Pengendali	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Aktuaris	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor Internal	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	45	1	36	6	50	1	7	2	1	-

10. Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

Selama triwulan I-2018, terdapat 192 pelaporan perubahan pengurus IKNB, disertai dengan sebanyak 21 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari triwulan IV - 2017. Dari jumlah

dimaksud, sebanyak 184 telah dicatat dan sebanyak 29 sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 40 — Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	42	44	38	3	3
Dana Pensiun	19	82	101	78	-	23
Perusahaan Pembiayaan	-	59	59	59	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	8	8	8	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	1	1	1	-	-
Total	21	192	213	184	3	26

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

- 11. Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB**
 Pada triwulan I-2018, terdapat 336 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB disertai dengan sebanyak 13 pelaporan yang merupakan

outstanding dari triwulan IV-2017. Rincian pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 41 — Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	66	68	64	1	3
Dana Pensiun	11	221	232	216	-	16
Perusahaan Pembiayaan	-	49	49	49	-	-
Total	13	336	349	329	1	19

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

- 12. Pelaporan Pengangkatan/Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris dan Auditor Internal**
 Selama triwulan I-2018, terdapat 45 pelaporan pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal yang seluruhnya merupakan tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta lima pelaporan yang merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pelaporan tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal dimaksud telah diselesaikan pada triwulan I-2018 sebanyak 40 pelaporan dan sebanyak 10 pelaporan sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal perusahaan asuransi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 42 — Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan/Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris dan Auditor Internal sampai dengan Triwulan I-2018

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018				
Tenaga Ahli dan Aktuaris	4	38	42	36	2	4
Auditor Internal	1	7	8	4	4	-
Total	5	45	50	40	6	4

13. Pelaporan Pengangkatan/Pemberhentian Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan I-2018, terdapat 46 pelaporan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing dari perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan serta terdapat dua pelaporan yang

merupakan *outstanding* triwulan IV-2017. Adapun rincian pelaporan tenaga kerja asing dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 43 — Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB sampai dengan Triwulan I-2017

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditanggapi *)	Proses Analisis
	Outstanding Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	35	37	24	12	1
Perusahaan Pembiayaan	-	11	11	11	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Total	2	46	48	35	12	1

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

J. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

OJK melaksanakan fungsi pelayanan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan

perusahaan penilai kerugian asuransi. Data permohonan layanan selengkapnya dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel II - 44 — Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan I-2018

No.	IKNB	Permohonan Triwulan I-2018	Outstanding Triwulan IV-2017	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1.	Pemberian Izin Usaha	0	4	2	2	0
2.	Perubahan Nama	0	5	4	1	0
3.	Perubahan Kepemilikan	17	36	13	35	5
4.	Penambahan Modal	5	15	5	14	1
5.	Perubahan Pengurus	36	52	20	64	4
6.	Perubahan Alamat	16	16	15	16	1
7.	Pembukaan Kantor Cabang	5	7	6	6	0
8.	Pendaftaran Tenaga Ahli	29	35	22	33	9
9.	Pendaftaran Pialang	14	20	10	23	1
10.	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	3	2	4	1	0
11.	Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum	2	4	2	4	0
12.	Pendaftaran Agen Penjamin	84	1	11	74	0

*) Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atau masih proses analisis

Sampai dengan triwulan I-2018, telah terdaftar sebanyak 273 Akuntan Publik, 27 Konsultan Aktuaria, dan 132 Penilai yang berkegiatan di bidang IKNB.

Tabel II - 45 — Pendaftaran Profesi selama Triwulan I-2018

Jenis Profesi	Jumlah Profesi Terdaftar Triwulan I-2018	Jumlah Pendaftaran Profesi Triwulan I-2018
Akuntan Publik	31	273
Konsultan Aktuarial	1	27
Penilai	21	132
Total	53	432

Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengandali, dan Tenaga Ahli. Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan sepanjang triwulan I-2018 terlampir sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II - 46 — Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan I-2018

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan I-2018		Jumlah
	Direkomendasikan	Tidak Direkomendasikan	
Pemegang Saham Pengandali	10	-	10
Komisaris	40	7	47
Direksi	32	1	33
Auditor Internal	-	1	1
Total	82	9	91

Jumlah perusahaan penunjang usaha perasuransian pada triwulan I-2018 adalah 235 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 47 — Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Perusahaan	Sampai dengan Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	168	2	5	165
2.	Pialang Reasuransi	43	-	-	43
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	-	-	27
	Total	238	2	5	235

2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Kajian dan Pengaturan Konglomerasi Keuangan

Selama triwulan I-2018, terdapat dua kajian yang dilakukan untuk mendukung pengembangan pengawasan terintegrasi dengan detail sebagai berikut :

- Kajian Manajemen Risiko Transaksi Intragrup bagi Konglomerasi Keuangan.**
Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kerangka pengaturan manajemen risiko transaksi intragrup bagi Konglomerasi Keuangan.
- Kajian Metodologi dan Tools: *Early Warning Systems (EWS)* Konglomerasi Keuangan berkerjasama dengan World Bank.**
Kajian ini bertujuan untuk memberikan kerangka pengembangan EWS di level Konglomerasi Keuangan. Selama triwulan I-2018 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - Focus Grup Discussion* terkait konsep EWS existing
 - Dua kali pertemuan dengan agenda *Kick Off meeting* dengan World Bank dan konsultan terkait dan pembahasan *overview* konsep EWS existing di OJK serta cakupan dan rencana pelaksanaan kajian yang akan dilakukan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan menyusun *initial analysis* Kajian EWS bagi Konglomerasi Keuangan yang akan dibangun. Di samping itu, akan dilaksanakan juga kegiatan *workshop/knowledge sharing* dari *Technical Assistance* untuk membahas mengenai *best practice* EWS yang telah ada.

2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Untuk memperkuat proses pengawasan, pada triwulan I-2018 dilakukan pengkinian serta harmonisasi atas Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan Bank yang telah berlaku sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengkaji kembali relevansi SPO, peraturan-peraturan yang menjadi acuan, efektivitas serta efisiensi atas pelaksanaan pengawasan saat ini. Proses pengkinian tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pengawas Bank terkait serta dengan mengharmonisasikan Proses Pengawasan dengan rencana pengawasan OJK di masa yang akan datang.

Selain pengkinian SPO, pada triwulan I-2018 juga sedang disusun Ketentuan Internal OJK yang mendukung pengawasan Bank terkait pedoman bagi pengawas dalam mengawasi program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh perbankan.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Dalam rangka menindaklanjuti temuan *on-site visit Mutual Evaluation Review (MER)* di Indonesia, yaitu memenuhi salah satu persyaratan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT) yang direkomendasikan FATF, pada triwulan I-2018, sedang dilakukan kajian pelaksanaan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berbasis risiko pada BPR. Adapun rekomendasi FATF yang akan dikaji diantaranya meliputi: (1) Penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT pada

BPR; dan (2) Penetapan periode pelaksanaan pengawasan on-site APU dan PPT berbasis risiko. Kajian tersebut akan menjadi landasan penyusunan pedoman pengawasan pelaksanaan APU dan PPT berbasis risiko pada BPR.

2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal

Selama periode laporan, telah dilakukan penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal, antara lain:

1. **Enhancement C-Best Next Generation**
Pengembangan sistem utama KSEI (C-BEST) guna mengantisipasi peningkatan jumlah investor dan integrasi aplikasi-aplikasi di luar C-BEST yang selama ini digunakan sebagai pendukung aplikasi C-BEST.
2. **Enhancement e-Clears**
Pengembangan arsitektur sistem utama KPEI (e-CLEARs) guna mengantisipasi peningkatan kapasitas, performa, fleksibilitas dan kehandalan sistem sistem kliring KPEI.
3. **Pengembangan Infrastruktur Pasar Repo, Third Party Repo**
Pengembangan sistem *third party* Repo bertujuan untuk mengembangkan model bisnis dan sistem Repo yang efektif dan efisien serta *applicable* bagi pelaku pasar. KPEI sebagai *third party* menyediakan *back-office service* atas transaksi Repo yang sudah dilakukan para partisipan dalam pengelolaan agunan, *mark to market* dan *margin management*.
4. **Implementasi General Clearing Member (GCM)**
Implementasi GCM bertujuan memberikan pilihan kepada AB untuk fokus pada bisnis inti (terutama pemasaran) yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pemodal dan meningkatkan likuiditas pasar serta penurunan risiko secara keseluruhan dengan risiko antara KPEI sebagai CCP dengan GCM.

2.3.4 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan I-2018, dilakukan persiapan penyelenggaraan seminar program 1000 aktuaris yang akan dilaksanakan bersama FMIPA Universitas Andalas. Sampai dengan akhir periode, jumlah aktuaris (ASAI dan FSAI) adalah sebanyak 536 aktuaris (FSAI: 265 dan ASAI: 271).

B. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait SKKNI selama triwulan I-2018, yaitu melakukan permintaan nama tim pengurus atau tim verifikasi SKKNI Bidang Perasuransian kepada ketua STMA Trisakti, ketua AAUI dan AAJI, ketua APKAI, PAI, APPARINDO, dan AASI dan melakukan penyusunan unit kompetensi “mengelola investasi” dan “mengelola sistem informasi” pada SKKNI Bidang Perasuransian.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pada triwulan I-2018, stabilitas sistem keuangan nasional terjaga dengan baik, didukung oleh kinerja industri jasa keuangan yang solid serta profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali. Sejalan dengan *outlook* perekonomian domestik yang membaik ke depan, OJK terus mendorong agar sektor jasa keuangan berkontribusi semakin optimal dalam mendorong pertumbuhan, dengan tetap memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

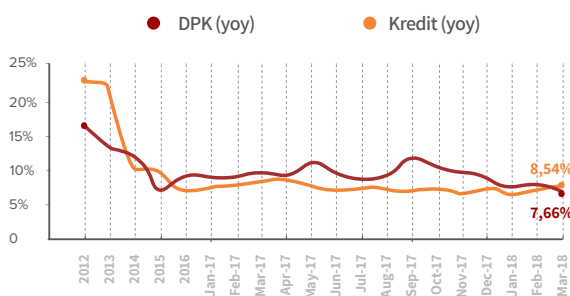
2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Secara umum stabilitas sektor jasa keuangan dalam negeri pada triwulan I-2018 dalam kondisi terjaga. Indikator lembaga jasa keuangan terpantau stabil dengan kinerja intermediasi yang mencatat sejumlah perbaikan. Seiring dengan perkembangan positif tersebut, terdapat beberapa faktor eksternal yang meningkatkan volatilitas di pasar, seperti kenaikan *Fed Funds Rate* pada Maret 2018 serta meningkatnya potensi terjadinya konflik dagang antara Tiongkok dan AS. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan menyebabkan tingkat risiko sektor jasa keuangan di triwulan I-2018 ini sedikit meningkat jika dibandingkan kondisi pada akhir tahun.

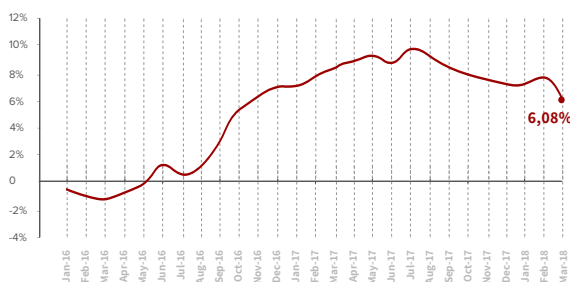
Kinerja pasar keuangan domestik terpantau sedikit mengalami tekanan. Pada triwulan I-2018, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup pada level 6.189,65 atau melemah 2,62% (*qtd*). Investor nonresiden masih melakukan aksi jual di pasar saham sebesar Rp23,4 triliun. Namun, volume kepemilikan saham oleh investor nonresiden tercatat mengalami peningkatan, meskipun secara nilai mengalami penurunan akibat harga saham yang terkoreksi. Sementara di pasar Surat Berharga Negara (SBN), meskipun imbal hasil SBN terpantau meningkat rata-rata 18 bps pada triwulan I-2018, investor nonresiden membukukan *net buy* signifikan sebesar Rp22,6 triliun. Tekanan pada pasar modal domestik tersebut diharapkan dapat diredam oleh kinerja emiten yang terpantau masih stabil, serta meningkatnya persepsi investor atas prospek perekonomian Indonesia.

Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada triwulan I-2018 mencatat sejumlah perkembangan positif sejalan dengan mulai terlihatnya arah perbaikan ekonomi domestik pada paruh kedua 2017. Kredit yang disalurkan perbankan tercatat tumbuh sebesar 8,54% (yoy). Angka ini juga meningkat dibandingkan pada akhir 2017 (8,24%). Sementara itu di industri pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan tercatat tumbuh secara moderat sebesar 6,08% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (7,05%).

Grafik II - 4 — Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan



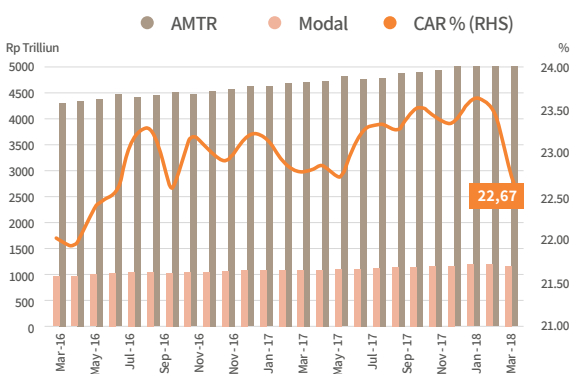
Grafik II - 5 — Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan



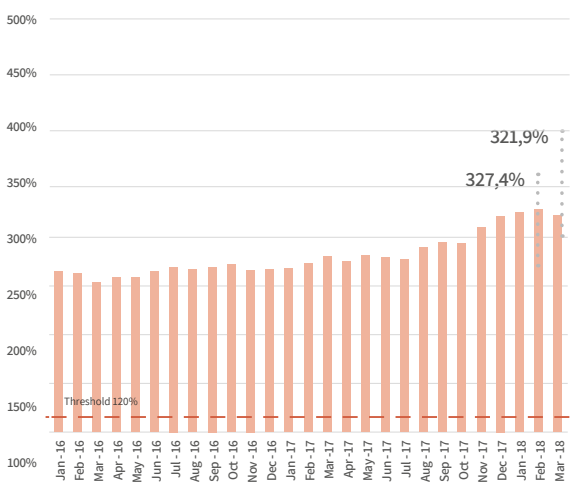
Pemanfaatan pasar modal Indonesia sebagai sumber dana korporasi masih terus melanjutkan peningkatan. Sepanjang triwulan I-2018, penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp30,5 triliun yang mayoritas dilakukan oleh Emiten di sektor jasa keuangan yang disusul oleh Emiten properti dan infrastruktur. Penghimpunan dana di pasar modal ini akan terus berlanjut, mengingat terdapat 38 perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dalam *pipeline* dengan nilai indikatif sebesar Rp33,0 triliun. Kegunaan penghimpunan dana ini sebagian besar untuk membiayai modal kerja. Proporsi pembiayaan untuk ekspansi terpantau naik dan proporsi pembiayaan untuk membayar utang yang lebih rendah mengindikasikan kinerja Emiten yang membaik dan lebih ekspansif.

Permodalan industri jasa keuangan terpantau pada level yang memadai untuk mendukung ekspansi kredit/ pembiayaan sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan risiko di masa yang akan datang. Hal ini tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan serta *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa yang jauh berada di atas ketentuan minimum. CAR tercatat sebesar 22,67%. Sementara itu, RBC asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing tercatat sebesar 321% dan 480%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan sebesar 3,08 kali, jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali.

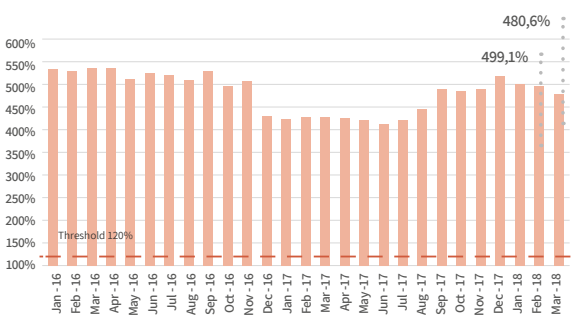
Grafik II - 6 — *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perbankan



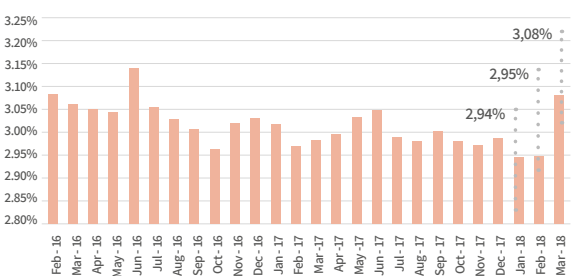
Grafik II - 7 — *Risk Based Capital* (RBC) Asuransi Umum



Grafik II - 8 — *Risk Based Capital* (RBC) Asuransi Jiwa



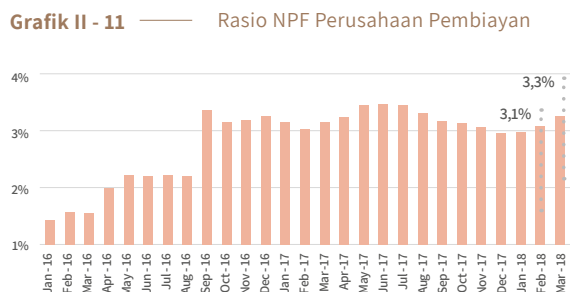
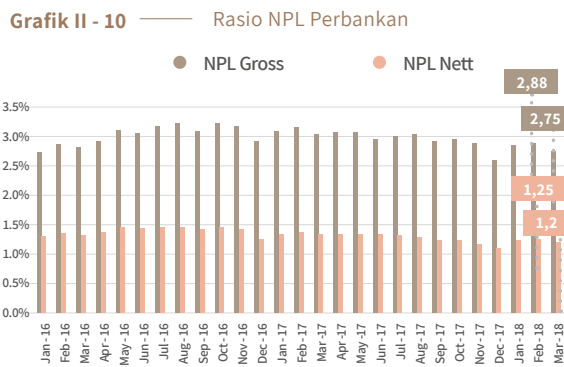
Grafik II - 9 — *Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan



Dari sisi likuiditas lembaga jasa keuangan, alat likuid perbankan dinilai masih memadai untuk mengantisipasi potensi risiko likuiditas. Pada akhir triwulan I-2018, rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) tercatat sebesar 99,1% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak

Ketiga (AL/DPK) tercatat masih tinggi pada level 20,7%. Terdapat kecenderungan penurunan likuiditas sepanjang Maret 2018 sejalan dengan penyaluran kredit yang meningkat pada bulan tersebut.

Pada triwulan I-2018, rasio kredit/pembiayaan bermasalah lembaga jasa keuangan terpantau masih pada level yang *manageable* sejalan dengan konsolidasi yang dilakukan oleh perbankan dalam mengelola risiko kredit. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* perbankan per Maret 2018 tercatat masing-masing sebesar 2,75% dan 1,2% (Desember 2017: 2,59% *gross* dan 1,11% *net*). Nilai nominal restrukturisasi kredit dan hapus buku di industri perbankan masih melanjutkan peningkatan, namun dengan pertumbuhan yang semakin melambat. Sementara itu, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga masih terpantau pada level yang *manageable* di bawah batas wajar dan tercatat sebesar 3,25% pada akhir Maret 2018 (Desember 2017: 2,96%).



Pada triwulan I-2018, risiko pasar lembaga jasa keuangan terpantau relatif rendah meskipun pasar keuangan domestik sedikit tertekan. Posisi Devisa Neto (PDN) sektor perbankan per Maret 2018 tercatat sebesar 1,75% masih rendah dari batas maksimum sebesar 20%. Sementara itu, nilai investasi industri reksa dana, perasuransian, dan dana pensiun juga melanjutkan peningkatan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana pada triwulan I-2018 tumbuh sebesar 8,52% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing meningkat sebesar 1,39% dan 1,18% pada periode yang sama.

2.4.2 Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, OJK terus melaksanakan koordinasi dengan

lembaga-lembaga terkait salah satunya melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan I-2018, keempat lembaga anggota KSSK (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan) melaksanakan Rapat KSSK dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan IV-2017 berada dalam kondisi normal. KSSK optimis bahwa kondisi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan ke depan akan tetap terkendali, sehingga dapat mendukung momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik.

Lembaga-lembaga anggota KSSK akan mengoptimalkan bauran kebijakan dalam menjaga momentum perbaikan ekonomi dari tantangan-tantangan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Adapun beberapa tantangan yang perlu dicermati ke depan berasal dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, KSSK mencermati kenaikan lanjutan *Fed Funds Rate* serta normalisasi neraca *The Fed* dan negara maju, moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta peningkatan dinamika konflik geopolitik. Sementara dari sisi domestik, KSSK mencermati tantangan dari dampak peningkatan harga komoditas minyak terhadap kondisi perekonomian domestik, aliran dana nonresiden pada pasar keuangan, permintaan kredit, serta persepsi pasar menjelang pesta politik tahun 2018 dan 2019.

KSSK berkomitmen untuk terus mendorong sinergi kebijakan dan reformasi struktural yang diperlukan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Kerja KSSK 2018 yang meliputi pengkajian implementasi peraturan pelaksanaan UU PPKSK, pelaksanaan simulasi penanganan krisis keuangan, operasionalisasi Sekretariat KSSK, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui program pertukaran pegawai antar lembaga KSSK.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

1. Workshop Ketentuan Literasi dan Inklusi Keuangan

OJK menyelenggarakan rangkaian kegiatan *workshop* POJK Nomor 7/POJK.07/2016 dan peraturan pelaksanaannya serta mekanisme penyampaian laporan pada sistem PEDULI kepada pihak internal maupun eksternal. Rangkaian kegiatan ini mengundang perwakilan Bank Umum dan BPR, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi, Perusahaan Modal Ventura, Penjaminan, Asosiasi, Pergadaian, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Workshop dibagi menjadi tiga *round* yaitu bagi pengawas, pegawai EPK dan PUJK. Materi *workshop* meliputi *monitoring* laporan rencana dan realisasi kegiatan dalam

rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, evaluasi terhadap kegiatan yang dilaporkan oleh PUJK di wilayah kerja KR/KO dan masukan kepada kantor pusat serta pengenalan Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) untuk laporan literasi dan inklusi keuangan.

2. Pembahasan Sanksi dalam RPKD Market Conduct

OJK membahas revisi pengaturan rancangan Peraturan Dewan Komisioner tentang Pengawasan *Market Conduct* Sektor Jasa Keuangan terkait sanksi. Selain itu, dilakukan pula pembahasan mengenai materi delegasi wewenang yang akan diajukan dalam hal pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh bidang EPK. Secara umum, perumusan sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

Tabel II - 48 ——— Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Sanksi yang dikenakan oleh pengawas <i>market conduct</i> dan diimplementasikan oleh pengawas <i>market conduct</i>	Sanksi yang pengenaannya melalui forum koordinasi pengawasan dan diimplementasikan oleh pengawas <i>market conduct</i>	Sanksi yang pengenaannya melalui forum koordinasi pengawasan dan diimplementasikan oleh pengawas prudensial
Teguran dan peringatan tertulis	Denda selain terkait dengan laporan rutin	Penurunan tingkat kesehatan PUJK
Denda terkait dengan laporan rutin	Pengumuman oleh OJK di situs resmi OJK	Pembatasan kegiatan usaha sebagian dan/ atau keseluruhan termasuk larangan PUJK untuk memasarkan produk untuk lini usaha tertentu
	Memerintahkan PUJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen	Rekomendasi untuk pencantuman dalam <i>track record</i> maupun daftar pihak yang mendapat predikat Tidak lulus dalam <i>fit and proper test</i>

3. Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan tema “Mendukung Pertumbuhan melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Layanan Pengaduan Konsumen di Padang

OJK menyelenggarakan sosialisasi mengenai ketentuan di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Padang dengan tema “Mendukung Pertumbuhan Melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Layanan Pengaduan Konsumen”. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait peranan pengaduan konsumen keuangan dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Sosialisasi dihadiri oleh 208 peserta yang berasal dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan, asosiasi lembaga jasa keuangan, dan akademisi.

4. Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan tema “Mendorong Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta layanan Pengaduan Konsumen” di Pekanbaru

OJK menggelar sosialisasi ketentuan di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan tema “Mendukung Pertumbuhan Melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Layanan Pengaduan Konsumen”. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman serta *awareness* Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait RPOJK Layanan Pengaduan Konsumen sehingga diharapkan PUJK memiliki kesiapan pada saat ketentuan tersebut diberlakukan. Selain materi terkait Layanan Pengaduan Konsumen, PUJK juga diberikan materi mengenai POJK peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan harapan PUJK yang ada di daerah-daerah khususnya di Provinsi Riau dapat berperan aktif dalam kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Sosialisasi dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari PUJK, asosiasi lembaga jasa keuangan, dan akademisi.

5. Pembahasan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKTI)

OJK menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Komisioner tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (RPDK SLKT). Terdapat usulan untuk menambahkan alur kegiatan “konsultasi” yang dilakukan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan/atau fungsi layanan konsumen baik di kantor pusat, kantor regional maupun kantor OJK. OJK merumuskan kriteria perihal yang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan konsultasi, yaitu:

- Mempengaruhi risiko reputasi dan risiko hukum OJK;
- Berpotensi membahayakan keamanan dan kenyamanan;
- Konsumen sering datang ke Kantor OJK;
- Terkait dengan *high profile* di daerah setempat; atau
- Menjadi perhatian masyarakat setempat.

6. Kajian Pembentukan *Self Regulatory Organization* (SRO) bagi *Industri Financial Technology*

OJK menggodok rencana pembentukan *Self Regulatory Organization* (SRO) bagi industri *Financial Technology* (*Fintech*). Sebagai pembahasan awal, telah dibahas isu-isu perlindungan konsumen yang patut diperhatikan terkait dengan pembentukan SRO *Fintech*. Terkait dengan isu perlindungan konsumen bagi industri *Fintech* telah diakomodasi dalam bab yang secara khusus membahas mengenai ketentuan perlindungan konsumen dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan-ketentuan dimaksud mengacu kepada POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, rancangan pedoman perilaku bagi penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang tengah disusun oleh AFI juga

telah mencakup isu perlindungan konsumen, antara lain mengenai transparansi dan perlakuan yang adil.

Rekomendasi yang diusulkan antara lain sebagai berikut:

- a. SRO *Fintech* yang dapat dilakukan di Indonesia ialah SRO yang diinisiasi oleh regulator dan dilakukan oleh asosiasi
- b. Penyusunan pedoman perilaku dengan memasukan ketentuan seperti standar informasi dalam *disclaimer*, penyampaian informasi-informasi penting seperti perhitungan *risk grade*, standarisasi istilah, serta keamanan dan kerahasiaan data;

2.5.2 Inklusi Keuangan

1. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pada awal 2018, telah terbentuk 63 TPAKD yang terdiri dari 30 TPAKD pada tingkat provinsi dan 33 TPAKD pada tingkat kabupaten/kota. Atas pelaksanaan program dimasing-masing TPAKD, telah dilakukan analisis dengan mengacu pada empat kriteria dengan hasil sebagai berikut:

1. Perluasan akses keuangan di daerah tercatat sebesar 41,6% meningkat dari periode tahun sebelumnya yaitu 40,9%.
2. Penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan daerah tercatat sebesar 24,9% meningkat dari periode tahun sebelumnya yaitu 18,2%.
3. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan tercatat sebesar 22,6% mengalami penurunan dari periode sebelumnya yaitu 28,3%.
4. Kegiatan pendampingan/asistensi TPAKD tercatat sebesar 10,9% mengalami penurunan dari periode sebelumnya yaitu 12,6%.

Selama triwulan I-2018, terdapat tiga TPAKD yang telah dikukuhkan, yaitu:

1. TPAKD Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. TPAKD Provinsi Papua Barat.
3. TPAKD Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

2. Tabungan Pemuda dan Mahasiswa (SIMUDA)

OJK melakukan pertemuan pembahasan dengan 10 perwakilan dari industri perbankan terkait serta kendala yang dihadapi dalam rencana implementasi SiMuda pada masing-masing bank. Dari hasil pertemuan, diketahui fitur SiMuda InvestasiKu akan digunakan oleh empat bank, fitur SiMuda RumahKu akan digunakan oleh enam bank dan fitur SiMuda EmasKu akan digunakan oleh satu bank. Sementara itu, mengenai perizinan, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai kewajiban Pengajuan Aktivitas Baru (PAB) dan perizinan *bancassurance* masing-masing bank. Dalam implementasinya, pada beberapa bank akan

menggunakan skim dari produk eksisting dalam pengembangan SiMuda sehingga hanya memerlukan penyesuaian dari sisi fitur dan pengembangan sistem IT. Bank diperkenankan untuk melakukan *re-branding* dengan tabungan eksisting bank.

3. Pengembangan Model Inklusi Keuangan Untuk Pedesaan

Program ini merupakan Pengembangan Model Inklusi Keuangan Untuk Pedesaan dengan agenda penyusunan model bisnis dan studi kelayakan pendirian LKM atau LJK lainnya melalui pemberdayaan BUMDes dan BUMAdes. OJK melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyumas untuk *Focus Group Discussion* “*Kick-off dan Sosialisasi Rencana Bisnis BUMDesa Bersama*” dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat rencana pembentukan BUMDesa Bersama di Kabupaten Banyumas. BUMDesa tersebut merupakan inisiasi dari 25 desa yang masing-masing telah memiliki Badan Kredit Desa (BKD) dan mempunyai visi untuk menggabungkan usahanya agar dapat menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai usaha yang dijalankan oleh BUMDesa bersama. Dalam pertemuan tersebut, kendala yang dihadapi oleh BPR BKD Banyumas adalah terkait keleluasaan Kepala Desa dalam mengembangkan BUMDesa Bersama untuk membuat BPR yang masih terbatas karena adanya peraturan yang mengharuskan bahwa minimal saham Pemerintah Daerah dalam BPR adalah 51% sehingga timbul konflik kepentingan.
- b. Dalam kegiatan tersebut, diselenggarakan juga *Focus Group Discussion*, kunjungan langsung terkait praktik *business matching* dari pihak swasta dengan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Bersama, *knowledge sharing* dengan Kepala Desa Pandak yang mendapatkan *Foreign Direct Investment* dari Korea Selatan, dan penandatanganan peresmian BUMDesa Kabupaten Banyumas.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus (Klaster)

OJK menyelenggarakan pertemuan untuk membahas KUR Klaster terkait peremajaan (*replanting*) untuk komoditi Kelapa Sawit. Pertemuan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Perekonomian bertujuan untuk persiapan implementasi KUR khusus peremajaan (*replanting* sawit) yang akan dilaksanakan di Rokan Hulu, Riau. Dalam pertemuan tersebut, telah diidentifikasi beberapa kendala teknis dalam implementasi KUR Klaster antara lain:

1. Mekanisme Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) diharapkan mampu mengakomodir klaim subsidi bunga kredit investasi dan kredit *Interest During Construction* (IDC);
2. Permasalahan terkait agunan yang diperlukan dalam persyaratan pemberian kredit KUR;
3. Kepastian pencairan dana hibah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapsa Sawit (BPDP KS)

- dilanjutkan dengan skema KUR Khusus;
4. Diperlukannya petunjuk teknis (Juknis) bagi perbankan dalam implementasi KUR khusus peremajaan (*replanting* sawit).

OJK juga telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan bank partisipan dalam rangka pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) KUR khusus *replanting* peremajaan sawit. Fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu terkait dengan identifikasi permasalahan implementasi KUR Khusus (Klaster) dan penyusunan penyusunan Juknis.

5. **Workshop** Terkait Ketentuan Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Pengenalan Sistem Informasi Pengaduan Konsumen dan Edukasi Literasi (SiPEDULI)

Workshop ketentuan literasi dan inklusi keuangan serta pengenalan SiPEDULI diselenggarakan untuk sesi pelatihan modul aplikasi SiPEDULI pada pelaporan inklusi. Peserta dari *workshop* ini adalah seluruh PUJK yang terdiri dari perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, penjaminan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Pada kegiatan *workshop* tersebut, beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

1. Terdapat kewajiban PUJK untuk menyampaikan laporan kegiatan inklusi keuangan (laporan rencana kegiatan inklusi keuangan serta laporan realisasi kegiatan inklusi keuangan). Laporan disampaikan bersamaan dengan laporan Rencana Bisnis serta dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SiPEDULI.
2. PUJK diharapkan memperhatikan batas akhir waktu penyampaian laporan inklusi keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penyampaian laporan Rencana Bisnis. Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan Rencana Bisnis secara spesifik pada industri tersebut, PUJK wajib mengacu pada ketentuan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
3. *Person in Charge* (PIC) dalam aktifitas pelaporan dan pelaksanaan kegiatan inklusi keuangan dapat berada pada unit kerja diluar dari unit manajemen risiko, audit internal, hukum dan kepatuhan.
4. Dalam hal penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan inklusi keuangan, dapat dilakukan berdasarkan permintaan OJK (pengawas) dan/ atau inisiatif PUJK. Apabila PUJK ingin mengajukan koreksi, maka pengajuan koreksi hanya dapat dilakukan satu kali sebelum 30 Juni atau 20 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan inklusi keuangan.

5. Video tutorial sebagai panduan bagi PUJK dalam menggunakan aplikasi SiPEDULI.

6. Kunjungan Queen Maxima

Kunjungan ke Indonesia oleh Queen Maxima dilaksanakan dalam rangka membahas perkembangan implementasi kebijakan keuangan inklusif di Indonesia sebagai tindak lanjut kunjungan pertamanya pada 2016.

Selain kunjungan bilateral meeting dengan OJK, Queen Maxima juga melakukan ke beberapa kementerian terkait pelaku *Fintech* (Gojek). Queen Maxima melakukan kunjungan ke Lampung untuk melihat program pola pembinaan dan mitra antara perusahaan dan petani jagung kemudian dilanjutkan dengan round table meeting terkait *Inclusive Agriculture Value Chain Financing*. Selanjutnya, dilakukan *round table* terkait *fintech* dan dilanjutkan *bilateral meeting* dengan beberapa menteri dan pimpinan lembaga terkait.

7. Keuangan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

OJK menyelenggarakan FGD “Penyusunan PTO bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Kegiatan tersebut dibagi menjadi empat sesi yaitu sesi Perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan Regulator. Adapun pembahasan dari FGD tersebut antara lain adalah :

- Gambaran inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas secara umum;
- Pembahasan kebijakan penyediaan produk dan program keuangan bagi penyandang disabilitas;
- Pembahasan mengenai pendamping bagi penyandang disabilitas;
- Pembahasan mengenai edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas;
- Pembahasan mengenai produk dan program keuangan bagi penyandang disabilitas;
- Pembahasan mengenai pelayanan keuangan bagi penyandang disabilitas;
- Pembahasan mengenai karyawan penyandang disabilitas pada lembaga perbankan;
- Hambatan yang dihadapi, baik hambatan administratif, infrastruktur, dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas; dan
- Solusi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut.

2.5.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

1. Edukasi Keuangan bagi Komunitas

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa salah satu tujuan pembentukan OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sepanjang triwulan I-2018, OJK melaksanakan edukasi keuangan sebanyak sembilan kali edukasi keuangan di Kota Jambi,

Purwokerto, Bukittinggi, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Atambua, Palangka Raya, Botang dan Jakarta. Kegiatan edukasi keuangan tersebut dihadiri oleh Pelaku UMKM, Nelayan, Masyarakat Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Karyawan, dan Mahasiswa dengan total peserta sebanyak 1.019 orang. Para peserta edukasi tersebut diberikan materi mengenai Pengenalan OJK, IJK, dan Waspada Investasi Ilegal, Perencanaan Keuangan, Kewirausahaan, dan Pengenalan Produk Jasa Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat seperti materi Pengenalan KUR, Tabungan, Tabungan emas, Pasar Modal, Asuransi, Laku Pandai, dan *Financial Technology*.

2. Edukasi Waspada Investasi

Sebagai upaya preventif terhadap maraknya penyebaran modus investasi ilegal yang merugikan masyarakat, OJK melaksanakan kegiatan waspada investasi ilegal. Kegiatan edukasi waspada investasi tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah yang banyak terjadi modus penawaran investasi ilegal. Kegiatan tersebut diikuti oleh Aparatur Sipil Negara, Pelaku UMKM, Ibu Rumah Tangga, Civitas Akademika, dan Karyawan.

Selama triwulan I-2018, OJK melaksanakan program edukasi waspada investasi ilegal kepada masyarakat di enam Kota/Kabupaten yaitu Jambi, Purbalingga, Lombok Timur, Padang, Palangka Raya, dan Lampung. Selain materi waspada investasi, peserta dibekali dengan materi perencanaan keuangan dan pengenalan produk jasa keuangan yang menjadi pilihan oleh masyarakat sebagai bentuk investasi yang legal seperti investasi di Pasar Modal Indonesia.

3. Sinergi Edukasi OJK dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bagi Dosen Perguruan Tinggi

OJK bekerjasama dengan Kemenristekdikti menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan serta mempersiapkan SDM yang dapat mengajarkan kembali materi literasi keuangan kepada mahasiswa sebagai salah satu *essential life skill* dalam menghadapi dunia kerja maupun memiliki usaha mandiri. Kegiatan tersebut diikuti oleh 34 orang dosen perguruan tinggi dari 27 perguruan tinggi di wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Lumajang, dan Jember. Sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan *pre* dan *post test* kepada para peserta untuk dapat mengetahui peningkatan indeks literasi keuangan mereka. Dari hasil *pre* dan *post test* tersebut terdapat peningkatan sebesar 7%. Peserta mendapatkan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi dengan materi sebagai berikut:

- a. Buku 1: OJK dan Pengawasan Mikroprudensial
- b. Buku 2: Perbankan
- c. Buku 3: Pasar Modal
- d. Buku 4: Perasuransian
- e. Buku 5: Lembaga Pembiayaan

- f. Buku 6: Dana Pensiun
- g. Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- h. Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah
- i. Buku 9: Perencanaan Keuangan

4. Sinergi Edukasi dengan Kemendikbud bagi Guru SMP

OJK bersinergi dengan Kemendikbud menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi guru IPS tingkat SMP di wilayah Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 orang Guru IPS tingkat SMP. Materi yang disampaikan kepada peserta antara lain sekilas tentang OJK, maju berkat pembiayaan, bank mempermudah transaksi kita, asuransi melindungi kita, sumber pendanaan melalui pergadaian, pasar modal mencerahkan masa depan, dana pensiun menyejahterakan masa tua, dan ekonomi syariah.

5. Sinergi Edukasi dengan Kemendikbud bagi Guru SD

OJK bersinergi dengan Kemendikbud menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi guru IPS tingkat SD di wilayah Ternate. Kegiatan tersebut diikuti oleh 91 orang Guru IPS tingkat SD. Adapun materi yang diberikan kepada peserta merupakan materi yang terdapat di dalam buku Mengenal Jasa Keuangan bagi tingkat Sekolah Dasar yang mencakup materi antara lain terkait OJK, Pembiayaan, Bank, Asuransi, Pergadaian, Pasar Modal, Dana Pensiun, dan Ekonomi Syariah.

6. *Training of Trainers* bagi Stakeholders TKI di NTB

OJK bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainers* (ToT) bagi *stakeholders* TKI di wilayah Provinsi NTB. Sebanyak 103 peserta yang hadir merupakan *stakeholders* TKI yang berinteraksi langsung dan memiliki *multiplier effect* untuk meneruskan materi ajar kepada TKI/calon TKI, yaitu terdiri dari Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Instruktur Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI BP3TKI Mataram, Petugas Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Kabupaten Lombok Barat, LSM pemerhati buruh migran, Perangkat Desa dan Dusun, *Community Organizer* (CO), serta Anggota Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM).

Peserta menerima rangkaian materi pengenalan OJK, waspada investasi, perencanaan keuangan, dan pengenalan produk/layanan jasa keuangan yang sesuai bagi TKI, yaitu:

1. Pengenalan OJK dan Waspada Investasi;
2. Perencanaan Keuangan Rahasia Hidup Menuju Sejahtera;
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia;
4. Edukasi Keuangan dan Perbankan – Modul Remitansi
5. BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan Sosial Calon TKI/TKI

7. Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* di Universitas Khairun Ternate

OJK melaksanakan serangkaian peluncuran program Galeri Investasi *Mobile* yang diselenggarakan salah satunya di Universitas Khairun Ternate. Program tersebut merupakan kerjasama OJK dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Galeri Investasi Universitas Khairun Ternate. Kegiatan dihadiri oleh kurang lebih 189 peserta antara lain Pelaku UMKM, Karyawan, Ibu Rumah tangga (IRT), Aparatur Sipil Negara, dan Civitas Akademika. Acara peluncuran Galeri Investasi *Mobile* dilanjutkan dengan Seminar Pasar Modal di Indonesia. Untuk mengukur peningkatan pemahaman, peserta diberikan *pre dan post test* dengan kenaikan tingkat pemahaman sebesar 3,14%.

8. Edukasi dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai di Jakarta

Sebagai bentuk dukungan OJK terhadap program pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), OJK menyelenggarakan penguatan edukasi dan sosialisasi (edusos) BPNT bagi perangkat daerah, pendamping BPNT, dan pengelola agen bank penyalur yang berasal dari 83 kota/kabupaten di 19 provinsi di Indonesia. Inisiatif ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) 2018 terkait Persiapan Pelaksanaan BPNT 2018. Edusos BPNT dilakukan sebagai *training of trainers* yang bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah, pendamping BPNT, dan pengelola agen bank penyalur mengenai mekanisme penyaluran BPNT, selaku pelaksana penyaluran BPNT di daerah. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan Pemantauan Pelaksanaan Program BPNT Oktober – November 2017, sosialisasi program BPNT masih lemah sehingga pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang prinsip-prinsip dan informasi dasar BPNT masih relatif rendah. Selain itu, sosialisasi bagi perangkat daerah mengenai mekanisme penyaluran BPNT masih terbatas, sehingga dapat berisiko pada penyaluran bantuan yang kurang optimal. Dengan demikian, dilakukan edusos BPNT yang lebih fokus dan efektif sebagai penguatan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Rangkaian edukasi dan sosialisasi BPNT ini diselenggarakan pada tiga kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pelaksanaannya dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden, TNP2K, Bank Indonesia, Kementerian Sosial, Bappenas, dan Bank Himbara. Sebanyak 192 peserta dari 31 kota/kabupaten pada delapan provinsi, sebagai berikut:

Tabel II - 49 — Peserta Rangkaian Kegiatan Sosialisasi BNPT

Prov. Kalimantan Utara	Kab. Tasikmalaya	Kota Jakarta Selatan
Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Bekasi	Kab. Tabalong
Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Subang	Kab. Bolaang Mongondow
Prov. Sulawesi Utara	Kab. Karawang	Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Cirebon	Kab. Gowa
Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Ciamis	Kab. Maros
Prov. Gorontalo	Kab. Majalengka	Kab. Luwu Timur
Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu	Kab. Takalar
Kab. Bogor	Kota Depok	Kab. Sidenreng Rappang
Kab. Sukabumi	Kota Jakarta Pusat	Kab. Kotawaringin Barat
Kab. Bandung	Kota Jakarta Utara	Kota Tarakan
Kab. Bandung Barat	Kota Jakarta Barat	Kota Palu
Kab. Garut	Kota Jakarta Timur	Kota Gorontalo

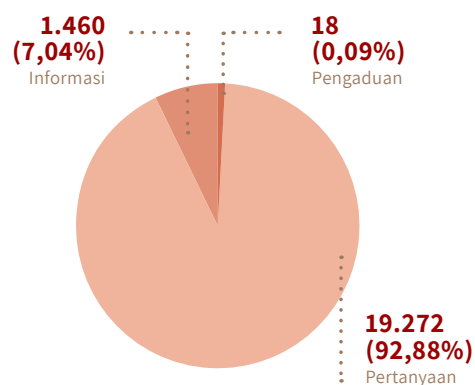
Materi yang disampaikan antara lain Arah dan Kebijakan Bantuan Sosial Pangan, Mekanisme BPNT, dan dilengkapi dengan diskusi kelompok terkait isu utama dalam program BPNT, seperti kesiapan data KPM dan penyiapan E-warong, penyiapan *contact person* untuk sosialisasi dan edukasi, penyiapan registrasi, pengecekan dan penggantian KPM, serta pemanfaatan dan penerapan prinsip BPNT. Selain materi BPNT, peserta juga menerima materi pengenalan OJK dan waspada berinvestasi, pengelolaan keuangan, dan Gerakan Nasional Non Tunai

2.5.4 Perlindungan Konsumen

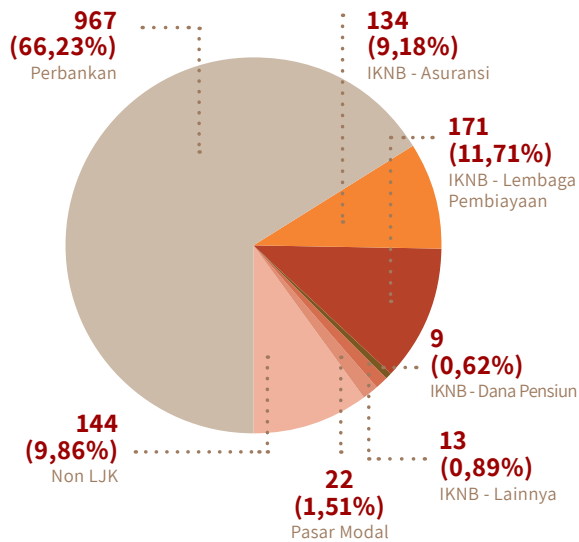
Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Pada triwulan I-2018, layanan konsumen OJK menerima 20.750 layanan yang terdiri dari 1.460 penerimaan informasi, 19.272 pertanyaan dan 18 pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 242% (14.678 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah 6.072 layanan.

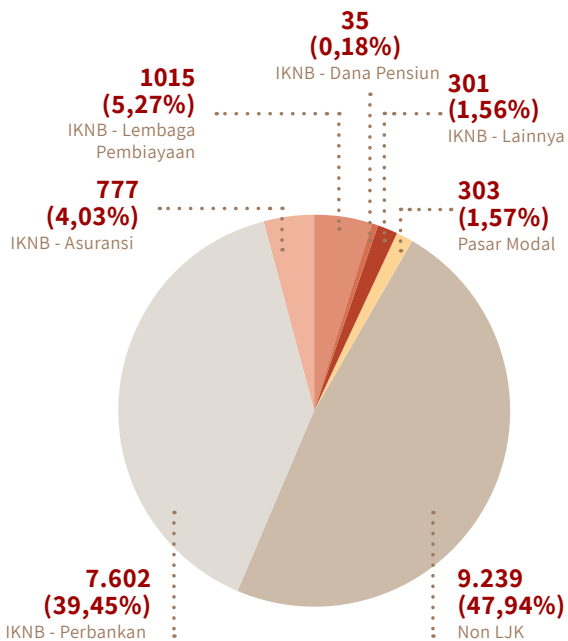
Grafik II - 12 — Layanan Masuk Triwulan I-2018



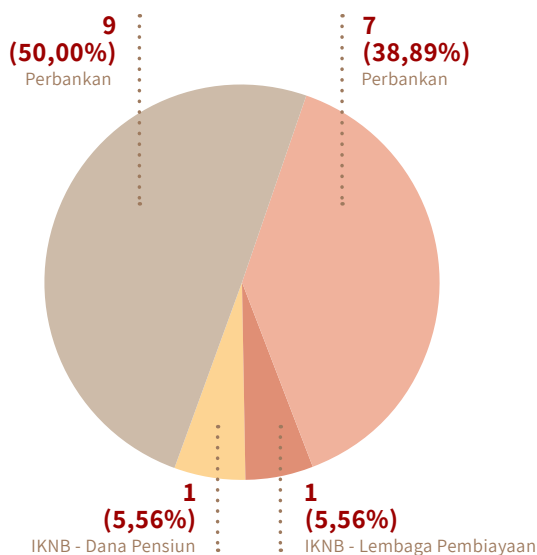
Grafik II - 13 Informasi per Sektor Triwulan I-2018



Grafik II - 14 Pertanyaan per Sektor Triwulan I-2018

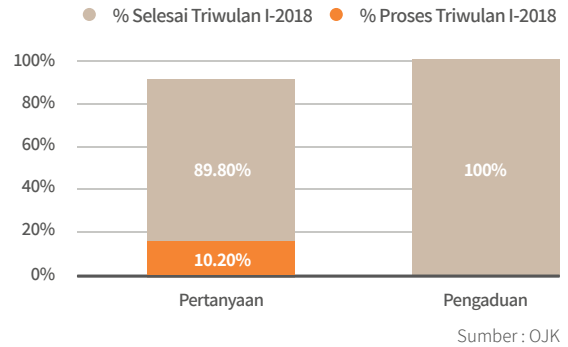


Grafik II - 15 Pengaduan per Sektor Triwulan I-2018



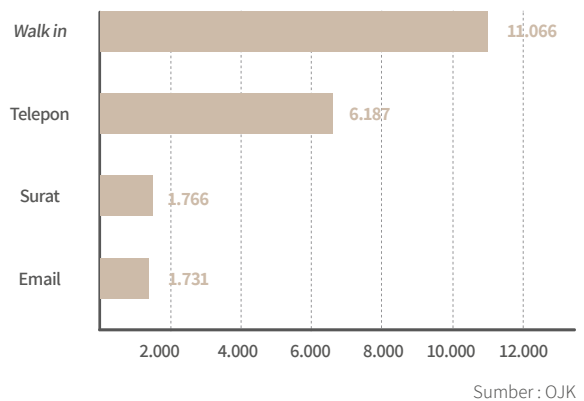
Pada triwulan I-2018, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 97,1% (18.706 layanan), sedangkan layanan pengaduan selesai 100% (18 pengaduan).

Grafik II - 16 Grafik Tingkat Penyelesaian Layanan Triwulan I-2018



Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat, faksimili dan walk in. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen sebagai berikut:

Grafik II - 17 Kanal Layanan Triwulan I-2018



Berdasarkan grafik kanal layanan triwulan I-2018, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK dengan atau datang langsung ke kantor OJK.

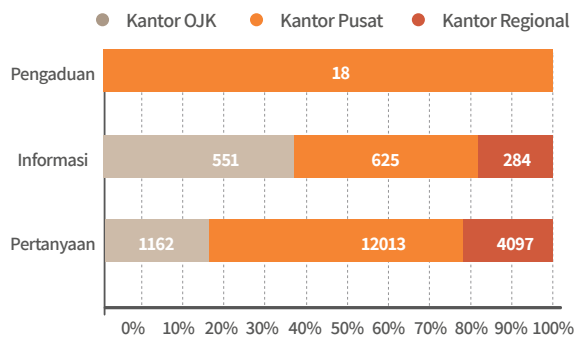
Tabel II - 50 Penerimaan Layanan OJK

Penginput	Total Layanan
Kantor Pusat	12.656
Kantor Regional	4.381
Kantor OJK	3.713
Total	20.750

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar diseluruh Indonesia untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan, secara total satuan kerja di Kantor Pusat menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 61% dari total penerimaan layanan pada triwulan I – 2018.

Grafik II - 18 — Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

2.5.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Asistensi Layanan Konsumen OJK

Sepanjang triwulan I-2018, OJK melakukan dua kali asistensi Layanan Konsumen OJK yaitu di Kediri dan Banjarmasin. Peserta yang hadir pada kegiatan ini merupakan perwakilan dari PUJK dan internal OJK. Materi yang disampaikan terkait statistik dan data perkembangan penanganan pengaduan secara keseluruhan, *refreshment* penggunaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (Sistem *Customer Relationship Management* atau CRM) dan proses penanganan pengaduan di wilayah Kantor OJK dan Kantor Regional OJK. Selain itu, materi yang disampaikan kepada PUJK adalah terkait kewajiban penanganan pengaduan di internal PUJK, Sosialisasi Perlindungan Konsumen serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan kegiatan Asistensi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen Terintegrasi OJK sesuai Perubahan PDK No.1/PDK.07/2016, mengembangkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK guna mendukung percepatan penanganan pengaduan dan meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM serta penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS.

Kegiatan Komunikasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

OJK menyelenggarakan empat kali kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan di Universitas Syiah Kuala, Aceh bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan akademisi mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, khususnya tentang peran

OJK. Materi yang disampaikan terkait perlindungan pada konsumen *fintech*, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan *unit link*. Selain itu, sosialisasi mengenai LAPS di sektor jasa keuangan kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dilaksanakan di Provinsi Aceh. Narasumber kegiatan tersebut merupakan Ketua Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman PUJK mengenai mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, khususnya alternatif penyelesaian sengketa.

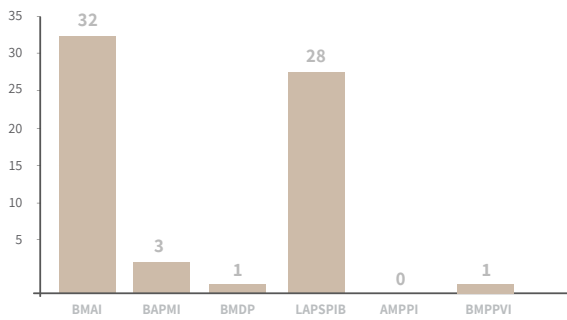
OJK menyelenggarakan sosialisasi kepada akademisi dan mahasiswa dua universitas di Bandung. Konsep penyelenggaraan sosialisasi dimaksud berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dengan memasukkan unsur *games* dan gimik sebagai metode untuk menarik perhatian peserta yang sebagian besar adalah kalangan mahasiswa. Sosialisasi juga diselenggarakan di Universitas Katolik Parahyangan. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah seputar perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peran OJK di dalamnya, serta materi kajian mengenai *fintech*. Selanjutnya, sosialisasi diselenggarakan di Universitas Islam Bandung. Selain penyampaian materi yang sama seperti di Universitas Katolik Parahyangan, turut dihadirkan perwakilan LAPS sektor jasa keuangan untuk menyampaikan materi mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di LAPS. Narasumber acara ini adalah Direktur Eksekutif Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Monitoring Laporan Penyelesaian sengketa LAPS di sektor jasa keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang *Monitoring* LAPS di Sektor Jasa Keuangan, OJK melakukan *monitoring* terhadap LAPS yang dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK. Salah satu cara *monitoring* adalah melalui evaluasi laporan yang disampaikan oleh LAPS secara berkala setiap 10 Juli dan 10 Januari melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

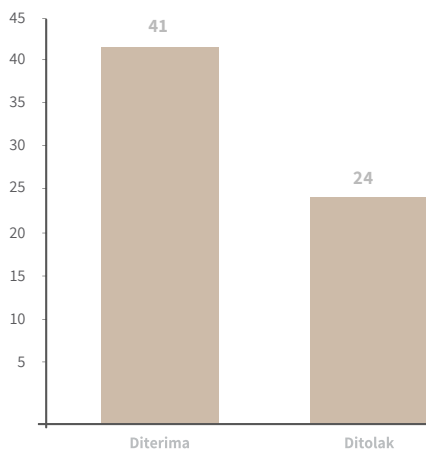
Laporan dimaksud meliputi penyelesaian sengketa oleh LAPS yang memuat unsur demografi para pihak, jenis para pihak, jenis sengketa, nilai sengketa, status penanganan sengketa termasuk alasan penolakan dalam hal permohonan penyelesaian sengketa ditolak, nomor perkara, proses penanganan sengketa dan hasilnya apabila sudah ada, serta *monitoring* pelaksanaan kesepakatan atau putusan oleh LAPS. Pada periode laporan, LAPS menyampaikan laporan penanganan sengketa yang dilakukan pada semester II-2017. Sepanjang semester II - 2017, LAPS di sektor jasa keuangan menerima 65 permohonan penyelesaian sengketa.

Grafik II - 19 — Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS

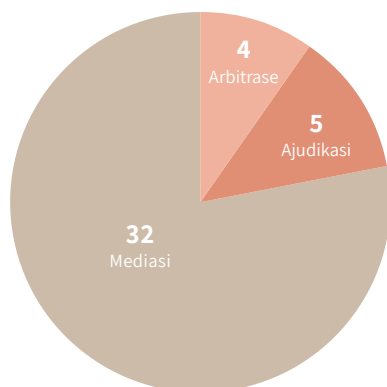


LAPS yang menerima permohonan terbanyak adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), yaitu sebanyak 32 permohonan. Dari total 65 permohonan penyelesaian sengketa, sebanyak 41 permohonan diterima dan 24 sisanya ditolak. Alasan penolakan permohonan penyelesaian sengketa antara lain bahwa sengketa belum diselesaikan secara IDR, sengketa sedang ditangani atau sudah diputus di pengadilan, serta bukan merupakan sengketa perdata. Layanan penyelesaian sengketa yang paling banyak diajukan adalah mediasi.

Grafik II - 20 — Status Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS



Grafik II - 21 — Layanan Penyelesaian Sengketa yang Diajukan ke LAPS



2.5.6 Market Conduct

Pengawasan Market Conduct

Selama triwulan I-2018, OJK melanjutkan *pilot project* pengawasan *market conduct* 2017 melalui pemeriksaan tematik secara *onsite* bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan *prudential* dengan objek 1 Bank Pembangunan Daerah dengan tema “Aspek Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Baku”.

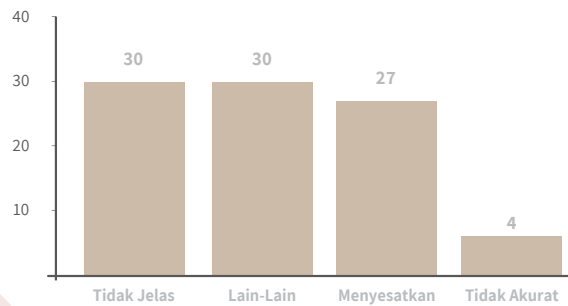
Pemeriksaan tematik *market conduct* melakukan *review* konten klausula terkait aspek eksonerasi/eksemsi dan penyalahgunaan keadaan, serta format perjanjian baku untuk memastikan kepatuhan perjanjian baku yang dibuat Bank Pembangunan Daerah agar seimbang, adil, wajar dan transparan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terkait perjanjian baku. Secara umum, masih terdapat kelemahan khususnya dari sisi konten yaitu masih ditemukan klausula eksonerasi dan ketundukan nasabah pada ketentuan yang akan berlaku. Disamping itu, terdapat pembebanan biaya yang tidak seimbang kepada nasabah.

OJK juga melaksanakan kegiatan operasi intelijen pasar mengenai aspek perlindungan konsumen layanan *fintech*, baik *fintech* yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (*fintech* 2,0), *feeder site fintech* maupun *fintech* oleh *start up company* (*fintech* 3,5). Secara umum, masih ditemukan kerawanan di sisi konsumen yang meliputi aspek transparansi, keamanan kerahasiaan data pribadi konsumen, proses *matching* dan perjanjian baku.

Pemantauan Iklan Triwulanan

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. *Monitoring* yang dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 116 iklan Sektor Perbankan yang terdapat 48,3% (56 iklan) diduga melanggar SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Kategori dengan dugaan terbanyak berturut-turut adalah Tidak Jelas (30 iklan) dan Lain-Lain (30 iklan), Menyesatkan (27 Iklan), serta Tidak Akurat (empat iklan). Kategori Tidak Jujur tidak diperhitungkan karena penilaiannya membutuhkan tindak lanjut berupa *mystery calling* atau *mystery shopping*.

Grafik II - 22 — Kategori Dugaan Pelanggaran Iklan SJK



Dari jumlah pelanggaran per kategori, dapat dilihat bahwa satu iklan cenderung diduga melanggar lebih dari satu kategori pelanggaran. Masih banyak iklan yang memberikan penawaran yang menggiurkan kepada Konsumen, namun tidak menyertakan syarat dan ketentuan lengkapnya dan/atau memberikan keterangan jelas di mana Konsumen dapat melihat syarat dan ketentuan tambahan yang berlaku. Padahal, syarat dan ketentuan yang diberlakukan mungkin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Konsumen. Hal ini berpotensi menimbulkan *dispute* di kemudian hari, terutama untuk produk yang memiliki nilai tinggi dan/atau jangka pemakaian panjang. Selain itu, kesadaran PUJK untuk menyatakan bahwa entitasnya terdaftar dan diawasi OJK masih kurang. Padahal, hal ini merupakan salah satu pembeda antara lembaga jasa keuangan formal dengan lembaga jasa keuangan ilegal.

2.5.7 Investor Alert Portal

OJK melakukan *update* berkala terhadap daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam *Investor Alert Portal* (IAP). Daftar entitas dalam IAP bersumber dari hasil identifikasi dan verifikasi atas informasi dan/atau pertanyaan masyarakat melalui layanan konsumen OJK serta entitas yang secara resmi telah dihentikan kegiatannya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi. IAP dapat diakses melalui *minisite* sikapiuangmu.ojk.go.id atau *mobile apps* Sikapiuangmu yang tersedia di Playstore dan Apple Store.

Selama triwulan I-2018 ada sebanyak 65 entitas baru yang diunggah dalam IAP dan dua entitas yang diperbaharui datanya. Hingga Maret 2018, terdapat 193 entitas yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan investasi pada entitas yang namanya tercantum dalam IAP tersebut. Selain itu, OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi sejenis melalui telepon 157, email konsumen@ojk.go.id, atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Pelayanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK mulai beroperasi pada 2 Januari 2018 dan berjalan dengan lancar di semua kantor OJK di 37 kota. Masyarakat dapat mengakses layanan SLIK OJK melalui telepon call center OJK di 157 (sebelumnya 1500655) ataupun langsung

mengunjungi kantor-kantor OJK yang sudah menyiapkan ruangan atau desk khusus untuk melayani permintaan informasi debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya.

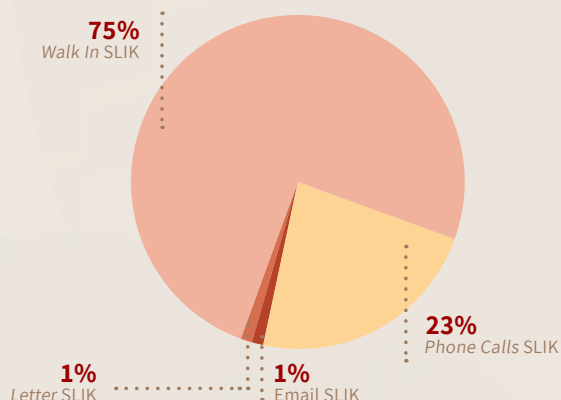
Grafik II - 23 Alur Layanan SLIK



Masyarakat yang ingin memperoleh Informasi mengenai debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya dapat mendatangi pusat layanan SLIK di kantor-kantor OJK seluruh Indonesia pada pukul 09.00 – 15.00 WIB. Salah satu kelebihan SLIK adalah cakupan Informasi yang lebih luas dan tidak lagi terbatas hanya pada industri perbankan. Informasi pada SLIK merupakan kontribusi 1.655 lembaga jasa keuangan yang terdiri dari 102 Bank

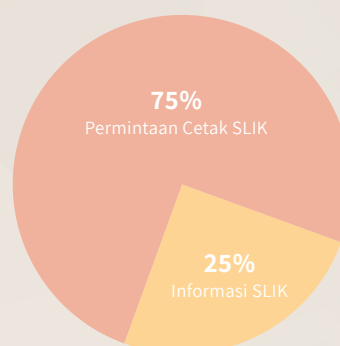
Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR dan 142 BPRS 32 Lembaga Pembiayaan, 5 Perusahaan Modal Ventura, 8 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 1 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan 1 Koperasi Simpan Pinjam. Informasi tersebut diberikan melalui platform informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer.

Grafik II - 24 Data SLIK Januari - Maret 2018



Sampai akhir triwulan I-2018, sebanyak 14.253 masyarakat telah menerima layanan SLIK baik melalui Pusat Pelayanan SLIK di Kantor OJK maupun *call center*. Permintaan Informasi yang dilayani antara lain mengenai data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debet, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. SLIK juga bisa memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit.

Grafik II - 25 Data Informasi dan Permintaan Cetak SLIK



SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan dalam melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK rutin menggelar koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait antara lain Kejaksaan RI dan Mabes Polri. Pada periode laporan, OJK berkoordinasi dengan SRO yaitu BEI, KPEI, dan KSEI dalam rangka mensinergikan fungsi penegakan hukum di sektor jasa keuangan khususnya bidang pasar modal.

2.6.2 Penanganan Perkara

Pada triwulan I-2018, OJK menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari dua perkara Perbankan. Berdasarkan hasil proses penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya telah mengirimkan dua berkas perkara perbankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI. Selanjutnya, terdapat tiga berkas perkara yaitu dua perkara perbankan dan satu perkara asuransi hasil penyidikan 2017 yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI.

2.6.3 Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan KR/KOJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada triwulan I-2018, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan program sosialisasi dan edukasi waspada investasi kepada masyarakat di tiga provinsi dan pembekalan aparat penegak hukum di tiga Kepolisian Daerah.

2.6.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Maraknya penawaran kepada masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk investasi yang semakin bervariasi jenis, bentuk serta sarasannya. Investasi yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memiliki legalitas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dampak dari penawaran tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan yang saat ini makin berkembang.

Maka diperlukan pengawasan sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

2.6.5 Penandatanganan Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi dengan 13 Kementerian/ Lembaga

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang saat ini semakin marak terjadi di masyarakat, SWI melakukan perluasan keanggotaan dari tujuh Kementerian/Lembaga menjadi 13 Kementerian/Lembaga. Pada triwulan I-2018, telah ditandatangani Nota Kesepakatan oleh 13 Kementerian/Lembaga, yang dilakukan secara *circular letter*, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Kementerian Agama Republik Indonesia;
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
8. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
9. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
11. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
12. Bank Indonesia; dan
13. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.6.6 Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Daerah (Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah)

Pembentukan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di Daerah, telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) di 40 daerah wilayah kerja Kantor Regional (KR) atau Kantor OJK (KO) selama 2016 dan 2017.

2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

I. Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia

Sebagai rangkaian kelanjutan kegiatan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), OJK telah menyampaikan tanggapan atas hasil sementara MER Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses MER yang telah dimulai dari penyampaian *Technical Compliance*

questionnaire kepada tim assessor dan *Immediate Outcome questionnaire*, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan *pre on-site visit* dan *on-site visit*.

Tidak jauh berbeda dengan *exit report*, hasil sementara menunjukkan bahwa pelaksanaan APU PPT di sektor jasa keuangan telah diterapkan secara efektif. OJK, selaku *major financial supervisors*, memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko dan kerentanan terhadap TPPU/ TPPT dan secara efektif melakukan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko terhadap sektor yang memiliki risiko TPPU/TPPT tinggi, yaitu perbankan dan pasar modal. Dari sisi PJK, efektivitas penerapan APU PPT juga dinilai baik antara lain terlihat dari pemahaman mayoritas PJK yang baik mengenai risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU PPT. Mayoritas PJK juga memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko tinggi dari PEP dan *Non-Profit Organization* serta telah memiliki mekanisme mitigasi risiko. Terkait dengan kerja sama, OJK dinilai telah memiliki mekanisme kerja sama antar otoritas yang memadai, dan telah melakukan pertukaran informasi dengan otoritas negara lain, antara lain terkait dengan *fit and proper tests*.

Proses MER berikutnya adalah *face to face meeting* sebagai pertemuan terakhir dengan assessor untuk memberikan penjelasan langsung terkait beberapa isu yang memerlukan diskusi secara langsung, sebelum hasil MER difinalisasi dan disampaikan dalam APG *Annual Meeting*.

II. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Semester II-2017

Sebagai bagian pertanggungjawaban OJK yang merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam pelaksanaan pengawasan program APU PPT, OJK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Semester II-2017. Laporan ini menggambarkan hasil pengawasan program APU PPT secara historis untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB yang mencakup juga data statistik terkait hasil pengawasan program APU PPT terhadap Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan (TKM, TKT, dan TKL). Hasil analisis sekaligus rekomendasi dalam rangka penguatan pengawasan APU PPT pada sektor jasa keuangan. Laporan tersebut dapat menjadi salah satu referensi untuk memperkuat fungsi pengawasan untuk jangka waktu ke depan terhadap penerapan program APU PPT bagi SJK terkait dan sejalan dengan Rekomendasi 33 *The Financial Action Task Force* (FATF), di mana suatu negara harus memiliki statistik yang komprehensif terkait hal-hal yang relevan dengan efektivitas dan efisiensi sistem APU PPT.

III. Pembangunan Sistem Informasi Program APU dan PPT (SIGAP)

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas pengawasan program APU dan PPT, OJK sebagai LPP yang memiliki fungsi pengawasan terhadap PMPJ dan kepatuhan kewajiban pelaporan, membutuhkan infrastruktur yang memadai. Sejalan dengan rekomendasi FATF nomor 33. Terkait hal tersebut telah dibangun sistem informasi program APU dan PPT (SIGAP) sebagai sarana *monitoring* dan analisis tren, serta penyedia data pendukung pelaksanaan pengawasan program APU dan PPT. SIGAP adalah sistem informasi berbasis *web* yang dibangun dalam rangka mengintegrasikan data dan informasi hasil pelaksanaan pengawasan program APU PPT. SIGAP sangat mendukung pelaksanaan *monitoring* dan rekomendasi langkah perbaikan terkait dengan penerapan program APU PPT pada penyedia jasa keuangan (PJK) yang diawasinya. Di samping itu, sistem informasi tersebut juga menyediakan data pendukung untuk pelaksanaan pengawasan program APU PPT sehingga pelaksanaan pengawasannya menjadi lebih efektif dan optimal. Pembangunan SIGAP telah mencapai proses penyusunan perangkat peraturan internal OJK terkait dengan penerapan SIGAP serta tahap *User Acceptance Test* (UAT).

IV. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sebagai kelanjutan dari rangkaian program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi pelaku industri jasa keuangan, dalam periode laporan telah dilakukan beberapa kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk sosialisasi Perkembangan Terkini Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II - 51 — Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

No.	Kegiatan	Peserta
1	Sosialisasi kepada pejabat dan pegawai Perusahaan Pembiayaan, Anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	203 orang
2	Sosialisasi kepada pejabat dan pegawai Perusahaan Pembiayaan, Anggota Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)	55 orang
3	Sosialisasi kepada anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	170 orang
4	Narasumber pelaksanaan Pendidikan Berkelanjutan (PPL) WPPE dan WPEE kepada Perusahaan Penjamin Efek yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) terhadap karyawan Perusahaan Efek anggota APEI.	200 orang
5	Narasumber pelaksanaan Pendidikan Berkelanjutan (PPL) bagi Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) kepada Perusahaan Penjamin Efek yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) terhadap karyawan Perusahaan Efek anggota APEI	130 orang
6	Narasumber kuliah umum yang merupakan kegiatan program budaya OJK Mengajar bekerjasama dengan tim pengajar mata kuliah hukum perbankan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).	70 orang
7	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Asset Recovery (Pemulihan Aset) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan materi pembahasan yaitu "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Pemulihan Aset" kepada Perwakilan Kasi Pidum, Kasi Pidsus dan Kasubagbin pada Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.	30 orang

2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.8.1 Kerjasama Domestik

OJK secara aktif mengadakan koordinasi antar lembaga dengan tujuan menjalin kerjasama strategis yang mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode triwulan I-2018, OJK melakukan penandatanganan kerjasama domestik sebagai berikut:

Tabel II - 52 — Kerjasama Domestik

Kerjasama Domestik	Ringkasan Kerjasama
Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Aisyiyah	Pengembangan Keuangan Syariah, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen
Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Pengurus Pusat Bhayangkari	Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi Anggota Bhayangkari

Di samping penandatanganan kerja sama antar lembaga, OJK menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 25 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang dilakukan mencakup antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai literasi keuangan, sosialisasi bersama Anggota Komisi XI DPR RI bertemakan waspada investasi bodong di Tuba Barat, Lampung; berinvestasi yang amanah di Lombok Tengah; cerdas berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik di Jember, Jawa timur dan peran OJK dalam membuka akses keuangan untuk generasi muda di Jambi.

Pendampingan kunjungan kerja Komisi XI DPR RI antara lain terkait kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, serta kunjungan kerja spesifik dalam rangka permasalahan kredit pasca bencana Gunung Agung. Diskusi kelembagaan juga dilakukan OJK bersama dengan Tenaga Ahli Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi Komisi XI DPR RI dengan tema peran OJK dalam pengembangan *fintech* dan perlindungan konsumen di Bandung.

2.8.2 Kerjasama Internasional

1. Kerjasama Internasional dan Kerjasama Regional

- a. **Penyelesaian Negosiasi dalam Rangka Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan di ASEAN**
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan kerjasama internasional, diperlukan penyelesaian negosiasi dalam rangka peningkatan komitmen jasa keuangan di ASEAN yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu :

1. **Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan Sektor Non-Bank dalam Paket ke-8 AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services);**
Usulan komitmen jasa keuangan non-bank dalam paket ke-8 ASEAN *Framework Agreement on Services Financial Services Liberalization* (AFAS-FSL) dibahas OJK bersama dengan *stakeholders* yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia/AAUI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia/AAJI, Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia/APPARINDO, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia/AASI, dan Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia/APARI

2. **Tindak lanjut negosiasi dalam lingkup ABIF (ASEAN Banking Integration) Framework;** dan OJK melaksanakan koordinasi awal bilateral tingkat teknis antara OJK dengan otoritas negara lain yang sudah memiliki LOI ABIF dengan OJK. Koordinasi awal bilateral tingkat teknis antara OJK dengan otoritas negara terkait tindak lanjut dengan otoritas negara lain di ASEAN yang sudah memiliki LOI ABIF dengan OJK dalam pertemuan WC-ABIF.

3. **Peningkatan peran OJK pada perundingan sektor jasa keuangan dalam kelompok kerja ASEAN (WC-CMD, WC-FSL, WC-FINC, AIFo, ACMF, dll)**
OJK telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok kerja ASEAN. Partisipasi aktif OJK dalam kegiatan kelompok kerja ASEAN antara lain WC-FSL, WC-ABIF, WC-CMD, WC-FINC.

b. **Keterwakilan Posisi OJK Dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional**

Efektivitas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kerjasama internasional terkait kegiatan IJK dilihat dari posisi (*stand point*) OJK yang diterima sebagai posisi RI dalam forum perdagangan jasa internasional. Selama triwulan I-2018, terdapat satu posisi Indonesia yang diterima oleh *counterpart* dan diadopsi menjadi posisi bersama. Hal ini tercermin dari usulan OJK terkait substansi *Article 7 [Transfers Of Information And Processing Of Information] of Annex [Financial Services]* dimuat dalam *Record of Understanding*, diterima oleh EFTA dalam pertemuan *Working Group Trade in Services Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* di Jenewa.

2. **Penguatan Peran OJK dalam hubungan Internasional.**

Peningkatan Kerjasama Internasional OJK, melalui realisasi perjanjian kerjasama internasional. Pada triwulan I-2018, terdapat dua perjanjian kerjasama internasional dalam proses finalisasi yaitu:

- i. OJK dengan *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)*; dan
- ii. OJK dengan *International Finance Cooperation (IFC)*.

3. **Pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan international counterparts:**

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kerjasama dengan *international counterparts*, terdapat dua jenis kegiatan yaitu:

- a. **Pemenuhan kewajiban OJK terhadap international standard setting bodies dan kebutuhan permintaan informasi counterpart internasional.**
Pada triwulan I-2018 terdapat empat *draft* dikirim ke *counterparts* yaitu:

1. OJK mengirimkan tanggapan terhadap *update* bahan pertemuan Deputi Keuangan dan Bank Sentral APEC oleh BKF;
2. OJK mengirimkan tanggapan terhadap permintaan *update data AMRO Economic Review and Policy Dialogue (ERPD) Matrix* dan *ERPD Report* oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI;
3. OJK mengirimkan tanggapan terhadap permintaan survei *Islamic Financial Services Board (IFSB) Annual Report*;
4. OJK mengirimkan tanggapan terhadap pertanyaan terkait *Exchange of Information Rating (EOIR)* dari Direktorat Jenderal Pajak.

b. **Penyelenggaraan event internasional**

Telah terselenggara delapan kegiatan selama triwulan I-2018 antara lain :

1. OJK menerima Kunjungan *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* dalam hal pembahasan penajakan ruang lingkup kerja sama yang akan dituangkan dalam MoU;
2. OJK menerima kunjungan Lembaga *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* yang didampingi oleh perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF);
3. OJK menerima kunjungan *Korean Banking Institute* dalam hal berdiskusi mengenai sektor *multifinance* dan kondisi perekonomian Indonesia secara umum;
4. Menerima kunjungan salah satu perusahaan manajer investasi, *ValueCap Asset Managers Sdn. Bhd. (VCAM)*, Malaysia, dalam hal ini VCAM bermaksud mengetahui lebih lanjut mengenai regulasi perbankan, *asset quality*, dan tren industri keuangan di Indonesia;
5. OJK menerima kunjungan delegasi industri keuangan Nepal dengan tema *Indonesia Exposure on Microfinance*. Adapun kunjungan dimaksud sebagai wadah diskusi antara Nepal dan OJK untuk mengetahui tingkat kesehatan investasi di Indonesia;
6. OJK merealisasikan kunjungan Lembaga Peringkat R&I - Jepang.
7. OJK menerima delegasi *The Association of Financiers of Kazakhstan (AFK)* perihal diskusi terhadap kondisi industri keuangan syariah di Indonesia; dan
8. OJK merealisasikan kunjungan Lembaga Peringkat *Moody's*.

Halaman ini sengaja di kosongkan

BAB 3

TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH



Pengembangan



Penerbitan 1 POJK dan 6 SEOJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB Syariah



Kajian Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi BUS dan UUS



Kajian Market Maker Sukuk



Kajian Aspek Syariah Transaksi Efek Syariah

Event



Sosialisasi '*Link and Match*' Industri Perasuransian Syariah dan Perguruan Tinggi



Training of Trainers Keuangan Syariah Terintegrasi di Semarang dan Mataram



Sosialisasi Pasar Modal Syariah di Jakarta dan Sukabumi



Workshop Halaqah Keuangan Syariah di Sumenep

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Industri Perbankan Syariah yang terdiri dari 13 BUS, 21 UUS, dan 167 BPRS terus mengalami perkembangan. Pada triwulan I-2018, Perbankan Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan intermediasi yang membaik dengan peningkatan aset, pembiayaan yang disalurkan

(PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio keuangan utama, baik risiko kredit, likuiditas, efisiensi, rentabilitas, maupun permodalan menunjukkan perbaikan.

Tabel III - 1 Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan I-2017	Triwulan IV-2017*	Triwulan I-2018	Pertumbuhan (qtq) Triwulan IV-2017		Pertumbuhan (qtq) Triwulan I-2018		Pertumbuhan (yoy) Triwulan I-2018	
				Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp. T)	368.17	435.02	439.32	29.72	+7.33	4.29	+ 0.99	71.15	+ 19.33
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+ UUS+ BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+ BUK+ BPRS+ BPR)	5.29	5.78	5.80	-	+0.22	-	+ 0.02	-	+ 0.51
DPK (Rp. T)	292.20	341.71	347.15	16.65	+5.12	5,45	+ 1.59	56.55	+ 18.81
Pembiayaan (Rp. T)	257.58	293.46	294.70	14.33	+5.13	1,24	+0.42	38.79	+ 14.41
Jumlah NPF (Rp. T)	11.45	11.82	11.94	0.48	+4.19	0.12	+0.98	11.25	+ 4.27
Jumlah Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BUS	13	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- UUS	21	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- BPRS	166	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Kantor	2,638	2,610	2,620	-16.00	-0.87	10.00	0.38	-18.00	-1.66
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF Gross (%)	4.29	3.87	3.86	-	-0.01	-	-0.01	-	-0.43
NPF Net (%)	2.33	2.13	2.19	-	-0.24	-	+0.06	-	-0.14
ROA (%)	1.53	1.17	1.59	-	-0.24	-	+0.42	-	+0.06
BOPO (%)	88.58	89.62	85.65	-	+2.16	-	-3.97	-	-2.93
FDR (%)	87.55	85.31	84.32	-	+0.06	-	-0.99	-	-3.23
BUS									
Total Aset BUS (Rp. T)	257.78	288.03	294.27	12.08	+4.38	6.24	+2.17	36.49	+14.16
DPK (Rp. T)	213.20	238.22	244.82	5.88	+2.53	6.60	+2.77	31.62	+14.83
Pembiayaan (Rp. T)	178.08	189.79	190.06	3.64	+1.95	0.27	+0.14	11.98	+6.73
Jumlah NPF (Rp. T)	8.22	9.05	8.67	0.84	-10.19	-0.38	-4.15	0.46	+5.55
CAR (%)	16.98	17.91	18.47	-	-1.75	-	-0.56	-	-1.49
NPF Gross (%)	4.61	4.77	4.56	-	+0.35	-	-0.20	-	-0.05
ROA (%)	1.12	0.63	1.23	-	-0.36	-	-0.59	-	+0.11
BOPO (%)	92.34	94.91	89.90	-	-3.23	-	-5.01	-	-2.44
FDR (%)	83.53	79.65	77.63	-	-0.47	-	-2.02	-	-5.89
Jumlah Kantor	1,849	1,825	1,822	-20.00	-1.35	-3.00	-0.16	- 27.00	- 2.35
UUS									
Total Aset BUS (Rp. T)	100.97	136.15	133.93	17.01	+14.27	-2.22	-1.63	32.97	+32.65
DPK (Rp. T)	72.98	96.49	95.09	10.27	+11.91	-1.41	-1.46	22.11	+30.30
Pembiayaan (Rp. T)	72.46	95.91	95.56	10.48	+12.27	0.65	+0.68	24.10	+33.26
Jumlah NPF (Rp. T)	2.53	2.02	2.38	-0.30	-12.76	0.36	+17.55	-0.15	-6.06
NPF Gross (%)	3.50	2.11	2.46	-	-0.61	-	+0.35	-	-1.03
ROA (%)	2.61	2.47	2.40	-	-0.02	-	-0.07	-	-0.20
BOPO (%)	75.07	74.15	72.64	-	-0.52	-	-1.51	-	-2.43
FDR (%)	99.28	99.39	101.54	-	-0.32	-	+2.15	-	-2.26
Jumlah Kantor	335	344	348	3.00	1.47	4.00	1.16	13.00	3.61
BPRS									
Total Aset BUS (Rp. T)	9.42	10.84	11.11	0.63	+6.17	0.27	+2.53	1.69	+17.95
DPK (Rp. T)	6.02	6.99	7.25	0.50	+7.72	0.26	+3.70	1.23	+20.37
Pembiayaan (Rp. T)	7.04	7.76	8.08	0.21	+2.75	0.31	+4.04	1.04	+14.72
Jumlah NPF (Rp. T)	0.70	0.75	0.89	-0.06	-7.97	0.14	+18.09	0.19	+26.61
CAR (%)	21.53	20.81	20.54	-	-0.08	-	-0.27	-	-0.99
NPF Gross (%)	9.94	9.68	10.97	-	-1.11	-	+1.29	-	+1.03
ROA (%)	2.29	2.55	2.40	-	-0.01	-	-0.16	-	+0.11
BOPO (%)	85.13	85.34	84.21	-	-0.97	-	-1.13	-	-0.92
FDR (%)	116.98	111.12	111.48	-	-5.37	-	+0.37	-	-5.50
Jumlah Kantor	454	441	450	1.00	-0.68	9.00	2.04	- 4.00	- 2.65

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, Maret 2018
*) Data Sementara

A. Aset

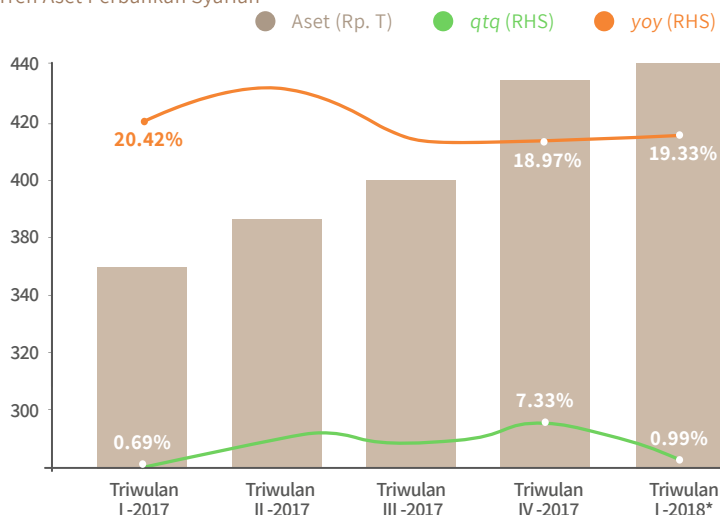
Pertumbuhan aset perbankan syariah yang cukup tinggi (19,33%, yoy) membuat pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset industri perbankan nasional secara perlahan terus meningkat, meski secara triwulanan mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan IV-2017 ((pertumbuhan triwulan I-2018 sebesar 0,99% (qtq)). Sementara itu, pertumbuhan triwulan IV-2017 sebesar 7,33% (qtq).

Pada triwulan I-2018, pangsa aset perbankan syariah tumbuh mencapai 5,80% (triwulan IV-2017=5,78%). Peningkatan pangsa aset perbankan syariah terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan UUS yang mencapai 32,65% (yoy). Sementara itu, BUS dan BPRS masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 14,16% (yoy) dan 17,95% (yoy). Jika dilihat secara triwulanan, pertumbuhan BUS, UUS, dan BPRS pada triwulan I-2018 masing-masing sebesar 2,17% (qtq), -1,63% (qtq), dan 2,54% (qtq). Dilihat dari porsi aset, BUS, UUS, dan BPRS

masing-masing berkontribusi sebesar 66,98%, 30,49%, dan 2,53%.

Komponen utama aset perbankan syariah merupakan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 67,08%, penempatan pada Bank Indonesia (14,54%), dan surat berharga yang dimiliki (11,52%). Ketiga komponen tersebut mengalami pertumbuhan tahunan cukup tinggi, masing-masing sebesar 14,41% (yoy), 13,10% (yoy), dan 73,17% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi terdapat pada surat berharga dimiliki yang tumbuh sebesar 13,28% (qtq), PYD mengalami pertumbuhan sebesar 0,41% (qtq), serta penempatan pada BI mengalami penurunan sebesar 0,44% (qtq). Di sisi pasiva, pertumbuhan dipengaruhi oleh meningkatnya DPK dan modal, yang masing-masing meningkat sebesar 18,81% (yoy) dan 13,07% (yoy), atau secara triwulanan meningkat 1,59% (qtq) dan 7,41% (qtq).

Grafik III - 1 Tren Aset Perbankan Syariah



Sumber : SPS, Maret 2018
*) Data Sementara

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 86,62% dari total sumber dana perbankan syariah (tidak termasuk modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 8,80%, liabilitas kepada bank lain sebesar 1,76% dan surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,65% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan I-2018.

Secara triwulanan, DPK perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 1,59% (qtq), melambat dibandingkan posisi Desember 2017 yang tumbuh 5,12% (qtq). Perlambatan pertumbuhan DPK di awal tahun merupakan siklus tahunan yang disebabkan penarikan dana nasabah untuk kegiatan operasional di awal tahun.

Pertumbuhan pada triwulan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan deposito yang tertinggi di antara instrumen lainnya, yaitu sebesar 2,55% (qtq), diikuti oleh tabungan dan giro yang tumbuh stabil pada level 0,29% dan 0,09% (qtq).

Sementara secara tahunan, DPK perbankan syariah tumbuh sedikit melambat 18,81% (yoy) dibandingkan triwulan IV-2017 yang tumbuh 19,83% (yoy). Perlambatan terjadi pada komponen giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh melambat sebesar 30,90% (yoy) dan 15,15% (yoy) dibandingkan triwulan IV-2017. Sementara itu, deposito mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 18,53% dibandingkan triwulan IV-2017.

Tabel III - 2 — Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah (yoy)

	Triwulan I-2017	Triwulan II-2016	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Porsi	qtq (%)		yoy (%)	
							Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
Giro	30.620	35.970	38.206	40.045	40.081	+ 11,55%	4,81%	0,09%	43,16%	30,90%
Tabungan	87.990	88.983	92.731	101.027	101.317	+ 29,19%	8,95%	0,29%	15,66%	15,15%
Deposito	173.588	183.101	194.124	200.635	205.755	+ 59,27%	3,35%	2,55%	18,13%	18,53%
Total DPK	292.197	308.055	325.061	341.707	347.152	+ 100,00%	5,12%	1,59%	19,83%	18,81%

Sumber : SPS, Maret 2018

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) merupakan komponen utama penggunaan dana perbankan syariah. Pada triwulan I-2018, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 0,42% (qtq), melambat dibandingkan triwulan IV-2017 yang tumbuh sebesar 5,13% (qtq). Pertumbuhan tahunan pada triwulan I-2018 juga menunjukkan perlambatan.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 42,53% diikuti modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 34,11% dan 23,36%. Pembiayaan dan investasi dan konsumsi tumbuh melambat, sementara pembiayaan modal kerja tumbuh lebih tinggi masing-masing sebesar 13,60% (yoy) dibandingkan triwulan I-2017 yang hanya tumbuh 14,27% (yoy).

Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah tumbuh 0,42% (qtq), lebih rendah dibandingkan posisi triwulan IV-2017 yang tumbuh sebesar 5,20% (qtq). Secara triwulanan, terjadi perlambatan pertumbuhan pada pembiayaan konsumsi yang pada triwulan IV-2017 tumbuh 5,47% (qtq), namun pada triwulan I-2018 hanya tumbuh sebesar 2,24% (qtq), yang salah satunya didorong oleh menurunnya ekspansi pembiayaan untuk rumah tinggal. Sementara pembiayaan modal kerja pada triwulan I-2018 menunjukkan penurunan sebesar 2,20% (qtq), meski jika dibandingkan secara tahunan menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi (13,60%, yoy). Pembiayaan investasi tetap tumbuh meski melambat (1,11%, qtq) dibandingkan triwulan IV-2017 (5,51%, qtq).

Tabel III - 3 — Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2016	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Porsi	qtq (%)		yoy (%)	
								Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
Modal Kerja	90.100	88.487	95.710	98.318	102.781	100.520	+ 34,11%	4,67%	-2,20%	14,27%	13,60%
Investasi	61.168	61.552	64.888	64.553	68.079	68.832	+ 23,36%	5,51%	1,11%	11,34%	11,83%
Konsumsi	103.402	107.538	112.239	116.261	122.598	125.348	+ 42,53%	5,47%	2,24%	18,31%	16,56%
Total UMKM	254.670	257.578	272,838	279,132	293,459	294,700		5,20%	0,42%	15,20%	14,41%

Sumber : SPS, Maret 2018

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan ekonomi yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan 58,34% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan I-2018 mengalami pertumbuhan secara tahunan sebesar 12,99% (yoy), atau meningkat sebesar Rp18,98 triliun (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini dikonstruksikan oleh sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 47,64% (yoy) atau meningkat Rp6,87 triliun (yoy). Kontributor peningkatan pembiayaan lapangan usaha terbesar berikutnya adalah Sektor Perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 10,66% (yoy) atau meningkat Rp3,15 triliun. Sektor Listrik, gas, dan air juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 34,96% (yoy) atau mengalami peningkatan sebesar Rp2,89 triliun. Pada triwulan I-2018, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada sektor rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 16,84% (yoy), melambat

dibandingkan pertumbuhan di triwulan I-2017 yang mampu tumbuh sebesar 28,40% (yoy). Perlambatan pertumbuhan utamanya terjadi pada pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal dan pemilikan peralatan rumah tangga.

Secara triwulanan, pertumbuhan pembiayaan BUS dan UUS pada sektor ekonomi lapangan usaha pada triwulan I-2018 menunjukkan penurunan sebesar 1,02% (qtq). Penurunan pertumbuhan paling besar terdapat pada sektor perikanan, pertanian, pertambangan, penyediaan akomodasi, jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, dan jasa kesehatan. Sementara pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan jasa perorangan lainnya yang tumbuh 34,70% (qtq). Sementara itu, pembiayaan pada sektor bukan lapangan usaha yaitu rumah tangga masih menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,24% (qtq), melambat dibandingkan triwulan IV-2017 yang mampu tumbuh sebesar 5,40% (qtq).

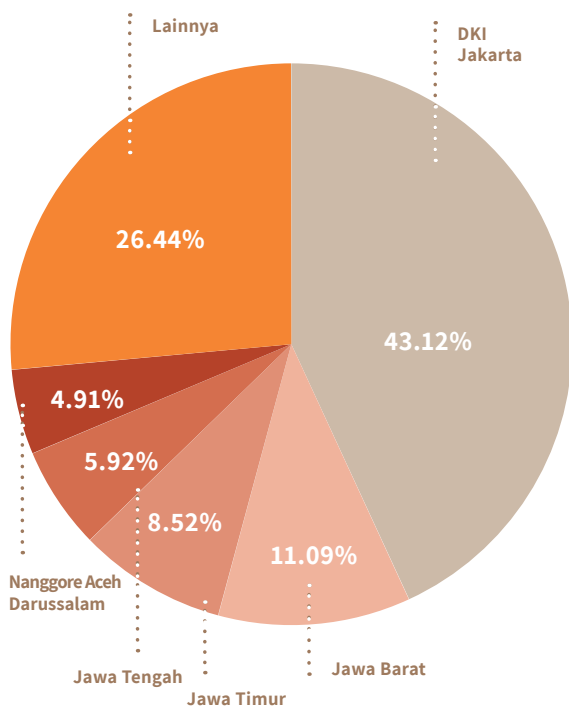
Tabel III - 4 ——— Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS & UUS (Rp Miliar)	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2016	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Porsi	qtq (%)		yoy (%)	
								Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
Lapangan Usaha	147,405	146,005	156,389	158,732	166,674	166,674	58.34%	5.00%	-1.02%	13.07%	12.99%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	8,531	9,484	9,847	9,741	10,396	10,419	3.65%	6.97%	-0.23%	22.14%	9.61%
Perikanan	1,405	1,492	1,350	1,370	1,048	1,048	0.51%	6.74%	-28.36%	4.08%	-29.79%
Pertambangan dan Penggalian	6,604	6,833	7,085	7,012	6,864	6,551	2.40%	-2.11%	-4.56%	3.95%	-4.12%
Industri Pengolahan	19,745	20,055	20,558	20,422	21,463	21,440	7.51%	5.09%	-0.10%	8.70%	6.91%
Listrik, Gas, dan Air	8,117	8,262	7,857	7,733	11,044	11,150	3.87%	42.82%	0.96%	36.06%	34.96%
Konstruksi	14,435	14,409	19,782	21,540	22,198	21,273	7.77%	3.05%	-4.16%	53.78%	47.64%
Perdagangan Besar dan Eceran	30,319	29,320	30,450	31,600	32,839	32,472	11.49%	3.92%	-1.12%	8.31%	10.75%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3,043	3,425	3,489	3,542	3,613	3,730	1.26%	1.99%	3.24%	18.73%	8.89%
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	10,921	10,387	11,028	10,019	10,087	9,833	3.53%	0.67%	-2.51%	-7.64%	-5.33%
Perantara Keuangan	18,948	18,106	19,385	19,564	19,583	18,590	6.85%	0.10%	-5.07%	3.35%	2.68%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	12,797	11,354	11,657	12,045	12,326	12,218	4.31%	2.33%	-0.88%	-3.68%	7.60%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9	8	9	8	7	5	0.00%	-10.39%	-26.23%	-18.16%	-32.37%
Jasa Pendidikan	3,786	4,107	4,390	4,693	4,905	4,794	1.72%	4.53%	-2.27%	29.58%	16.73%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,030	3,229	3,511	3,658	4,021	3,981	1.41%	9.92%	-0.99%	32.70%	23.31%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	4,617	4,518	4,895	4,880	4,973	6,699	1.74%	1.91%	34.70%	7.72	48.27%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	337	329	343	330	331	331	0.12%	0.54%	-0.26%	-1.77%	0.39%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	760	688	752	575	538	462	0.19%	-6.34%	-14.27%	-29.20%	-32.91%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	97,597	101,669	106,214	110,233	116,186	118,787	40.67%	5.40%	2.24%	19.05%	16.84%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	51,195	53,369	55,363	57,895	60,663	62,321	21.23%	4.78%	2.73%	18.49%	16.77%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	1,512	1,537	1,632	1,811	1,956	2,092	0.68%	7.99%	6.94%	29.42%	36.08%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3,101	3,148	3,086	3,120	3,142	3,119	1.10%	0.71%	-0.72%	1.32%	-0.90%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	8,607	8,612	9,303	9,420	10,122	9,779	3.54%	7.45%	-3.39%	17.60%	13.55%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)	33,183	35,002	36,829	37,987	40,303	41,476	14.11%	6.10%	2.91%	21.46%	18.50%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,005	2,863	2,715	2,610	2,835	2,861	0.99%	8.61%	0.93%	-5.67%	-0.04%
Total	248,007	250,536	365,317	271,576	285,695	286,621	100%	5.20%	0.32%	15.20%	14.40%

Sumber : SPS, Maret 2018

Kualitas pembiayaan bank Syariah membaik terlihat dari rasio NPF gross triwulan I-2018 yang terjaga pada angka 3,86%, sedikit menurun dibandingkan posisi akhir 2017 (3,87%). Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 70,05%, khususnya DKI Jakarta (41,14%), Jawa Barat (10,79%), Jawa Timur (8,40%), dan Jawa Tengah (5,94%). Besarnya dominasi pembiayaan dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya terutama Bagian Timur Indonesia. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

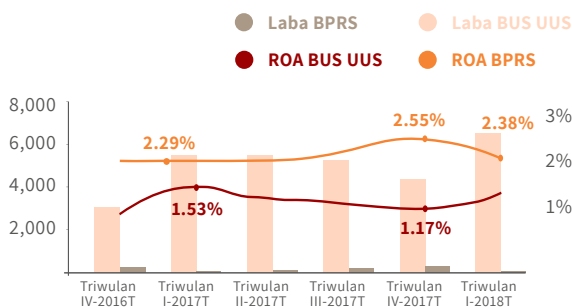
Grafik III - 2 ———— Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



D. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari rasio ROA pada triwulan I-2018 sebesar 1,59%, lebih tinggi dari triwulan IV-2017 (1,17%). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan serta efisiensi bank Syariah sehingga turut mendorong kenaikan laba sebesar 24,87% (yoy) menjadi Rp6,69 triliun (triwulan I-2018).

Grafik III - 3 ———— Tren Aset Perbankan Syariah



Sumber : SPS, Maret 2018

Rentabilitas BPRS terjaga baik yang terlihat dari ROA sebesar 2,38% pada triwulan I-2018. Baiknya rentabilitas BPRS juga didukung oleh pertumbuhan laba sebesar 14,65% (yoy) dari triwulan I-2017 yang sebesar Rp63,82 miliar menjadi Rp73,17 miliar pada triwulan I-2018. Perbaikan ROA BPRS didukung oleh pertumbuhan laba sebesar 14,65% (yoy) dari triwulan I-2017 sebesar Rp63,82 miliar menjadi Rp73,17 miliar pada triwulan I-2018.

E. Permodalan

Ketahanan Perbankan Syariah relatif cukup kuat diindikasikan oleh tingkat permodalan yang memenuhi persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM). Pada periode laporan, CAR BUS meningkat 56 bps dari posisi terakhir 2017 menjadi 18,47%, dengan jumlah modal sebesar Rp33,07 triliun. Dibandingkan dengan posisi triwulan I-2017, modal dan ATMR BUS masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 17,68% (yoy) dan 8,19% (yoy). Dengan kenaikan modal yang lebih besar dari ATMR, CAR BUS pada triwulan I-2018 sebesar 18,47% meningkat dari 17,91% (triwulan IV-2017).

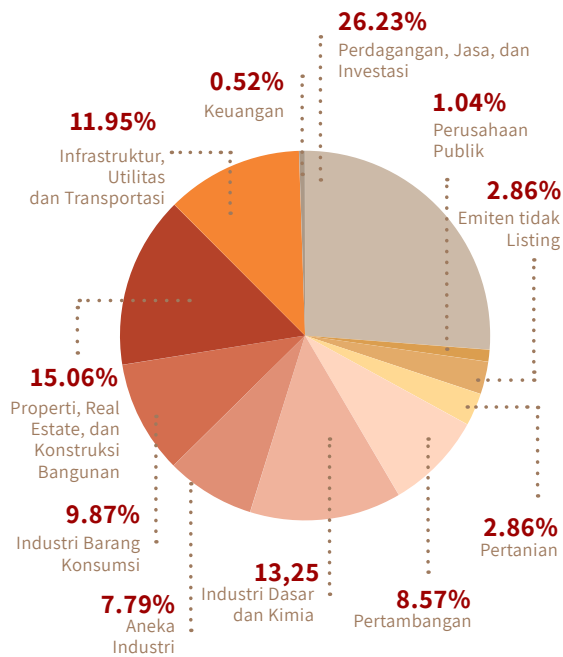
3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Perkembangan industri pasar modal Syariah pada triwulan I-2018 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada jumlah dan nilai sukuk korporasi serta sukuk negara *outstanding*. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada Reksa Dana Syariah beredar baik dari sisi jumlah maupun NAB nya. Namun di sisi lain, indeks saham Syariah baik ISSI maupun JII mengalami penurunan baik dari sisi indeks dan kapitalisasinya.

A. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode II yang meliputi 375 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek Syariah lainnya. DES periode II tahun 2017 berlaku sampai akhir Mei 2018. Sampai akhir periode laporan, terdapat penambahan 10 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran dengan total saham yang masuk dalam DES berjumlah 385 saham. Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 101 saham (26,23%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi sebanyak 58 saham (15,06%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 51 saham (13,25%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 46 saham (11,95%) dan 129 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 4 — Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Pada akhir periode laporan, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada level 183,59 poin atau menurun 3,30% dibandingkan indeks ISSI pada periode sebelumnya. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI sebesar Rp3.584,60 triliun atau 52,06% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham sebesar Rp6.884,88 triliun, menurun sebesar 3,24% jika dibandingkan kapitalisasi pasar Saham ISSI pada akhir triwulan IV-2017 sebesar Rp3.704,54 triliun.

Tabel III - 5 — Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Miliar)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66
2016	2.041.070,80	3.175.053,04	5.759.379,25
2017	2.288.015,67	3.704.543,09	7.052.388,63
2018 Triwulan I	2.123.498,74	3.584.600,83	6.884.880,83

Tabel III - 6 — Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2015	603,35	145,06	4.593,01
2016	694,13	172,08	5.296,71
2017	759,07	189,86	6.355,65
2018 Triwulan I	704,28	183,59	6.188,99

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama triwulan I-2018 terdapat penerbitan sebanyak tujuh seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,19 triliun. Selain itu, terdapat dua seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo dengan total Rp825 miliar. Dengan demikian, jumlah *outstanding* sukuk korporasi menjadi sebanyak 84 seri atau meningkat sebesar 6,33% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sisi nilai *outstanding* sebesar Rp16.104 miliar atau meningkat sebesar 2,31% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel III - 7 — Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2015	16.656	87	9.902	47
2016	20.425	102	11.878	53
2017	26.394	137	15.740	79
2018 Triwulan I	27.583	144	16.104	84

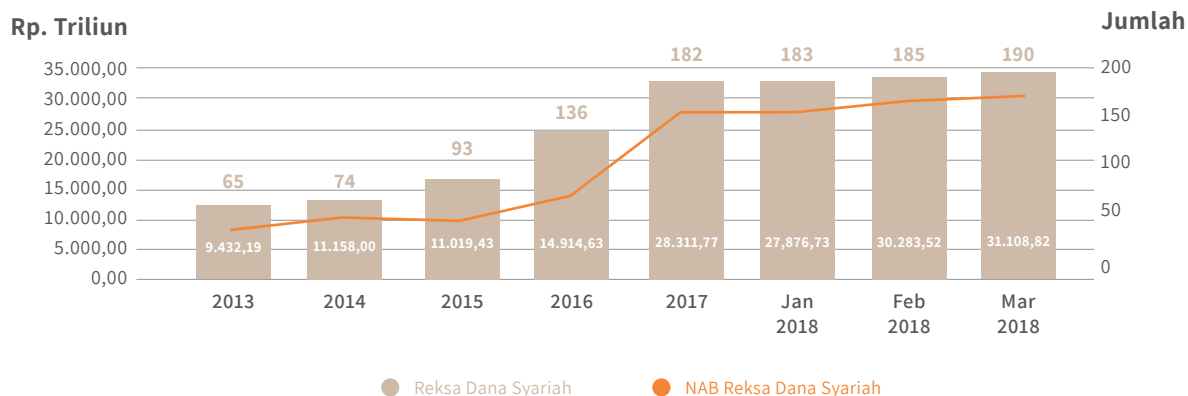
C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan I-2018 terdapat sembilan Reksa Dana Syariah efektif terbit. Sampai akhir Maret 2018, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 190, dengan NAB sebesar Rp31,11 triliun atau meningkat 4,4% dari sisi jumlah dan meningkat 9,88% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 10,28% dari total 1.849 Reksa Dana dan 6,27% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp496,5 triliun.

Tabel III - 8 — Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%
2017	182	1.595	1777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%
2018 Triwulan - I	190	1.659	1.849	10,28%	31.108,82	465.395,08	496.503,90	6,27%

Grafik III - 5 — Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah

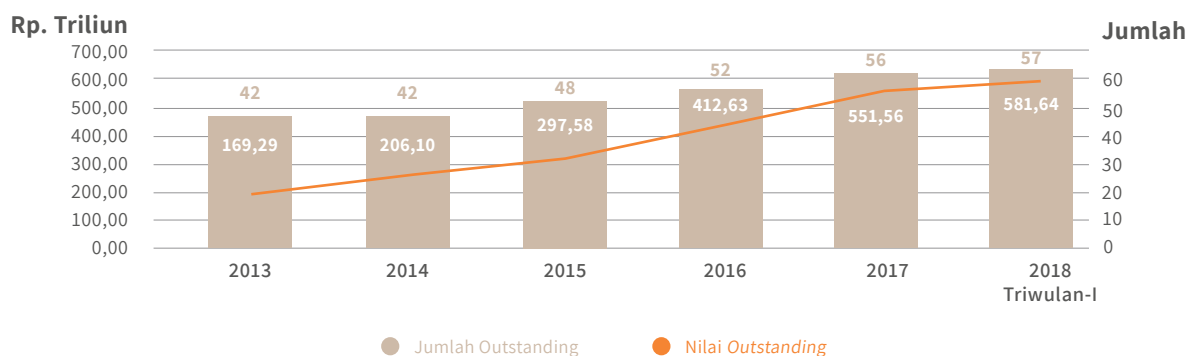


D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga yang diterbitkan negara berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir triwulan I-2018, jumlah keseluruhan

SBSN *outstanding* sebanyak 57 seri, dengan nilai sebesar Rp581,64 triliun, terdapat penambahan satu seri dari periode sebelumnya, dan peningkatan dari sisi nilai sebesar 5,45% dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik III - 6 — Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*



Tabel III - 9 — Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai Outstanding (triliun)	Total Jumlah Outstanding
2015	297,58	48
2016	412,63	52
2017	551,56	56
2018 Triwulan I	581,64	57

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan I-2018, para pihak yang terlibat atau mempunyai jasa layanan Syariah meliputi:

- Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 51 Manajer Investasi;
- Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 27 Penjamin Emisi Efek;
- Pihak Penerbit DES yang memperoleh persetujuan OJK berjumlah 10 Pihak Penerbit DES;
- Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah 14 bank;
- Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip Syariah (sistem *online trading* Syariah) berjumlah 13 Perusahaan Efek;
- Terdapat tujuh Wali Amanat yang terlibat dalam perwalianan penerbitan Sukuk Korporasi; dan
- Terdapat 73 pihak yang memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

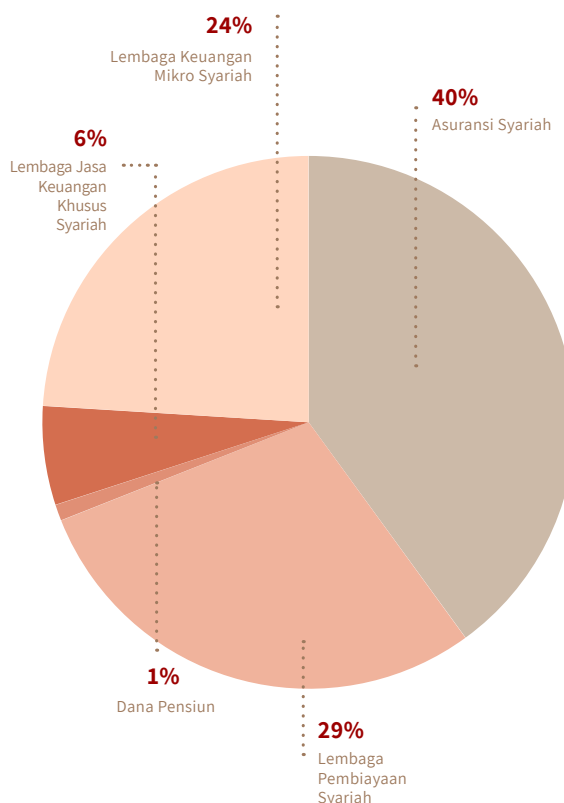
Selama triwulan I-2018, aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 0,30% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp99,45 triliun. Aset industri perasuransian Syariah mendominasi porsi nya yaitu sebesar 43% dari total aset IKNB Syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 10 Tabel Aset IKNB Syariah (triliun Rupiah)

No. Industri	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1 Perasuransian Syariah	35,25	37,37	39,41	40,52	42,74
2 Lembaga Pembiayaan Syariah	37,64	38,78	36,80	34,48	32,77
3 Dana Pensiun Syariah	-	-	-	1,30	1,32
4 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	19,61	21,39	22,26	22,74	22,50
5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11
Total	92,58	97,62	98,57	99,15	99,45

Sampai akhir triwulan I-2018, terdapat 63 perusahaan perasuransian Syariah, 45 lembaga pembiayaan Syariah, satu Dana Pensiun Syariah, 10 lembaga jasa keuangan Syariah khusus, dan 37 lembaga keuangan mikro Syariah. Selama periode laporan, terdapat delapan penambahan jumlah entitas IKNB Syariah.

Grafik III - 7 Jumlah Entitas IKNB Syariah Triwulan I-2018



A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan I-2018, industri perasuransian Syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 5,48% dan 3,60% menjadi Rp42,74 triliun dan Rp36,58 triliun dibandingkan triwulan IV-2017. Secara *year-on-year*, kontribusi bruto, dan klaim bruto pada triwulan I-2018 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 34,98%, dan 6,03% menjadi Rp4,09 triliun dan Rp1,23 triliun.

Tabel III - 11 — Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (triliun Rupiah)

1	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	28,93	30,42	31,32	33,48	33,48
	Asuransi Umum Syariah	4,91	4,98	5,28	5,37	5,37
	Reasuransi Syariah	1,42	1,96	1,61	1,66	1,66
	Jumlah	35,25	37,37	39,41	40,52	42,74
2	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	26,28	27,41	28,78	30,42	30,42
	Asuransi Umum Syariah	3,23	3,36	3,54	3,67	3,67
	Reasuransi Syariah	1,12	1,49	1,19	1,22	1,22
	Jumlah	30,63	32,26	33,52	35,31	36,58
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,39	4,91	7,60	11,34	11,34
	Asuransi Umum Syariah	0,51	0,95	1,43	1,88	1,88
	Reasuransi Syariah	0,13	0,30	0,53	0,78	0,78
	Jumlah	3,03	6,16	9,56	14,00	4,09
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	0,85	1,73	2,21	3,53	3,53
	Asuransi Umum Syariah	0,22	0,46	0,68	0,88	0,88
	Reasuransi Syariah	0,09	0,24	0,49	0,53	0,53
	Jumlah	1,16	2,44	3,44	4,95	1,23
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,91	4,07	5,37	4,32	4,55
	Asuransi Umum Syariah	2,66	2,66	2,82	2,86	2,94
	Reasuransi Syariah	0,47	0,64	0,60	0,59	0,66
	Jumlah	7,05	7,19	8,79	7,78	8,14

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 63 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi Syariah, 48 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah, satu perusahaan reasuransi

Syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit Syariah. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari satu Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dengan aset sebesar Rp1,31 triliun.

B. Industri Pembiayaan Syariah

Pada triwulan I-2018, jumlah aset perusahaan pembiayaan Syariah pada periode pelaporan

mengalami penurunan sebesar 5,8% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp30,39 triliun.

Tabel III - 12 — Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (miliar Rupiah)

No.	Komponen	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan IV-2017	Triwulan I-2018
1	Kas dan Setara Kas	602,17	955,26	833,92	1.103,56	1.353,07
2	Aset Tagihan Derivatif	-10,27	-	-	4,02	14,92
3	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga					-
4	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto	33.746,41	34.050,84	31.993,54	28.645,49	26.171,71
5	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
6	Investasi Jangka Panjang dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
7	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	95,71	111,28	98,06	88,45	57,06
8	Aset Tetap dan Inventaris – Neto	144,30	124,20	118,03	114,60	111,87
9	Aset Pajak Tangguhan	23,23	23,57	48,23	24,80	21,80
10	Rupa-Rupa Aset	1.888,20	2.224,20	2.486,93	2.275,66	2.664,42
	Total	36.489,75	37.489,36	35.578,71	32.256,57	30.394,85

Sampai akhir triwulan I-2018 terdapat 37 perusahaan pembiayaan Syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 34 perusahaan berbentuk UUS. Pada perusahaan modal ventura Syariah, terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan tiga perusahaan

berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.267,77 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit Syariah dengan aset sebesar Rp1.111,59 miliar.

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari enam Perusahaan Penjaminan Syariah, Unit Usaha Syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan

Ekspor Indonesia (LPEI), dan dua Pergadaian Swasta. Jumlah perusahaan penjaminan Syariah sebanyak enam perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan empat UUS

dengan total aset sebesar Rp1,14 triliun. Aset kegiatan Syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan LPEI masing-masing sebesar Rp5,26 triliun dan Rp16,09 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 37 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp115,55 miliar.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2018, terdapat satu ketentuan yang diterbitkan yaitu SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2018 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (SEOJK Rencana Bisnis BUS UUS). SEOJK Rencana Bisnis BUS UUS merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Ketentuan ini antara lain memuat cakupan dan penyusunan serta format pelaporan untuk Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Untuk UUS, Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sebagai bagian tersendiri yang disajikan sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bank umum yang memiliki UUS. Selain ketentuan yang khusus berlaku bagi Perbankan Syariah, terdapat satu ketentuan Perbankan secara umum yang diterbitkan oleh OJK yang berlaku juga bagi Perbankan Syariah, yaitu POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan I-2018, OJK menerbitkan satu POJK terkait Pasar Modal Syariah, yaitu POJK Nomor Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. POJK ini mengatur mengenai Persyaratan pihak yang dapat melakukan PUB Sukuk, jangka waktu pelaksanaan PUB Sukuk, kewajiban penyampaian Pernyataan Kesesuaian Syariah oleh Emiten dan pencantuman total jumlah dana yang akan dihimpun.

OJK juga menerbitkan satu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang mengatur Pasar Modal Syariah yaitu SEOJK Nomor 6/SEOJK.04/2018 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal. Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal, sesuai dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Pada periode triwulan I-2018, OJK menerbitkan satu Peraturan OJK terkait IKNB Syariah yaitu POJK Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Adapun pokok pengaturan dalam POJK ini adalah aspek kelembagaan, termasuk didalamnya pengaturan mengenai pembentukan Unit Usaha Syariah, penyelenggaraan usaha didalamnya pengaturan mengenai kegiatan usaha yang diperkenankan berdasarkan prinsip Syariah, penerapan manajemen risiko serta pengaturan mengenai penegakan kepatuhan.

OJK menerbitkan empat SEOJK terkait IKNB Syariah dengan detail dijabarkan sebagai berikut:

1. **SEOJK Nomor 2/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.** Peraturan ini mengatur mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala oleh perusahaan asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi Syariah kepada OJK. Peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dimana laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK melalui sistem elektronik sehingga mempermudah cara penyampaian laporan, monitoring penyampaian laporan, dan pengolahan data perusahaan asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi Syariah.
2. **SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.** Peraturan ini merupakan amanat ketentuan POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura. SEOJK ini bertujuan mengatur mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura Syariah. Adapun pokok pengaturan antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pelaporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi penerapan tata kelola perusahaan yang baik
3. **SEOJK Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Dana Pensiun yang Menyeleggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.** Peraturan ini merupakan Amanat POJK Nomor 33 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. SEOJK ini merupakan pedoman bagi DPS Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah dalam menyusun laporan hasil pengawasannya. Adapun pokok peraturan ini antara lain Format, isi dan ketentuan tata cara penyampaian Laporan pengawasan DPS.

4. SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2018 Tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Modal Ventura. Peraturan ini merupakan amanat POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yang menjelaskan bahwa perlu adanya pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman bagi perusahaan untuk mengatur tingkat kesehatan keuangannya. Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dengan kondisi minimum sehat. Adapun pokok peraturan ini antara lain: penghitungan kualitas aset produktif dan rentabilitas.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Optimisme terhadap perekonomian yang semakin membaik telah memberikan harapan positif dan telah mendorong pertumbuhan pembiayaan di perbankan syariah (BUS) sehingga di triwulan I/2018 mencapai Rp190,06 Triliun atau tumbuh 6,73% yoy. Sejalan dengan harapan positif tersebut, kebijakan stimulus restrukturisasi pembiayaan yang tidak diperpanjang OJK telah mendorong *awareness* BUS untuk mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan bermasalah. Meski hal tersebut sempat berdampak terhadap peningkatan NPF di akhir 2017, namun secara bertahap *awareness* BUS semakin membaik sehingga terdapat perbaikan pengelolaan pembiayaan yang menyebabkan penurunan NPF gross di triwulan I/2018 dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 4,77% menjadi 4,56%. Meski mengalami perbaikan, namun untuk mengantisipasi kemungkinan dampak pelemahan ekonomi secara global, OJK senantiasa mendorong peningkatan *awareness* BUS terhadap substansi penerapan manajemen risiko kredit, sebagai bagian dari *supervisory concern* OJK dalam rangka mendukung pencapaian “industri perbankan yang tumbuh berkualitas”.

Sejalan dengan meningkatnya *awareness* tersebut, kecukupan permodalan industri Perbankan Syariah (terutama untuk BUS) sampai dengan Triwulan I/2018 semakin membaik dan berada di atas *threshold* (rasio KPMM minimum 14%), yakni 18,47% atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 17,91%. Kecukupan permodalan tersebut akan semakin membaik mengingat optimisme terhadap perekonomian telah berdampak terhadap rencana pengembangan usaha BUS, yaitu terdapat enam BUS dari 13 BUS yang telah merencanakan penambahan modal di tahun 2018, bahkan dua BUS di antaranya berencana untuk melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*), sebagai wujud dukungan terhadap pendalaman pasar keuangan.

Dari sisi operasional, secara umum efisiensi masih memerlukan penyempurnaan akibat struktur dana BUS masih didominasi oleh dana mahal (deposito) dan rendahnya *fee based income*, sebagaimana tercermin dari rasio BOPO yang masih tergolong tinggi, yaitu 89,90%, meski membaik dari triwulan sebelumnya yaitu 94,91%. Selanjutnya, upaya perbaikan efisiensi pada masing-masing BUS masih terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing, terutama dengan mengoptimalkan pendapatan dan biaya, antara lain menyempurnakan layanan dan produk, peningkatan efisiensi dan produktifitas karyawan, optimalisasi jaringan kantor dengan mengurangi jaringannya secara bertahap (*network reprofiling*) dan membuka layanan tanpa kantor. Adapun Sebagai langkah *supervisory action*, OJK masih menetapkan risiko operasional sebagai bagian dari *primary supervisory concern* (khususnya kegiatan *on-site supervision*) terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur (khususnya IT) yang memadai, kompetensi SDI dan kecukupan pengendalian intern.

Berkenaan dengan profil risiko Perbankan Syariah yang cenderung stabil akibat upaya perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing BUS dan didukung oleh efektifitas *supervisory action* OJK dalam menjaga kelangsungan bank, maka rating peringkat RBBR di Perbankan Syariah masih sejalan dengan periode sebelumnya (Juni 2017), yaitu tergolong Cukup Sehat. Adapun potensi risiko utama, sesuai *Supervisory Plan* 2018 masih berasal dari risiko kredit dan risiko operasional. Adapun aspek permodalan hanya menjadi *concern Supervisory Plan* pada BUS tertentu.

Perizinan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2018, OJK melaksanakan proses perizinan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap tiga Calon Pemegang Saham Pengendali, 54 Pengurus Bank Syariah dan 12 pengajuan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari proses perizinan tersebut terdapat 13 calon Pengurus Bank dinyatakan memenuhi syarat (disetujui) dan dua calon DPS dinyatakan memenuhi syarat (layak). Di sisi lain, terdapat dua Calon Pengurus Bank Syariah tidak disetujui. Selain itu, terdapat tiga dokumen Calon Pemegang Saham Pengendali, 13 dokumen calon Pengurus Bank Syariah dan tiga calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hingga akhir triwulan I-2018 terdapat 26 proses perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Bank Syariah dan tujuh calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian.

Di bidang perizinan produk baru, terdapat enam permohonan masuk yang seluruhnya masih dalam proses penyelesaian. Terkait pengembangan jaringan kantor Perbankan Syariah, terdapat 52 permohonan jaringan kantor Perbankan Syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, penutupan kantor, perubahan status kantor dan penghentian kegiatan LSB dimana 33 permohonan telah disetujui, tiga permohonan dibatalkan oleh bank, lima dokumen dikembalikan karena

tidak memenuhi ketentuan dan 11 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Pada triwulan I-2018, OJK menerima 11 permohonan perizinan lainnya yaitu berupa lima permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Syariah, satu permohonan izin usaha pendirian bank Syariah, satu permohonan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank Syariah (konversi), satu permohonan pemisahan *spin off* dan tiga permohonan merger dan/atau akuisisi yang seluruhnya masih dalam proses penyelesaian.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal Syariah, berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan kriteria Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Sampai akhir triwulan I-2018, terdapat 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. Terkait pengawasan terhadap Pihak Penerbit DES yang telah ada, telah dilakukan penelaahan atas laporan DES yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES secara tahunan, yaitu pelaporan penerbitan DES selama 2017. Laporan tersebut berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Kriteria Daftar Efek Syariah.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 63 Perusahaan Perasuransian Syariah dan menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) terhadap Perusahaan Perasuransian Syariah. OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap empat Perusahaan Perasuransian Syariah. Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, OJK menerbitkan satu LHPLF Perusahaan Pergadaian Syariah, satu LHPLF Perusahaan Pembiayaan Syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap tiga Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, OJK melakukan kegiatan:

1. **Pemberian Izin Usaha.**
OJK memberikan izin unit usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk. OJK juga mengembalikan satu permohonan izin Perusahaan Pembiayaan Syariah.
2. **Kantor Cabang Syariah**
OJK memberikan izin enam kantor cabang Perusahaan Asuransi Syariah, dua kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah; pencatatan kantor selain kantor cabang pada satu Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu Perusahaan Perasuransian Syariah. Pada masa pelaporan, OJK mencabut izin satu kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah.

3. **Direksi**
OJK melakukan pencatatan perubahan susunan Direksi pada satu Perusahaan Modal Ventura Syariah dan satu Perusahaan Penjaminan Syariah.
4. **Dewan Pengawas Syariah**
OJK melakukan pencatatan perubahan Dewan Pengawas Syariah pada satu Perusahaan Pembiayaan Syariah.
5. **Modal Disetor**
OJK melakukan pencatatan pelaporan penambahan modal disetor pada satu Perusahaan Modal Ventura Syariah.
6. **Pemegang Saham**
OJK melakukan pencatatan atas perubahan pemegang saham pada lima Perusahaan Asuransi Syariah serta melakukan pembatalan pengajuan pencatatan atas perubahan pemegang saham pada satu Perusahaan Asuransi Syariah.
7. **Pimpinan Unit Syariah**
OJK melakukan pengadministrasian pengangkatan Pimpinan Unit Syariah pada empat Perusahaan Perasuransian Syariah dan empat Perusahaan Pembiayaan Syariah.
8. **Produk IKNB Syariah**
OJK melakukan persetujuan 14 produk baru asuransi jiwa Syariah dan 11 produk baru asuransi umum Syariah, serta pencatatan tiga produk asuransi jiwa Syariah, satu produk asuransi umum Syariah dan persetujuan kerjasama pemasaran *Bancassurance* 22 produk asuransi Syariah. Untuk produk pergadaian, OJK melakukan persetujuan untuk satu produk baru. Terdapat satu produk pembiayaan Syariah yang telah dilakukan persetujuan oleh OJK.
9. **Uji kemampuan dan Kepatutan**
OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap satu komisaris Perusahaan Asuransi Syariah, dua komisaris Perusahaan Pembiayaan Syariah, empat komisaris independen Perusahaan Asuransi Syariah dan dua komisaris independen Perusahaan Pembiayaan Syariah. OJK juga melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap tiga Direksi Perusahaan Asuransi Syariah, dan masing-masing satu orang aktuaris dan auditor internal. Selama periode laporan, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap empat Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah.
10. **Pemenuhan Syarat Keberlanjutan**
OJK melakukan pencatatan atas pemenuhan syarat keberlanjutan 21 pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan empat pihak utama Perusahaan Pembiayaan Syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan I-2018, OJK melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengembangan Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut:

1. Kajian Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi BUS dan UUS

Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk merumuskan skema atau model dan bentuk kerja sama sekuritisasi aset bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), OJK bersama lembaga terkait melakukan kajian untuk meninjau aktivitas sekuritisasi aset dari sisi fikh terutama terkait akad-akad yang dapat diterapkan dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan mengkaji isu-isu strategis dan permasalahan dalam aktivitas sekuritisasi aset. Kesimpulan kajian tersebut adalah sekuritisasi berbentuk EBA Syariah diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Beberapa peran bank Syariah yang dapat diakomodir dalam proses sekuritisasi aset antara lain: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Bank Kustodian, dan Pemodal. Berdasarkan diskusi dengan DSN-MUI tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah, aset yang dapat disekuritisasi adalah aset keuangan yang berdasarkan akad musyarakah, mudharabah, dan/atau akad lain yang kedudukan kepemilikan aset pembiayaan masih berada pada kreditur asal. Selain itu hasil dari diskusi dengan DSN MUI juga menyebutkan bahwa mekanisme dalam EBA Syariah juga memperbolehkan adanya kelas-kelas pemeringkatan pemodal yang dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

2. Kajian Metodologi Penurunan Nilai (*Impairment*) atas Aset-Aset yang Berasal dari Transaksi Syariah

OJK bekerja sama dengan Dewan Standar Akutansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) menyusun Kajian Metodologi Penurunan Nilai (*Impairment*) atas Aset-aset yang Berasal dari Transaksi Berbasis Syariah. Pada triwulan I-2018 telah dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Perbankan Syariah membahas praktik penurunan nilai saat ini di Perbankan Syariah. Pada FGD tersebut, bank Syariah menyambut baik penyusunan PSAK penurunan nilai secara Syariah sebagai panduan spesifik untuk penurunan nilai yang selaras dengan prinsip Syariah. Metode penurunan nilai secara Syariah diharapkan mampu mencerminkan risiko aset bank Syariah dan PSAK-nya tidak terlalu bersifat *principle-based*. Tahap selanjutnya, akan didalami implementasi metodologi penurunan nilai di IFRS 9.

Group Discussion (FGD) dengan Perbankan Syariah membahas praktik penurunan nilai saat ini di Perbankan Syariah. Pada FGD tersebut, bank Syariah menyambut baik

penyusunan PSAK penurunan nilai secara Syariah sebagai panduan spesifik untuk penurunan nilai yang selaras dengan prinsip Syariah. Metode penurunan nilai secara Syariah diharapkan mampu mencerminkan risiko aset bank Syariah dan PSAK-nya tidak terlalu bersifat *principle-based*. Tahap selanjutnya, akan didalami implementasi metodologi penurunan nilai di IFRS 9.

3. iB *Research Fellowship* Program 2018

OJK mengembangkan berbagai wadah riset salah satu di antaranya adalah iB *Research Fellowship* Program 2018. Dalam kegiatan ini, peneliti dan akademisi diberikan kesempatan untuk melakukan kolaborasi riset di bidang Perbankan Syariah bersama otoritas. Tema besar yang diangkat dalam iB *Research Fellowship* Program 2018 adalah “Transformasi Perbankan Syariah”. Pada triwulan I-2018, telah dilakukan publikasi *Call for Paper* iB *Research Fellowship* Program 2018 dan jumlah paper yang telah masuk sebanyak 35 paper.

4. iB *Research Grant* Program 2018

Dalam rangka mendukung *research-based policy* di bidang Perbankan Syariah, pada 2018 ini OJK menyelenggarakan program kolaborasi riset yang disebut iB *Research Grant* Program 2018. Sasaran utama dari program ini adalah percepatan pelaksanaan agenda riset yang masih panjang daftar topik dan permasalahannya, serta untuk mendukung aktivitas penelitian Perbankan Syariah oleh mahasiswa yang bermanfaat untuk mendukung perumusan kebijakan OJK di bidang Perbankan dan keuangan Syariah. Pada triwulan I-2018, telah dilakukan publikasi *Call for Paper* iB *Research Grant* Program 2018 dan jumlah paper yang telah masuk sebanyak 37 paper.

5. Standardisasi Pedoman Pengawasan

Dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan bank Syariah yang terstandarisasi, dilakukan sejumlah penyusunan pedoman terkait Perbankan Syariah antara lain:

- Pedoman pemeriksaan berdasarkan risiko untuk risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi
- Pedoman Pengawasan Bank terkait Siklus Pengawasan Bank berdasarkan Risiko
- Pedoman Laporan Bulanan BPRS
- Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

6. Sosialisasi dan Pelatihan

OJK bekerja sama dengan lembaga terkait melakukan sosialisasi dan pelatihan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS) batch I dalam rangka meningkatkan pemahaman petugas pelaporan dan meningkatkan kualitas data LSMK yang dihadiri oleh 17

BUS/UUS. Dalam rangka meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat terhadap Perbankan/keuangan Syariah, selama triwulan I-2018 dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan Expo iB Vaganza yang bertujuan untuk meningkatkan *outreach* nasabah baru baik nasabah Perbankan Syariah maupun keuangan Syariah. iB Vaganza Malang diikuti oleh 15 BUS/UUS, empat BPRS dan satu IKNB Syariah dengan perolehan sejumlah 4.430 rekening baru dengan total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp159 M.
2. Dalam rangka memperluas target sosialisasi dan edukasi Perbankan Syariah, telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi Perbankan Syariah melalui Workshop Halaqah Perbankan dan Keuangan Syariah kepada Da'i, Ulama dan Kalangan Pesantren, yaitu :
 - a. *Workshop* Halaqah Perbankan/Keuangan Syariah di Pondok Pesantren Guluk-guluk Sumenep Madura.
 - b. ToT Perbankan dan Keuangan Syariah di UNIDA Gontor.
 - c. TOT Keuangan Syariah Terintegrasi (UNDIP Semarang)
 - d. *Workshop* Halaqah Perbankan dan Keuangan Syariah di Pondok Pesantren An-Nur Malang.

7. Kajian Indeks Return Sektor Riil

Untuk menjaga keutuhan prinsip dasar dan praktik Syariah dibutuhkan adanya imbal hasil acuan yang mencerminkan kegiatan sektor riil sebagai akar operasional bank Syariah, terutama sebagai acuan penentuan harga (*pricing*). Kajian Pengembangan Indeks *Return* Sektor Riil merupakan kajian bersama antara OJK dan BI dan sebagai tindak lanjut dari kajian yang menghasilkan metode *Cash Recovery Rate* (CRR). CRR adalah penghitungan imbal hasil bisnis yang menitikberatkan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari investasi yang dilakukan dengan mengabaikan suku bunga. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan dan menghitung CRR dari sisi bisnis melalui nasabah-nasabah yang dibiayai oleh bank Syariah. Penyusunan Indeks *Return* Sektor Riil dengan data nasabah bank Syariah masih merupakan *pilot project*, yang dilakukan khususnya pada nasabah pada sektor utama dan prioritas pembiayaan Perbankan Syariah, yaitu sektor perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, dan pertanian khususnya pada beberapa bank Syariah.

8. Kerjasama Institusi Keuangan Syariah Internasional - Islamic Financial Services Board (IFSB)

Sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan organisasi internasional, OJK dengan IFSB bekerjasama untuk menyelenggarakan IFSB *Public Hearing* untuk tiga *exposure draft* terkait keuangan Syariah. Acara tersebut

dihadiri oleh industri dari ketiga sektor keuangan Syariah, yaitu industri Perbankan Syariah, pasar modal Syariah, dan takaful/asuransi Syariah. Lebih dari 75 peserta dari ketiga industri hadir dan beberapa diantaranya menyampaikan tanggapan terhadap *exposure draft* yang dipresentasikan oleh IFSB.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Kajian Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah pada Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil survei dengan sebagian besar pelaku di industri pasar modal syariah, tingkat kebutuhan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Syariah cukup tinggi sedangkan fakta menunjukkan bahwa penyerapan SDM yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Syariah di industri pasar modal syariah masih sangat rendah. Rendahnya tingkat penyerapan SDM yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Syariah tersebut dikarenakan belum adanya link and match antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Pada kajian sebelumnya telah dirumuskan standar kompetensi dan materi pasar modal syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pada kajian ini dilakukan pendalaman atas rumusan materi pasar modal syariah dalam rangka mengetahui tingkat kedalaman dan kesesuaiannya untuk menjadi literatur standar pengajaran di perguruan tinggi. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengaplikasikan rumusan materi pasar modal syariah yang telah disusun tersebut.

2. Penyusunan Kajian Terkait Market Maker Sukuk

Market share sukuk yang masih di bawah 5% dan perdagangannya di pasar sekunder yang relatif tidak likuid berpotensi menghambat perkembangan sukuk di Indonesia, karena akan menghasilkan liquidity premium yang tercermin dalam besaran imbal hasil sukuk. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan likuiditas tersebut, salah satunya dengan melakukan analisis terkait market maker sukuk. Kajian ini menganalisis data-data terkait perdagangan sukuk dan kemudian melihat kemungkinan dibentuknya market maker sukuk.

3. Penyusunan Kajian Terkait Aspek Syariah Transaksi Efek Syariah (Aspek Syariah Kliring dan Penjaminan)

Upaya peningkatan investor pasar modal syariah salah satunya dapat dilakukan dengan memastikan bahwa pasar modal syariah sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini menganalisis kesesuaian aspek syariah terutama pada kegiatan kliring dan penjaminan transaksi saham di bursa.

4. Sosialisasi dan Edukasi

Selama triwulan I-2018, OJK melaksanakan tujuh kegiatan sosialisasi dan edukasi Pasar Modal Syariah, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Pasar Modal Syariah di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Kahfi di Sukabumi.
- b. Pertemuan Forum Sikompak Syariah di Jakarta.
- c. Sosialisasi Pasar Modal Syariah di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia, Jakarta.
- d. *Coaching Clinic* Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha di Jakarta.
- e. Workshop Kopi Darat “Bincang Santai Investasi Syariah” di Jakarta.
- f. Workshop Aspek Syariah untuk WPPE & WPEE di Jakarta.
- g. *Training of Trainers* Keuangan Syariah Terintegrasi batch 1 di Semarang.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

1. Sosialisasi “*Link & Match* Industri Perasuransian Syariah dan Perguruan Tinggi”

Dalam rangka mendukung ketersediaan sumber daya manusia asuransi Syariah yang berkualitas, OJK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi mengenai “*Link & Match* Industri Perasuransian Syariah dan Perguruan Tinggi” dengan topik “Mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk memasuki Dunia Kerja di Industri Perasuransian Syariah”. Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja sama antara OJK, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

2. Sosialisasi Asuransi Syariah dan Dana Pensiun Syariah, dengan tema: “Meningkatkan Literasi di Kalangan Akademisi terhadap Produk Keuangan Syariah”

OJK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Asuransi Syariah dan Dana Pensiun Syariah, dengan tema: “Meningkatkan Literasi di Kalangan Akademisi terhadap Produk Keuangan Syariah”. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama OJK dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

Tujuan kegiatan sosialisasi asuransi Syariah dan dana pensiun Syariah dimaksudkan untuk:

- a. Memperkenalkan produk asuransi Syariah dan program pensiun Syariah kepada mahasiswa, dosen dan tenaga pengajar.
- b. Mendorong mahasiswa, dosen dan tenaga pengajar agar berminat menjadi peserta asuransi Syariah dan program pensiun Syariah.
- c. Berminat menjadi agen diseminasi informasi mengenai keuangan Syariah khususnya di bidang asuransi Syariah dan dana pensiun Syariah.

3. *Training of Trainers* Keuangan Syariah Terintegrasi

Dalam rangka pengembangan industri jasa keuangan Syariah, OJK menyelenggarakan kegiatan ToT/*Workshop* Keuangan Syariah Terintegrasi.

Tujuan ToT/*Workshop* Keuangan Syariah Terintegrasi adalah untuk:

- a. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang keuangan Syariah;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan Syariah;
- c. *Sharing* mengenai strategi pengembangan keuangan Syariah;
- d. Meningkatkan jumlah nasabah untuk menggunakan produk keuangan Syariah.

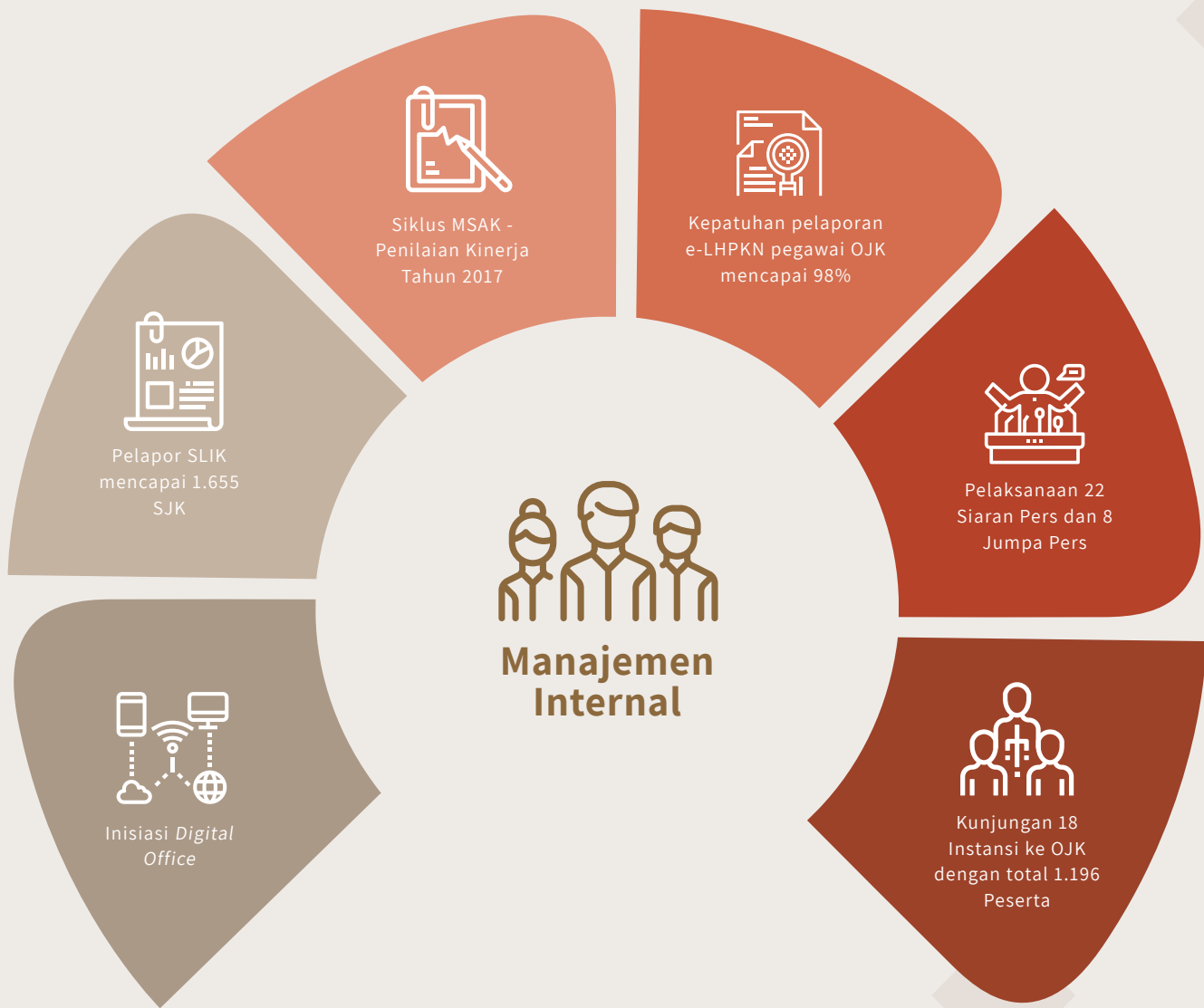
Kegiatan ToT/*Workshop* Keuangan Syariah Terintegrasi Batch-I 2018 ini bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Sebagai rangkaian kegiatan ToT/*Workshop* Keuangan Syariah Terintegrasi dimaksud, diselenggarakan pula dua jenis kegiatan lainnya, yaitu: 1) *Mini Expo* produk keuangan Syariah, dan 2) *Talkshow* IKNB Syariah.

Halaman ini sengaja di kosongkan

BAB 4

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI





4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat untuk periode 2017 yaitu evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi RKA dan penilaian kinerja triwulan IV-2017 melalui pengisian capaian masing-masing Satuan Kerja (Satker) pada Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Pada periode ini, Siklus MSAK OJK juga memasuki tahap kedua untuk periode 2018 yaitu penyusunan manual IKU dari masing-masing Peta Strategi Satker serta Operasionalisasi dari Peta Strategi baik OJK *Wide* maupun Satker.

Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK melakukan integrasi SIMPEL dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Dengan integrasi ini, diharapkan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU dapat dimitigasi dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di OJK, telah diselenggarakan pelatihan kepada seluruh Manajer IKU dan Anggaran (MIA) perwakilan masing-masing Satker dengan tema “Meningkatkan Kontribusi Organisasi melalui Manajemen Kinerja yang Handal”. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan baru terkait *best practise* pengelolaan kinerja di organisasi sejenis serta memberikan masukan kepada MIA dalam melakukan pengelolaan kinerja di masing-masing Satker.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan IV-2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan. Laporan tersebut disampaikan kepada *Stakeholders* eksternal OJK untuk memberikan informasi kebijakan dan capaian yang telah dilakukan oleh OJK selama triwulan IV-2017.

Grafik IV - 1 — Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) (sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2018 yang di dalamnya terdapat enam Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel**
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kepuasan *Stakeholders* terhadap kinerja OJK yang diukur dengan survei yang ditujukan kepada *Stakeholders* OJK seperti Lembaga Jasa Keuangan, Media, Akademisi, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui indeks integritas organisasi dan pengelolaan keuangan yang handal.
- 2. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan**
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK antara lain rasio *Capital Adequacy Ratio* (Perbankan), dan Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan melalui peningkatan indeks inklusi keuangan.
- 3. Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing**
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pelaksanaan penguatan pengawasan OJK, peningkatan SLA pelayanan SJK, penguatan *surveillance* stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan serta penerapan *best fit international standard*.
- 4. Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan**
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan kontribusi SJK pada sektor ekonomi prioritas, peningkatan kontribusi SJK bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku SJK.
- 5. Mewujudkan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel**
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui perlindungan konsumen yang kredibel, peningkatan produk keuangan mikro dan optimalisasi pemanfaatan *Fintech*.
- 6. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah**
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah.

4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Pada periode laporan, OJK melakukan penandatanganan *Project Charter* Inisiatif Strategis 2018. Inisiatif strategis merupakan proyek strategis lintas Satuan Kerja (Satker) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Rencana Jangka Menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategis OJK *Wide* 2018. Inisiatif Strategis 2018 terdiri dari enam proyek inisiatif strategis dengan detail sebagai berikut:

1. **Inovasi Keuangan Digital untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi Keuangan**

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain penyusunan *roadmap* inovasi keuangan digital, penyelenggaraan *regulatory sandboxing*, penyusunan POJK inovasi keuangan digital dan pembentukan National *Fintech Center* dan *Innovation Hub*.

2. **Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis IT**

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terwujudnya pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain penguatan infrastruktur pengawasan berbasis IT dan penyempurnaan proses bisnis pengawasan berbasis IT.

3. **Pendalaman Pasar Keuangan**

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah melakukan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam kerangka upaya pendalaman pasar keuangan serta menyusun rekomendasi dan upaya-upaya konkrit yang perlu dilakukan OJK dalam jangka pendek dan menengah untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain pengembangan instrumen baru di Pasar Modal (Obligasi Daerah, produk pengelolaan investasi berbasis KIK, pengembangan *Indonesia Government Futures Bond*), penguatan intermediasi dan kelembagaan di Pasar Modal serta pengembangan infrastruktur Pasar Modal yang efisien (percepatan proses IPO, penyelesaian transaksi T+3 menjadi T+2 dan penerapan *electronic book building*).

4. **Reformasi Industri Keuangan Non Bank**

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah melakukan penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain pengembangan sistem pengawasan, penerapan *exit policy* yang efektif, perluasan distribusi produk dan skema penyelesaian sengketa antar LJK.

5. **Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis**

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain implementasi SIAUTO, penyusunan peraturan terkait *Activity Based Costing* (ABC), dan desain sistem informasi manajemen keuangan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

6. **Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan**

Tujuan dari pelaksanaan inisiatif strategis ini adalah memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat diandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Beberapa kegiatan utama pada inisiatif strategis ini antara lain simplifikasi proses bisnis, *digital office* dan implementasi *e-procurement*.

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018

“Memacu Pertumbuhan”



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Agar kebijakan OJK dapat berjalan secara efektif, diperlukan komunikasi yang efektif antara OJK dengan *stakeholders*. Komunikasi tersebut juga merupakan bagian dari akuntabilitas OJK kepada publik. *Stakeholders* tersebut tidak saja meliputi Industri Jasa Keuangan (IJK), melainkan juga pihak-pihak lain di luar IJK.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan suatu *platform* yang dapat menjadi momen refleksi dan komunikasi antara OJK dengan *stakeholders*. Momen di mana OJK dapat menyampaikan progress mengenai perkembangan pasar keuangan, sekaligus untuk menyampaikan prospek, tantangan serta arah kebijakan OJK Industri Keuangan Nasional pada tahun mendatang.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk tersebut, OJK menyelenggarakan acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 yang mengambil tema “Memacu Pertumbuhan”. Pemilihan tema tersebut merupakan salah satu bentuk upaya OJK untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden; Seluruh Jajaran Pimpinan di OJK; Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR-RI; Gubernur Daerah;

Pimpinan Kementerian; Pimpinan Lembaga Pemerintah; Duta Besar; Pimpinan Lembaga Internasional; dan Pimpinan Perwakilan Sektor Industri Jasa Keuangan; serta Pimpinan Redaksi.

OJK menilai bahwa tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif hal ini tercermin dari indikator SJK yang dalam baik. Kuatnya tingkat permodalan, ketersediaan likuiditas yang memadai, serta terkendalinya tingkat risiko memberikan landasan yang kuat bagi sektor jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam menyediakan sumber pendanaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian domestik.

Sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi antara lain perkembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan yang sangat cepat, normalisasi kebijakan moneter negara maju dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Sejumlah program menjadi fokus OJK pada 2018, yaitu mendukung aspek pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya, percepatan program industrialisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah.

Memacu # Pertumbuhan

OJK berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan melalui serangkaian kebijakan strategis di tahun 2018.

Kebijakan Strategis OJK 2018

1. Memfasilitasi penyediaan pembiayaan untuk infrastruktur, UMKM dan pembiayaan ultra mikro;
2. Mendorong program industrialisasi melalui pengembangan bisnis model klaster yang diharapkan menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan efisiensi perbankan dan daya saing industri jasa keuangan melalui program reformasi BPR dan IKNB;
4. Mendorong proses digitalisasi serta pemanfaatan fintech untuk pembiayaan UMKM dan pemerataan akses keuangan;
5. Memperluas cakupan dan intensitas edukasi dan literasi keuangan untuk mencegah investasi ilegal; serta
6. Mendorong pengembangan ekonomi syariah.



Grafik IV - 2 — Kebijakan Strategis OJK 2018



Kebijakan mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta memperdalam pasar keuangan:

- a. Mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif
- b. Mempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional
- c. Meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah
- d. Meningkatkan proses handling perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi.
- e. Menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi *hedging* nilai tukar



Kebijakan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan:

- a. Mendorong sinergi bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur
- b. Mengintensifkan penerapan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan

- c. Mereformasi industri keuangan non-bank, agar mempunyai skala ekonomi yang lebih besar



Kebijakan mengoptimalkan pengawasan industry jasa keuangan:

- a. Mengoptimalkan peran teknologi untuk pengawasan secara terintegrasi di sektor perbankan, pasar modal dan industry keuangan non-bank dengan menerapkan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia
- b. Meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi Informasi yang lebih intensif



Kebijakan mendukung inovasi produk teknologi di sektor jasa keuangan (*Fintech*) yang bermanfaat bagi masyarakat:

- a. Mengeluarkan kebijakan (*guiding principles*) bagi Penyelenggara layanan Keuangan Digital yang mencakup mekanisme pendaftaran dan perizinan serta penerapan *regulatory sandbox* dan kebijakan tentang *crowdfunding*
- b. Mengarahkan lembaga jasa keuangan agar dapat meningkatkan sinergi dengan perusahaan *Fintech* ataupun mendirikan lini usaha *Fintech*
- c. Menyikapi perkembangan *cryptocurrency*, OJK melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin dari otoritas terkait



Kebijakan mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat:

- a. Mengembangkan KUR Klaster, yakni penyaluran KUR yang diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk oleh perusahaan inti, yaitu BUMN, BUMDes/BUMADes maupun swasta
- b. Memperluas pembentukan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah dengan menggunakan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan pembiayaan tanpa agunan dengan margin setara 3%
- c. Memfasilitasi pengembangan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, seperti Kredit Ultra Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan
- d. Mengoptimalkan fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk pemberdayaan masyarakat kecil di daerah.



Kebijakan meningkatkan edukasi dan literasi keuangan:

- a. Mengembangkan berbagai model edukasi keuangan yang bersifat high impact, tepat sasaran dan terukur dengan memanfaatkan berbagai delivery channel.
- b. Mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi dalam pencegahan dan penindakan investasi ilegal.

Pada kesempatan tersebut, OJK juga memberikan penghargaan terhadap pihak-pihak yang telah berperan penting sebagai “Tokoh Inspirator Inklusi Keuangan” dalam perannya untuk mendorong tingkat inklusi keuangan di daerah. Penghargaan tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu: pengembangan klaster perikanan, pengembangan BUMDes, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Untuk kategori pengembangan klaster perikanan, penghargaan tersebut diberikan kepada Direktur sekaligus pendiri PT Kelola Mina Laut, dimana beliau mendukung perkembangan nelayan tradisional dan memutus ketergantungan terhadap tengkulak serta mendirikan BMT (Baitul Mal wa Tamwil) untuk koperasi simpan-pinjam nelayan yang akan membantu pengelolaan keuangan nelayan.

Terkait dengan kategori pengembangan BUMDes, diberikan kepada Kepala Desa Langgosari, Banyumas dimana beliau mentransformasi empat hektar tanah/ lahan tandus terbengkalai menjadi taman argowisata yang dikelola BUMDes Bulak Barokah Desa Langgosari dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaannya. Komitmen untuk memajukan ekonomi pedesaan, beliau mengalokasikan lebih dari 90% Alokasi Dana Desa Tahun 2017 untuk mendukung pengelolaan taman argowisata tersebut. Pada akhirnya, usaha yang dikelola tersebut menarik banyak investor.

Selanjutnya, terkait dengan kategori bidang Lembaga Keuangan Mikro Syariah diberikan kepada Ketua Pengurus LKMS Berkah Rizqi Lirboyo yang turut aktif dalam mendorong LKMS tersebut untuk memberdayakan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan terbanyak, serta turut dalam menghidupkan aktifitas LKMS di lingkungan Pesantren Lirboyo Kediri.



4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

a. Audit Internal

Sampai akhir periode pelaporan, Audit internal telah menyelesaikan 13 audit dari 33 rencana audit pada tahun 2018. Dari 13 pelaksanaan audit tersebut, terdapat 13 Laporan Hasil Audit (LHA) yang telah diterbitkan. Pada triwulan I-2018, telah disusun tujuh konsep LHA antara lain terkait dengan hasil pelaksanaan audit di Kantor Regional OJK 2 Jawa Barat, Kantor Regional OJK 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor OJK Provinsi Lampung, Kantor OJK Cirebon, Kantor OJK Tasikmalaya, Audit Khusus tindak lanjut rekomendasi BPK dan audit khusus atas pemotongan dan pemungutan hutang pajak.

b. Profil Risiko

Menindaklanjuti keputusan Komite Manajemen Risiko terkait penetapan profil risiko utama 2018, terdapat tujuh jenis risiko dengan 17 tema antara lain pengaturan terintegrasi/sektoral, pengawasan terintegrasi/sektoral, perizinan terintegrasi/sektoral, penyidikan, akselerasi pertumbuhan SJK syariah, pendalaman pasar, *surveillance* stabilitas sistem keuangan, APU PPT, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, pengelolaan Sumber Daya Manusia, sistem informasi, pengembangan dan pengawasan *fintech*, komunikasi, internasional, logistik, dan pencapaian kinerja, penanganan gugatan, tata kelola, pembiayaan. Hasil identifikasi risiko tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam ke tujuh jenis risiko antara lain sembilan risiko strategis, tiga risiko operasional, satu risiko reputasi, satu risiko hukum, satu risiko kepatuhan, satu risiko kecurangan dan satu risiko keuangan.

c. Program Pendampingan Profil Risiko

Program pendampingan merupakan suatu proses manajemen risiko OJK untuk mengidentifikasi, mengukur dan menangani risiko serta meningkatkan kesadaran dan menanamkan budaya sadar risiko. Selama triwulan I-2018 pendampingan dilakukan di enam KR/KOJK. Program pendampingan dimulai dari sosialisasi SIMARIO, pengisian profil risiko, mitigasi dan CSA pada aplikasi SIMARIO.

d. Pengendalian Kualitas

Sampai dengan triwulan I-2018, telah dilakukan beberapa kegiatan terkait pengendalian kualitas antara lain *enhancement* Sistem Informasi Pengendalian Kualitas (SIMETA), melaksanakan *quick quality review* (QQR) terkait dengan analisis *virtual meeting*, penetapan status tanah OJK beserta dampaknya, kendala pengadaan barang dan jasa, sistem informasi *e-procurement*, strategi pengawasan OJK, proses penyelesaian sewa dan bongkar gedung kantor. QQR dilakukan dengan tujuan untuk menjaga standar kualitas dengan cara merespon isu-isu terkini dengan melakukan kajian singkat atas isu tersebut.

e. Program Pengendalian Gratifikasi

Pada triwulan I-2018 OJK menerima dan mengelola 43 laporan gratifikasi sehingga total laporan gratifikasi yang telah dikelola Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) sejak 2015 sejumlah 454 laporan. Gratifikasi yang dilaporkan tersebut berupa uang dan barang senilai Rp2,7 miliar.

f. Whistle Blowing System

Whistle Blowing System merupakan sarana yang disediakan OJK untuk melaporkan Insan OJK yang diindikasikan melakukan *fraud*. Laporan *Whistle blowing System* yang diterima sampai triwulan I-2018 sebanyak 255 laporan dengan laporan yang sedang ditindaklanjuti (laporan yang berindikasi pelanggaran oleh jajaran OJK dan didukung bukti yang memadai) sejumlah 26 laporan. Laporan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 29 laporan, dan laporan yang sedang dalam proses verifikasi dan analisa Konsultan Pengelola OJK WBS sebanyak 23 laporan. Adapun laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti sejumlah 84 laporan dan laporan tidak terkait pelanggaran oleh Insan OJK (laporan pengaduan konsumen, laporan pelanggaran di industri) sejumlah 93 laporan.

g. Audit Investigasi

OJK melaksanakan tindak lanjut atas laporan dugaan *fraud* yang masuk melalui OJK WBS dan non OJK WBS. Kegiatan yang dilakukan yaitu analisis awal dan audit investigasi. Sampai dengan triwulan I-2018, OJK menyelesaikan dua audit investigasi dan lima audit investigasi dalam proses.

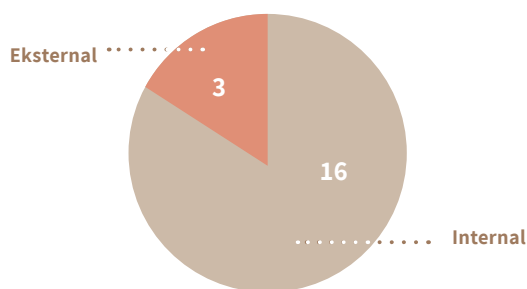
h. LHKPN

Pada triwulan I-2018, OJK mengkomodir penyampaian laporan periodik 2018 melalui aplikasi *e-LHKPN*. Laporan tahunan ini disampaikan oleh pegawai OJK dari level jabatan Anggota Dewan Komisiner hingga staf. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendorong tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yaitu sosialisasi tatap muka *e-LHKPN* dengan wakil seluruh satuan kerja kantor pusat, sosialisasi melalui *video conference* dengan KR dan KOJK, mengadakan klinik *e-LHKPN* bekerjasama dengan KPK, sosialisasi kepada satuan kerja, dan *email blast reminder* pengisian *e-LHKPN* serta *email blast* klasifikasi tingkat kepatuhan setiap satuan kerja. Sampai dengan triwulan I-2018, tingkat kepatuhan pelaporan *e-LHKPN* oleh pegawai OJK yaitu 98%.

i. Sosialisasi

Sejak 2016, OJK secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas, baik kepada pihak internal OJK maupun eksternal. Selain sosialisasi untuk Program Penguatan Integritas, pada triwulan I-2018 ini OJK juga melakukan sosialisasi mengenai pengisian *e-LHKPN*. Berikut rincian dari sosialisasi yang telah dilaksanakan:

Grafik IV - 3 — Jumlah Sosialisasi Berdasarkan Peserta Sosialisasi



4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Dalam rangka menetapkan atau melakukan evaluasi atas kebijakan strategis di OJK dan/atau menerima laporan atas kebijakan strategis yang wajib diketahui, Dewan Komisiner menyelenggarakan Rapat Dewan Komisiner paling kurang satu kali dalam satu minggu. Selama triwulan I-2018, Dewan Komisiner menyelenggarakan RDK sebanyak 16 kali yang membahas 14 topik yang bersifat laporan dan 36 pengambilan keputusan.

Grafik IV - 4 — Gambaran Topik RDK



Dalam RDK Laporan, Dewan Komisiner secara rutin menerima laporan mengenai kondisi terkini perekonomian dan hasil *surveillance* terhadap industri jasa keuangan. Selain itu, Dewan Komisiner juga menerima laporan atas kebijakan strategis di OJK. Dalam RDK Topik, Dewan Komisiner menyetujui penerbitan tujuh Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), 10 topik kelembagaan, dan 19 keputusan strategis lainnya. Dewan Komisiner menyetujui tujuh RPOJK yang terdiri dari dua RPOJK untuk industri perbankan, dua RPOJK untuk industri Pasar Modal, dan tiga RPOJK untuk IKNB.

Terkait industri perbankan, Dewan Komisiner menyetujui penerbitan RPOJK tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge* dan RPOJK tentang Perubahan Atas POJK Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum. Kedua RPOJK tersebut merupakan penyempurnaan atas POJK yang sudah ada.

Terkait industri Pasar Modal, Dewan Komisiner telah menyetujui penerbitan RPOJK Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang Merupakan Penyempurnaan atas POJK Sebelumnya dan RPOJK tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Ketentuan Baru di Pasar Modal Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyampaian Laporan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. Melalui ketentuan ini, Emiten dan Perusahaan Publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara elektronik.

Selanjutnya, tiga peraturan di IKNB yaitu RPOJK yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, RPOJK tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan RPOJK tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

Terkait kelembagaan, pada triwulan I-2018 Dewan Komisiner menyetujui hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon pengurus di industri perbankan dan lembaga jasa keuangan non bank. Terkait keputusan strategis lainnya, Dewan Komisiner menyetujui di antaranya pemutakhiran daftar bank sistemik sebagai pelaksanaan terhadap UU PPKSK, penetapan rekomendasi Komite Teknologi Informasi OJK tentang program kerja sistem informasi OJK 2018, Laporan Keuangan OJK 2017, pengelolaan SDM di OJK, dan lain sebagainya.

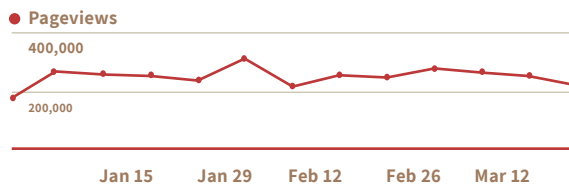
Dewan Komisiner menyelenggarakan *Board Seminar* (BS) membahas materi tertentu dan memberikan arahan atas pelaksanaan fungsi dan tugas OJK. Dalam proses menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), peraturan wajib terlebih dahulu dibahas dalam *Board Seminar* untuk mendapatkan arahan Dewan Komisiner serta masukan Satuan Kerja lain terhadap substansi aturan. Selain masukan dari Dewan Komisiner dan Satuan Kerja di OJK, penyusunan peraturan di OJK juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Selama triwulan I-2018, forum BS membahas beberapa kajian antara lain mengenai *Fintech* dan teknologi kripto, strategi penguatan BPR dan penyempurnaan metodologi pemutakhiran daftar bank sistemik. Forum BS juga membahas beberapa inisiatif antara lain pengembangan Aplikasi *Record Management System* OJK sebagai bagian dari digitalisasi proses kerja di OJK, program bank wakaf, dan usulan insentif bagi *green bond*.

4.4 KOMUNIKASI

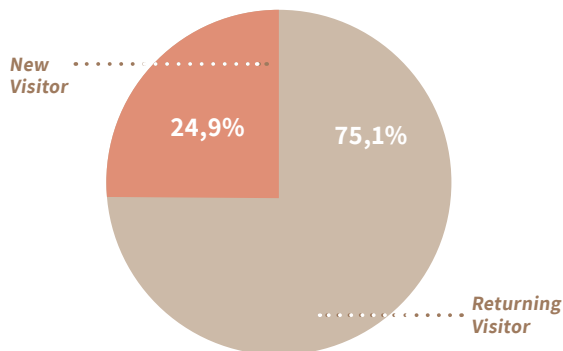
4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*.

Grafik IV - 5 — Statistik Pengunjung Website OJK



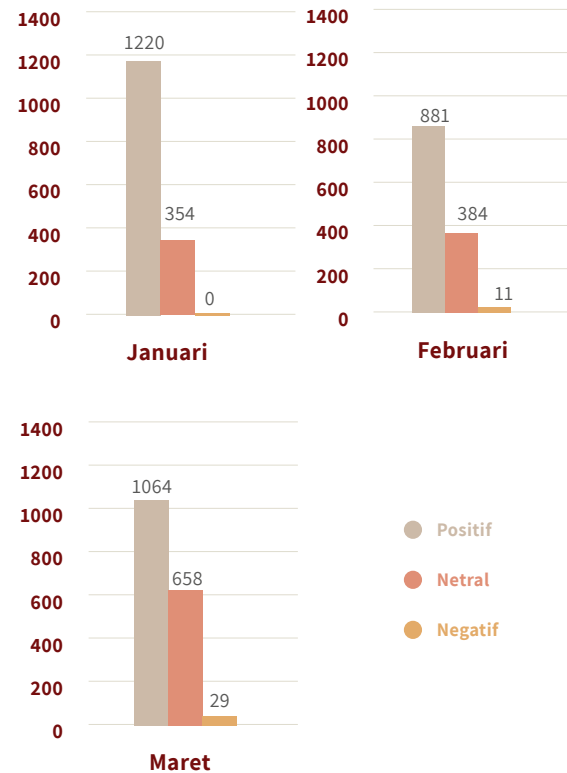
Users	New Users	Sessions
653,985	586,762	1,132,836
Number of Sessions per User	Pageviews	Pages / Session
1.132.836	3,204,644	2.83
Avg. Session Duration	Bounce Rate	
00:03:31	57.00%	



Pada periode laporan, *website* OJK mengunggah 514 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, dan foto kegiatan. *Website* OJK juga memiliki 15 *minisite*. Berdasarkan data statistik, jumlah pengunjung *website* dan jumlah halaman yang dilihat atau dibaca mengalami kenaikan yaitu 36,3% dan 20,3%. Jumlah pengunjung meningkat dari sebelumnya pada triwulan IV-2017 sebanyak 479.890 menjadi 653.985 *users* dan jumlah halaman yang diakses sebelumnya 2.664.058 menjadi 3.204.644 *pageviews* pada triwulan I-2018. Untuk media sosial, *Twitter* OJK memiliki lebih dari 34.500 *followers*, media sosial *Facebook* OJK memiliki lebih dari 26.769 *followers* dan *Instagram* OJK memiliki lebih dari 50.400 *followers*.

Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisa ini dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum pada 234 media cetak, 4211 media *online*, 11 stasiun televisi nasional.

Grafik IV - 6 — Tone Pemberitaan Triwulan I-2018



Total pemberitaan selama triwulan I-2018 adalah 4.601 berita dengan rata-rata 1.533 berita per bulan atau sekitar 51 berita per harinya. Sementara itu, dari segi *tone* pemberitaan terbagi dari 3.165 berita positif, 1.396 pemberitaan netral, dan 40 berita negatif. Terkait dengan relasi media, selama triwulan I-2018 OJK telah menerbitkan 22 siaran pers yang didominasi oleh isu terkait OJK Wide dan IKNB masing-masing sebanyak tujuh siaran pers.

Grafik IV - 7 — Siaran Pers Triwulan I-2018



Tabel IV - 1 — Siaran Pers Triwulan I-2018

No.	Judul Siaran Pers	Bidang
1	OJK Keluarkan Kebijakan Khusus untuk Perbankan di Kabupaten Karangasem Bali	Perbankan
2	Masyarakat Mulai Manfaatkan SLIK OJK	Perbankan
3	OJK Imbau Masyarakat Pahami Perjanjian Pembiayaan	IKNB
4	Penerbitan "Market Standard" Transaksi Repo atas Efek Bersifat Utang	Pasar Modal
5	Perdagangan Saham di BEI Tetap Berjalan Normal	Pasar Modal
6	Wimboh Santoso Pimpin Masyarakat Ekonomi Syariah	OJK Wide
7	Memacu Pertumbuhan Melalui Industri Jasa Keuangan-Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2018	OJK Wide
8	Pembangunan Infrastruktur Penting Menunjang Tujuan SDGs- Wimboh Santoso Pembicara di Forum OECD	OJK Wide
9	OJK Memberikan Akses Informasi Penerbitan Obligasi Daerah	Pasar Modal
10	Penjelasan Proses Penggabungan PT Axa Life Indonesia dan PT Axa Financial Indonesia	IKNB
11	OJK Sampaikan Program Inisiatif Baru Inklusi Keuangan ke Ratu Maxima	OJK Wide
12	OJK Lakukan Program Penyehatan Komprehensif Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB)	IKNB
13	OJK Dorong Integrasi BPD untuk Dukung Pembiayaan Pembangunan	Perbankan
14	OJK Dukung Pengembangan Pembiayaan Ramah Lingkungan	Pasar Modal
15	Stabilitas dan Likuiditas Industri Jasa Keuangan Februari dalam Kondisi Terjaga	OJK Wide
16	OJK Fokus Kebijakan Perlindungan Konsumen <i>Fintech</i> -Seminar Internasional Kebijakan dan Peraturan <i>Fintech</i>	IKNB
17	OJK Keluarkan Izin 20 Bank Wakaf Mikro-Presiden Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara di Serang, Banten	IKNB
18	OJK Sampaikan Keuntungan Berinvestasi di Indonesia ke Investor Inggris	OJK Wide
19	OJK Ijinkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Memasarkan Produk	IKNB
20	Wimboh Santoso Jabat Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah	OJK Wide
21	Dorong Inklusi Keuangan OJK Gandeng Pengurus Pusat Bhayangkari	OJK Wide
22	Presiden Gelar Silaturahmi Bank Wakaf Mikro Di Istana Negara	IKNB

OJK menyelenggarakan jumpa pers dan media *briefing* sebanyak delapan kali yang terdiri dari tiga IKNB, dua OJK Wide, satu Pasar Modal, satu Perbankan, dan satu EPK. Program ini merupakan upaya OJK dalam menjalin kerja sama yang erat dengan para wartawan media. Topik jumpa pers dan media *briefing* pada triwulan I-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 2 — Jumpa Pers dan Media Briefing Triwulan I-2018

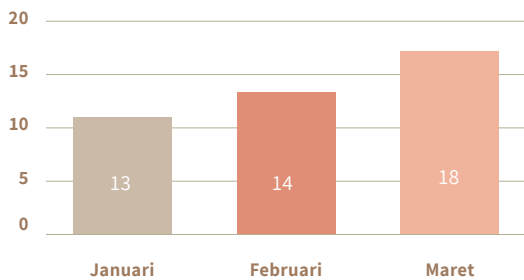
No.	Topik Jumpa Pers dan Media Briefing
1	Perkembangan Pelaksanaan SLIK
2	Perkembangan Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi
3	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018
4	Kebijakan Penerbitan Obligasi Daerah
5	Perkembangan Industri Perasuransian
6	Market Update Bulanan
7	Perkembangan Industri Asuransi di Indonesia
8	Perkembangan Terkini Perbankan Indonesia

Sebagai upaya untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan industri jasa keuangan serta membangun opini positif OJK di masyarakat, OJK mengadakan kegiatan pelatihan dan *gathering* wartawan media massa pada Februari 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 42 wartawan yang bertemakan Perkembangan Industri Jasa Keuangan di Wilayah Kerja KR 6 dan Satgas Waspada Investasi. OJK juga melakukan diskusi bersama Redaktur Pelaksana Media Massa yang dihadiri oleh 25 redaktur pelaksana. OJK melakukan kunjungan ke Media Group (Metro TV dan Media Indonesia) untuk menjalin komunikasi dan diskusi serta *sharing* perkembangan terkini industri jasa keuangan. Pada kegiatan tersebut, OJK memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan pemberitaan media di masa mendatang.

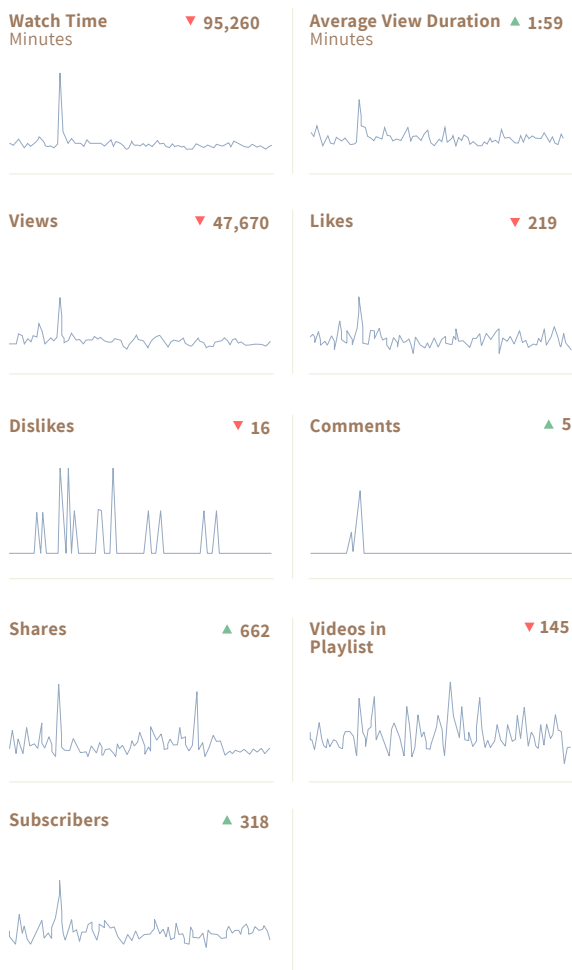
4.4.2 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal *Youtube* dengan akun Jasa Keuangan dan disiarkan di IDX Channel (TV Bursa). Selama triwulan I-2018, OJK TV memproduksi 45 liputan yang terdiri dari 22 liputan OJK Wide, 11 liputan di bidang IKNB, lima liputan di bidang Pasar Modal, empat liputan di bidang EPK, dan tiga liputan di bidang Perbankan. Selama periode triwulan I-2018 kanal *Youtube* Jasa Keuangan telah disaksikan lebih dari 47.670 viewers.

Grafik IV - 8 — Jumlah Liputan OJK TV Triwulan I-2018



Grafik IV - 9 — Statistik OJK TV Triwulan I-2018



4.5 KEUANGAN

4.5.1 Realisasi Anggaran

Pada 2018, anggaran untuk membiayai program kerja dan kegiatan OJK dibiayai sepenuhnya dari pungutan sebesar Rp4.977,187 miliar. Sampai akhir triwulan I-2018, realisasi anggaran OJK adalah sebesar Rp947,075 miliar atau 19,03% dari pagu anggaran. Persentase realisasi tersebut mengalami sedikit peningkatan dibanding triwulan I-2017 yaitu sebesar 18,99%.

4.5.2 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik terutama di

bidang keuangan. Selama tahun 2017, OJK melakukan transformasi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi OJK (SI-AUTO). Sistem informasi ini mengintegrasikan enam aplikasi yaitu empat aplikasi keuangan, satu aplikasi pengelolaan aset dan satu aplikasi *Mandiri Cash Management* (MCM). Selain itu, SI-AUTO juga dipersiapkan untuk melakukan interkoneksi dengan aplikasi seperti Sistem Remunerasi OJK (OJK-SAR), SIMFOSIA (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia), dan Sistem Manajemen Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Melalui integrasi tersebut pengelolaan keuangan OJK diharapkan lebih efektif secara *end to end*. Sampai triwulan I-2018, OJK melakukan persiapan implementasi SI-AUTO yang meliputi kegiatan:

1. Sosialisasi pengoperasian dan migrasi data transaksi ke SI-AUTO;
2. Migrasi data anggaran, data aset tetap dan persediaan ke SI-AUTO;
3. Pengujian integrasi dengan *Bank Partner*;
4. Pengujian integrasi dengan aplikasi internal OJK; dan
5. *Grand Launching* aplikasi SI-AUTO

OJK mengembangkan konsep *Performance Based Budgeting* (PBB) dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran. Konsep PBB tersebut diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018. PBB merupakan konsep penyusunan anggaran yang menghubungkan (*alignment*) antara strategi yang ditetapkan oleh OJK dengan anggaran yang tersedia, sehingga setiap program kerja yang dianggarkan mendukung *Destination Statement* (jangka menengah) dan Sasaran Strategis (jangka pendek) yang telah ditetapkan OJK. Dengan demikian, tidak ada aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam pencapaian visi dan misi OJK.

Dalam rangka mendukung implementasi PBB, OJK memfinalisasi konsep *Activity Based Costing* (ABC) dalam penyusunan standar biaya sebagai *key success factor* implementasi PBB. Penerapan konsep ABC dalam penyusunan standar biaya di lingkungan OJK dilakukan berdasarkan standar aktivitas untuk menghasilkan suatu *output* untuk kegiatan sejenis, seperti pengaturan, pengawasan, dan sosialisasi. Oleh karena itu, penerapan standar biaya di lingkungan OJK dapat meningkatkan kewajaran dalam alokasi anggaran kegiatan sejenis antar satuan kerja dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional apakah telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian visi dan misi OJK.

4.6 SISTEM INFORMASI

4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

- a. Implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
Untuk mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan publik dalam memantau informasi kredit yang dimiliki debitur serta untuk mendukung LJK dalam mengendalikan risiko kredit

yang diberikan kepada debitur maka OJK melakukan pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pembangunan SLIK selesai pada tahun 2017 dan pada 1 Januari 2018, SLIK diimplementasikan secara penuh dan menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, layanan permintaan informasi debitur dan penanganan pengaduan debitur beralih dari BI kepada OJK. Jumlah Pelapor SLIK pada triwulan I-2018 adalah 1.665 terdiri dari 102 Bank Umum, 34 BUS/UUS, 1.337 BPR, 142 BPRS, 32 Perusahaan Pembiayaan, lima Perusahaan Modal Ventura, delapan Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu Perusahaan Modal Ventura Syariah, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJKL) dan satu Koperasi.

b. **Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)**

SPRINT merupakan aplikasi perizinan berbasis *web* secara *end to end solution* dan adaptif, di mana LJK dapat melakukan registrasi perizinan dan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan. Rencana pengembangan SPRINT pada 2018 meliputi modul Lembaga dan Produk Investasi, modul Perubahan Data Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, modul WPE dan WAPERD, modul *Bancassurance* Unit Syariah, modul Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaga), modul Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun Syariah, dan modul Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi.

c. **Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)**

Pengembangan SIPT bertujuan untuk mendukung pengawas terintegrasi dalam melakukan analisis penilaian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan secara berkala, peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan. Pengembangan SIPT pada 2018 akan mengakomodir perubahan format Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dan penambahan modul *Early Warning System* (EWS) pada SIPT.

d. **Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS)**

SILARAS merupakan aplikasi pelaporan secara elektronik yang dibangun untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh LJK sehingga memudahkan pengawas dalam pengolahan dan analisis data keuangan LJK serta proses *monitoring* laporan yang disampaikan LJK. Pengembangan SILARAS 2018 meliputi penambahan validasi dan formulir rincian pada laporan perusahaan pembiayaan, serta pembangunan laporan berkala *financial technology* dan industri perasuransian berbasis *metadata*.

e. **Sistem Aplikasi Pengawasan dan *Monitoring***
OJK mengembangkan sistem aplikasi untuk

pengawasan dan *monitoring* antara lain: (a) *Dashboard* Konglomerasi Keuangan, (b) *Dashboard* Pendalaman Pasar Keuangan, (c) Sistem Informasi Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahap II, (d) Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal (SIPM), (e) Sistem *e-Monitoring* Pengelolaan Investasi, (f) Sistem *e-Monitoring* Modul S-INVEST, (g) Sistem Pelayanan Informasi dan Statistika IKNB (SIPIKA), (h) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), (i) Sistem Informasi Geografis LJKNB (SIGEO), (j) Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR Modul Tingkat Kesehatan, Modul *Know Your* BPR/BPRS, Modul *Quality Assurance* BPR/BPRS, (k) Aplikasi Data Pokok, dan (l) *Enhancement* pada Sistem Informasi Perbankan terkait APOLO, (m) *Data Warehouse* Bank Umum.

4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

a. **Sistem Aplikasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi**

OJK mengembangkan aplikasi untuk mendukung kapasitas organisasi antara lain (a) Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas (SIMETA), (b) Pengembangan Sistem Informasi Rapat Dewan Komisiner (SI RDK), (c) Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT), (d) Pengembangan Sistem Informasi Audit Internal (SIAI), (e) Sistem Tata Persuratan dan Kearsipan OJK (*RMS-Record Management System*), (f) Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA), (g) Pembangunan *E-Procurement* OJK, (h) Aplikasi *Mobile* Sumber Daya Manusia (SMART HR), dan (i) *Learning Management System* (LMS) OJK.

4.7 LOGISTIK

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Kegiatan OJK selama periode laporan, khususnya terkait kelogistikan adalah penyelesaian pemindahan sejumlah Satuan Kerja (Satker) kantor pusat ke gedung kantor pusat baru dan penataan lanjutan untuk mengakomodir pemindahan Kompartemen Perbankan ke gedung tersebut. OJK terus mengkaji kepemilikan gedung kantor pusat terpadu, demi terciptanya efektifitas dan efisiensi koordinasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah yang telah menempati gedung kantor sendiri (terpisah dari gedung Bank Indonesia) baik yang telah merupakan milik OJK, gedung sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga akhir periode laporan adalah sebanyak 29 Kantor, dengan detail sebagai berikut:

Tabel IV - 3 — Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

1	Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung)	5	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang)
2	Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang)	6	Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar)
3	Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Medan)	7	Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin)
4	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar)	8	Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya)
9	Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta)	20	Kantor OJK Prov. Lampung (Bandar Lampung)
10	Kantor OJK Solo (Solo)	21	Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi)
11	Kantor OJK Tegal (Tegal)	22	Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu)
12	Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto)	23	Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang)
13	Kantor OJK Jember (Jember)	24	Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah (Palangkaraya)
14	Kantor OJK Kediri (Kediri)	25	Kantor OJK Cirebon (Cirebon)
15	Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam)	26	Kantor OJK Prov. Riau (Pekanbaru)
16	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari)	27	Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara (Manado)
17	Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu)	28	Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh)
18	Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon)	29	Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat (Pontianak)
19	Kantor OJK Prov. Papua dan Papua Barat (Jayapura)		

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Dari sisi pengaturan kelogistikan, terdapat beberapa ketentuan kelogistikan yang telah ditetapkan, yakni:

1. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah di OJK
2. Pedoman Penghapusan Barang Milik OJK
3. Pedoman Manajemen Persediaan Barang Milik OJK

Dalam hal sistem kelogistikan, OJK mengembangkan Sistem Manajemen Ruang Rapat (SEMERU). Terkait manajemen aset, dalam periode laporan tengah dilakukan migrasi data penatausahaan aset dari Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS) ke aplikasi SI-AUTO. OJK juga mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2015 terkait penerapan manajemen mutu sistem manajemen kearsipan untuk layanan *Mailing Room* OJK (pengelolaan naskah dinas).

4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Kebijakan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan I-2018 telah diterbitkan lima kebijakan, yang terdiri dari dua SEDK dan tiga KDK, sebagai berikut:

1. SEDK Nomor 2/SEDK.01/2018 tentang Fasilitas Pinjaman Multiguna atau Fasilitas Pembiayaan Bagi Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
2. SEDK Nomor 3/SEDK.01/2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, merupakan penyempurnaan dari ketentuan penilaian kinerja pegawai di OJK yang berlaku sebelumnya. Perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan antara lain:
 - a. Penambahan ketentuan mengenai pola distribusi nilai kinerja sebagai penentu nilai kinerja pegawai di Satuan Kerja.
 - b. Penambahan ketentuan mengenai tahapan evaluasi penilaian kinerja bagi Pemimpin Satuan Kerja selain Deputi Komisiner.
 - c. Penyesuaian ketentuan mengenai penilaian kinerja bagi Pegawai promosi, mutasi, penugasan eksternal, dan tugas belajar (PTB).
3. KDK Nomor 3/KDK.01/2018 tentang Kenaikan Penghasilan karena penyesuaian daya beli bagi Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan,
4. KDK Nomor 4/KDK.01/2018 tentang Indeks dan Bunga atau Margin/Ujrah Fasilitas Pinjaman Multiguna atau Fasilitas Pembiayaan Bagi Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
5. KDK Nomor 8/KDK.01/2018 tentang Pola Distribusi Nilai Kinerja di Otoritas Jasa Keuangan

4.8.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sebagai kelanjutan dari proses pemetaan kebutuhan pegawai OJK 2018 yang ditetapkan pada triwulan IV-2017, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memutuskan mutasi pegawai sebanyak 77 orang yang terdiri dari level Deputi Komisiner sampai dengan level PTU dan penentuan 18 lowongan jabatan yang diprioritaskan untuk diisi karena kebutuhan mendesak. Untuk memenuhi jabatan lowong dilakukan seleksi terhadap 54 kandidat melalui asesmen pihak ketiga dan wawancara. Pemenuhan dilakukan pula melalui seleksi tenaga kerja Pegawai Kontrak Waktu Tertentu, sebanyak 60 orang.

Selain pemenuhan pegawai, OJK memberikan izin prinsip kepada 45 pegawai melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yang terdiri dari empat skema pembiayaan:

1. Sembilan orang untuk beasiswa yang seluruhnya ditanggung OJK;
2. 14 Orang untuk beasiswa dari pihak lain dan OJK membayarkan selisihnya sesuai ketentuan internal OJK;
3. 10 Orang untuk program pendidikan dengan beasiswa yang seluruhnya berasal dari pihak lain; dan
4. 12 Orang untuk jalur pendidikan formal atas inisiatif sendiri dengan beasiswa berupa penggantian biaya pendidikan formal dari OJK.

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Berdasarkan RDK mengenai Laporan dan Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang Berasal dari Eksternal, telah ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018-2021. Selain itu, dalam kaitannya dengan tugas Anggota Dewan Audit OJK, maka dilakukan juga perubahan PDK Nomor 2/PDK.01/2018 tentang Dewan Audit dengan pokok-pokok pengaturan antara lain meliputi tugas, fungsi, jumlah dan susunan Dewan Audit serta proses pemilihan, hak dan kewajiban Dewan Audit Eksternal. Dewan Audit dibantu oleh Sekretariat Dewan Audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan pengendalian kualitas.

4.8.4 Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

Pada triwulan I-2018, OJK melakukan pengkinian pada sistem informasi terkait sumber daya manusia, antara lain:

1. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)
 - a. Pengisian dan persetujuan evaluasi kinerja melalui SIMFOSIA seluruh pegawai di satuan kerja.
 - b. Pemingkatan kinerja oleh seluruh satuan kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK secara *online*.
 - c. Penyelesaian tahapan pengembangan SIMFOSIA dan memasuki tahapan pengujian sistem (SIT)
 - d. Perbaikan dan Penambahan fungsi-fungsi baru di SIMFOSIA.
2. Sistem Aplikasi Remunerasi (OJK-SAR)
 - a. Pengembangan fungsi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai
 - b. Pengembangan fungsi perhitungan pajak mantan pegawai, pajak pesangon dan pajak ireguler dan regular.
 - c. Integrasi antara OJK-SAR dan SI-AUTO
3. Sistem Mobile SDM (SMART-HR)
 - a. *Kick-off meeting* dan pembentukan tim kerja.
 - b. *Desain mockup template* sistem aplikasi SMART-HR.
 - c. Pengembangan sistem modul berita.

4. *Virtual Assistant* (VIRA) SIMFOSIA
 - a. Penambahan *field keyword* untuk informasi berita dan ketentuan.
 - b. *Database*, sistem dan *webservice* VIRA di SIMFOSIA
 - c. *Input keyword* untuk *bank data* VIRA.
 - d. *Desain mockup template* VIRA

4.8.5 Dana Pensiun OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK

Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Dana Pensiun OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK pada triwulan I-2018 ini di antaranya adalah:

1. Penyampaian Laporan Evaluasi Investasi Dana pensiun OJK semester I- 2017
2. Persetujuan usulan perubahan Arahan Investasi Dana Pensiun OJK
3. Aktuaris untuk melakukan valuasi aktuaria Dapen-OJK per 31 Desember 2017.
4. Penjadwalan Rapat Pembina dengan Dewan Pengawas dan Pengurus YPK-OJK

4.9 OJK INSTITUTE

4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi ini. Penyelenggaraan Program terbagi menjadi tahap *Pre-Training*, *Training* dan *Post Training (assignment)*. Selama triwulan I-2018, PPKB dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu:

- a. PPKB Level Pertama (Kepala Subbagian) *batch* 1. Kegiatan klasikal *batch* 1 diikuti oleh 39 peserta.
- b. PPKB Level Pertama (Kepala Subbagian) *batch* 2. Kegiatan klasikal *batch* 2 diikuti oleh 40 peserta.

4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi (PPK) pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*) yang telah dilaksanakan pada triwulan I-2018 sebagai berikut :

- a. **Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan**
Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 2 tahap pertama diikuti peserta 42 orang dan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 2 tahap kedua diikuti peserta 40 orang.
- b. **PPK Non In-House Luar Negeri**
Selama triwulan I-2018, tercatat total 13 pegawai mengikuti PPK Non In-House Luar Negeri.
- c. **PPK Non In House Dalam Negeri**
Selama triwulan I-2018 sebanyak 27 pegawai mengikuti PPK Non In House Dalam Negeri teknis dengan 11 judul program.

- d. **PPK In-House Dalam Negeri**
Selama triwulan I-2018, telah dilaksanakan 10 IHT untuk pengembangan kompetensi teknis dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 645 pegawai, dan lima IHT untuk pengembangan kompetensi perilaku dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 166 pegawai.

4.9.3 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan I-2018 tercatat delapan orang pegawai untuk skim-1 (beasiswa penuh dari OJK), enam orang pegawai untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), lima orang pegawai untuk skim-3 (beasiswa dari pihak lain dengan remunerasi dari OJK), satu orang pegawai untuk skim-4 (beasiswa dengan pembiayaan secara mandiri dengan penggantian dari OJK).

4.9.4 Program Penugasan

Selama triwulan I-2018, OJK menugaskan enam pegawai untuk mengikuti program *Secondment/Attachment* di APRA selama dua bulan.

4.9.5 Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Manfaat Balik melalui Program Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan, OJK melakukan empat *workshop* pada triwulan I-2018 yaitu Program Regulator Mengajar di Universitas Sam Ratulangi Manado, *Workshop Implementasi PSAK 71*, *Workshop Peningkatan Kompetensi Kepada Komisaris dan Direksi BPR/BPRS Wilayah Semarang*, *Workshop Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA)* bagi Sektor Jasa Keuangan dengan jumlah keseluruhan kegiatan sebanyak 1.073 peserta.

4.9.6 Program Asesmen

Pada triwulan I-2018, OJK melakukan asesmen bagi tingkat Kepala Bagian-Kepala Departemen sebanyak 54 orang untuk pengukuran kompetensi yang bertujuan mendapatkan profil pegawai secara lengkap sebagai dasar promosi.

4.9.7 Program Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Sektor Jasa Keuangan telah dilaksanakan pembahasan peta kompetensi dan pelatihan metodologi SKKNI Bidang SJK, pembahasan Rancangan SKKNI bidang pembiayaan, bidang perasuransian dan bidang Pasar Modal.

4.9.8 Program Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti

PPK persiapan masa purnabakti diberikan untuk meningkatkan kemandirian pegawai dalam menghadapi masa purnabakti. Pelaksanaan Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti *Batch 1* telah dilaksanakan dan diikuti oleh 22 orang peserta. Modul yang disampaikan yaitu, Psikologi Persiapan Masa Purna Tugas, Spiritual, Kesehatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kewirausahaan serta Studi ke Usaha Kecil dan Menengah.

4.9.9 Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Sebagai salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat/pelajar/mahasiswa dalam rangka memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK, selama triwulan I-2018, OJK telah memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 194 pelajar/mahasiswa dan telah membantu mahasiswa yang melakukan penelitian di Satuan Kerja terkait untuk 38 penelitian skripsi/tesis/disertasi.

4.9.10 Program Visit OJK

Dalam penyelenggaraan program tersebut, OJK memberikan tentang Perbankan, Pasar Modal, IKNB, EPK, dan materi lainnya mengenai OJK sesuai dengan permohonan topik yang diajukan oleh peserta kunjungan. Pada triwulan I-2018 terdapat sebanyak 18 kunjungan ke OJK dengan 1.196 peserta dari SMA/SMK/Perguruan Tinggi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV - 4 Pelaksanaan Visit OJK Triwulan I-2018

No.	Topik	Instansi					Total
		SD	SMP	SMA	Univer- sitas	Lainnya	
1	Pengaturan dan Pengawasan Perbankan	-	-	1	2	-	3
2	Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah	-	-	1	3	-	4
3	Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal	-	-	-	3	-	3
4	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	-	-	2	-	-	2
5	Tugas dan Fungsi OJK	-	-	-	4	-	4
6	Lainnya (Fintech dan Sistem Informasi)	-	-	-	2	-	2
Jumlah Kunjungan		-	-	4	14	-	18
Jumlah Peserta Kunjungan		-	-	342	854	-	1196

4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan rangkaian Program Transformasi, OJK merumuskan *Roadmap* Program Budaya OJK untuk menentukan tujuan dan fokus Program Budaya periode 2018-2022 serta tema dan tolok ukur keberhasilan program setiap tahunnya. Perumusan *roadmap* dilakukan melalui dua pendekatan yakni *bottom up* dan *top down*. Hasil perumusan tersebut telah dituangkan dalam konsepsi *Roadmap* Program Budaya OJK 2018-2022 dengan visi “Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional dan Proaktif”. Visi tersebut akan dicapai secara bertahap melalui pencanangan tema Program Budaya Tahunan, di mana Program Budaya 2018 mengusung tema “Insan OJK Sigap”. Tema ini didukung dengan penetapan tiga Program Budaya yaitu OJK Proaktif, OJK Inspiratif dan OJK Inovatif. Adapun Program OJK Proaktif ditujukan untuk membentuk perilaku Insan OJK dalam mengambil inisiatif, merespon dan memenuhi kebutuhan *stakeholder* dengan cepat. Program OJK Inspiratif dicanangkan untuk membangun sinergi dengan *stakeholders* melalui *knowledge sharing* lintas Satker maupun eksternal, serta memperkuat rasa saling percaya dan kepedulian terhadap sesama. Program OJK Inovatif dirancang sebagai program pengembangan atau *re-engineering* sistem pendukung kinerja untuk proses kerja yang lebih cepat.

4.10.1 Program Budaya

Kegiatan program budaya dan perubahan yang dijalankan selama Triwulan I-2018 adalah:

1. **Change Partner Forum I 2018**
Change Partner Forum (CPF) I 2018 diselenggarakan bertujuan mempersiapkan *Change Partner* dalam mengelola program, *monitoring* dan media komunikasi perubahan untuk mendukung tema Program Budaya 2018 “Insan OJK Sigap”. Secara garis besar kegiatan CPF I 2018 terdiri dari *Townhall Meeting* bersama Anggota Dewan Komisiner, sosialisasi mengenai kriteria program dan metode *monitoring* Program Budaya 2018, Pembekalan kemampuan teknis *Change Partner* untuk merancang program, metode *monitoring* dan media komunikasi Program Budaya di masing-masing Satuan Kerja, serta Sesi konsultasi *one-on-one* dan tanya jawab *Change Partner*
2. **Lomba Budaya OJKway 2017**
Lomba Budaya *OJKway* 2017 yang dilaksanakan pada awal 2018 bertujuan untuk mendapatkan penilaian secara menyeluruh terhadap implementasi Program Budaya Satuan Kerja. Satker Finalis terpilih mengikuti tahap presentasi Final Lomba Budaya *OJKway* 2017. Proses seleksi tersebut menghasilkan sejumlah Satuan Kerja Pemenang Lomba Budaya *OJKway* 2017 yang dianugerahi penghargaan oleh Anggota Dewan Komisiner dalam *OJK Awards*.

3. **OJK Awards**
OJK Awards merupakan ajang penganugerahan penghargaan yang diberikan oleh Anggota Dewan Komisiner kepada Satuan Kerja dan Insan OJK yang mendapatkan predikat terbaik dalam rangkaian Lomba Budaya *OJKway* serta Manajer Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran yang terbaik. Selain penganugerahan penghargaan, kegiatan ini juga menampilkan pameran budaya dan kinerja dari setiap bidang di OJK yang digelar dalam *Culture and Performance Fair*.
4. **Townhall Meeting Anggota Dewan Komisiner**
Untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Insan OJK berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan Anggota Dewan Komisiner. Mulai 2018, OJK menyelenggarakan ADK *Townhall Meeting* secara periodik setiap triwulan untuk setiap Anggota Dewan Komisiner secara bergantian. Selama periode laporan, *Townhall Meeting* diselenggarakan sebanyak dua kali, bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dalam acara *Change Partner Forum (Batch 1)* dan Wakil Ketua Dewan Komisiner dalam acara penutupan *OJK Awards (Batch 2)*.
5. **Inisiasi Digital Office**
Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penggunaan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional kinerja seluruh Satuan Kerja, OJK melakukan inisiasi *Digital Office*. Adapun langkah inisiasi yang telah ditempuh di triwulan I-2018 mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan distribusi media kampanye optimalisasi *virtual meeting* untuk rapat koordinasi antar Satuan Kerja melalui *e-mail blast*, *screen saver*, *poster*, media sosial dan Majalah Integrasi;
 - b. Penggunaan fitur *virtual meeting* untuk konsultasi kinerja dan budaya kerja dengan Kelompok Mitra Perubahan seluruh Satuan Kerja;
 - c. Koordinasi dengan Tim IT terkait implementasi aplikasi OJK Inovatif yang dikembangkan oleh salah satu Satuan Kerja yang mengoptimalkan *office automation*; dan
 - d. Sosialisasi mengenai *blueprint* dan implementasi *digital office* di OJK pada Forum Manajer IKU dan Anggaran.

4.10.2 Monitoring Program Budaya

Di bidang *monitoring* program budaya, OJK menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau progress implementasi program-program perubahan dan budaya yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. Penilaian pelaksanaan program budaya terlebih dahulu dilakukan melalui metode *self-assessment*

- yang didukung bukti-bukti pelaksanaan *program budaya* secara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system* (www.ojkway.com). Laporan budaya kerja dan penilaian *self-assessment* tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan langsung (*onsite monitoring*), serta melalui telepon (*oncall monitoring*) untuk satuan-satuan kerja yang berada di lingkungan Kantor Regional dan Kantor OJK. Berdasarkan hasil kalibrasi *offsite* dan *onsite monitoring* tersebut, didapatkan Indeks Kinerja Utama (IKU) Budaya triwulan I-2018 dengan nilai 5,39 secara OJK-wide.
2. **Evaluasi Konsultan Internal Budaya 2017**
Dalam rangka meningkatkan kualitas konsultansi dan asistensi pelaksanaan Program Budaya di Satuan Kerja, OJK melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas serta layanan konsultan budaya internal melalui survei *online* dengan responden seluruh *Change Partner* di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK.
 3. **Evaluasi Konsultan Internal Budaya 2017**
Untuk mendukung konsultan budaya internal dalam memberikan layanan konsultansi dan asistensi yang berkualitas kepada seluruh Satuan Kerja, OJK menyusun profil Satker yang mencakup tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja, susunan struktur, isu strategis, pencapaian kinerja dan pencapaian Satuan Kerja dalam implementasi Program Budaya *OJKway*, serta *Engagement Level* Satuan Kerja (dari hasil *Employee Opinion Survey 2017*)
 4. **Enhancement Dashboard Monitoring OJKway**
Pada triwulan I-2018, telah dilakukan peningkatan dan perbaikan fitur serta pengembangan tampilan baru yang lebih memudahkan pengguna *Dashboard Monitoring OJKway* pada triwulan I-2018.
3. **Pengkinian Screen Saver Nilai Strategis, Program Budaya dan Pencapaian Kinerja**
Pengkinian *screen saver* dilakukan untuk mengkampanyekan program budaya, nilai strategis dan pencapaian kinerja secara lebih menarik dan mudah dipahami.
 4. **Pengkinian Konten Media Sosial OJKway dan OJKway TV**
OJK melakukan pengkinian desain dan konten media sosial OJKway dan OJKway TV untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK, Program Budaya 2018 serta menyampaikan pesan-pesan untuk memacu semangat Insan OJK.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Di bidang media komunikasi budaya dan perubahan, OJK melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye, di antaranya:

1. **Penerbitan Majalah Integrasi**
Selama periode laporan, OJK menerbitkan tiga edisi Majalah Integrasi dengan tema “Proactive” pada Januari 2018; “OJK-ku Semakin Peduli Semakin Inspiratif” pada Februari 2018; dan “Berinovatif untuk Kinerja yang Efektif” pada Maret 2018.
2. **Pesan Anggota Dewan Komisiner**
Selama periode laporan, telah dilakukan penyusunan dan penyebaran tiga Pesan Ketua/Anggota Dewan Komisiner dengan tema “Menyambut Tahun 2018 Dengan Penuh Optimisme”, “Memperkuat Budaya Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja”, serta “Peran Keluarga dalam Peningkatan Kinerja”.

Halaman ini sengaja di kosongkan

SINGKATAN DAN AKRONIM

AAJI	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	<i>Australia Awards Scholarship</i>
AASI	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	<i>ASEAN Banking Integration Framework</i>
ACIA	<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i>
ACKS	Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	Anggota Dewan Komisioner
AFAS	<i>ASEAN Framework Agreement on Services</i>
AHM	Anugerah Media Humas
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	<i>Anti Money Laundering</i>
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
APRA	<i>Australia Prudential Regulatory Authority</i>
ASBANDA	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASIC	<i>Australia Securities and Investment Commission</i>
ATIGA	<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>
ATISA	<i>ASEAN Trade In Services Agreement</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BIN	Badan Intelijen Negara
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPPI	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BRC	<i>BPD Regional Champion</i>
BS	Board Seminar
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CA	<i>Combined Assurance</i>
CBRC	<i>China Banking Regulatory Commission</i>
CDD	<i>Customer Due Diligence</i>
CFT	<i>Combating the Financing of Terrorism</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	<i>Cash Ratio</i>
CRM	<i>Customer Relationship Management</i>
CTKI	Calon Tenaga Kerja Indonesia

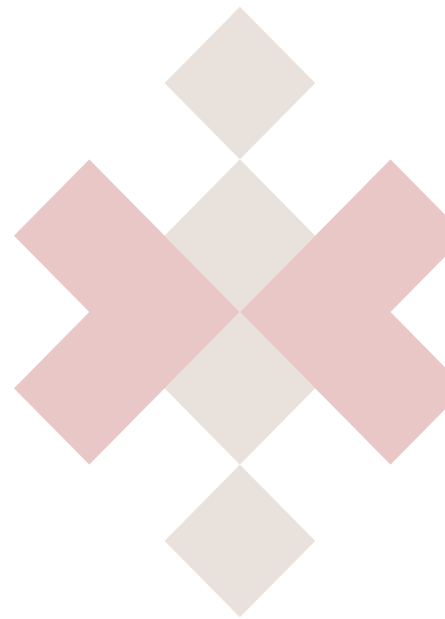
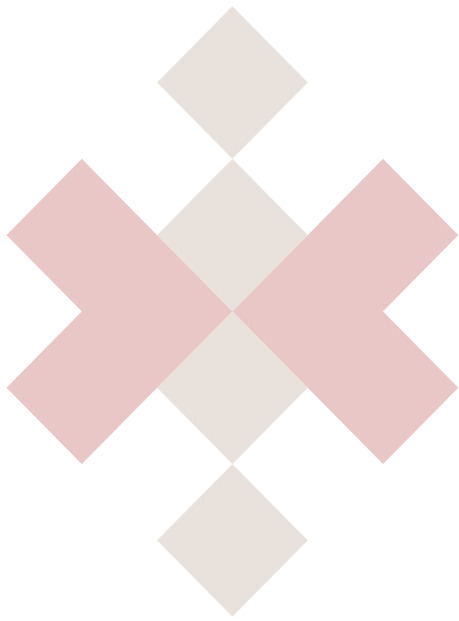
DCC	<i>Data Center Collocation</i>
DES	<i>Daftar Efek Syariah</i>
DFSA	<i>Dubai Financial Service Authority</i>
DJPU	<i>Direktorat Jendral Pengelola Utang</i>
DPD	<i>Dewan Perwakilan Daerah</i>
DPK	<i>Dana Pihak Ketiga</i>
DPLK	<i>Dana Pensiun Lembaga Keuangan</i>
DPPK PPIP	<i>Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti</i>
DPPK PPMP	<i>Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti</i>
DPR	<i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>
DRC	<i>Disaster Recovery Center</i>
EBA-SP	<i>Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi</i>
EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
Eduwan	<i>Edukasi Wartawan</i>
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FAPM	<i>Forum Akuntan Pasar Modal</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	<i>Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial</i>
FKSSK	<i>Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan</i>
FREKS	<i>Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah</i>
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSC	<i>Financial Service Commission</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GeNTa PM	<i>Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal</i>
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
GMRA	<i>Global Master Repurchase Agreement</i>
GRC	<i>Governance Risk and Compliance</i>
HKHPM	<i>Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal</i>
HMETD	<i>Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</i>
ICMA	<i>International Capital Market Association</i>
IDB	<i>Islamic Development Bank</i>
IFAC	<i>International Federation of Accountant</i>
IFAR	<i>Investasi Terhadap Total Aset</i>
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFCC	<i>Integrated Financial Customer Care</i>
IFN	<i>Interantional Finance News</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	<i>Indeks Harga Saham Gabungan</i>
IJEPA	<i>Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement</i>
IJK	<i>Industri Jasa Keuangan</i>
IKI	<i>Indikator Kinerja Pegawai</i>
IKNB/NBFI	<i>Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	<i>Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators</i>
ILM	<i>Iklan Layanan Masyarakat</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
INDOBeX	<i>Indonesia Bond Indexes</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IRR	<i>Integrated Risk Rating</i>
IS	<i>Inisiatif Strategis</i>
JARING	<i>Jangkau, Sinergi, dan Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
JPSK	<i>Jaring Pengaman Sistem Keuangan</i>
KDK	<i>Keputusan Dewan Komisiner</i>
Kemenaker	<i>Kementerian Ketenagakerjaan</i>
Kemendagri	<i>Kementerian Dalam Negeri</i>
Kemendesa	<i>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</i>

KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOINKU	Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPMR	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	Kelompok Usaha Bersama
KYC	<i>Know Your Customer</i>
KYFC	<i>Know Your Financial Conglomerates</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LoU	<i>Letter of Understanding</i>
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	<i>Loan to Value</i>
MCRA	<i>Market Conduct Risk Assessment</i>
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
MPSJKI	<i>Master Plan</i> Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	Net Interest Margin
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
ORP	Outreach Program
OSINT	<i>Open Source Intelligence</i>
PCE	Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	Pendidikan Calon Pejabat
PCS	Pendidikan Calon Staf
PCT	Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek
PELAKU	Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	<i>Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law</i>
PI	Penasihat Investasi
PKR	Pasar Keuangan Rakyat
PM	Pasar Modal

PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPF	Program Pendidikan Formal
PPG	Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	Program Pendidikan Lanjutan
PPP	Program Penugasan Pegawai
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
RDK	Rapat Dewan Komisioner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RGS	<i>Risk and Governance Summit</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIELOG	Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SKM	Sahat Keuangan Maritim
SKP	Satuan Kredit Profesi
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	Service Level Agreement
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System OJK</i>
SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i>
TKHT	Tunjangan Kesehatan Hari Tua

TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
TPHT	Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU LKM	Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WCFSL	<i>Working Committee on Financial Services Liberalisation</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	<i>Extensible Business Reporting Language</i>
YKP OJK	Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>
ZMET	<i>Zaltman Metaphor Elicitation Technique</i>

Halaman ini sengaja di kosongkan



Halaman ini sengaja di kosongkan

